KEMENPORA

LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas kami dalam mengimplementasikan misi besar membangun pemuda yang patriotik, gigih, dan berempati serta olahraga yang mencerminkan kedigdayaan bangsa. Tahun 2025 menjadi saksi bagi kebangkitan talenta muda Indonesia di panggung dunia. Kita telah menyaksikan perjuangan luar biasa para atlet muda di ajang Asian Youth Games (AYG) 2025 di Bahrain yang berhasil membawa pulang 4 medali emas. Keberhasilan ini semakin dilengkapi dengan prestasi gemilang di Asian Youth Para Games (AYPG) 2025 Dubai.

Prestasi ini membuktikan bahwa jalur pembinaan atlet elit masa depan kita berada pada arah yang tepat. Di kancah regional, Indonesia mengukir sejarah pada SEA Games 2025 Thailand dengan meraih 91 medali emas dan menempati peringkat kedua klasemen akhir, sebuah pencapaian terbaik di luar kandang sejak tahun 1995. Seluruh kesuksesan ini merupakan buah dari transformasi tata kelola dan fokus pada 21 Cabang Olahraga Unggulan yang dipersiapkan secara ilmiah dan berkelanjutan. Pembangunan sumber daya manusia juga menunjukkan tren positif yang signifikan. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2025 mencapai 65,79, melampaui target yang ditetapkan dan diproyeksikan terus meningkat menuju target 73 pada akhir tahun 2029. Sejalan dengan itu, Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) juga terus diperkuat sebagai tolok ukur partisipasi dan kebugaran masyarakat, yang ke depan akan didukung oleh kebijakan gerakan inklusif seperti pelaksanaan *Car Free Day* sebagai manifestasi Indonesia Bergerak yang tahap pertama akan difokuskan di seluruh provinsi yang ada di pulau Jawa dan program pembinaan disabilitas. Transformasi internal juga menjadi kunci, di mana kami telah melakukan deregulasi metode Omnibus untuk menyederhanakan aturan agar ekosistem olahraga lebih ramah investasi dan kompetitif. Pendekatan *Money follows Priority* dalam penganggaran memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak terukur bagi prestasi dan kesejahteraan atlet.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga, institusi pemerintah, organisasi kepemudaan, IOCO, serta masyarakat pemuda dan olahraga yang telah bekerja keras untuk keberhasilan dan pencapaian kinerja Kemenpora. Mari kita jadikan momentum 2025 ini sebagai batu pijakan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pemuda yang mandiri dan olahraga yang mendunia.

Jakarta, Februari 2026
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia,

Erick Thohir

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 ini disusun sebagai dokumen pertanggungjawaban publik sekaligus instrumen evaluasi strategis dalam menavigasi masa transisi birokrasi menuju periode perencanaan pembangunan nasional yang baru. Sebagai tahun pembuka yang mengawali fondasi Rencana Strategis 2025-2029, laporan ini merekam momentum transformasi Kemenpora dalam mengoptimalkan potensi kepemudaan dan keolahragaan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Analisis Capaian dan Upaya Strategis

Tabel 1.1 Analisis Capaian dan Upaya Strategis

Tujuan 1: Membangun pemuda yang berkarakter dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.					
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang berkarakter dan berperan aktif dalam membangun Indonesia maju.					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Kriteria**
1,1	Indeks Pembangunan Pemuda	64,95	65,79	101,29%	Sangat Baik
Tujuan 2: Membangun budaya olahraga di masyarakat, meningkatkan prestasi olahraga di tingkat dunia, dan memperkuat ekosistem industri olahraga untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.					
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada pertumbuhan ekonomi nasional					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Kriteria**
2,1	Indeks Pembangunan Olahraga	0,338	0,363	107,40%	Sangat Baik
2,2	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	10,36%	9,06%	87,45%	Cukup
2,3	Peringkat pada Asian Youth Games	15	15	100%	Baik
2,4	Peringkat pada Asian Youth Para Games	5	6	80%	Cukup
2,5	PDB Industri Olahraga	38.805 Miliar Rupiah	58.620 Miliar Rupiah	151,06%	Sangat Baik

Tujuan 3: Mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional dengan didukung oleh digitalisasi sistem, penyederhanaan regulasi, dan penguatan kapasitas aparatur.					
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Kriteria**
3,1	Indeks RB	80,4	82,91*	103,12%	Sangat Baik
3,2	Opini BPK	WTP	WTP	100%	Baik
3,3	Indeks Pelayanan Publik	4,32	4,67	108,1%	Sangat Baik

Sepanjang tahun 2025, Kemenpora berhasil mencatatkan performa yang solid dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 104,27% yang didukung oleh realisasi anggaran yang sangat optimal, yakni mencapai 91,36%. Keberhasilan ini bukan sekadar angka administratif, melainkan hasil dari upaya penguatan tata kelola internal yang konsisten, terbukti dengan dipertahankannya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada kategori 'A' (82,91). Di tengah proses penetapan Renstra baru, Kemenpora telah melakukan langkah akselerasi melalui sinkronisasi program pusat dan daerah, sehingga Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) mampu melampaui target nasional di angka 65,79. Hal ini merupakan hasil nyata dari upaya orkestrasi kebijakan lintas sektor yang lebih tajam dalam mengintervensi dimensi pendidikan dan partisipasi pemuda.

Di sektor olahraga, tahun 2025 menjadi titik balik melalui implementasi strategi s*portomics*. Upaya sistematis dalam menyelenggarakan Indonesia *Sport Summit* (ISS) telah berhasil mengkonversi ekosistem olahraga menjadi mesin ekonomi baru, dengan capaian PDB Industri Olahraga yang melonjak hingga Rp. 58.620 Miliar (151% dari target). Namun, analisis kinerja juga mengungkap tantangan struktural pada aspek budaya olahraga masyarakat. Meskipun partisipasi aktif berolahraga baru mencapai 9,06%, Kemenpora akan terus melakukan upaya responsif dengan menginisiasi revitalisasi infrastruktur *last-mile* melalui kolaborasi lintas kementerian untuk menyediakan ruang aktif di tingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat desa.

Di level prestasi, konsistensi posisi 15 besar pada Asian Youth Games 2025 menunjukkan bahwa sistem pembinaan atlet muda kian teruji, meski diperlukan penguatan lebih lanjut pada integrasi *sport science* untuk meningkatkan efisiensi konversi medali emas di masa mendatang. Meskipun masih terdapat tantangan pada tingkat kebugaran masyarakat secara umum, fondasi yang telah diletakkan selama masa transisi ini menjadi modalitas penting bagi pelaksanaan Renstra 2025-2029.

*Prognosa Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora Tahun 2025

Evaluasi capaian kinerja tahun 2025 menegaskan bahwa Kemenpora telah berada pada jalur yang tepat dalam mengintegrasikan nilai ekonomi, sosial, dan prestasi dalam satu ekosistem yang berkelanjutan. Kemenpora berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas program dan efisiensi belanja agar setiap rupiah yang diinvestasikan mampu memberikan dampak nyata bagi kemajuan pemuda dan prestasi olahraga Indonesia di kancah dunia.

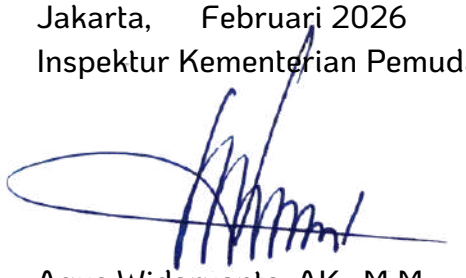
PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025 ini telah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai dengan pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi yang memuat data/informasi yang tersusun dalam laporan ini menjadi tanggungjawab menajemen Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Reviu atas Laporan Kinerja ini dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa informasi kinerja yang disajikan telah andal, akurat dan terpercaya.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan data/informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2026
Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga,



Agus Widaryanto, AK., M.M
NIP. 196711281988031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

RINGKASAN EKSEKUTIF 3

PERNYATAAN REVIU INSPEKTORAT 6

DAFTAR ISI 7

DAFTAR TABEL 9

DAFTAR GAMBAR 12

DAFTAR GRAFIK 14

BAB I PENDAHULUAN 22

A. Latar Belakang 23

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi 26

B.1. Struktur dan Profil Pejabat Kemenpora 26

B.2. Tugas dan Fungsi Kemenpora 30

C. Analisis Kondisi dan Potensi ASN Kemepora 32

D. Isu Strategis 35

E. Sistematika Pelaporan 37

BAB II PERENCANAAN KINERJA 38

A. Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 39

B. Rencana Kerja Kementrian Pemuda dan Olahraga 2025 47

C. Perjanjian Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 50

D. Postur Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga 53

DAFTAR ISI

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **58**

A. Pengukuran Kinerja 59

B. Capaian Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga 59

C. Realisasi Anggaran 192

D. Capaian Prioritas Nasional 201

E. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Evaluasi SAKIP Tahun 2024 205

BAB IV PENUTUP **206**

LAMPIRAN **209**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Analisis Capaian dan Upaya Strategis	3
Tabel 1.2 Unit Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025	31
Tabel 2.1 Pagu Anggaran Kemenpora TA 2025	53
Tabel 2.2 Pengalokasian Anggaran Kemenpora TA 2025	54
Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Ketercapaian Target Indikator	59
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenpora	59
Tabel 3.3 Domain dan Indikator IPP metode baru	65
Tabel 3.4 Intervensi Program/Kegiatan Kemenpora Bagian 1	72
Tabel 3.5 Intervensi Program/Kegiatan Kemenpora Bagian 2	74
Tabel 3.6 Alokasi Rincian Output Intervensi Kegiatan dalam Indeks Pembangunan Pemuda	80
Tabel 3.7 Capaian *ASEAN Youth Development Index* (YDI) 2022	81
Tabel 3.8 Peringkat 2023 *Global Youth Development Index*	82
Tabel 3.9 Alokasi Rincian Output intervensi pada indikator IPO	98
Tabel 3.10 Data Perbandingan Pembangunan Olahraga Tingkat Regional dan Internasional	100
Tabel 3.11 Inovasi Peningkatan IPO Terukur	102
Tabel 3.12 Persentase Penduduk 10th Ke Atas Yang Aktif Berolahraga pada 38 Provinsi di Indonesia	106
Tabel 3.13 Tingkat Pengelompokan Partisipasi Penduduk 10th Ke Atas Yang Aktif Berolahraga berdasarkan Pulau	108
Tabel 3.14 Kategori Cabang Olahraga pada Kejuaraan TARKAM	110
Tabel 3.15 Program perluasan akses inklusif	111
Tabel 3.16 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan dalam peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga	115

DAFTAR TABEL

Tabel 3.17 Capaian medali dan analisis performa 121

Tabel 3.18 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan dalam perolehan medali emas 130

Tabel 3.19 *Benchmarking* perolehan medali dengan negara lain di Asia 132

Tabel 3.20 Analisis faktor keberhasilan dan penghambat AYPG 2025 139

Tabel 3.21 Alokasi Rincian Output intervensi pada indikator Peringkat Indonesia AYPG 140

Tabel 3.22 Perbandingan capaian medali AYPG 2025 dengan negara lain 142

Tabel 3.23 Kontribusi PDB industri olahraga pada tiap sektor 145

Tabel 3.24 Delapan komponen pengeluaran 146

Tabel 3.25 Rekapitulasi Estimasi Uang Beredar Untuk Belanja Olahraga Tahun 2025 berdasarkan Laporan IPO Tahun 2025 147

Tabel 3.26 Alokasi rincian output intervensi indikator PDB Industri Olahraga 156

Tabel 3.27 Perbedaaan Kontribusi Industri Olahraga pada PDB antara Indonesia dan Negara Maju 158

Tabel 3.28 Indeks RB Kemenpora Tahun 2024-2025 163

Tabel 3.29 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan dalam Indeks Reformasi Birokrasi 170

Tabel 3.30 Capaian Opini BPK Kemenpora Tahun 2021-2024 174

Tabel 3.31 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan dalam Opini BPK 177

Tabel 3.32 Nilai dan Kategori Indeks Pelayanan Publik 181

Tabel 3.33 Indeks Pelayanan Publik Kemenpora Tahun 2020-2025 182

Tabel 3.34 Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022-2025 183

Tabel 3.35 Hasil pelaksanaan PEKPPP Mandiri Kemenpora Tahun 2025 184

DAFTAR TABEL

Tabel 3.36 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan dalam Indeks Pelayanan Publik	188
Tabel 3.37 Rekapitulasi Efisiensi Indikator Kinerja Sasaran Strategis	191
Tabel 3.38 Realisasi Pagu dan realisasi anggaran per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja	193
Tabel 3.39 Realisasi Pagu dan Realisasi Anggaran per Program	194
Tabel 3.40 Pagu dan Realisasi Anggaran per Eselon 1, LPDUK dan Dekonsentrasi	195
Tabel 3.41 Pagu Anggaran status blokir	197
Tabel 3.42 Kontribusi Kemenpora dalam Capaian Prioritas Nasional Bidang Kepemudaan	202

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Foto Pelaksanaan Moto GP Mandalika 2025 16

Gambar 1.2 Foto Tim Indonesia saat Pelaksanaan *ASEAN School Games* 2025 16

Gambar 1.3 Foto Tim Indonesia saat Pelaksanaan *SEA Games* 2025 17

Gambar 1.4 Konferensi Pers Konferensi FIG *Artistic Gymnastic World Championships* 2025 18

Gambar 1.5 Foto Atlet Indonesia (kanan) melawan Atlet Thailand saat Pelaksanaan *Asian Fencing Championships* 2025 18

Gambar 1.6 Kemenpora menerima penghargaan Anugerah Reksa Bandha 2025 19

Gambar 1.7 Penghargaan GSM Award 2025 kategori *Best Use of Image* 20

Gambar 1.8 Penghargaan GSM Award 2025 kategori *Best Account* 20

Gambar 1.9 Penghargaan BKN Award Tahun 2025 21

Gambar 1.10 Struktur Organisasi Kemenpora 26

Gambar 1.11 Menteri Pemuda dan Olahraga 27

Gambar 1.12 Foto Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga 28

Gambar 1.13 Foto Pejabat Eselon I Kemenpora 29

Gambar 1.14 Foto Staf Ahli Menteri 29

Gambar 1.15 Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin 32

Gambar 2.1 Visi dan Misi Kemenpora Tahun 2025-2029 41

Gambar 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenpora Tahun 2025-2029 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Pohon Kinerja Kemenpora Tahun 2025-2029 43

Gambar 2.4 Pohon Kinerja Kepemudaan Tahun 2025-2029 44

Gambar 2.5 Pohon Kinerja Keolahragaan Tahun 2025-2029 45

Gambar 2.6 Pohon Kinerja Dukungan Manajemen Tahun 2025-2029 46

Gambar 2.7 Prioritas Nasional Tahun 2025-2029 47

Gambar 2.8 Struktur Renja Kemenpora Tahun 2025 48

Gambar 2.9 Perjanjian Kinerja Kemenpora Tahun 2025 51

Gambar 2.10 Perjanjian Kinerja Kemenpora Tahun 2025 52

Gambar 2.11 Perjalanan Pagu Anggaran Kemenpora TA 2025 56

Gambar 3.1 Pemberian penghargaan pemuda pada Hari Peringatan Sumpah Pemuda Tahun 2025 79

Gambar 3.2 Kemenpora memberi dukungan pengembangan kewirausahaan pemuda 84

Gambar 3.3 Pelaksanaan Kejuaraan Tarkam Tahun 2025 92

Gambar 3.4 Fun Run pada Kejuaraan Tarkam Tahun 2025 97

Gambar 3.5 Peringkat Indonesia pada Asian Youth Games 2025 120

Gambar 3.6 Peringkat Indonesia pada Asian Youth Para Games 2025 135

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Transformasi Anggaran Kemenpora Tahun 2015-2025	24
Grafik 1.2 Fungsi Kemenpora sesuai Permenpora 1 Tahun 2025	30
Grafik 1.3 Komposisi pegawai berdasarkan Manajemen ASN	32
Grafik 1.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan	33
Grafik 1.5 Komposisi Pegawai Penata Layanan Operasional	34
Grafik 3.1 Capaian Sasaran Strategis Kemenpora berdasarkan Tujuan Pembangunan	64
Grafik 3.2 Perbedaan Konsep IPP Metode Lama dan IPP Metode Baru	65
Grafik 3.3 Alur dan Formulasi Penghitungan IPP	66
Grafik 3.4 Capaian IPP Nasional 7 Tahun Terakhir (2019 - 2025)	67
Grafik 3.5 Perbandingan Capaian IPP pada tiap domain antara metode lama dan metode baru	68
Grafik 3.6 Bagan Pengambilan Sampling IPO pada 172 Kab/Kota	87
Grafik 3.7 Capaian Indeks Pembangunan Olahraga 2021 - 2025	88
Grafik 3.8 Capaian Indeks Pembangunan Olahraga per Dimensi 2021 - 2025	89
Grafik 3.9 Jenjang Pembinaan Olahraga Prestasi	122
Grafik 3.10 Gambaran Pelaksanaan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional	123
Grafik 3.11 Capaian Pembinaan Olahragawan Muda di Tahun 2025	124
Grafik 3.12 PDB Industri Olahraga Merujuk pada Indeks Ekonomi IPO	148

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.13 Sasaran RB Tematik berdasarkan RPJMN 2025–2029 161

Grafik 3.14 Agenda RB Tematik Tahun 2025 162

Grafik 3.15 Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2025 162

Grafik 3.16 Aspek dan Prinsip Evaluasi PEKPPP 181

Grafik 3.17 Alur Proses Perolehan Indeks Pelayanan Publik 182

Grafik 3.18 Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020-2025 182

Grafik 3.19 Capaian Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kemenpora 185

Grafik 3.20 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kemenpora tahun 2025 199

Grafik 3.21 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Kemenpora tahun 2024 200

Grafik 3.22 Indikator Prioritas Nasional 2025-2029 201

CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENPORA YANG BERDAMPAK PADA KEDIGDAYAAN BANGSA

1. MOTO GP MANDALIKA 2025



Gambar 1.1 Foto Pelaksanaan Moto GP Mandalika 2025

Penyelenggaraan Moto GP edisi 2025 mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi dan eksposur yang signifikan:

- Jumlah Penonton: Mencapai 120.000+ penonton (termasuk wisatawan mancanegara), meningkat 15% dari tahun sebelumnya.
- Dampak Ekonomi : Estimasi nilai ekonomi nasional mencapai Rp4,8 Triliun melalui sektor akomodasi, transportasi, dan UMKM.
- *Global Reach*: Disiarkan ke lebih dari 200 negara, memperkokoh *brand* Indonesia sebagai destinasi olahraga dunia.
- *Global Impact*: Menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat *sport tourism* dunia. Keberhasilan menyelenggarakan ajang balap motor paling bergengsi ini membuktikan kesiapan infrastruktur dan profesionalisme manajerial bangsa dalam skala global.

2. *ASEAN SCHOOL GAMES* 2025

Indonesia berhasil menjadi juara umum dalam *14th ASEAN School Games* 2025 di Brunei Darussalam. Kontingen Indonesia mengumpulkan 93 medali dari tujuh cabang olahraga, yang terdiri dari 42 medali emas, 30 medali perak, dan 20 medali perunggu. Kejayaan di level pelajar menjadi indikator keberhasilan regenerasi atlet nasional, dengan capaian kinerja:



Gambar 1.2 Foto Tim Indonesia saat Pelaksanaan *ASEAN School Games* 2025

- Juara Umum: Indonesia sukses meraih predikat Juara Umum dengan perolehan 45 Medali Emas.
- Pemecahan Rekor: Terjadi 8 pemecahan rekor baru ASG oleh atlet pelajar Indonesia pada cabang renang dan atletik.
- Partisipasi: Melibatkan 250 atlet pelajar dari 38 provinsi sebagai bentuk pemerataan pembinaan olahraga.

Impact: Investasi pada "Akar Rumput" (*grassroots*). Kesuksesan di ASG membuktikan bahwa Indonesia memiliki cadangan talenta muda yang melimpah dan kompetitif, menjamin keberlanjutan kejayaan bangsa di masa depan.

3. *SEA GAMES* THAILAND 2025



Gambar 1.3 Foto Tim Indonesia saat Pelaksanaan SEA Games 2025

Indonesia kembali menorehkan sejarah di ajang olahraga Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir, Merah Putih sukses finis sebagai *runner-up SEA Games*, menyamai pencapaian bersejarah pada *SEA Games* 1995 Chiang Mai, Thailand.

Pada *SEA Games* 2025 Thailand yang berlangsung pada 9–20 Desember 2025, kontingen Indonesia tampil impresif dengan mengoleksi 91 medali emas, 111 perak, dan 131 perunggu, atau total 333 medali, mengantarkan Indonesia menempati peringkat kedua klasemen akhir. Capaian ini menjadi raihan emas terbanyak Indonesia sepanjang keikutsertaan *SEA Games* di luar negeri setelah edisi 1989 Kuala Lumpur (102 emas) dan 1991 Manila (92 emas).

Prestasi tersebut juga menunjukkan peningkatan signifikan dibanding *SEA Games* 2023 Kamboja, di mana Indonesia meraih 87 emas, 80 perak, dan 109 perunggu.

Bonus penghargaan Rp1 miliar bagi atlet peraih medali emas, tertinggi sepanjang sejarah penghargaan *SEA Games* oleh pemerintah Indonesia. Nilai tersebut naik dua kali lipat dibanding *SEA Games* 2023 Kamboja yang sebesar Rp500 juta. Penyaluran bonus dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) berdasarkan Keputusan Menpora RI Nomor 219 Tahun 2025. Untuk atlet perorangan, bonus diberikan sebesar Rp1 miliar (emas), Rp315 juta (perak), dan Rp157,5 juta (perunggu). Atlet ganda menerima Rp800 juta (emas), Rp252 juta (perak), dan Rp126 juta (perunggu), sementara atlet beregu memperoleh Rp500 juta (emas), Rp220,5 juta (perak), dan Rp110,25 juta (perunggu).

4. *WORLD ARTISTIC GYMNASTICS & ASIAN FENCING CHAMPIONSHIPS* 2025



Gambar 1.4 Konferensi Pers Konferensi FIG Artistic Gymnastic World Championships 2025

Pencapaian pada cabang olahraga spesifik menunjukkan diversifikasi prestasi:

- Senam Artistik: Indonesia berhasil menempatkan 2 atlet dalam babak final (Top 8 Dunia) pada alat spesifik, sebuah sejarah baru bagi senam Indonesia di level kejuaraan dunia.
- Anggar Asia: Meraih 1 Medali Perak dan 2 Perunggu di tingkat Asia, meningkatkan peringkat dunia (*FIE Ranking*) atlet Indonesia secara signifikan ke posisi 30 besar dunia.

Dampak: Penetrasi pada cabang olahraga elit global. Kehadiran dan prestasi atlet Indonesia di kejuaraan dunia senam artistik membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di cabang olahraga dengan tingkat kesulitan dan prestise teknis yang tinggi. Di cabang olahraga anggar ini semakin memperluas jangkauan prestasi Indonesia pada cabang olahraga individu yang kompetitif di tingkat kontinental.



Gambar 1.5 Foto Atlet Indonesia (kanan) melawan Atlet Thailand saat Pelaksanaan Asian Fencing Championships 2025

PENGHARGAAN/AWARD

1. ANUGERAH REKSA BANDHA



Gambar 1.6 Kemenpora menerima penghargaan Anugerah Reksa Bandha 2025

Pada ajang Anugerah Reksa Bandha 2025, Kemenpora RI berhasil meraih Juara I Kategori Utilisasi BMN Terbaik. Prestasi ini merupakan bukti nyata dari komitmen Kemenpora RI dalam memperkuat tata kelola aset negara. Meraih Juara I Kategori Utilisasi BMN Terbaik pada Anugerah Reksa Bandha 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari pencapaian tahun sebelumnya, melanjutkan tren positif pengelolaan aset yang sudah dimulai sejak 2023.

Kemenpora dinilai unggul dalam beberapa komponen krusial, antara lain:

1. Penetapan Status Penggunaan BMN.
2. Pengelolaan BMN Terindikasi Idle dan Optimalisasi Aset.
3. Realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Non-Tusi.
4. Asuransi BMN sebagai bentuk pengamanan aset.

Penghargaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan indikator bahwa Kemenpora telah berhasil menjalankan prinsip efektivitas dan akuntabilitas publik. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset, kementerian berkontribusi langsung pada efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara melalui PNBP. Barang Milik Negara yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel.

2. GOVERNMENT SOCIAL MEDIA SUMMIT (GSM AWARD)



Gambar 1.7 Penghargaan GSM Award 2025 kategori Best Use of Image



Gambar 1.8 Penghargaan GSM Award 2025 kategori Best Account

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mencatatkan capaian kinerja di bidang komunikasi publik melalui perolehan penghargaan pada ajang Government Social Media Summit (GSMS) Award 2025. Dalam ajang tersebut, Kemenpora berhasil meraih predikat Pemenang Best Use of Image (Kategori Kementerian) serta Top 3 Best Account (Kategori Kementerian). Capaian ini menjadi bentuk pengakuan eksternal terhadap kualitas pengelolaan media sosial kementerian dalam mendukung penyampaian informasi publik yang efektif, kredibel, dan selaras dengan dinamika komunikasi digital.

Keberhasilan ini mencerminkan kemampuan Kemenpora dalam memanfaatkan media sosial sebagai instrumen strategis komunikasi kebijakan, program, serta nilai kepemudaan dan keolahragaan kepada masyarakat luas. Pengelolaan konten visual yang konsisten, informatif, dan berorientasi pada pesan kebijakan menunjukkan bahwa komunikasi publik tidak hanya berfokus pada aspek estetika, tetapi juga pada kejelasan substansi dan konteks informasi yang disampaikan. Selain itu, capaian Top 3 Best Account menegaskan bahwa akun resmi media sosial Kemenpora dikelola secara profesional dan berkelanjutan, dengan perencanaan konten yang terstruktur, responsivitas terhadap isu strategis, serta kemampuan membangun interaksi dan kepercayaan publik.

3. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA AWARD (BKN AWARD)



Gambar 1.9 Penghargaan BKN Award Tahun 2025

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memperoleh penghargaan BKN Awards sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akuntabel, profesional, dan berbasis sistem merit.

Penghargaan ini mencerminkan komitmen Kemenpora dalam memperkuat tata kelola SDM aparatur yang selaras dengan reformasi birokrasi nasional.

Capaian Kemenpora dalam ajang BKN *Awards* antara lain meliputi:

1. Kategori Implementasi Sistem Merit Terbaik
   Penghargaan ini diberikan atas konsistensi Kemenpora dalam menerapkan prinsip sistem merit pada seluruh siklus manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, hingga manajemen talenta.
2. Kategori Pengelolaan Data Kepegawaian Terbaik
   Kemenpora dinilai berhasil mengelola data kepegawaian yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi melalui pemanfaatan sistem informasi kepegawaian nasional secara optimal.
3. Kategori Penilaian Kinerja ASN Terbaik
   Penghargaan ini menunjukkan keberhasilan Kemenpora dalam mengimplementasikan manajemen kinerja ASN yang terukur, berbasis indikator kinerja, serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.
4. Kategori Pengembangan Kompetensi ASN
   Kemenpora memperoleh apresiasi atas upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN melalui pelatihan, pembelajaran digital, dan pengembangan karier berbasis kebutuhan organisasi.

BAB I
PENDAHULUAN

01



LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 merupakan dokumen akuntabilitas sekaligus instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas layanan, efektivitas program, dan dampak pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Disusun sebagai refleksi kinerja berbasis data, LKj ini mendukung penguatan tata kelola, perencanaan, dan prioritas strategis pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025–2029. Dalam kerangka RKP 2025, Kemenpora memfokuskan penguatan pada tiga pilar utama, yaitu peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), penguatan prestasi olahraga melalui implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), serta penguatan sinergi lintas sektor sesuai Perpres Nomor 43 Tahun 2022, guna mendukung agenda pembangunan nasional secara terintegrasi.

Transformasi ini memerlukan pendekatan holistik: pemberdayaan pemuda yang terarah, pembudayaan olahraga masyarakat, penataan dan revitalisasi infrastruktur, pembangunan ekosistem olahraga prestasi, dan integrasi *sport science*. Kemenpora melakukan langkah strategis dan kolaboratif agar dapat menjadi penggerak utama dalam mewujudkan generasi muda yang berkualitas, masyarakat yang sehat dan bugar, serta Indonesia yang berprestasi dan berdaya saing tinggi di tingkat global, melalui:

1. Perbaikan Tata Kelola Kemenpora dan Cabang Olahraga
   a. MoU dengan Kejaksaan Agung dan BPKP.
      Pada 18 November 2025 Kemenpora menandatangani Nota Kesepahaman dengan BPKP tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di Kemenpora, dan di tanggal 24 November 2025 Kemenpora telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Republik Indonesia terkait kerja sama di bidang bantuan hukum, pertimbangan hukum, pengamanan program strategis pembangunan, pemulihan aset, pertukaran data serta peningkatan kapasitas SDM.
   b. Pencabutan Permenpora 14/2024 dan Deregulasi 191 Peraturan Menpora dengan Pendekatan Omnibus.
      i. Di akhir September 2025, Permenpora 14/2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi telah dicabut karena tidak sesuai dengan Piagam Olimpiade dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto;
      ii. Kemenpora sudah melakukan kick off meeting deregulasi secara internal dengan melibatkan lintas kedeputian dan secara eksternal dengan melibatkan tim pakar hukum dengan target menyederhanakan Permenpora menjadi <10 regulasi. Status per Desember 2025 sudah ada 4 (empat) draft awal Peraturan Menpora Omnibus bidang: Pelayanan Kepemudaan, Pembudayaan Olahraga, Prestasi Olahraga, dan Industri Olahraga. Untuk Omnibus Prestasi Olahraga dan Industri Olahraga sudah selesai dilakukan dan akan uji publik di awal tahun 2026.

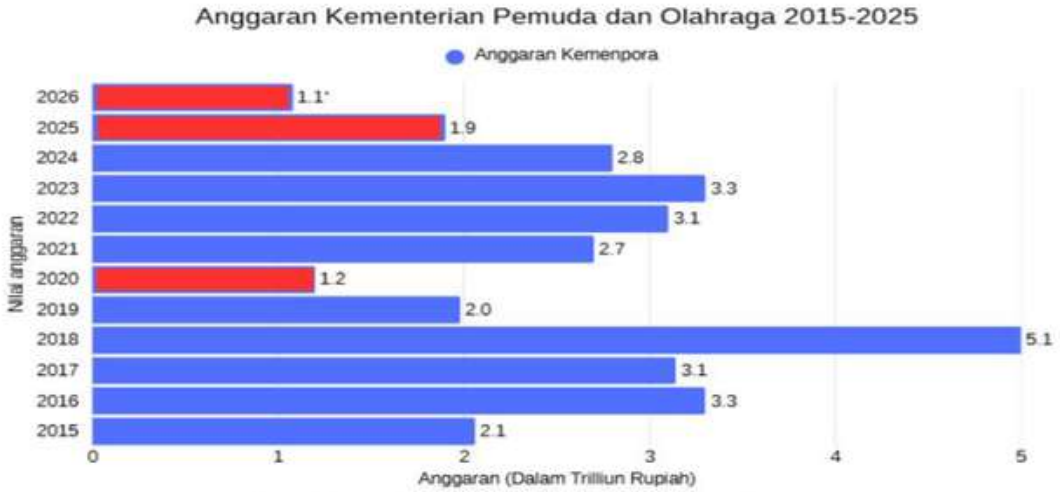
iii. *Expected outcome* yang diharapkan dari *omnibus law* adalah :

- regulasi yang lebih efisien, ringkas, dan mudah diimplementasikan;
- lebih ramah bagi industri olahraga dan ekosistem pembinaan; dan
- memangkas hambatan birokrasi untuk mempercepat layanan.

c. Penyelesaian Sengketa Cabang Olahraga.

Kemenpora sudah mengirim surat kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan memberi tenggat waktu 3 bulan untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan cabang olahraga. Sengketa kepengurusan cabang olahraga harus diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan tidak boleh mengorbankan atlet dan masa depan olahraga Indonesia. Di awal Desember 2025, KONI dan KOI sudah sepakat penyelesaian sengketa cabang Sepak Takraw dan masih terdapat 3 (tiga) cabor yang akan diselesaikan sengketanya.

2. Transformasi Sistem Penganggaran Kemenpora



Grafik 1.1 Transformasi Anggaran Kemenpora Tahun 2015-2025

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dikelola secara efisien dan efektif dengan dampak yang terukur/*Key Performance Indicator*. Anggaran yang disusun mengikuti program-program prioritas (*Money follows Priority*) dan dikelola dengan *good governance* dengan pelaksanaan Program Prioritas dijalankan secara kolaboratif lintas unit kerja.

3. Reformasi Birokrasi Kemenpora

a. Penguatan Manajemen SDM Kemenpora. *Assessment* kompetensi dan integritas untuk memetakan kualitas dan penempatan SDM Kemenpora, melalui upaya Evaluasi job description ASN Kemenpora serta perumusan *Key Performance Indicators* (KPI) yang selama ini belum terdefinisi secara jelas. Hasil awal *assessment* menunjukkan bahwa sebagian ASN Kemenpora belum ditempatkan sesuai kompetensinya, serta belum memiliki KPI yang jelas sebagai tolak ukur kinerja, meskipun telah memahami tugas pokok dan fungsi.

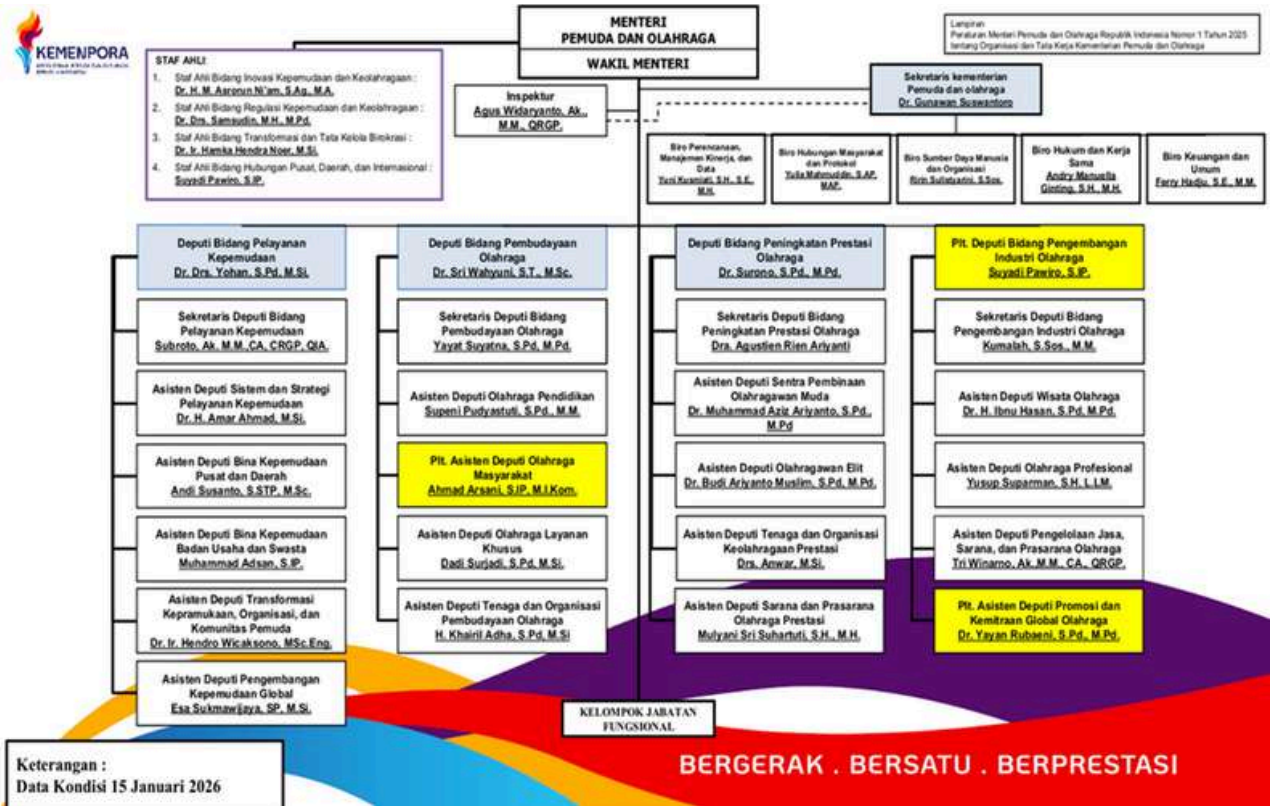
b. Memperkuat Kolaborasi Lintas Kedeputian. Kementerian Pemuda dan Olahraga akan melakukan sentralisasi fungsi kehumasan, yang sebelumnya setiap kedeputian memiliki Humas masing-masing, kini seluruh fungsi Humas disatukan sehingga penyampaian informasi dapat terkoordinasi, saling berbagi konten, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Penguatan budaya kolaborasi ASN dan sinergi antar unit kerja yang di tahun 2025 diujicobakan melalui pembentukan kepanitiaan Indonesia *Sports Summit* yang melibatkan seluruh ASN Kemenpora, guna membiasakan kerja lintas unit dan kebersamaan. Pendekatan lintas kedeputian juga akan diterapkan pada program-program lainnya sebagai program bersama, bukan program sektoral.

c. Penguatan Data & Sistem Informasi Kemenpora. Kerja sama dengan Telkom dalam penguatan *database* olahraga dan kepemudaan. Penguatan data cabang olahraga dan kompetitor internasional ini sebagai dasar pemetaan kekuatan olahraga sejak dini, serta penguatan data organisasi dan komunitas kepemudaan. Integrasi sistem lintas kedeputian dengan mengonsolidasikan berbagai sistem yang terpisah menjadi Satu Data Kemenpora.

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

B.1. STRUKTUR DAN PROFIL PEJABAT KEMENPORA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, struktur organisasi dan tata kerja, struktur organisasi Kemenpora tertuang dalam Permenpora Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga disajikan sebagai berikut:



Gambar 1.10 Struktur Organisasi Kemenpora

PROFIL MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

ERICK THOHIR
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA



Gambar 1.11
Foto Menteri Pemuda dan Olahraga

RIWAYAT PENDIDIKAN :

National University of California
1993 - *Master of Business Administration*

Glandale University
1991 - *Bachelor of Arts*

RIWAYAT JABATAN

- 2010 - 2019- Komisaris Utama Mahaka Media
- 2013 - 2016- Presiden Klub *Inter Milan*
- 2014 - 2019- Direktur Utama PT Intermedia Capital Tbk, perusahaan induk ANTV
- 2015 - 2019- Ketua Komite Olimpiade Indonesia
- 2018 - Ketua Indonesia *Asian Games* 2018 *Organizing Committee*/INASGOC
- 2019 - 2024- Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

(Kabinet Indonesia Kerja II)

- 2024 - 2025- Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

(Kabinet Merah Putih)

LHKPN

LHKPN 2024

PROFIL WAKIL MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAUFIK HIDAYAT

WAKIL MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA



Gambar 1.12
Foto Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- SD Pangelengan 01, Jawa Barat
- SMP Taman Siswa Bandung, Jawa Barat
- SMU Taman Siswa Bandung, Jawa Barat

RIWAYAT KEJUARAAN :

- 1998 - Brunei Open Championships.
- 1999 - Indonesia Open.
- 2000 - Indonesia Open, Asia Badminton, Thomas Cup, Malaysia Open.
- 2001 - Singapore Open.
- 2002 - Indonesia Open, Thomas Cup, China Taipei Championships.
- 2003 - Indonesia Open.
- 2004 - Olimpiade Athena, Asia Badminton Championships.
- 2005 - Singapore Open.
- 2006 - Asian Games (Gold)
- 2007 - Asia Badminton Championships, Sea Games, Asian Continental.
- 2008 - Macau Open
- 2009 - US Open & India Open Championships
- 2010 - French Open Championships & Canada Open Championships
- 2011 - India Open Championships

RIWAYAT JABATAN :

- 2007 - 2018 Direktur Utama PT. Nayottama Prawira Hidayat
- 2012 - 2016 Staf Ahli Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)
- 2015 - Chef de Mission Sea Games
- 2015 - 2017 Wakil Ketua Bidang Permainan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas
- 2016 - 2018 Staf Khusus Bidang Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
- 2024 - Tim Tambahan Pemenangan PBSI Olimpiade Paris
- 2024 - Wakil Ketua Umum PBSI
- 2024 - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI

LHKPN

LHKPN 2024

PROFIL PEJABAT ESELON I



Drs. Gunawan Suswantoro
Sekretaris Kementerian
Pemuda dan Olahraga



Dr. Drs. Yohan, M. Si.
Deputi Bidang
Pelayanan Kepemudaan



Dr. Sri Wahyuni,
S.T.,M.Sc.
Deputi Bidang
Pembudayaan Olahraga



Dr. Surono, S.Pd. M, Pd
Deputi Bidang
Peningkatan
Prestasi Olahraga

Gambar 1.13 Foto Pejabat Eselon I Kemenpora

PROFIL STAF AHLI MENTERI



Prof. Dr. H.M. Asrorun
Ni'am Sholeh, MA
Staf Ahli Bidang
Inovasi Kepemudaan &
Keolahragaan



Ir. Hamka Hendra Noer,
M.Si., Ph.D.
Staf Ahli Bidang
Transformasi
Tata Kelola Birokrasi



Dr. Drs. Samsudin, S.H.,
M.H., M.Pd.
Staf Ahli Bidang
Regulasi Kepemudaan&
Keolahragaan



Suyadi Pawiro
Staf Ahli Bidang
Hubungan Pusat
Daerah & Internasional

Gambar 1.14 Foto Staf Ahli Menteri

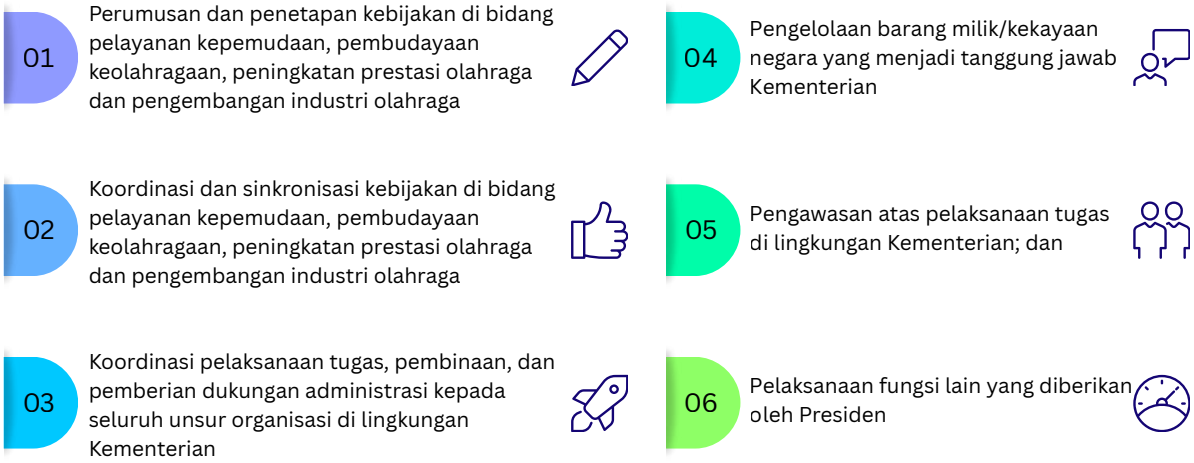
B.2. TUGAS DAN FUNGSI KEMENPORA

Peraturan yang ditetapkan di tahun 2025 terkait Kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

- Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No 34 Tahun 2025 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:



Grafik 1.2 Fungsi Kemenpora sesuai Permenpora 1 Tahun 2025

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kementerian Pemuda dan Olahraga bertransformasi dan melaksanakan penyederhanaan struktur yang terdiri dari 5 (lima) Unit Eselon I. Secara rinci struktur organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga selama tahun 2025 sesuai dengan SOTK baru disajikan dalam tabel sebagai berikut

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kementerian Pemuda dan Olahraga bertransformasi dan melaksanakan penyederhanaan struktur yang terdiri dari 5 (lima) Unit Eselon I. Secara rinci struktur organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga selama tahun 2025 sesuai dengan SOTK baru disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Unit Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025

NO.	UNIT ORGANISASI	TUGAS
1	Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian
2	Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kepemudaan
3	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga
4	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
5	Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga	menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri olahraga

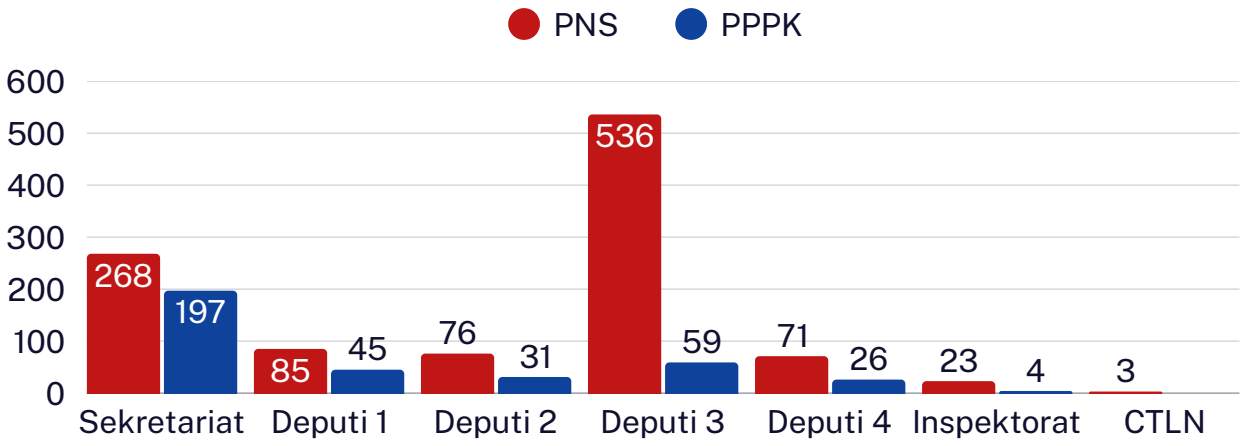
ANALISIS KONDISI DAN POTENSI ASN KEMENPORA

Struktur ASN Kemenpora

Dengan struktur organisasi yang adaptif untuk mencapai tujuan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, Kemenpora memiliki basis kekuatan sebanyak 1.433 pegawai yang terdiri dari sinergi antara 1.070 PNS dan 363 PPPK.



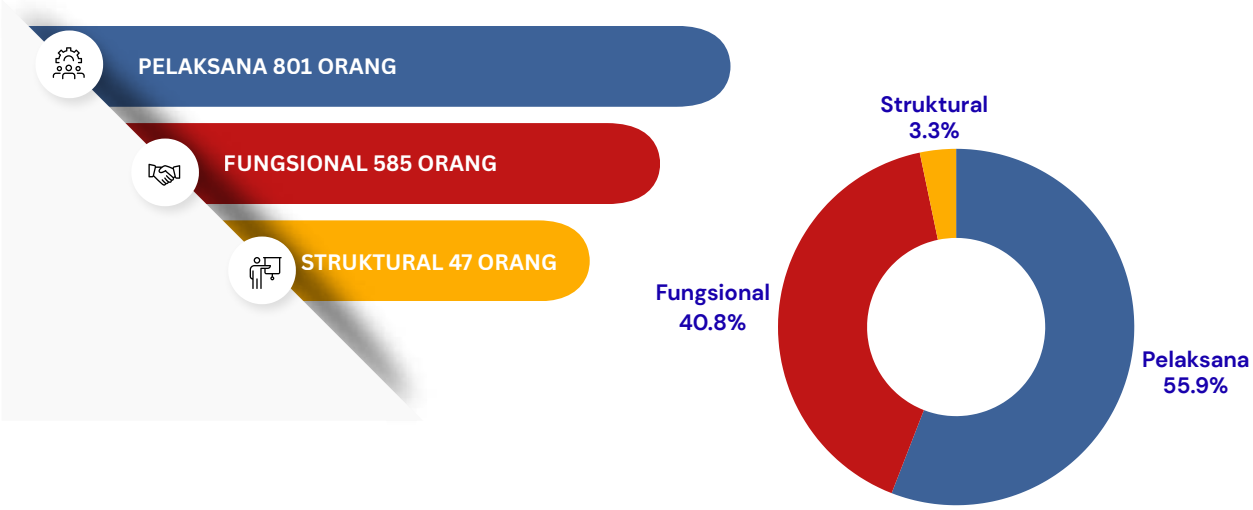
Gambar 1.15 Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin



Grafik 1.3 Komposisi pegawai berdasarkan Manajemen ASN

Komposisi ini terdiri dari 801 orang pada jabatan pelaksana, dan 585 orang pada jabatan fungsional, yang menunjukkan besarnya kapasitas tenaga teknis untuk mengeksekusi program-program strategis di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Komposisi Pegawai



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan

Pengadaan Dan Seleksi ASN TA 2024-2025

Proses pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Kemenpora dilaksanakan sebagai upaya strategis untuk memenuhi kebutuhan organisasi berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), guna mendukung percepatan program prioritas nasional di bidang kepemudaan dan olahraga.

1. Penetapan Formasi dan Kebijakan Seleksi
Berdasarkan Keputusan Menpan-RB, Kemenpora memperoleh alokasi sebanyak 308 formasi pada tahun anggaran 2024. Fokus utama pengadaan tahun ini diarahkan pada penataan tenaga non-ASN (honorer) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini dibagi menjadi dua skema prioritas:

1. Seleksi PPPK Tahap I: Diperuntukkan bagi eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) dan Tenaga Non-ASN yang datanya telah terverifikasi dalam pangkalan data (database) BKN
2. Seleksi PPPK Tahap II: Ditujukan bagi Tenaga Non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN namun memiliki masa kerja aktif minimal 2 tahun secara terus-menerus di unit kerja Kemenpora.

2. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

Proses seleksi dilakukan secara transparan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) untuk menjamin akuntabilitas hasil. Pada tanggal 5 Mei 2025, pelaksanaan seleksi kompetensi Tahap II menjadi momen krusial untuk mengisi formasi yang belum terpenuhi pada tahap sebelumnya. Ujian ini mencakup kompetensi manajerial, sosial kultural, teknis, serta wawancara berbasis komputer.

3. Analisis Hasil Kelulusan dan Penempatan

Dari total kuota yang dialokasikan, sebanyak 139 peserta dinyatakan lulus seleksi pada Tahap II. Rekapitulasi kelulusan menunjukkan konsentrasi pada jabatan operasional untuk memperkuat lini pendukung organisasi.



Hasil seleksi ini mencerminkan komitmen Kemenpora dalam melakukan transformasi SDM melalui pengangkatan pegawai yang kompeten dan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Grafik 1.5 Komposisi Pegawai Penata Layanan Operasional

Akselerasi Kualitas melalui Pendidikan Tinggi

Terdapat tren positif dalam peningkatan kualifikasi akademik pegawai. Pada tahun 2025, jumlah pegawai yang mengajukan pendidikan formal meningkat drastis hingga 97% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total 57 pegawai yang menempuh studi dari jenjang D3 hingga S3. Semangat pengembangan diri ini, terutama pada jenjang S1 (25 orang) dan S2 (19 orang), menjadi modal intelektual kuat bagi kementerian untuk menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks.

Transformasi menuju Manajemen Talenta berbasis Merit

Kemenpora sedang berada dalam transisi penting menuju tata kelola karier yang lebih objektif melalui optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) BKN. Meskipun masih terdapat tantangan dalam integrasi data, upaya pemetaan potensi melalui *Computer Assisted Competency Test* (CACT) dan penyusunan *Individual Development Program* (IDP) menunjukkan komitmen organisasi untuk menempatkan talenta terbaik pada jabatan-jabatan strategis sesuai dengan kinerja dan kompetensinya. Sinergi antara pemetaan potensi SDM yang akurat, komitmen pengembangan kompetensi berkelanjutan, dan penataan manajemen talenta yang terintegrasi akan menjadi kunci utama bagi Kemenpora dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil di masa depan.

ISU STRATEGIS

Kementerian Pemuda dan Olahraga memasuki dekade strategis di tengah bonus demografi dan tuntutan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Olahraga berperan tidak hanya dalam pembinaan prestasi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan karakter, peningkatan kebugaran masyarakat, dan penguatan kualitas generasi muda. Pada tahun 2025, jumlah pemuda Indonesia mencapai 64,22 juta jiwa atau sekitar 20 persen dari total penduduk, menjadikan pemuda sebagai kekuatan utama sekaligus tantangan pembangunan nasional. Potensi besar pemuda dalam mendorong produktivitas ekonomi, inovasi, kepemimpinan sosial, dan prestasi olahraga masih dihadapkan pada berbagai kesenjangan, seperti kualitas sumber daya manusia, pengangguran usia muda, partisipasi pendidikan, serta kapasitas kewirausahaan dan kepeloporan. Kondisi tersebut menuntut kebijakan kepemudaan dan keolahragaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kementerian Pemuda dan Olahraga selama tahun 2025 menghadapi beberapa isu/peristiwa utama diantaranya:

Isu Strategis di Bidang Kepemudaan

Isu strategis kepemudaan dihadapkan pada tingginya pengangguran usia muda sebesar 13–14 persen serta proporsi pemuda kategori *Not in Education, Employment, or Training* (NEET) yang mencapai 20,31 persen, menunjukkan satu dari lima pemuda tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan. Selain itu perilaku destruktif pemuda yang mencakup penyalahgunaan zat adiktif, kekerasan komunal (tawuran), hingga kriminalitas jalanan merupakan manifestasi dari hambatan sosiologis dan psikologis yang dihadapi generasi pemuda dalam masa transisi menuju kedewasaan. Kondisi ini mencerminkan kerentanan sosial-ekonomi yang berpotensi menurunkan daya saing bangsa apabila tidak ditangani melalui kebijakan yang sistematis dan berbasis bukti. Kemenpora juga perlu melakukan transformasi untuk menekan perilaku destruktif dari pendekatan keamanan (represif) menjadi pendekatan pembangunan (preventif) melalui penyediaan youth center sebagai ruang aman untuk ekspresi kreatif, penguatan program mental health awareness yang terintegrasi di tingkat komunitas dan penguatan nilai IPP secara holistik. Kesenjangan kualitas pemuda juga terlihat pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yang meskipun membaik secara nasional, masih menunjukkan disparitas antarwilayah, khususnya pada dimensi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta partisipasi dan kepemimpinan. Data BPS Tahun 2023 mencatat 40,94 persen pemuda berpendidikan SMA/SMK, sementara lulusan pendidikan tinggi masih terbatas, sehingga kapasitas pemuda dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja berbasis keterampilan digital dan kreativitas masih perlu diperkuat. Di sisi lain, transisi menuju ekonomi digital, industri kreatif, dan kewirausahaan muda membuka peluang besar, di mana pemuda menjadi aktor utama dan Kemenpora berperan strategis dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui pelatihan, inkubasi, pendanaan, dan akses pasar dengan dukungan kebijakan lintas kementerian.

Isu Strategis di Bidang Keolahragaan

Isu strategis keolahragaan dihadapkan pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam olahraga, tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Olahraga sebesar 0,363 di tahun 2025, hanya naik 0.21 poin dari 0,342 di tahun 2021, serta tingkat partisipasi olahraga yang hanya 30,93 persen. Kondisi ini berdampak pada kesehatan masyarakat dan melemahnya basis olahraga prestasi, dengan risiko meningkatnya penyakit tidak menular dan terbatasnya regenerasi atlet.

Kesenjangan fasilitas dan sarana olahraga antar daerah juga masih signifikan, baik dari sisi kualitas, pemerataan, maupun pengelolaan, sehingga diperlukan transformasi melalui skema Badan Layanan Umum (BLU), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan kolaborasi sektor swasta agar infrastruktur olahraga menjadi aset produktif.

Pada olahraga prestasi, capaian Indonesia di SEA Games, Asian Games, dan multi-event global masih fluktuatif akibat sistem pembinaan atlet yang belum terintegrasi secara menyeluruh, meskipun arah kebijakan melalui Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) telah tersedia. Tantangan lain adalah keterbatasan tenaga profesional olahraga, seperti pelatih bersertifikat internasional, tenaga sport science, dan dokter olahraga, yang dapat diperkuat melalui optimalisasi Rumah Sakit Olahraga Nasional (RSON) sebagai pusat unggulan *sport medicine*. Di sisi ekonomi, industri olahraga nasional masih berkembang, meskipun minat masyarakat terhadap lari, sepeda, *triathlon*, badminton, sepak bola, dan *e-sports* terus meningkat dan membuka peluang ekonomi bernilai besar. Digitalisasi data atlet, kebugaran masyarakat, dan prestasi berbasis *sport science* menjadi pengungkit utama kebijakan berbasis bukti melalui pembangunan sistem data terpadu, sehingga Kemenpora berada pada momentum strategis untuk memodernisasi pembangunan olahraga nasional secara berkelanjutan.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 adalah untuk menjelaskan pencapaian kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga selama tahun 2025. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum terkait dengan latar belakang; struktur organisasi, tugas dan fungsi; kondisi SDM Aparatur Negara; isu strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga selama tahun 2024; dan sistematika penyajian.

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis 2025-2029, Rencana Kerja Kemenpora 2025, Perjanjian Kinerja Kemenpora 2025, dan Postur Penganggaran 2025.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan pemenuhan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang meliputi pengukuran kinerja dan capaian kinerja, realisasi anggaran, serta capaian Prioritas Nasional, dan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2025.

BAB IV: PENUTUP

Menyajikan kesimpulan atas Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga selama tahun 2025 beserta rekomendasinya sebagai perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

02



RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Pemuda dan Olahraga memperoleh mandat strategis untuk melaksanakan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Sesuai arahan Presiden, Kemenpora mempunyai 2 (dua) misi besar yaitu membangun pemuda yang patriotik, gigih, dan berempati. Ketiga unsur ini diharapkan melahirkan pemuda yang berani bermimpi, berani berprestasi, dan berani mencintai tanah air, dan menempatkan posisi olahraga sebagai Duta Bangsa yang mencerminkan kedigdayaan Bangsa.

Pada periode transisi dan perkembangan strategis menuju Indonesia Emas 2045, tahun 2025 merupakan momentum krusial sebagai tahap pertama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Transisi ini ditandai dengan berakhirnya dua dekade pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan dimulainya RPJPN 2025-2045 yang disahkan melalui UU No. 59 Tahun 2024. Kemenpora menyusun Renstra 2025-2029 untuk menyelaraskan kebijakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya guna mendukung peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Perubahan mendasar dalam transisi ini meliputi :

1. Landasan Yuridis dan Global. Renstra 2025-2029 disusun dengan mengacu pada UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Kemenpora kini naik level secara global, di mana Indonesia masuk dalam kategori "*high*" dengan skor 0,756 pada *Global Youth Development Index* (YDI) 2023.
2. Pembaruan Metodologi IPP. Terdapat transisi besar dalam pengukuran keberhasilan pembangunan pemuda melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Metode Baru. Metode ini melakukan penajaman pada 5 domain (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi, dan inklusivitas) serta disagregasi data hingga level kabupaten/kota.
3. Transformasi Tata Kelola. Terjadi lonjakan signifikan dalam nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dari 60,62 (2018) menjadi 80,04 (kategori A) pada tahun 2024. Hal ini menandai kesiapan kelembagaan untuk bertransformasi ke arah sistem digital yang terintegrasi (*e-performance* dan *e-office*).

Dalam masa transisi ini dokumen perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga berupaya agar visi pada Renstra 2025-2029 jauh lebih luas dan bersifat transformatif karena selaras dengan visi nasional dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.

- Renstra 2020-2024: Berfokus pada perwujudan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing melalui pelayanan kepemudaan dan pengelolaan olahraga yang sistematis. Harapan utamanya adalah tercapainya tujuan pembentukan karakter, kapasitas, dan daya saing pemuda, serta masyarakat yang bugar dan berprestasi.
- Renstra 2025-2029: Mengusung visi besar "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Fokusnya diarahkan pada transformasi menyeluruh di berbagai dimensi, termasuk sosial, ekonomi, tata kelola, dan kepemimpinan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur.

Dan penyusunan misi pada Renstra 2025-2029 dijabarkan lebih teknis ke dalam program nasional yang disebut Asta Cita, sedangkan Renstra 2020-2024 lebih menekankan pada perbaikan internal dan program prioritas kementerian.
Renstra 2020-2024 (5 Program Prioritas):

1. Perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, dan peningkatan pelayanan publik
2. Pemberdayaan pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, dan berjiwa wirausaha.
3. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa di kalangan pemuda.
4. Pemassalan olahraga untuk masyarakat yang sehat dan bugar.
5. Pembinaan usia dini dan prestasi atlet secara berkesinambungan.

Renstra 2025-2029 (Fokus Prioritas Nasional ke-4/Asta Cita): Kemenpora menjadi aktor utama dalam melaksanakan misi ke-4 dari delapan misi Presiden (Asta Cita) yang meliputi:

1. Memperkuat pembangunan SDM, sains, dan teknologi.
2. Meningkatkan prestasi olahraga.
3. Penguatan peran pemuda (Generasi Milenial dan Z) serta penyandang disabilitas.
4. Kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan.
5. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Bidang Olahraga.

Pelaksanaan Renstra pada tahun 2025 menitikberatkan pada penguatan transformasi untuk mencapai target menengah nasional, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga tetap mempertahankan tiga pilar utama pembangunan yaitu: Kepemudaan, Keolahragaan, dan Dukungan Manajemen. Hal ini memberikan gambaran komprehensif bahwa Renstra 2025-2029 bukan sekadar kelanjutan, melainkan sebuah lompatan transformatif untuk menjawab tantangan Indonesia Emas 2045.

Visi Kemenpora 2025-2029 :

Pelaksanaan Renstra pada tahun 2025 menitikberatkan pada penguatan transformasi untuk mencapai target menengah nasional, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga tetap mempertahankan tiga pilar utama pembangunan yaitu: Kepemudaan, Keolahragaan, dan Dukungan Manajemen. Hal ini memberikan gambaran komprehensif bahwa Renstra 2025-2029 bukan sekadar kelanjutan, melainkan sebuah lompatan transformatif untuk menjawab tantangan Indonesia Emas 2045.

Misi Kemenpora 2025-2029 :

Menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan karakter yang patriotik, gigih, dan berempati dengan penguatan komunitas, organisasi kepemudaan, kepramukaan, kepemimpinan, dan ketenagakerjaan yang layak, serta kerja sama di tingkat regional dan internasional.

1. Mendorong partisipasi aktif masyarakat berolahraga melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi, satuan pendidikan, dan masyarakat.
2. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat dunia melalui pengembangan sentra pembinaan olahraga dan akademi pelatihan berstandar internasional, pengembangan international *training center*, penguatan manajemen talenta nasional secara berkelanjutan, dan dana perwalian olahraga.
3. Mengembangkan ekosistem industri olahraga melalui penyelenggaraan Indonesia *Sport Summit* dan forum multi-pihak di tingkat nasional dan internasional, mendorong pertumbuhan wisata olahraga (*sports tourism*), serta pengembangan sport and wellness center.
4. Mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional dengan didukung oleh digitalisasi sistem, penyederhanaan regulasi, dan penguatan kapasitas aparatur.
5. Melakukan transformasi tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan profesional melalui digitalisasi sistem, penyederhanaan regulasi, serta penguatan kapasitas aparatur.

Gambar 2.1 Visi dan Misi Kemenpora Tahun 2025-2029

Tujuan Kemenpora 2025-2029 :

1. Membangun pemuda yang berkarakter dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional, dengan indikatornya yaitu: Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
2. Membangun budaya olahraga di masyarakat, meningkatkan prestasi olahraga di tingkat dunia, dan memperkuat ekosistem industri olahraga untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, dengan indikatornya yaitu: 1) Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga; 2) Indeks Pembangunan Olahraga (IPO); 3) Peringkat pada *Olympic Games*; 4) Peringkat pada *Paralympic Games*; 5) Jumlah perolehan medali emas pada *Olympic Games*; 6) Jumlah perolehan medali emas pada *Paralympic Games*; 7) Peringkat pada *Youth Olympic Games*; 8) Peringkat pada *Asian Youth Games*; 9) Peringkat pada *Asian Youth Para Games*; 10) PDB Industri Olahraga.
3. Mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional dengan didukung oleh digitalisasi sistem, penyederhanaan regulasi, dan penguatan kapasitas aparatur, dengan indikatornya yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga :

SS01. Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang berkarakter dan berperan aktif dalam membangun Indonesia maju.

SS02. Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada pertumbuhan ekonomi nasional

SS03.Terwujudnya tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik

Gambar 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenpora Tahun 2025-2029

POHON KINERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025 -2029

Visi Kemenpora 2025-2029

Pelaksanaan Renstra pada tahun 2025 menitikberatkan pada penguatan transformasi untuk mencapai target menengah nasional, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga tetap mempertahankan tiga pilar utama pembangunan yaitu: Kepemudaan, Keolahragaan, dan Dukungan Manajemen. Hal ini memberikan gambaran komprehensif bahwa Renstra 2025-2029 bukan sekadar kelanjutan, melainkan sebuah lompatan transformatif untuk menjawab tantangan Indonesia Emas 2045.

Misi Kemenpora 2025-2029

Menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan karakter yang patriotik, gigih, dan berempati dengan penguatan komunitas, organisasi kepemudaan, kepramukaan, kepemimpinan, dan ketenagakerjaan yang layak, serta kerja sama di tingkat regional dan internasional.

1. **Mendorong partisipasi aktif masyarakat berolahraga melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi, satuan pendidikan, dan masyarakat.**
2. **Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat dunia melalui pengembangan sentra pembinaan olahraga dan akademi pelatihan berstandar internasional, pengembangan *international training center*, penguatan manajemen talenta nasional secara berkelanjutan, dan dana perwalian olahraga.**
3. **Mengembangkan ekosistem industri olahraga melalui penyelenggaraan Indonesia Sport Summit dan forum multi-pihak di tingkat nasional dan internasional, mendorong pertumbuhan wisata olahraga (*sports tourism*), serta pengembangan sport and *wellness center*.**
4. **Mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional dengan didukung oleh digitalisasi sistem, penyederhanaan regulasi, dan penguatan kapasitas aparatur.**
5. **Melakukan transformasi tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan profesional melalui digitalisasi sistem, penyederhanaan regulasi, serta penguatan kapasitas aparatur.**

Tujuan Kemenpora 2025-2029

1. **Membangun pemuda yang berkarakter dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional, dengan indikatornya yaitu: Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).**
2. **Membangun budaya olahraga di masyarakat, meningkatkan prestasi olahraga di tingkat dunia, dan memperkuat ekosistem industri olahraga untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, dengan indikatornya yaitu: 1) Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga; 2) Indeks Pembangunan Olahraga (IPO); 3) Peringkat pada *Olympic Games*; 4) Peringkat pada Paralympic Games; 5) Jumlah perolehan medali emas pada *Olympic Games*; 6) Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games; 7) Peringkat pada *Youth Olympic Games*; 8) Peringkat pada *Asian Youth Games*; 10) Peringkat pada *Asian Youth Para Games*; 11) PDB Industri Olahraga.**
3. **Mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional dengan didukung oleh digitalisasi sistem, penyederhanaan regulasi, dan penguatan kapasitas aparatur, dengan indikatornya yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi (RB).**

Gambar 2.3 Pohon Kinerja Kemenpora Tahun 2025-2029

POHON KINERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025 - 2029

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang siap berperan aktif dalam membangun Indonesia maju.
Indikator SS 1 :
1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Sasaran Program 1.1 : Meningkatnya kualitas hidup generasi pemuda dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi

Indikator SP 1.1 :

1. Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/sederajat atau lebih tinggi
2. Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK
3. Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat
4. Persentase pemuda yang merokok
5. Persentase pemuda berolahraga
6. Persentase remaja perempuan berusia 16–18 tahun yang hamil
7. Angka Kesakitan Pemuda
8. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir
9. Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial
10. Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir
11. Rasio kewirausahaan pemuda
12. Persentase pemuda pekerja tidak penuh
13. Persentase usia muda (16-30 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan
14. Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda perempuan terhadap laki-laki
15. Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja
16. Perkawinan usia anak

Penjabaran dari indikator IPP diatas juga terkait Indikator kualitas pelaksanaan koordinasi dan pengembangan karakter yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kualitas pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan
2. Persentase pemuda yang mengalami pengembangan karakter yang difasilitasi layanan kepemudaan

Gambar 2.4 Pohon Kinerja Kepemudaan Tahun 2025-2029

POHON KINERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025 - 2029

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada pertumbuhan ekonomi nasional

Indikator SS 2 :

- Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
- Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga
- Peringkat pada *Olympic Games*
- Peringkat pada *Paralympic Games*
- Jumlah perolehan medali emas pada *Olympic Games*
- Jumlah perolehan medali emas pada *Paralympic Games*
- Peringkat pada *Youth Olympic Games*
- Peringkat pada *Asian Youth Games*
- Peringkat pada *Asian Youth Para Games*
- PDB Industri Olahraga

Sasaran Program 2.1 : Meningkatnya budaya masyarakat dalam berolahraga
Indikator SP 2.1 :

- Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga
- Indeks kebugaran jasmani masyarakat
- Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga

Sasaran Program 2.2 : Peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
Indikator SP 2.2:

- Persentase olahragawan pelatnas yang berprestasi di tingkat Regional/Internasional
- Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games
- Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games
- Jumlah perolehan medali pada Asian Games
- Jumlah perolehan medali pada Asian Para Games
- Jumlah perolehan medali pada SEA Games
- Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games
- Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic Games
- Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Games
- Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Para Games

Sasaran Program 2.3 : Pertumbuhan iklim industri olahraga nasional
Indikator SP 2.3 :

- PDB Industri Olahraga
- Indeks ekonomi olahraga

Gambar 2.5 Pohon Kinerja KeolahragaanTahun 2025-2029

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik

Indikator SS 3 :

1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

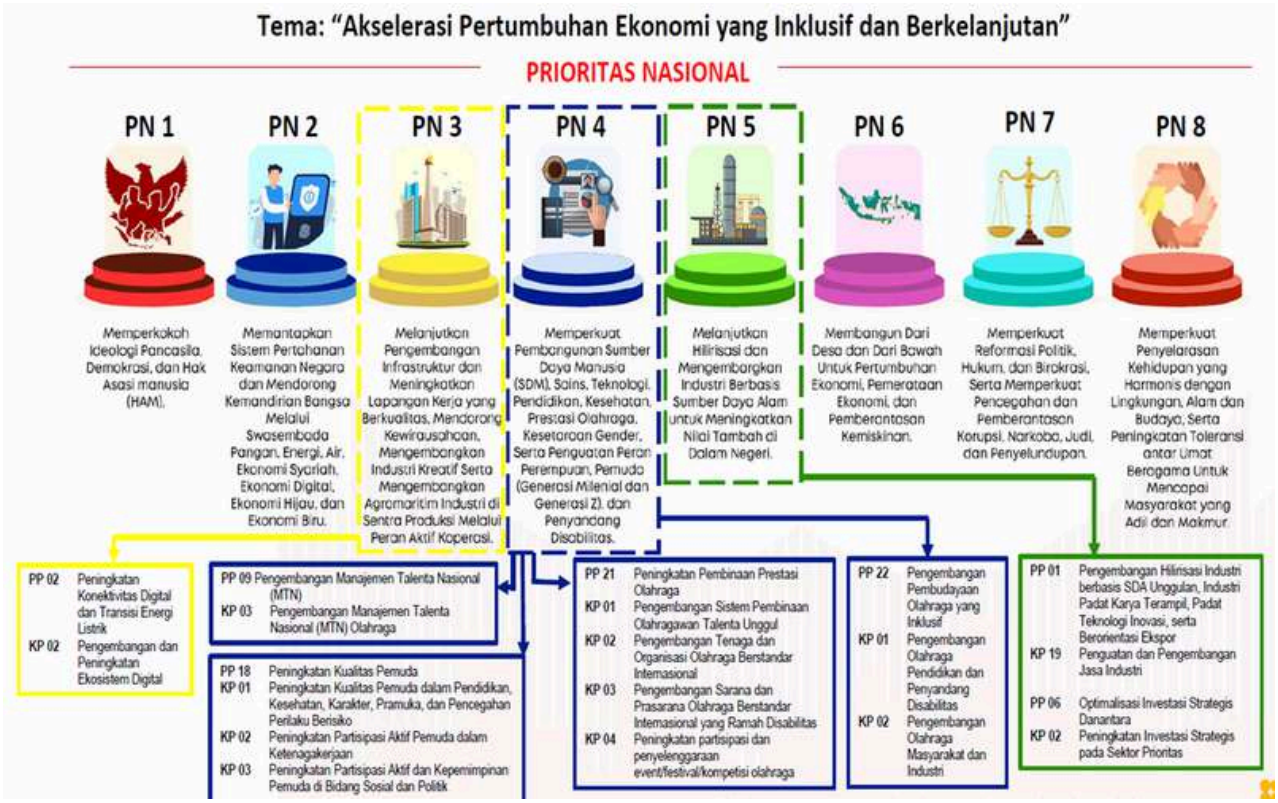
Sasaran Program 3.1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Bidang Pemuda dan Olahraga yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima

1. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora
2. Nilai SAKIP Kemenpora
3. Indeks SPBE
4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kemenpora
5. Indeks Sistem Merit
6. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
7. Indeks Pelayanan Publik
8. Indeks Reformasi Hukum
9. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemenpora
10. Indeks Pengelolaan Aset
11. Opini BPK
12. Survei Kepuasan Masyarakat Kemenpora
13. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
14. Indeks Pembangunan Statistik
15. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP)

Gambar 2.6 Pohon Kinerja Dukungan Manajemen Tahun 2025-2029

RENCANA KERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025

Rencana Kerja (Renja) Kemenpora Tahun 2025 diposisikan sebagai dokumen transisi yang krusial, yang secara teknis merupakan turunan langsung dari Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025. Sebagai tahun pertama dalam siklus pembangunan nasional yang baru, Renja ini menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dan setiap *output* kegiatan selaras dengan prioritas nasional yang telah dimutakhirkan.



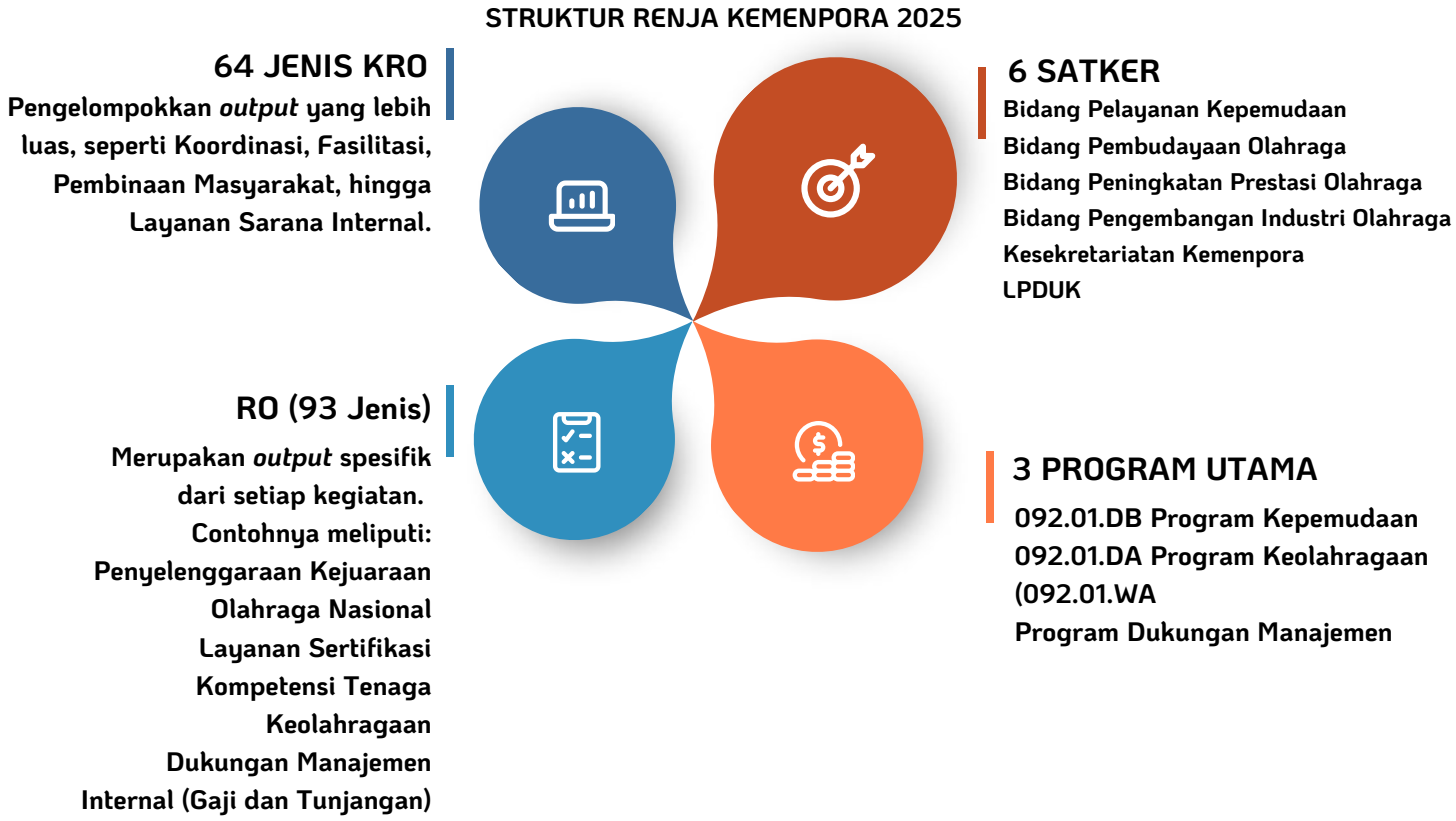
Gambar 2.7 Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

Matriks Pembangunan Nasional yang merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Dalam kaitannya dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Perpres ini diterbitkan untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan APBN 2025 yang telah ditetapkan, termasuk penyesuaian target dan alokasi anggaran untuk program unggulan seperti manajemen talenta dan penguatan karakter pemuda seperti yang ditunjukan pada bagan diatas.

Meskipun ada 8 Prioritas Nasional, Kemenpora hanya mendukung pada Prioritas Nasional 4 yaitu Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan penjabaran melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP). Bagan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi Kemenpora untuk menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2025 agar selaras dengan target makro pembangunan nasional yang baru saja dimutakhirkan oleh pemerintah pusat sehingga struktur Renja Kemenpora 2025 disusun secara hierarkis untuk memastikan setiap alokasi anggaran total Rp2,82 Triliun dalam dokumen DIPA terdistribusi secara tepat ke unit kerja dan output yang terukur

Dalam kerangka Perpres 79/2025, peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ditempatkan sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia. Renja Kemenpora 2025 menerjemahkan mandat ini dengan memperkuat peran kementerian sebagai *lead coordinator* lintas sektor. Upaya ini difokuskan pada pemutakhiran strategi untuk menurunkan tingkat pengangguran pemuda dan meningkatkan partisipasi sosial-ekonomi. Dengan mengacu pada hasil evaluasi BAPPENAS, Kemenpora mengarahkan kebijakan pada program yang bersifat integratif, memastikan pelayanan kepemudaan merambah hingga ke tingkat wilayah melalui koordinasi strategis yang lebih tajam.



Gambar 2.8 Struktur Renja Kemenpora Tahun 2025

Sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemutakhiran RKP untuk memperkuat ketahanan ekonomi, Renja Kemenpora 2025 mengarusutamakan kebijakan Ekonomi Olahraga (*Sportomics*). Kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk mengubah persepsi sektor olahraga dari pusat biaya menjadi sektor produktif yang menyumbang PDB Nasional. Di saat yang sama, penguatan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) tetap menjadi jangkar kebijakan dengan fokus pada "Hulu Olahraga" yakni peningkatan literasi fisik dan partisipasi aktif masyarakat guna membangun basis atlet berprestasi sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan nasional. Akselerasi Prestasi Olahraga dan Implementasi DBON Melalui kerangka Perpres 79/2025, Kemenpora tetap berpedoman pada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang menekankan pada pemanfaatan *sport science* dan teknologi olahraga dalam pembinaan atlet sejak usia dini di sentra-sentra daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa target prestasi di kancah internasional, termasuk persiapan kualifikasi ajang *multi-event* dunia, tetap terjaga efektivitasnya di tengah proses penyesuaian agenda pembangunan nasional yang dinamis.

Akuntabilitas di Masa Transisi Menghadapi tahun pertama Renstra 2025-2029, arah kebijakan Kemenpora dititikberatkan pada Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi. Dalam konteks Perpres 79/2025, pemutakhiran RKP menuntut efisiensi belanja dan akuntabilitas kinerja yang lebih ketat. Kemenpora merespons hal ini dengan kebijakan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pemanfaatan sistem informasi manajemen kinerja yang terintegrasi, guna memastikan masa transisi pemerintahan tetap berjalan stabil dengan standar opini WTP yang konsisten Renja Kemenpora 2025 adalah manifestasi operasional dari pemutakhiran RKP yang ditetapkan melalui Perpres 79/2025. Melalui arah kebijakan yang adaptif dan kolaboratif, Kemenpora berupaya memastikan bahwa seluruh program kepemudaan dan keolahragaan menjadi fondasi yang kokoh bagi akselerasi pembangunan nasional di masa depan.

Renja Kemenpora 2025 adalah manifestasi operasional dari pemutakhiran RKP yang ditetapkan melalui Perpres 79/2025. Melalui arah kebijakan yang adaptif dan kolaboratif, Kemenpora berupaya memastikan bahwa seluruh program kepemudaan dan keolahragaan menjadi fondasi yang kokoh bagi akselerasi pembangunan nasional di masa depan.

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025

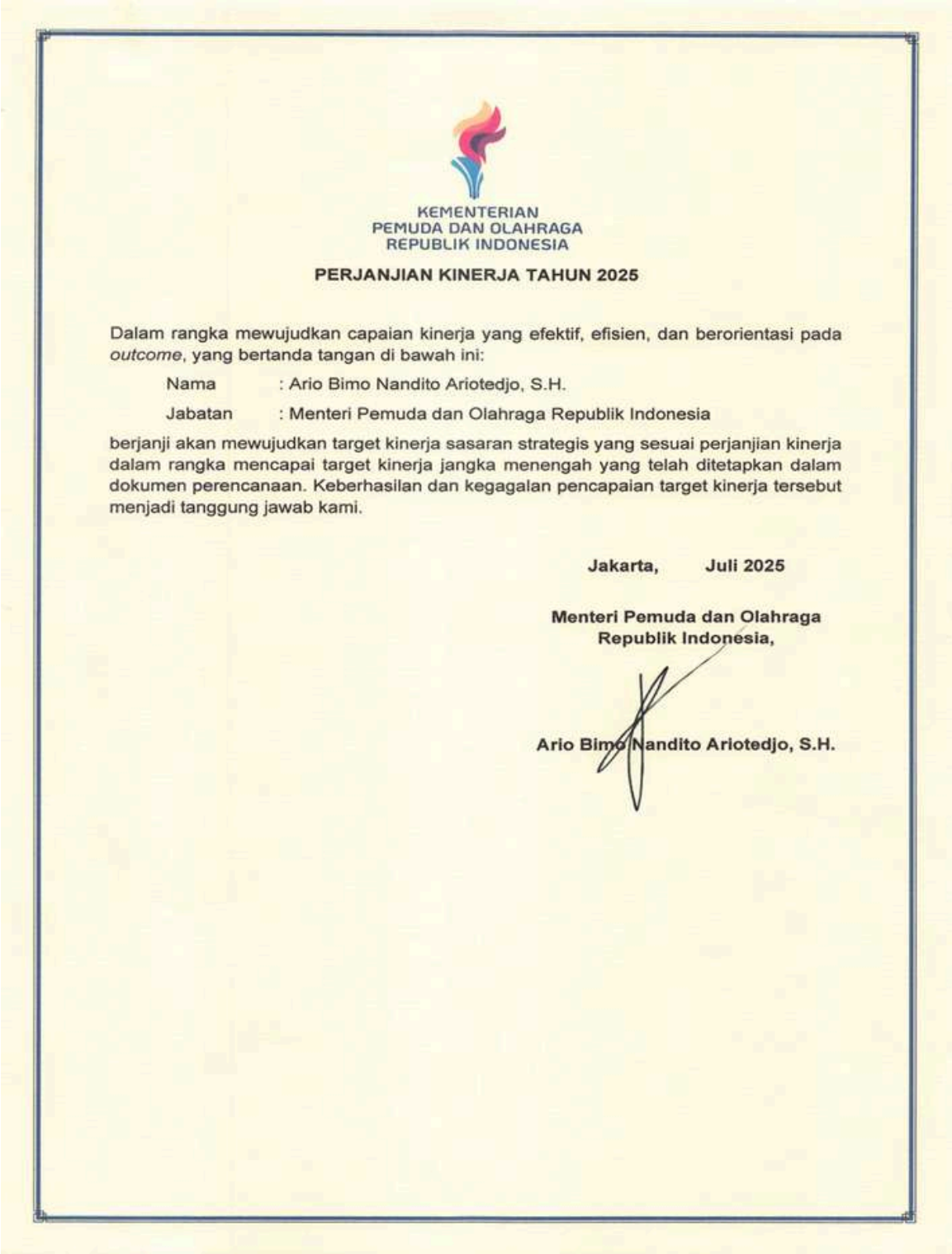
Perjanjian Kinerja 2025 adalah sebagai Jembatan Transisi (*Bridging*) sehingga memiliki peran unik sebagai dokumen transisi. Secara hukum dan administratif, Perjanjian Kinerja (PK) 2025 adalah langkah operasional pertama untuk mengimplementasikan visi besar dalam Renstra 2025-2029, namun tetap membawa beban evaluasi dan keberlanjutan dari capaian Renstra 2020-2024.

Penyelarasan Target: PK 2025 mengadopsi indikator-indikator baru yang telah disempurnakan dalam draf Renstra 2025-2029 (seperti penggunaan IPP metode baru) untuk memastikan bahwa sejak tahun pertama periode baru, pengukuran kinerja sudah relevan dengan target nasional RPJMN 2025-2029.

PK 2025 merupakan bentuk "estafet" dari apa yang telah dicapai pada periode sebelumnya, salah satunya angka-angka realisasi pada akhir Renstra 2020-2024 dijadikan dasar (*baseline*) dalam menetapkan target di PK 2025, salah satunya adalah nilai RB Tahun 2024 yang mencapai 80,35. Penguatan Program yang dari periode renstra 2020 - 2024, seperti pemassalan olahraga dan penguatan karakter pemuda, tetap dipertahankan dalam PK 2025 namun dengan penajaman strategi. PK 2025 adalah dokumen yang menerjemahkan visi-misi Renstra 2025-2029 ke dalam angka-angka nyata yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Penerjemahan Sasaran Strategis dalam PK 2025, Sasaran Strategis (SS) seperti "Meningkatnya Kualitas Pemuda" dan "Peningkatan Prestasi Olahraga Dunia" langsung dipatok dengan target kuantitatif yang mengacu pada proyeksi lima tahunan di Renstra 2025-2029.

Perjanjian Kinerja 2025 menjadi instrumen kontrol terhadap program kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa arah baru (Renstra 2025-2029) sudah dijalankan dengan benar berdasarkan evaluasi masa lalu (Renstra 2020-2024).

PERJANJIAN KINERJA KEMENPORA TAHUN 2025



KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada *outcome*, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Jabatan : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

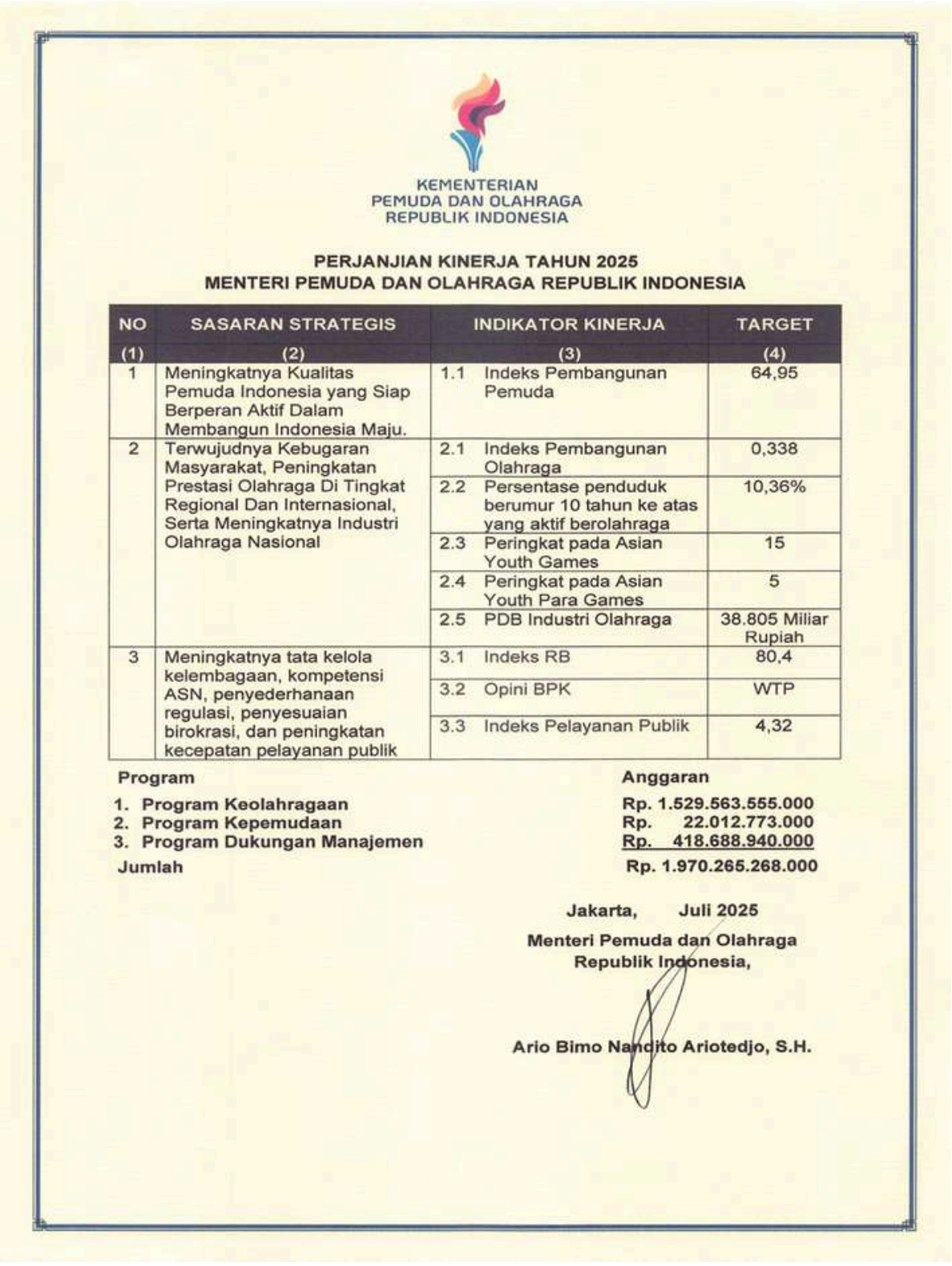
berjanji akan mewujudkan target kinerja sasaran strategis yang sesuai perjanjian kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Juli 2025

Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Gambar 2.9 Perjanjian Kinerja Kemenpora Tahun 2025



KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pemuda Indonesia yang Siap Berperan Aktif Dalam Membangun Indonesia Maju.	1.1 Indeks Pembangunan Pemuda	64,95
2	Terwujudnya Kebugaran Masyarakat, Peningkatan Prestasi Olahraga Di Tingkat Regional Dan Internasional, Serta Meningkatnya Industri Olahraga Nasional	2.1 Indeks Pembangunan Olahraga	0,338
		2.2 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	10,36%
		2.3 Peringkat pada Asian Youth Games	15
		2.4 Peringkat pada Asian Youth Para Games	5
		2.5 PDB Industri Olahraga	38.805 Miliar Rupiah
3	Meningkatnya tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik	3.1 Indeks RB	80,4
		3.2 Opini BPK	WTP
		3.3 Indeks Pelayanan Publik	4,32

Program	Anggaran
1. Program Keolahragaan	Rp. 1.529.563.555.000
2. Program Kepemudaan	Rp. 22.012.773.000
3. Program Dukungan Manajemen	Rp. 418.688.940.000
Jumlah	Rp. 1.970.265.268.000

Jakarta, Juli 2025

Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

Gambar 2.10 Perjanjian Kinerja Kemenpora Tahun 2025

POSTUR ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025

Tabel 2.1 Pagu Anggaran Kemenpora TA 2025

Program	PAGU 2025	
	Pagu Awal	Pagu Akhir
092 01 DA Program Keolahragaan	1.826.025.688.000	1.751.313.688.000
092 01 DB Program Kepemudaan	189.152.878.000	75.300.000.000
092 01 WA Program Dukungan Manajemen	433.167.250.000	473.770.252.000
092 06 DA Program Keolahragaan (Badan Layanan Umum)	30.000.000.000	108.450.440.000
Total	**2.478.345.816.000**	**2.408.834.380.000**

1. Program Keolahragaan (092.01.DA)

Pagu Program Keolahragaan mengalami penurunan dari Rp1.826.025.688.000 menjadi Rp1.751.313.688.000, atau berkurang Rp74.712.000.000 (turun 4,09%). Penurunan yang relatif moderat ini mencerminkan kebijakan efisiensi dan penajaman belanja agar lebih berorientasi pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan prestasi olahraga, tanpa mengurangi substansi pembinaan secara keseluruhan.

2. Program Kepemudaan (092.01.DB)

Pagu anggaran Program Kepemudaan turun signifikan dari Rp189.152.878.000 menjadi Rp75.300.000.000, atau berkurang Rp113.852.878.000 (turun 60,19%). Penurunan ini menunjukkan adanya restrukturisasi kebijakan dan *refocusing* kegiatan kepemudaan, dengan pendekatan yang lebih selektif, kolaboratif, serta mengedepankan sinergi lintas sektor dan pemanfaatan sumber pendanaan non-APBN.

3. Program Dukungan Manajemen (092.01.WA)

Pagu anggaran Program Dukungan Manajemen pada Tahun Anggaran 2025 meningkat dari Rp433.167.250.000 menjadi Rp473.770.252.000, atau bertambah Rp40.603.002.000 (naik 9,38%). Kenaikan ini menunjukkan adanya penguatan pada fungsi dukungan internal kementerian, terutama dalam peningkatan kualitas tata kelola, layanan administrasi, perencanaan, serta sistem akuntabilitas kinerja. Penambahan anggaran juga mengindikasikan kebutuhan untuk memastikan keberlangsungan reformasi birokrasi dan optimalisasi layanan organisasi dalam mendukung pelaksanaan program teknis

4. Program Keolahragaan pada Badan Layanan Umum (BLU) (092.06.DA)

Pagu pada skema BLU meningkat tajam dari Rp30.000.000.000 menjadi Rp108.450.440.000, atau bertambah Rp78.450.440.000 (naik 261,50%). Kenaikan yang sangat signifikan ini menandakan penguatan peran BLU sebagai *service delivery* unit yang lebih fleksibel dan produktif dalam pengelolaan fasilitas, layanan pelatihan, dan pembinaan olahraga berbasis kinerja serta potensi penerimaan layanan.

Tabel 2.2 Pengalokasian Anggaran Kemenpora TA 2025

NO	Satuan Kerja	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Sekretariat	396.181.252.000	447.070.252.000
2	Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	205.138.876.000	81.300.000.000
3	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	70.126.232.000	80.000.000.000
4	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	1.597.588.456.000	1.576.002.188.000
5	Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga	67311000000	67.311.000.000
6	UPT	0	0
7	LPDUK	30.000.000.000	108.450.440.000
8	Dekonsentrasi	112.000.000.000	48.700.500.000
	KEMENPORA	**2.478.345.816.000**	**2.408.834.380.000**

Pengalokasian Anggaran Kemenpora Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025, terdapat dinamika penyesuaian pagu pada masing-masing satuan kerja sebagai bagian dari kebijakan efisiensi, *refocusing* program, dan penguatan belanja yang lebih produktif. Uraian perubahan pagu adalah sebagai berikut:

Sekretariat
Pagu anggaran meningkat dari Rp396.181.252.000 menjadi Rp447.070.252.000, atau bertambah Rp50.889.000.000 (naik 12,84%). Kenaikan ini menunjukkan penguatan fungsi dukungan manajemen, termasuk peningkatan layanan tata kelola, perencanaan, keuangan, serta penguatan sistem akuntabilitas dan reformasi birokrasi guna menopang pelaksanaan program teknis.

Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan
Pagu anggaran turun dari Rp205.138.876.000 menjadi Rp81.300.000.000, atau berkurang Rp123.838.876.000 (turun 60,37%). Penurunan signifikan ini mencerminkan kebijakan *refocusing* kegiatan kepemudaan menjadi lebih selektif, dengan optimalisasi sinergi program lintas kementerian/lembaga dan pemanfaatan skema kolaboratif non-APBN.

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
Pagu meningkat dari Rp70.126.232.000 menjadi Rp80.000.000.000, atau bertambah Rp9.873.768.000 (naik 14,08%). Kenaikan ini diarahkan untuk memperkuat gerakan pembudayaan olahraga masyarakat dan peningkatan partisipasi publik dalam aktivitas olahraga sebagai bagian dari pembangunan SDM sehat dan produktif.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Pagu mengalami penurunan dari Rp1.597.588.456.000 menjadi Rp1.576.002.188.000, atau berkurang Rp21.586.268.000 (turun 1,35%). Penyesuaian ini relatif kecil dan menunjukkan rasionalisasi belanja tanpa mengurangi fokus utama pada pembinaan prestasi olahraga nasional dan dukungan terhadap atlet serta ajang kompetisi prioritas.

Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga
Pagu anggaran tetap sebesar Rp67.311.000.000 (tidak mengalami perubahan / 0%).
Hal ini menunjukkan konsistensi dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri olahraga, termasuk kewirausahaan olahraga dan kemitraan dengan sektor swasta.

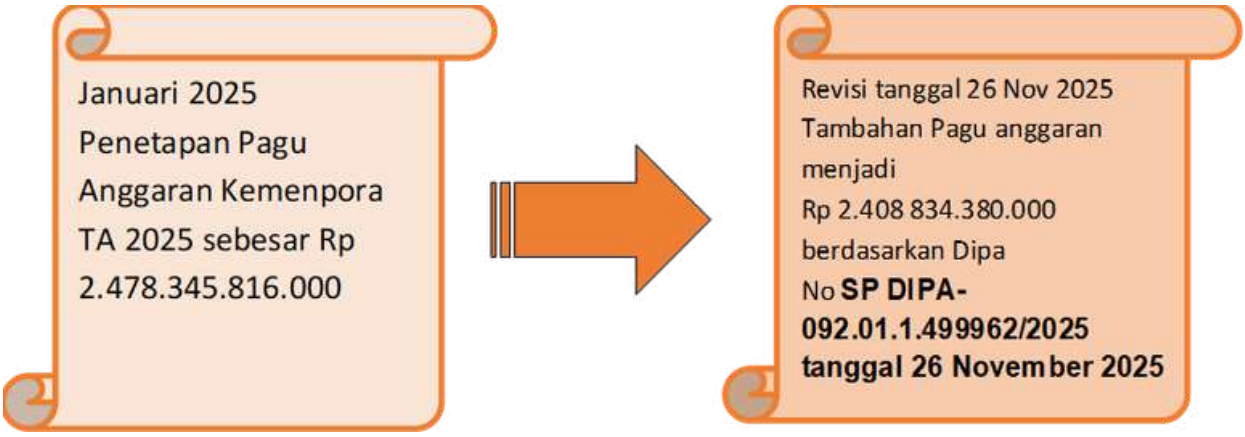
Pengalokasian Anggaran Kemenpora Tahun Anggaran 2025

LPDUK (Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan)
Pagu meningkat tajam dari Rp30.000.000.000 menjadi Rp108.450.440.000, atau bertambah Rp78.450.440.000 (naik 261,50%). Kenaikan sangat signifikan ini menunjukkan penguatan peran LPDUK sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dalam mengelola layanan dan pendanaan keolahragaan secara lebih fleksibel, profesional, dan berbasis kinerja.

Dekonsentrasi
Pagu menurun dari Rp112.000.000.000 menjadi Rp48.700.500.000, atau berkurang Rp63.299.500.000 (turun 56,52%). Penurunan ini mengindikasikan penataan ulang mekanisme pelaksanaan kegiatan di daerah dengan pendekatan yang lebih terpusat, efisien, dan berbasis output prioritas nasional.

Untuk **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**, tidak terdapat alokasi anggaran baik pada pagu awal maupun pagu akhir Tahun Anggaran 2025.

Secara keseluruhan, pagu Kemenpora TA 2025 turun dari Rp2.478.345.816.000 menjadi Rp2.408.834.380.000, atau berkurang Rp69.511.436.000 (turun 2,80%). Penurunan total yang relatif terbatas ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi dilakukan secara terukur melalui realokasi dari belanja administratif dan dekonsentrasi ke penguatan layanan strategis, khususnya melalui mekanisme BLU dan dukungan manajemen, sehingga pencapaian sasaran pembangunan kepemudaan dan keolahragaan tetap terjaga.



Gambar 2.11 Perjalanan Pagu Anggaran Kemenpora TA 2025

Pengalokasian Anggaran Kemenpora Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan penetapan dan revisi anggaran Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga mengalami penyesuaian sebagai berikut:

Pada Januari 2025, Pemerintah menetapkan pagu awal anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga TA 2025 sebesar Rp2.478.345.816.000. Penetapan ini menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan, termasuk dukungan manajemen, pembinaan pemuda, pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi, serta pengembangan industri olahraga.

Selanjutnya, dalam perjalanan tahun anggaran dilakukan penyesuaian melalui mekanisme revisi anggaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan riil pelaksanaan program, kebijakan efisiensi belanja pemerintah, serta optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih fokus pada kegiatan prioritas dan berorientasi hasil (*outcome oriented*).

Melalui Revisi DIPA tanggal 26 November 2025, pagu anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga mengalami perubahan menjadi Rp2.408.834.380.000, sebagaimana tercantum dalam DIPA Nomor SP DIPA-092.01.1.499962/2025 tanggal 26 November 2025. Dengan demikian, terdapat penurunan pagu sebesar Rp69.511.436.000 atau sekitar 2,80% dari pagu awal.

Penyesuaian ini mencerminkan langkah pemerintah dalam melakukan penajaman program, efisiensi belanja non-prioritas, serta realokasi sumber daya menuju kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan layanan kepemudaan dan keolahragaan, penguatan tata kelola, serta dukungan terhadap peningkatan prestasi olahraga nasional. Revisi anggaran tersebut tetap menjaga kesinambungan pencapaian target kinerja kementerian, dengan memastikan bahwa alokasi yang tersedia dimanfaatkan secara lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

03



A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan melalui dokumen perencanaan kinerja dengan mengukur pencapaian target. Penilaian atas ketercapaian target indikator kinerja menggunakan skala ordinal berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 133 Tahun 2024 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Ketercapaian Target Indikator

% CAPAIAN REALISASI OUTPUT/INDIKATOR	KRITERIA
x ≥ 100	Tercapai/Sangat Baik
90≤x<100	*On the Track*/Baik
80≤x<90	Perlu Percepatan/Cukup
<80%	Perlu upaya strategis/Kurang

B. CAPAIAN KINERJA

Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pemuda dan Olahraga Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Menteri Pemuda dan Olahraga merupakan kinerja tahun ke-1 (tahun pertama) pada periode Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga 2025-2029. Secara rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah 103,40% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

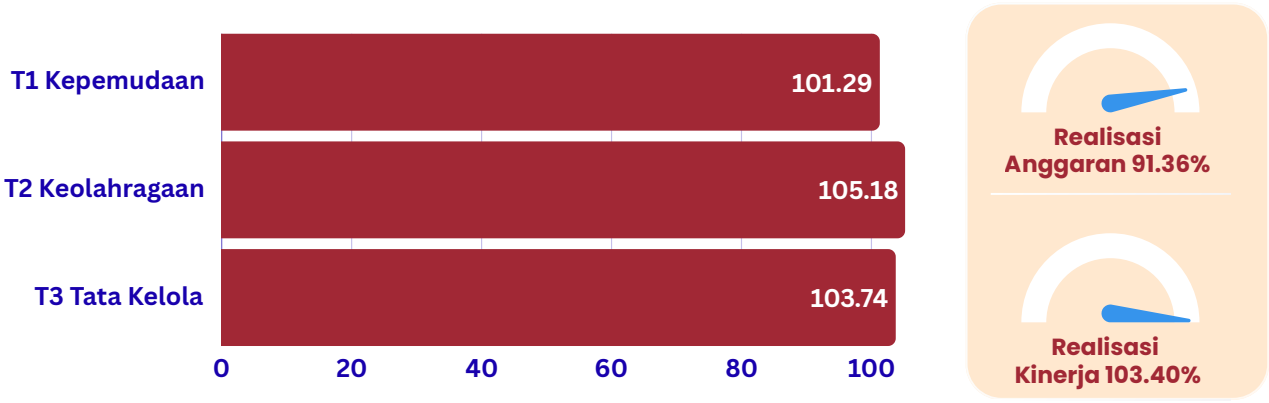
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenpora

Tujuan 1: Membangun pemuda yang berkarakter dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.					
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang berkarakter dan berperan aktif dalam membangun Indonesia maju.					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Kriteria**
1,1	Indeks Pembangunan Pemuda	64,95	65,79	101,29%	Sangat Baik

Tujuan 2: Membangun budaya olahraga di masyarakat, meningkatkan prestasi olahraga di tingkat dunia, dan memperkuat ekosistem industri olahraga untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.					
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada pertumbuhan ekonomi nasional					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Kriteria**
2,1	Indeks Pembangunan Olahraga	0,338	0,363	107,40%	Sangat Baik
2,2	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	10,36%	9,06%	87,45%	Cukup
2,3	Peringkat pada Asian Youth Games	15	15	100%	Baik
2,4	Peringkat pada Asian Youth Para Games	5	6	80%	Cukup
2,5	PDB Industri Olahraga	38.805 Miliar Rupiah	58.620 Miliar Rupiah	151,06%	Sangat Baik
Tujuan 3: Mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional dengan didukung oleh digitalisasi sistem, penyederhanaan regulasi, dan penguatan kapasitas aparatur.					
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik					
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Kriteria**
3,1	Indeks RB	80,4	82,91*	103,12%	Sangat Baik
3,2	Opini BPK	WTP	WTP	100%	Baik
3,3	Indeks Pelayanan Publik	4,32	4,67	108,1%	Sangat Baik

*Prognosa Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora Tahun 2025

PROFIL PEMENUHAN TUJUAN PEMBANGUNAN



Grafik 3.1 Capaian Sasaran Strategis Kemenpora berdasarkan Tujuan Pembangunan

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja dan sasaran strategis di atas, **kesimpulan capaian kinerja Kemenpora 2025** adalah sebagai berikut:

Penguatan Kapasitas Pemuda dan Tata Kelola Kelembagaan

Kemenpora berhasil melampaui target pembangunan kepemudaan dengan raihan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebesar 65,79 (101,29% dari target). Keberhasilan ini selaras dengan pencapaian di sektor tata kelola internal yang menunjukkan profesionalisme tinggi, dibuktikan dengan perolehan Opini WTP dari BPK dan Indeks RB yang mencapai 82,91 (hampir 100% dari target). Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan karakter pemuda didukung oleh sistem birokrasi yang semakin sehat dan transparan.

Lompatan Signifikan Industri Olahraga

Sektor ekonomi olahraga menjadi primadona capaian tahun ini. Indikator PDB Industri Olahraga mencatatkan realisasi sebesar Rp58.620 Miliar, jauh melampaui target awal sebesar Rp38.805 Miliar (capaian 151,06%). Lonjakan ini merefleksikan keberhasilan kebijakan strategis, termasuk dampak integrasi program seperti Indonesia Sport Summit, dalam mengomersialisasi ekosistem olahraga nasional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru.

Dinamika Prestasi dan Budaya Olahraga

Pada sektor prestasi, Indonesia menunjukkan konsistensi di level regional dengan memenuhi target peringkat 15 besar pada Asian Youth Games. Namun, terdapat tantangan utama yang memerlukan perhatian khusus di masa mendatang yaitu partisipasi Masyarakat berolahraga dengan indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga baru mencapai 9,06%, belum memenuhi target 10,36%.

Kemenpora tahun 2025 telah bertransformasi menjadi kementerian yang tidak hanya berorientasi pada medali, tetapi juga pada kesejahteraan ekonomi dan tata kelola yang bersih. Kemenpora telah berhasil mentransformasi olahraga tidak hanya sebagai ajang prestasi, tetapi juga sebagai kontributor ekonomi yang tangguh melalui PDB Industri Olahraga. Meski demikian, rendahnya angka partisipasi aktif masyarakat berolahraga menjadi sinyal bahwa strategi "memasyarakatkan olahraga" perlu dipertajam guna mendukung target Indeks Pembangunan Olahraga yang saat ini sudah mencapai 0,363 melampaui dari target 0,338. Fokus tahun mendatang adalah mengonversi kesuksesan nilai ekonomi industri ini menjadi peningkatan partisipasi aktif olahraga masyarakat demi menjamin keberlanjutan prestasi dan kesehatan nasional secara holistik.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.1

INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)

Pindai QR untuk bahan dan data pendukung lainnya.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi salah satu tolok ukur dalam mengevaluasi dan memahami kondisi pemuda, serta merefleksikan capaian dari upaya pembangunan pemuda.

SASARAN STRATEGIS

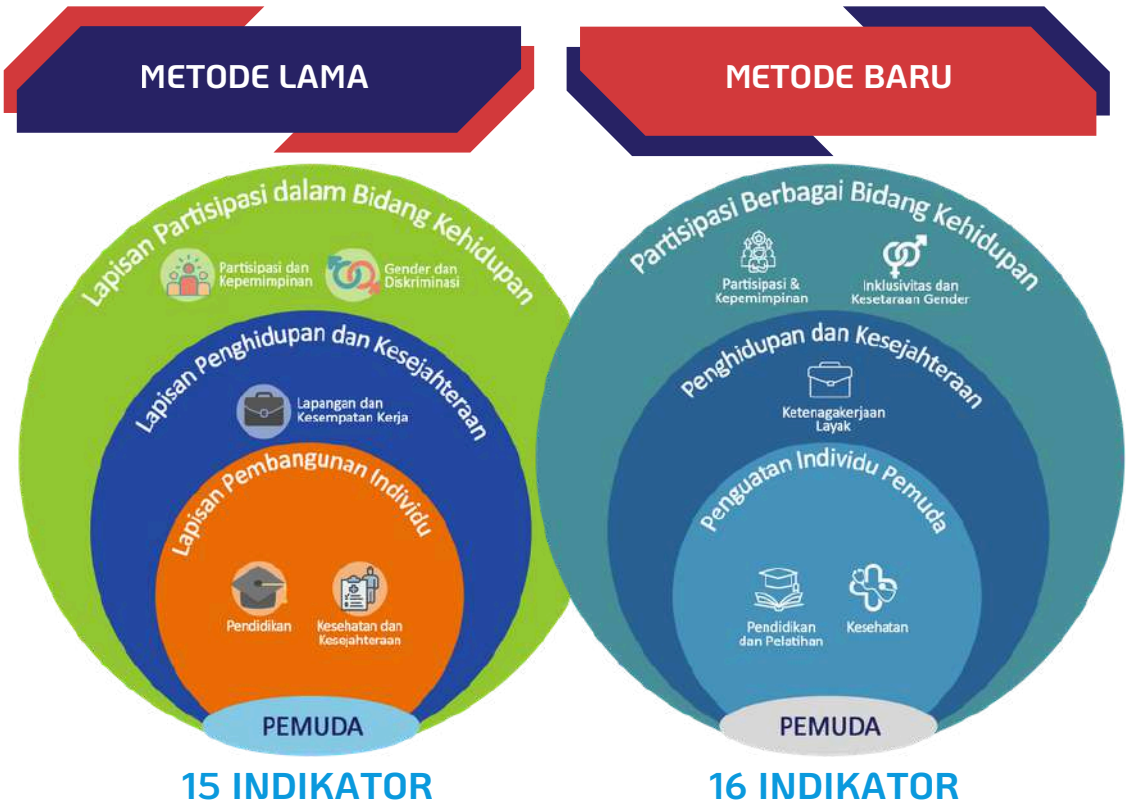
Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang berkarkter dan berperan aktif dalam membangun Indonesia maju.

KATA KUNCI TOPIK

- Capaian Kinerja
- Analisis Program/Kegiatan
- Outcome
- Nilai Efisiensi
- Perbandingan Capaian Kinerja
- Perbaikan Kinerja

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu indikator utama dalam Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mengukur kemajuan pembangunan kepemudaan di Indonesia. Instrumen ini penting karena mencerminkan kualitas hidup pemuda dalam berbagai aspek: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan inklusivitas. IPP juga telah diintegrasikan sebagai indikator dalam RPJMN 2025–2029 sebagai bagian dari Prioritas Nasional dan diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

IPP metode baru telah ditetapkan sebagai indikator Prioritas Nasional keempat pada periode RPJMN 2025-2029. Secara umum perbedaan antara IPP metode lama dan IPP metode baru terletak pada struktur, definisi operasional, ruang lingkup, indikator penyusun, metodologi penghitungan dan disagregasi datanya. IPP metode baru memungkinkan disagregasi data IPP hingga tingkat kabupaten/kota, yang sebelumnya hanya terbatas pada tingkat nasional dan provinsi. Perbedaan ini berimplikasi terhadap perbedaan nilai IPP yang dihitung menggunakan metode lama dan metode baru, sehingga perlu menjadi catatan keduanya tidak bisa diperbandingkan. Pedoman dan pengukuran serta penjelasan terkait Indeks Pembangunan Pemuda akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Indeks Pembangunan Pemuda yang masih berproses dalam kerangka kebijakan *Omnibus Law* terkait Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pelayanan Kepemudaan. Adapun perbedaan mendasar pada IPP metode baru sebagai berikut:





METODOLOGI

- Bobot *Equal Weight*
- Agregasi tingkat desil

- Bobot hasil AHP
- Agregasi tingkat persentil





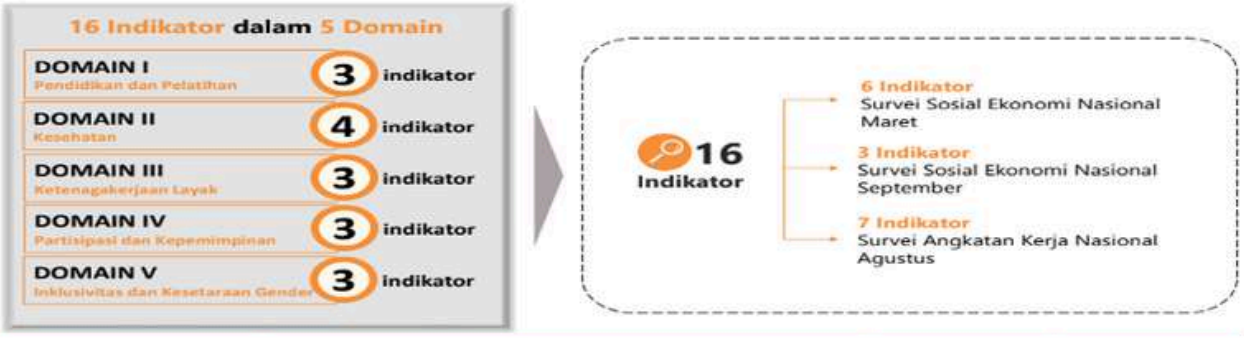
DISAGREGASI

Nasional dan Provinsi

Nasional, Provinsi & Kabupaten/Kota



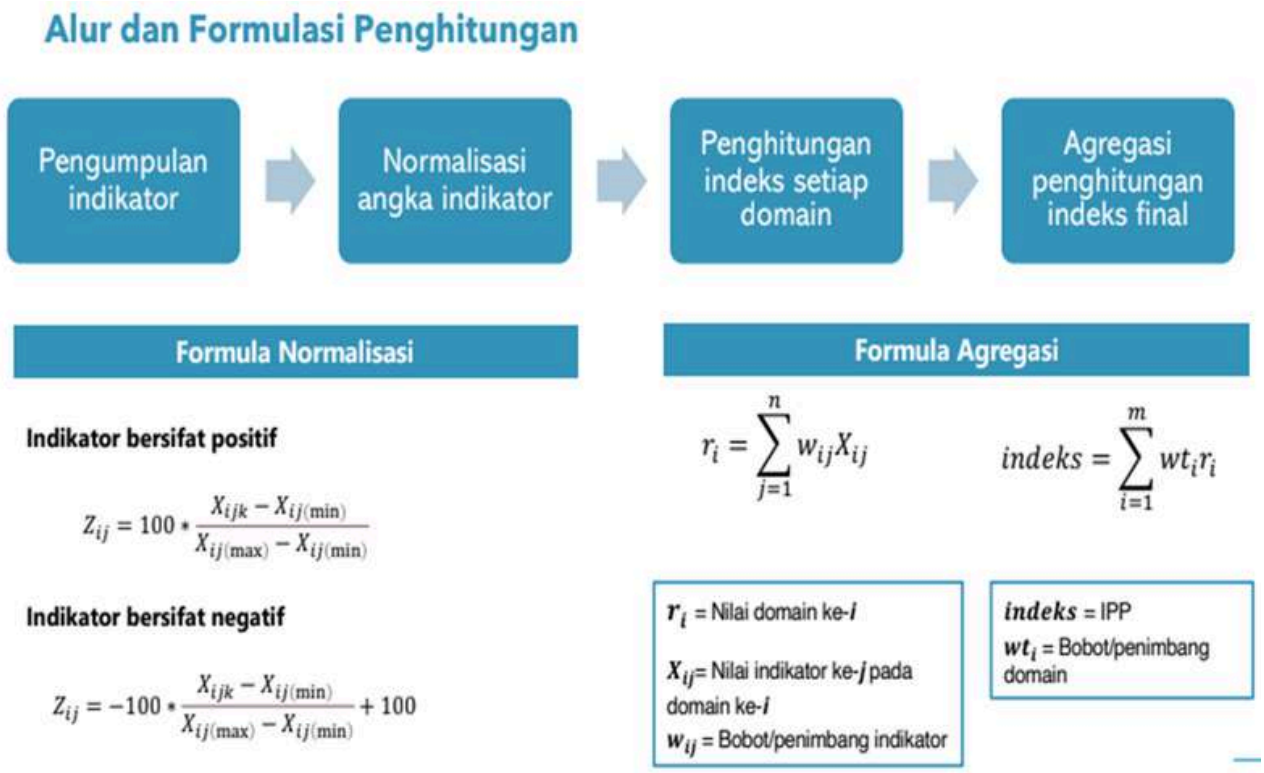
Grafik 3.2 Perbedaan Konsep IPP Metode Lama dan IPP Metode Baru



Domain		Indikator IPP		Bobot Indikator	Bobot Domain
(1)		(2)		(3)	(4)
1	Pendidikan dan Pelatihan	X1	Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	0,33	0,21
		X2	Persentase pemuda yang memiliki ijazah min SMA/sederajat atau lebih tinggi	0,34	
		X3	Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	0,33	
2	Kesehatan	X4	Angka Kesakitan Pemuda	0,26	0,20
		X5	Persentase Pemuda Merokok	0,23	
		X6	Persentase pemuda yang berolahraga	0,26	
		X7	Persentase Remaja Perempuan Sedang Hamil	0,25	
3	Ketenagakerjaan Layak	X8	Persentase pemuda NEET	0,35	0,20
		X9	Persentase pemuda setengah menganggur	0,32	
		X10	Rasio kewirausahaan pemuda	0,33	
4	Partisipasi dan Kepemimpinan	X11	Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0,34	0,20
		X12	Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi	0,33	
		X13	Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	0,33	
5	Inklusivitas dan Kesetaraan Gender	X14	Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	0,33	0,19
		X15	Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	0,35	
		X16	Persentase perkawinan anak	0,32	

Tabel 3.3 Domain dan Indikator IPP metode baru

Cara perhitungan IPP metode baru yaitu dengan tahapan sesuai bagan dibawah ini.



Grafik 3.3 Alur dan Formulasi Penghitungan IPP

Dalam proses penyusunan indeks, normalisasi memiliki peran untuk menstandardisasi angka-angka setiap indikator atau domain. Hal ini dimaksudkan agar capaian indikator atau domain dapat saling diperbandingkan. Setelah itu dilakukan metode agregasi penghitungan menggunakan metode agregasi aritmetik. Nilai IPP tingkat domain dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai indikator yang telah melalui proses normalisasi. Perhitungan IPP dilakukan melalui kolaborasi intensif antara Kemenpora dan pemangku kepentingan seperti BPS, BAPPENAS, Kemendagri dan kementerian/lembaga terkait guna menghitung dan menyusun data IPP yang valid dan terintegrasi.

CAPAIAN KINERJA INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA



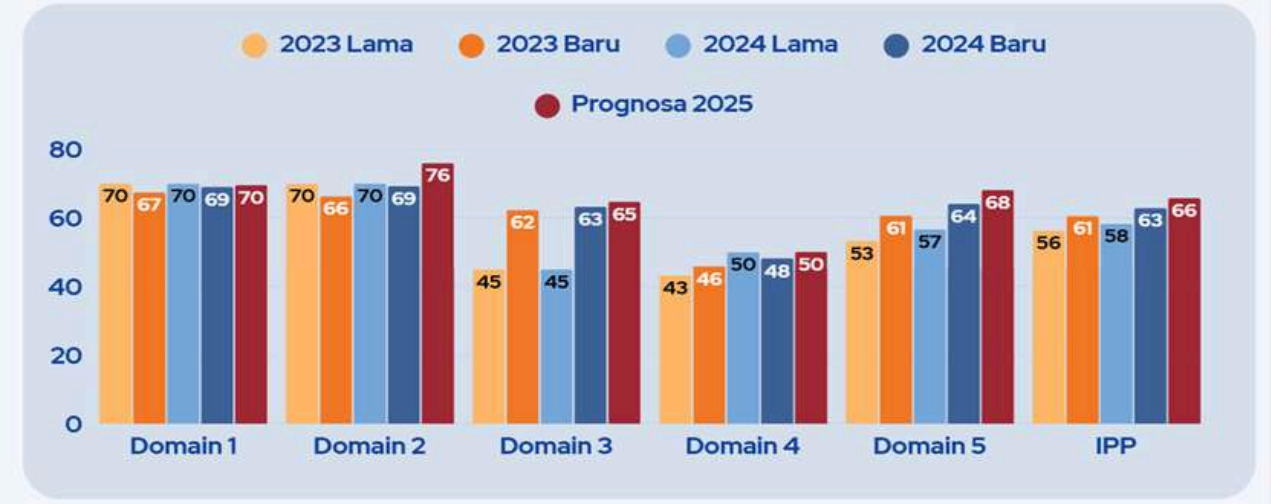
Data proyeksi IPP 2025 didasarkan hasil proyeksi setiap indikatornya, sehingga penetapan awal target pada dokumen RPJMN 2025-2029 adalah 65.16 hal itu dilakukan meskipun data yang diproyeksikan masih sementara, namun setelah adanya validasi data secara bersama oleh Kemenpora, BAPPENAS dan BPS maka targetnya disesuaikan menjadi 64.95 yang digunakan juga pada periode pelaporan 2025 sesuai Perjanjian Kinerja Menteri Pemuda dan Olahraga Tahun 2025.

Capaian IPP menunjukkan tren peningkatan secara nasional, dengan nilai indeks yang mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kemenpora telah menetapkan target nasional IPP yang ambisius dengan target pencapaian yang terus meningkat, menunjukan komitmen kuat terhadap pembangunan pemuda secara holistik. Capaian kinerja di tahun 2025 dengan nilai IPP sebesar 65.79 menunjukan bahwa Nilai IPP Nasional meningkat secara kontinu dari tahun ke tahun, apabila dibandingkan dengan capaian Indeks Pembangunan Pemuda di Indonesia tahun 2024 baik dengan metode baru sebesar 62.88 maupun metode lama sebesar 58,33. Ini menandakan kemajuan progresif pemuda di berbagai indikator pembangunan.



Grafik 3.4 Capaian IPP Nasional 7 Tahun Terakhir (2019 - 2025)

Hasil tersebut memperpanjang tren pencapaian IPP yang selalu meningkat selama 1 (satu) periode pembangunan 2020-2024. Secara umum IPP memang mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 52,67 menjadi 58,33 di tahun 2024 (Grafik 3.4), terdapat kenaikan sebesar 5,66 selama 5 tahun terakhir



Grafik 3.5 Perbandingan Capaian IPP pada tiap domain antara metode lama dan metode baru

Grafik ini menunjukkan perkembangan kinerja dalam lima sektor utama pembangunan manusia selama periode lima tahun dan menggambarkan **tren positif dalam capaian indeks**, di mana terdapat peningkatan berkelanjutan dari tahun ke tahun, baik dalam metode perhitungan lama maupun baru. Perubahan metodologi dari "Lama" ke "Baru" tampaknya memberikan gambaran skor yang lebih optimis atau mencerminkan penyesuaian indikator yang lebih relevan dengan kondisi lapangan.

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan bidang kepemudaan adalah koordinasi dan perhitungan IPP nasional serta implementasi rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah melalui kpelayanan kepemudaan dan pengembangan pendidikan kepramukaan. Pembangunan kepemudaan tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian sehingga kolaborasi terus dilakukan dengan puluhan kementerian/lembaga yang memiliki program terkait dengan kepemudaan, sehingga Kementerian Pemuda dan Olahraga berperan mengkoordinasikan atau mengorkestrasikan apa yang dilakukan oleh semua kementerian/lembaga terkait kepemudaan. Pembangunan kepemudaan tetap menjadi prioritas pembangunan dalam memajukan generasi muda Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang strategi pembangunan kepemudaan periode 2025–2029, Kemenpora menempatkan pengembangan karakter pemuda yang patriotik, gigih, dan berempati sebagai salah satu misi utama. Fokus ini meliputi peningkatan layanan kepemudaan yang inklusif, penguatan organisasi kepemudaan, kepemimpinan yang transformatif, serta pelibatan pemuda dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025, menjadi medium strategis untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut kepada generasi muda Indonesia sebagai momentum pendidikan nilai, patriotisme, dan kebersamaan dalam konteks pembangunan nasional.

Pemerintah juga mengapresiasi pemerintah daerah melalui penghargaan Wirasena 2025 kepada daerah dengan capaian IPP tertinggi atau terbaik dalam peningkatannya sebagai bentuk sinergi pusat–daerah. Penghargaan pertama yang dimulai dengan Wirasena 2025 diberikan untuk dua kategori yaitu:

A. Kategori Capaian IPP Tertinggi Tingkat Nasional 2024

Penghargaan ini diberikan kepada 10 provinsi dengan nilai indeks pembangunan pemuda paling unggul: DI Yogyakarta (Skor tertinggi: 74,83), Bali (68,00), Jawa Timur (61,00), Kepulauan Riau (60,83), Papua Barat (60,17), Sumatera Utara (59,33), Sulawesi Tenggara (58,67), Maluku Utara (58,00), Kalimantan Timur (58,00) dan Aceh (58,00)

B. Kategori Capaian Peningkatan IPP Tertinggi Tingkat Nasional 2024

Penghargaan ini diberikan kepada 10 provinsi yang berhasil mencatatkan lonjakan kenaikan skor IPP paling signifikan dibandingkan tahun sebelumnya: Kepulauan Riau (Naik 5,50 poin). Bali (Naik 5,33 poin), DKI Jakarta (Naik 5,00 poin), Jawa Timur (Naik 4,50 poin), Kalimantan Utara (Naik 4,17 poin), Papua (Naik 3,17 poin), Papua Barat (Naik 3,00 poin), Sumatera Utara (Naik 3,00 poin), Bangka Belitung (Naik 3,00 poin), Jawa Barat (Naik 2,67 poin)

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Upaya peningkatan IPP dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi IPP dalam perencanaan, serta peningkatan akses pemuda terhadap pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja. Namun capaian IPP masih terkendala oleh ketimpangan antar wilayah, belum optimalnya sinergi program lintas kementerian/lembaga, dan pemanfaatan IPP di tingkat daerah. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola dan fokus intervensi pembangunan kepemudaan secara berkelanjutan.

Hingga saat ini pembangunan kepemudaan belum sepenuhnya didukung oleh instrumen pengukuran yang komprehensif, terstandar, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional. Perbedaan definisi, keterbatasan data, serta belum terintegrasinya indikator pembangunan pemuda dalam perencanaan dan penganggaran menjadi tantangan utama. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kemenpora melakukan berbagai upaya salah satunya adalah kembali menempatkan posisi Kemenpora dari peran pelaksana program menjadi arsitek kebijakan reformasi struktural untuk mengatasi hambatan data dan koordinasi. Reformasi tata kelola ini mengintegrasikan instrumen hukum, mekanisme koordinasi, dan sinkronisasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem pelayanan kepemudaan yang terpadu.

1. **Reformasi Instrumen Hukum & Standarisasi (Pondasi Tata Kelola).**

Kemenpora memperkuat aspek regulasi sebagai landasan bagi seluruh pemangku kepentingan:

a. Penyusunan Rancangan Revisi Peraturan Undang-Undang tentang Kepemudaan dan Kepramukaan;
b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan sebagai pembaharuan/perubahan dari Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2022. Rancangan Peraturan Presiden tentang Koodinasir Lintas Sektor menjadi kunci transformasi karena mengatur ulang struktur pengarah dan pelaksana yang sebelumnya tersegmentasi. Hingga akhir tahun 2025, Rancangan Peraturan Presiden tentang Koodinasir Lintas Sektor beserta Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan sebagai lampiran Perpres telah siap diajukan kepada Bapak Presiden, dengan beberapa dimensi perubahan penting, antara lain terkait :
    i. restrukturisasi tim pengarah dan tim pelaksana;
    ii. pembaruan dalam RAN dimana periodisasinya disesuaikan menjadi 2025-2029;
    iii. perumusan ulang mekanisme sistem monitoring dan evaluasi;
    iv. peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha; dan
    v. perumusan ulang batas waktu penyusunan RAD melalui penguatan komitmen daerah.
c. Penyempurnaan dasar hukum penghitungan IPP melalui penyusunan Permenpora yang lebih seragam dan komprehensif agar praktik pengukuran IPP menjadi lebih konsisten di seluruh daerah:
    i. Pelibatan lebih luas lintas kementerian/lembaga dalam proses perhitungan data IPP agar hasil pengukuran lebih akurat dan mencerminkan konteks pembangunan kepemudaan secara nasional.
    ii. Penguatan kolaborasi pusat–daerah melalui penghargaan dan program apresiasi (Wirasena) yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian IPP di tingkat lokal.
d. Penyusunan NSPK Terintegrasi: Transformasi dari kebijakan yang bersifat umum menjadi pedoman teknis yang spesifik (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria). Ini mencakup standar penghargaan (Wirasena), peningkatan kapasitas kader nasional-daerah, hingga isu tematik global seperti gender dan anti-diskriminasi.

2. **Transformasi Mekanisme Koordinasi (Orkestrasi Lintas Sektor).**

Kegiatan rapat koordinasi tidak lagi hanya menjadi forum pertemuan, melainkan alat sinkronisasi operasional, yang dilakukan antara lain:

a. Sinkronisasi Lintas Level (Pusat-Daerah). Melalui Rakornas dan penyelarasan RAN ke RAD, Kemenpora memastikan kebijakan di tingkat pusat tidak terputus saat dieksekusi di daerah. Hal ini krusial untuk memastikan stabilitas dan kontinuitas program kepemudaan di seluruh wilayah.
b. Sinergi Publik-Swasta. Perluasan koordinasi di luar pemerintahan (seperti koordinasi badan usaha di Kabupaten Bogor) menunjukkan transformasi tata kelola yang inklusif, dimana sektor swasta ditarik masuk sebagai kontributor aktif dalam pelayanan kepemudaan, bukan sekadar penonton.

3. **Sinkronisasi Program Tematik (Penguatan Substansi).**

Tata kelola baru ini memastikan bahwa setiap intervensi memiliki parameter keberhasilan yang jelas melalui sinkronisasi IPP. Penyelarasan intervensi domain IPP dilakukan melalui rapat koordinasi antara lain transformasi organisasi maupun ketenagakerjaan layak yang difokuskan untuk mendongkrak skor Domain Partisipasi, Kepemimpinan, dan Ketenagakerjaan pada Indeks Pembangunan Pemuda. Selain itu melalui instrumen seperti Indonesia *Future Network* (IFN), tata kelola diarahkan untuk membangun jejaring yang mendukung partisipasi pemuda Indonesia di kancah global secara sistematis dan berkeadilan.

Pemuda merupakan aset strategis dan penentu keberhasilan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dengan jumlah yang besar dan potensi yang tinggi, pemuda berperan sebagai katalisator transformasi sosial, ekonomi, teknologi, kewirausahaan, serta penguatan ideologi, persatuan, dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045, khususnya dalam konteks pembangunan sumber daya manusia unggul dan optimalisasi bonus demografi.

Dalam pelaksanaannya, program pembangunan kepemudaan untuk meningkatkan nilai IPP pada setiap domain IPP dilakukan melalui pemetaan capaian nilai IPP dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti Kemenpora dengan program kegiatan kepemudaan menggunakan sumber daya anggaran yang dialokasikan tentunya juga berkolaborasi dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Program dikelompokkan berdasarkan peningkatan domain IPP dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas hidup pemuda.

Domain Ketenagakerjaan Layak merupakan salah satu indikator krusial dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Saat ini, tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan akses modal, terbatasnya keterampilan digital, serta perlunya perlindungan bagi kelompok rentan. Kemenpora hadir tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi sebagai katalisator untuk mengubah pemuda dari pencari kerja (*job seeker*) menjadi pencipta lapangan kerja (*job creator*).

Untuk mendongkrak nilai IPP pada domain ini, Kemenpora mengimplementasikan strategi "Kewirausahaan Berkeadilan" yang juga mengintervensi pada domain Inklusifitas melalui pengelompokan ima program/kegiatan seperti pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Intervensi Program/Kegiatan Kemenpora Bagian 1

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN & CAPAIAN	FOKUS UTAMA
Penumbuhan Mindset & Literasi (Kuliah Kewirausahaan)	600 Pemuda	Menanamkan pola pikir inovatif sejak dini. Ini adalah fondasi agar pemuda memiliki daya tahan dan kreativitas dalam menghadapi dinamika pasar kerja
Akselerasi & Permodalan (Kader Kewirausahaan Nasional)	1.228 Kader	Program ini menjadi mesin utama peningkatan IPP pada domain Kesempatan Kerja dan Ketenagakerjaan Layak. Melalui pendampingan bisnis yang intensif dan akses permodalan, Kemenpora memastikan unit usaha pemuda dapat naik kelas dan menyerap tenaga kerja lokal.
Inklusifitas Program Kewirausahaan	600 peserta program Wirausaha Disabilitas dan 800 peserta program Wirausaha Miskin Ekstrem	Memberikan akses setara agar pemuda disabilitas mandiri secara ekonomi dan memiliki daya saing yang sama di pasar kerja dan Melakukan intervensi langsung di wilayah prioritas kemiskinan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi mandiri

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN & CAPAIAN	FOKUS UTAMA
Digitalisasi Ekonomi melalui Sentra Digital (DIGDAYA)	200 Pemuda	Membekali pemuda dengan keahlian *digitalpreneurship* (Literasi digital, konten kreator, dan *digitalpreneur*). Hal ini bertujuan agar pemuda mampu mengoptimalkan ekosistem digital untuk menciptakan nilai ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
Kecakapan Hidup & Kreativitas (*Skill & Creativity*)	512 peserta *Youth Edulife Skill* (YES) dan 141 duta pemuda kreatif	Memfasilitasi pemuda bekerja sama dengan Plan Indonesia & Organisasi Kepemudaan seperti Fatayat NU, PMII, dll) dengan fokus pada pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI).

Kemenpora meyakini bahwa pembangunan sumber daya manusia unggul tidak akan lengkap tanpa ketahanan mental yang kokoh. Dalam upaya mendongkrak skor IPP pada Domain Kesehatan, Kemenpora bergeser dari sekadar penanganan kesehatan fisik menuju pendekatan holistik yang menyentuh "ruang privat" pemuda untuk memastikan mereka cerdas secara intelektual, namun juga tangguh secara jiwa. Melalui tiga inisiatif utama, Kemenpora melakukan intervensi langsung pada isu-isu krusial yang mempengaruhi kualitas hidup pemuda seperti yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Intervensi Program/Kegiatan Kemenpora Bagian 2

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN & CAPAIAN	FOKUS UTAMA
Olahrasa Youth Mental Health (Ketahanan Psikologis)	100 peserta pemuda	Program ini menjadi laboratorium pengelolaan emosi. Fokus utamanya adalah membekali pemuda dengan kemampuan adaptif dalam menghadapi tekanan sosial dan dinamika kehidupan, sehingga tercipta generasi yang memiliki stabilitas emosional tinggi.
Keluarga Muda Berdaya (Kesehatan Reproduksi)	440 peserta pemuda	Program ini menyasar hulu dari permasalahan kependudukan dengan melakukan sosialisasi intensif terkait pencegahan kehamilan usia remaja. Dengan pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi, pemuda diharapkan mampu mengambil keputusan bertanggung jawab demi masa depan yang lebih terencana.
Rembuk Pemuda Anti Merokok (Pengendalian Konsumsi)	170 peserta pemuda	Inisiatif ini tampil inovatif dengan mengintegrasikan adaptasi AI untuk memetakan dan mengendalikan konsumsi rokok di kalangan pemuda. Ini adalah langkah konkret melindungi generasi muda dari ancaman adiksi yang dapat menghambat produktivitas nasional.

Upaya Kemenpora dalam Domain Kesehatan ini adalah investasi jangka panjang untuk mengoptimalkan bonus demografi. Dengan memastikan pemuda memiliki kesehatan mental yang stabil, pemahaman reproduksi yang sehat, dan fisik yang terbebas dari adiksi, kita sedang membangun fondasi bagi manusia unggul yang siap membawa Indonesia menuju kemajuan di tahun 2045.

Peningkatan nilai IPP pada Domain Partisipasi dan Kepemimpinan bukan sekadar mengejar angka keterlibatan, melainkan upaya Kemenpora untuk memastikan pemuda hadir sebagai solusi atas tantangan sosial. Kemenpora bertransformasi dari penyedia kegiatan menjadi pembangun ekosistem yang memungkinkan pemuda memimpin di tingkat lokal, nasional, hingga global. Intervensi Kemenpora dilakukan melalui program/kegiatan yang dikelompokan ke dalam tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Penguatan Kapasitas Kepemimpinan dan Organisasi. Kemenpora memperkuat struktur kepemimpinan pemuda melalui pendekatan yang terstandar dan berkelanjutan:
   a. Pelatihan Kepeloporan dan Panduan Pemuda Pelopor Desa. Melalui kolaborasi strategis dengan Kemendesa PDTT, Kemenpora menciptakan acuan komprehensif agar pemuda desa mampu menciptakan inovasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat desa secara inklusif.
   b. Pendampingan dan Tata Kelola OKP. Fokus pada penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan (OKP). Dengan tata kelola yang profesional dan akuntabel, OKP diharapkan menjadi wadah kaderisasi yang efektif dan selaras dengan kebijakan pelayanan kepemudaan nasional.
   c. *Collab Rangers.* Mengarahkan kepemimpinan pemuda pada isu masa depan, yaitu kelestarian lingkungan, melalui pendekatan kolaboratif dan kesiapsiagaan bencana.

2. Penanaman Karakter Bangsa dan Moderasi Beragama. Kepemimpinan pemuda Indonesia harus berakar pada nilai-nilai kebangsaan yang inklusif:
   a. Pendidikan Kader Bela Negara dan Bakti Pemuda Nusantara. Program ini membentuk karakter pemuda yang cinta tanah air dan siap menjaga persatuan. Melalui Bakti Pemuda Nusantara, pemuda lintas daerah dipertemukan untuk melakukan pengabdian nyata, memperkuat interaksi lintas budaya, dan menumbuhkan rasa persaudaraan nasional.
   b. Moderasi Beragama. Membekali pemuda dengan pemahaman tentang kemajemukan. Di tengah keberagaman, pemuda dipersiapkan menjadi jembatan dialog untuk menjaga stabilitas sosial dan perdamaian di masyarakat.

3. Mobilitas dan Standarisasi Kebijakan. Untuk menjamin kualitas partisipasi yang setara di seluruh Indonesia, Kemenpora melakukan pembaruan instrumen kebijakan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP). Melalui penetapan Petunjuk Pelaksanaan tahun 2025, Kemenpora menjamin kepastian dan keseragaman kebijakan pusat-daerah. PPAP bukan sekadar mobilitas fisik, melainkan ruang bagi pemuda untuk menyerap praktik terbaik pembangunan dari provinsi lain dan menerapkannya kembali di daerah asal.

Intervensi pada domain ini secara langsung akan mendongkrak skor IPP melalui indikator kegiatan organisasi dan partisipasi pemuda dalam forum kemasyarakatan. Kemenpora berkomitmen untuk terus mencetak *Agent of Change* yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas kebangsaan yang kuat demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Analisis keberhasilan Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2025

Upaya-upaya terkait program/kegiatan pelayanan kepemudaan yang sudah dilakukan Kemenpora memperlihatkan transformasi strategi Kemenpora yang bergeser dari sekadar pelaksanaan kegiatan menjadi intervensi berbasis regulasi dan kolaborasi sistemik. Peningkatan nilai IPP tahun 2025 merupakan hasil dari sinkronisasi kebijakan yang koheren. Capaian tahun 2025 juga menunjukkan intervensi langsung pada domain-domain kunci IPP. Pembangunan kepemudaan tahun 2025 telah bergeser dari sekadar kegiatan seremonial menjadi intervensi berbasis data (IPP) dan kolaborasi lintas sektoral.

Kemenpora berhasil mengubah tantangan koordinasi menjadi peluang kolaborasi melalui penguatan regulasi dan pemanfaatan teknologi digital pada pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui sinergi lintas sektoral, Kemenpora optimis dapat meningkatkan kualitas hidup pemuda Indonesia secara signifikan sebagai katalisator transformasi nasional. Penggunaan teknologi (*AI* dan *LMS*) serta keberpihakan pada kelompok rentan (disabilitas & miskin ekstrem) menjadi nilai tambah utama dalam mencapai target Indonesia Emas 2045, dan sebagai catatan, pelaksanaan kegiatan pembangunan pemuda ini juga dilakukan secara inklusif, tanpa meninggalkan seorang pun di belakang (*no one left behind*).

Keberhasilan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan nilai IPP melalui upaya yang sudah dijabarkan juga ditemui beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Kelemahan Instrumen Pengukuran di tingkat Kabupaten/Kota. Instrumen pengukuran pembangunan pemuda belum sepenuhnya menggambarkan kondisi pembangunan pemuda di tingkat kabupaten/kota, sehingga meskipun nilai IPP sudah teragregasi di tingkat kabupaten/kota masih diperlukan upaya dan sosialisasi terkait pedoman pengukuran ini melibatkan Dinas Terkait dan Bappeda.
2. Kekuatan Hukum yang Belum Mengikat. Belum adanya regulasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara nasional menyebabkan implementasi kebijakan di tingkat lokal seringkali tidak seragam.
3. Hambatan Koordinasi Lintas Sektor (Silofikasi). Belum terintegrasinya perencanaan & anggaran, indikator pembangunan pemuda seringkali belum menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di K/L lain maupun Pemerintah Daerah.

4. Tantangan Sinergi Pusat-Daerah. Belum terintegrasinya perencanaan dan anggaran, indikator pembangunan pemuda seringkali belum menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di K/L lain maupun Pemerintah Daerah. Masih terdapat celah (*gap*) dalam komitmen Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dan menetapkan batas waktu penyusunan yang tegas.
5. Restrukturisasi yang sedang berjalan. Proses transisi dari Perpres No. 43 Tahun 2022 ke Rancangan Peraturan Presiden Koordinasi Lintas Sektor memerlukan waktu untuk penyesuaian mekanisme monitoring dan evaluasi.
6. Skalabilitas Program. Meskipun program seperti *Youth Edulife Skills* (YES) atau Kreativesia memiliki kualitas baik, jumlah peserta yang terjangkau masih terbatas jika dibandingkan dengan total populasi pemuda Indonesia yang sangat besar (tantangan pemerataan). Tingginya tantangan dalam pengendalian konsumsi rokok dan kebutuhan akan penanganan kesehatan mental (*mental health*) yang lebih masif di kalangan pemuda, dan masih tingginya angka pemuda dalam kategori miskin ekstrem dan disabilitas yang membutuhkan intervensi khusus agar tidak tertinggal dalam domain ketenagakerjaan.

OUTCOME

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2025 menunjukkan penguatan pembangunan kepemudaan yang semakin terarah dan terintegrasi. Peningkatan IPP mencerminkan membaiknya kualitas pemuda dalam pendidikan dan keterampilan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja, serta partisipasi sosial. Capaian ini juga menandakan meningkatnya sinergi lintas sektor dan pemanfaatan IPP sebagai dasar kebijakan berbasis bukti. Secara keseluruhan, IPP 2025 memperkuat peran pemuda sebagai agen pembangunan dan fondasi pencapaian tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Capaian kinerja Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2025 menunjukkan terjadinya penguatan kualitas pembangunan kepemudaan secara nasional yang semakin terarah, terukur, dan berkelanjutan. Peningkatan nilai IPP mencerminkan membaiknya kondisi pemuda Indonesia dalam berbagai dimensi pembangunan, meliputi pendidikan dan keterampilan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan dan inklusi.

Secara *outcome*, capaian IPP Tahun 2025 menandakan meningkatnya kapasitas pemuda sebagai subjek dan agen pembangunan. Pemuda semakin memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pengembangan keterampilan, serta peluang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Hal ini berkontribusi pada penguatan daya saing pemuda dan kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional dan global.

Selain itu, peningkatan IPP menunjukkan semakin kuatnya sinergi lintas sektor dalam pembangunan kepemudaan. Integrasi indikator IPP dalam perencanaan dan pelaksanaan program lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah mendorong pendekatan pembangunan pemuda yang lebih holistik dan terkoordinasi. *Outcome* ini tercermin dari meningkatnya kesadaran dan pemanfaatan IPP sebagai instrumen kebijakan berbasis bukti dalam perumusan program kepemudaan.

Dari sisi pemerataan, capaian IPP Tahun 2025 juga memberikan dampak terhadap pengurangan kesenjangan pembangunan pemuda antar wilayah dan kelompok sasaran. Upaya peningkatan inklusivitas dalam program kepemudaan mendorong pemuda perempuan, pemuda penyandang disabilitas, serta pemuda di daerah tertinggal untuk memperoleh akses yang lebih setara terhadap layanan dan kesempatan pembangunan.

Lebih lanjut, *outcome* capaian IPP berkontribusi pada meningkatnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam proses pembangunan. Pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi semakin berperan aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan sosial, serta inovasi di bidang ekonomi, budaya, dan olahraga. Hal ini memperkuat peran strategis pemuda sebagai pilar pembangunan nasional.

Dengan demikian, capaian IPP Tahun 2025 tidak hanya merepresentasikan peningkatan indikator statistik, tetapi juga menghasilkan dampak nyata berupa penguatan kualitas sumber daya pemuda, meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, serta terbentuknya fondasi pembangunan kepemudaan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan visi Indonesia Emas 2045.

ANALISIS HASIL EFISIENSI



Kementerian Pemuda dan Olahraga mengalokasikan anggaran indikator Indeks Pembangunan Pemuda sebesar Rp80.650.876.000 dan blokir anggaran sebesar Rp. 36.638.103.000, berdasarkan pagu tersebut, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp43.647.310.520 atau 99.17%. Dengan indeks efisiensi sebesar 0,98, organisasi berhasil membuktikan prinsip *value for money*. Secara teknis, setiap satuan biaya yang dikeluarkan mampu menghasilkan output yang lebih besar dari target proporsionalnya. Skor ini menegaskan bahwa:

1. Tidak terjadi pemborosan anggaran dalam mencapai target kinerja utama.
2. Terdapat optimasi proses bisnis internal sehingga sasaran strategis dapat tercapai secara maksimal di tengah keterbatasan alokasi sumber daya.

Capaian efisiensi ini memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan intervensi kebijakan pada domain-domain IPP. Keberhasilan melampaui target kinerja menunjukkan bahwa program penguatan kapasitas pemuda memiliki daya jangkau yang lebih luas dari yang direncanakan semula, yang pada gilirannya diharapkan mampu mengakselerasi peningkatan skor IPP secara nasional.



Gambar 3.1 Pemberian penghargaan pemuda pada Hari Peringatan Sumpah Pemuda Tahun 2025

Tabel 3.6 Alokasi Rincian Output Intervensi Kegiatan dalam Indeks Pembangunan Pemuda

Kegiatan	KRO	RO	% Realisasi Anggaran	Target Output	Satuan	RVO	% RVO
7841 BKBUS	PEA Koordinasi (kegiatan)	001 Koordinasi Terkait Pembinaan Badan Usaha dan Swasta (kegiatan)	99,98%	1	kegiatan	2	200,00%
7842 BKBUS	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan (Orang)	96,75%	1.200	orang	1235	102,92%
7843 BKBUS	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	002 Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda Kader dalam Kegiatan	99,97%	500	orang	580	116,00%
7844 BKBUS	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	003 Pembinaan Pemuda Disabilitas yang Terfasilitasi sebagai Kader	99,92%	500	orang	600	120,00%
7845 BKBUS	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	004 Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda Miskin Esktrim sebagai kader	99,98%	800	orang	800	100,00%
7846 BKBUS	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	005 Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda dalam Penguatan Potensi	99,88%	2.500	orang	3997	159,88%
7847 BKBUS	QEI Bantuan Lembaga (Lembaga)	001 Bantuan Pengembangan Kewirausahaan bagi Sentra	91,85%	10	lembaga	16	160,00%
7842 TOKP	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi/Komunitas Kepemudaan	99,53%	15	lembaga	32	213,33%
7843 TOKP	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Organisasi Kepemudaan	99,63%	400	orang	400	100,00%
7844 TOKP	QEI Bantuan Lembaga (Lembaga)	001 Pendampingan Organisasi Kepramukaan (kwarnas/saka/sako)	98,98%	15	lembaga	15	100,00%
7845 TOKP	QEI Bantuan Lembaga (Lembaga)	002 Pendampingan Organisasi Kepemudaan dalam rangka	98,07%	25	lembaga	25	100,00%
7843 Bina PUSDA	PBM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pelayanan Publik (Rekomendasi	95,58%	4	rekomendasi kebijakan	5	125,00%
7844 Bina PUSDA	PEA Koordinasi (kegiatan)	001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelayanan Kepemudaan	89,29%	7	kegiatan	7	100,00%
7845 Bina PUSDA	PEA Koordinasi (kegiatan)	002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelayanan Kepemudaan	98,45%	4	kegiatan	4	100,00%
7846 Bina PUSDA	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda dalam Peningkatan Indeks	99,95%	928	orang	2306	248,49%
7844 SISTRA	ABM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	001 Rancangan Revisi Kebijakan Kepemudaan dan Kepramukaan yang	99,85%	3	rekomendasi kebijakan	3	100,00%
7845 SISTRA	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 NSPK Program dan Kegiatan Pelayanan Kepemudaan (NSPK)	99,03%	1	NSPK	1	100,00%
7846 SISTRA	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda dibidang Peningkatan	99,55%	20	orang	30	150,00%
7847 SISTRA	FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Program Kegiatan yang	99,71%	1	laporan	1	100,00%
7848 SISTRA	PEA Koordinasi (kegiatan)	001 Koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan yang	98,93%	38	kegiatan	38	100,00%
7845 PKG	PEA Koordinasi (kegiatan)	001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan	99,80%	2	kegiatan	2	100,00%
7846 PKG	PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001 NSPK yang Menjadi Rujukan Pedoman Kebijakan Pelayanan	98,58%	3	NSPK	2	66,67%
7847 PKG	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda Kader dalam Kegiatan	99,59%	249	orang	258	103,61%
7848 PKG	UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur	001 Bimbingan Teknis Bagi Aparatur Negara di Tingkat Pusat dan Daerah	100,00%	38	orang	120	315,79%
7849 PKG	UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	001 Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Kebijakan Pengembangan	100,00%	1	rekomendasi kebijakan	1	100,00%
7910 DUKMANJ	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	957 Layanan Hukum (Layanan)	98,11%	1	layanan	1	100,00%
7911 DUKMANJ	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 Layanan Hubungan Masyakat dan Informasi (Layanan)	99,65%	1	layanan	1	100,00%
7912 DUKMANJ	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	959 Layanan Protokoler (Layanan)	99,90%	1	layanan	1	100,00%
7913 DUKMANJ	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 Layanan Umum (Layanan)	99,85%	1	layanan	1	100,00%
7914 DUKMANJ	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Layanan)	93,86%	1	layanan	1	100,00%
7915 DUKMANJ	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang	957 Layanan Manajemen SDM (Orang)	99,55%	35	orang	157	448,57%
7916 DUKMANJ	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	955 Layanan Manajemen Keuangan (Layanan)	99,85%	1	layanan	1	100,00%
7917 DUKMANJ	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	961 Layanan Reformasi Kinerja (Layanan)	98,10%	1	layanan	1	100,00%

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Benchmarking nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menunjukan bahwa capaian Indonesia mengalami peningkatan secara nasional, namun masih berada pada posisi menengah jika dibandingkan dengan capaian regional ASEAN dan standar Internasional. Di ASEAN, Indonesia menghadapi kesenjangan terutama pada dimensi pendidikan dan keterampilan serta kesempatan kerja pemuda. Pada tingkat global, posisi Indonesia mencerminkan negara dengan tingkat pembangunan pemuda menengah yang memiliki ruang peningkatan signifikan dan menjadi acuan strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan pembangunan kepemudaan di tingkat global.

Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menunjukkan bahwa capaian Indonesia mengalami peningkatan secara nasional, namun dalam rangka memperkuat kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan kepemudaan, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia dapat dibandingkan secara konseptual dengan ASEAN *Youth Development Index (*AYDI*)* ditingkat regional dan *Global Youth Development Index (*GYDI*).* Untuk analisis perbandingan ini perlu dicermati karena memakai skala yang berbeda, yaitu IPP dari Kemenpora (skala 0–100) berbeda metodologinya dengan YDI ASEAN/global (skala 0–1). Ini membuat perbandingan langsung angka hanya bisa dipakai untuk menunjukkan posisi relatif, tetapi bukan perbandingan metrik yang identik. Dan dari segi waktu ASEAN YDI memakai capaian untuk Laporan Tahun 2022 (paling *update* untuk perbandingan regional) dan *Global YDI Update Report* 2023 menggunakan data terbaru yang tersedia untuk perbandingan internasional.

Tabel 3.7 Capaian *ASEAN Youth Development Index (YDI)* 2022

NEGARA	YDI ASEAN 2022
Singapore	0,83
Malaysia	0,699
Brunei Darussalam	0,692
Viet Nam	0,661
Indonesia	**0,578**
Thailand	0,574
Cambodia	0,568
Philippines	0,522
Lao PDR	0,476
Myanmar	0,466
Skala skor: 0–1 (lebih tinggi = tingkat pembangunan pemuda lebih tinggi) (ASEAN Main Portal)	

YDI ASEAN diukur melalui 6 parameter indikator yaitu Pendidikan dan Keterampilan; Kesehatan dan Kesejahteraan; Kesempatan Kerja dan Peluang Ekonomi; Partisipasi dan Keterlibatan; Kesetaraan dan Inklusi serta Keamanan dan Keselamatan, dari keenam indikator tersebut ASEAN sebagai satu kawasan menunjukkan kemajuan positif antara 2013–2022 di semua domain YDI yang mencerminkan pembangunan pemuda yang semakin terukur dan terintegrasi kebijakan lintas negara anggota ASEAN.

Indonesia pada ASEAN YDI 2022 tercatat mendekati skor 0,578, menunjukkan progres di berbagai dimensi tetapi peringkat Indonesia berada di tengah–bawah di antara 10 negara ASEAN. Dalam beberapa kategori penting seperti pendidikan dan kesempatan kerja, Indonesia masih di bawah rata-rata ASEAN (mis. skor pendidikan YDI Indonesia 0.544 vs rata-rata kawasan sekitar 0.56; skor ketenagakerjaan sekitar 0.437 vs rata-rata 0.54), yang menunjukkan pemuda Indonesia menghadapi kesenjangan terutama di dimensi pendidikan bermutu, keterampilan, dan peluang kerja dibanding negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Vietnam. Hal ini memerlukan upaya perbaikan yang signifikan pada dimensi tersebut.

Indeks pemuda tingkat internasional (misalnya *Global Youth Development Index*) biasanya mengukur kondisi pemuda di puluhan hingga ratusan negara berdasarkan indikator multidimensi seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi sosial, dan inklusi. Posisi Indonesia di tingkat Global YDI, berdasarkan *Global Youth Development Index* 2020, Indonesia pernah berada di kelompok menengah dengan skor yang menunjukkan posisi sedang dibanding banyak negara Asia dan dunia. Indonesia menempati peringkat sekitar 88–90 dari lebih 180 negara yang dinilai, menunjukkan ruang maju yang signifikan terhadap negara lain. Namun di data terbaru 2023 tidak selalu menyajikan *ranking* per negara Indonesia secara rinci, tetapi gambaran menunjukkan masih berada di level menengah global.

Tabel 3.8 Peringkat 2023 *Global Youth Development Index*

No	Negara	YDI	Education	Employment & Opportunity	Equality & Inclusion	Health & Wellbeing	Peace & Security	Political & Civic Participation
1	Singapura	0.868	0.930	0.958	0.973	0.972	0.960	0.324
2	Denmark	0.862	0.957	0.954	0.971	0.904	0.949	0.399
3	Portugal	0.848	0.923	0.735	0.747	0.828	0.609	0.349
4	Islandia	0.847	0.951	0.613	0.854	0.911	0.807	0.452
5	Slovenia	0.845	0.916	0.621	0.653	0.849	0.796	0.416
6	Norwegia	0.842	0.938	0.631	0.767	0.859	0.680	0.346
7	Irlandia	0.838	0.911	0.977	0.955	0.874	0.948	0.355
8	Spanyol	0.832	0.907	0.812	0.849	0.829	0.682	0.236
9	Malta	0.832	0.932	0.850	0.907	0.759	0.813	0.303
10	Swiss	0.830	0.928	0.689	0.738	0.955	0.629	0.259
27	Brunei Darussalam	0.810	0.941	0.739	0.878	0.913	0.655	0.337
35	Malaysia	0.802	0.845	0.952	0.965	0.805	0.920	0.330
55	Thailand	0.785	0.890	0.755	0.908	0.823	0.796	0.218
55	Vietnam	0.785	0.834	0.534	0.658	0.930	0.543	0.225
77	Indonesia	0.756	0.758	0.951	0.966	0.853	0.922	0.400

Singapura, Denmark, Portugal, Islandia, dan Slovenia masuk di antara negara dengan skor YDI tertinggi secara global. Jika dibandingkan dengan negara maju seperti Singapura atau Eropa Barat yang memiliki skor YDI tinggi, Indonesia masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan pemuda, kesempatan kerja, partisipasi sosial, serta dukungan kebijakan yang inklusif.

PERBAIKAN KINERJA

Perbaikan kinerja indikator IPP dilakukan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja dan integrasi program pembangunan kepemudaan lintas sektor. Penajaman sasaran intervensi difokuskan pada domain IPP yang masih rendah agar peningkatan capaian lebih efektif dan terukur. Kualitas data dan mekanisme pengukuran IPP terus ditingkatkan untuk mendukung evaluasi kinerja yang akurat. Selain itu, pemanfaatan IPP sebagai instrumen monitoring dan evaluasi kinerja diperkuat di tingkat pusat dan daerah. Langkah tersebut diharapkan mendorong peningkatan kinerja IPP yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) secara berkelanjutan, diperlukan langkah tindak lanjut yang komprehensif, holistik, dan terintegrasi lintas sektor. Peningkatan IPP tidak hanya bergantung pada intervensi Kementerian Pemuda dan Olahraga semata, tetapi memerlukan sinergi kebijakan, program, dan anggaran seluruh pemangku kepentingan pembangunan kepemudaan. Ke depan, Kemenpora perlu memperkuat perannya sebagai *leading sector* pembangunan kepemudaan dengan mendorong integrasi IPP dalam siklus perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. IPP perlu dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa pembangunan pemuda dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berbasis hasil. Selain itu, intervensi pembangunan kepemudaan perlu difokuskan pada domain IPP yang masih menunjukkan capaian relatif rendah, khususnya pendidikan dan keterampilan, serta kesempatan kerja pemuda.



Gambar 3.2 Kemenpora memberi dukungan pengembangan kewirausahaan pemuda

Upaya peningkatan kualitas sumber daya pemuda harus diarahkan pada penguatan keterampilan relevan, peningkatan daya saing, serta perluasan akses pemuda terhadap pekerjaan layak dan peluang ekonomi produktif. Pembangunan kepemudaan juga perlu dilaksanakan secara inklusif dan berkeadilan dengan memastikan seluruh kelompok pemuda, termasuk pemuda perempuan, pemuda penyandang disabilitas, pemuda di wilayah tertinggal, dan kelompok rentan lainnya, memperoleh akses yang setara terhadap program dan layanan kepemudaan. Di samping itu, penguatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda harus terus didorong agar pemuda berperan aktif sebagai subjek pembangunan.

Untuk mendukung kebijakan yang lebih efektif, diperlukan penguatan sistem data dan informasi kepemudaan yang terintegrasi, akurat, dan mutakhir sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Harmonisasi IPP nasional dengan indikator pembangunan pemuda di tingkat regional ASEAN dan internasional juga perlu terus dilakukan guna meningkatkan daya banding dan daya saing pemuda Indonesia di tingkat global.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2.1

INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA

Pindai QR untuk bahan dan data pendukung lainnya.

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat jati diri bangsa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada pertumbuhan ekonomi sosial

KATA KUNCI TOPIK

- Capaian Kinerja
- Analisis Program/Kegiatan
- *Outcome*
- Nilai Efisiensi
- Perbandingan Capaian Kinerja
- Perbaikan Kinerja

Keolahragaan nasional berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, kebugaran, prestasi, serta penanaman nilai-nilai sportivitas dan disiplin. Selain itu, pembangunan keolahragaan juga mendukung penguatan persatuan bangsa, ketahanan nasional, serta peningkatan martabat bangsa di tingkat internasional. Oleh karena itu, kebijakan keolahragaan perlu disusun secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data, Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) digunakan sebagai instrumen untuk mengukur capaian pembangunan keolahragaan nasional secara objektif yang ditetapkan melaui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga. IPO memberikan gambaran kondisi pembangunan olahraga yang menjadi dasar evaluasi dan penetapan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemanfaatan IPO memungkinkan penyusunan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan efektif, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan pembangunan nasional.

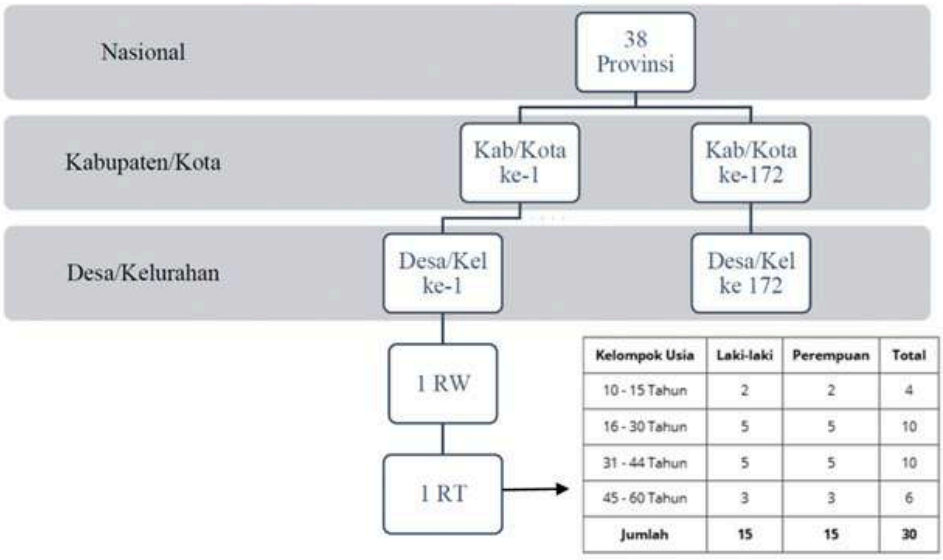
Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Tahun 2025 merupakan kelanjutan dan penguatan dari pelaksanaan IPO pada periode sebelumnya. IPO 2025 dirancang dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam penguatan tata kelola data dan peran unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dari sisi tata kelola, pelaksanaan IPO 2025 melibatkan Asisten Deputi Olahraga Masyarakat dan Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data (Biro PMKD) sesuai pembagian dimensi. Dalam penghitungan dan penyusunan laporan IPO tahun 2025, Asisten Deputi Olahraga Masyarakat didampingi langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Badan Pusat Statistik (BPS) diposisikan sebagai mitra strategis utama dalam memastikan bahwa desain pengukuran, metode pengambilan sampel, serta instrumen pengumpulan data memenuhi kaidah statistik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara substansi, IPO 2025 tetap mengukur sembilan dimensi pembangunan olahraga, yaitu literasi fisik, partisipasi, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, kebugaran, sumber daya manusia olahraga, ruang terbuka olahraga, dan performa olahraga. Penyesuaian dilakukan pada metode pengumpulan data, sumber data, serta mekanisme koordinasi antar unit kerja guna meningkatkan kualitas dan konsistensi data. Pengumpulan data pada dimensi literasi fisik, partisipasi, perkembangan personal, kesehatan, dan ekonomi tetap dilakukan melalui angket responden untuk menjaga kesinambungan data antar tahun, dengan penguatan pada sistem pengelolaan dan validasi data. Sementara itu, pengukuran dimensi kebugaran menggunakan *Rockport Test* sebagai pengganti *Multistage Fitness Test* (MFT), dengan pertimbangan kemudahan pelaksanaan, keamanan, dan kesesuaian dengan karakteristik responden. Pada dimensi sumber daya manusia olahraga, data difokuskan pada guru dan pelatih olahraga yang diperoleh melalui koordinasi dengan unit kerja terkait di tingkat pusat. Dimensi ruang terbuka olahraga difokuskan pada data Gedung Olahraga dan stadion, sedangkan dimensi performa olahraga diukur berdasarkan perolehan medali pada ajang POPNAS dan PEPAPERNAS.

Penentuan wilayah sampling IPO Tahun 2025 dilakukan menggunakan metode random sampling. Metode ini memastikan setiap wilayah dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai lokasi pengumpulan data, sesuai dengan kaidah statistik dan rekomendasi dari BPS.

Berdasarkan metode tersebut, ditetapkan sebanyak 172 wilayah sampling yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, mencakup kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan. Sebaran wilayah ini dirancang untuk merepresentasikan keberagaman kondisi geografis, demografis, dan sosial masyarakat, sehingga hasil pengukuran IPO 2025 diharapkan mampu menggambarkan kondisi pembangunan olahraga secara nasional. Penetapan wilayah sampling tersebut dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Lokasi Sampling Pengukuran Pembangunan Keolahragaan Nasional Tahun 2025 yang disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai dasar administratif dan sarana koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di daerah agar berjalan tertib dan terkoordinasi.

Seluruh data yang dihimpun, baik data primer maupun data sekunder, diinput langsung ke dalam aplikasi IPO yang disusun oleh tim IPO dari Asisten Deputi Olahraga Masyarakat. Untuk menjamin kualitas dan kebenaran data, pencacah diwajibkan mengunggah bukti dukung berupa foto responden dan dokumentasi kegiatan pengambilan data. Bagan di bawah ini merupakan rincian pengambilan sampling pada 172 Kab/Kota tersebut.



Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Total
10 - 15 Tahun	2	2	4
16 - 30 Tahun	5	5	10
31 - 44 Tahun	5	5	10
45 - 60 Tahun	3	3	6
Jumlah	**15**	**15**	**30**

Grafik 3.6 Bagan Pengambilan Sampling IPO pada 172 Kab/Kota

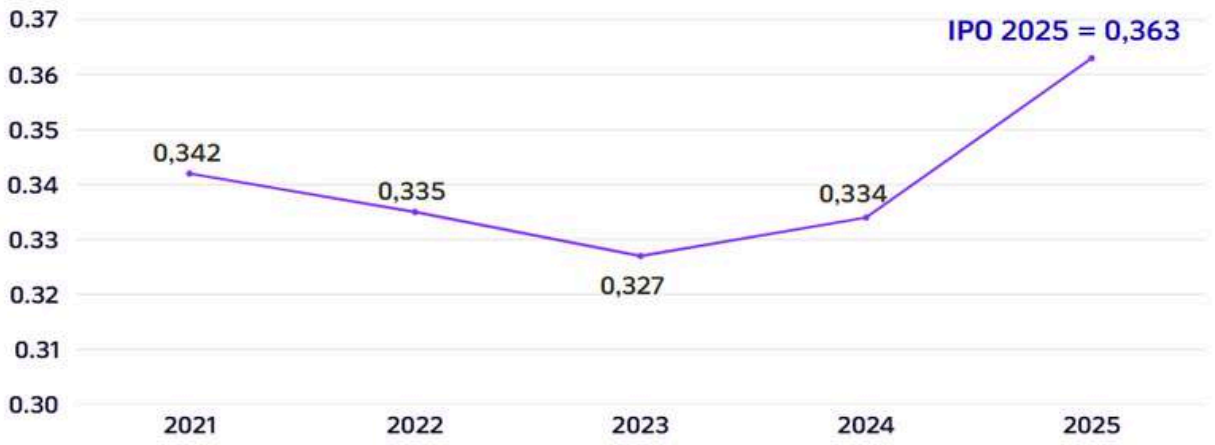
Secara teknis, perhitungan Indeks Pembangunan Olahraga diawali dengan pengolahan data individu dan wilayah pada masing-masing dimensi. Data yang telah divalidasi diolah melalui proses standarisasi dan penghitungan skor sesuai dengan rentang nilai yang ditetapkan untuk menghasilkan nilai per dimensi. Nilai dimensi tersebut selanjutnya diagregasikan dengan mempertimbangkan bobot penduduk berdasarkan kelompok usia dan wilayah administratif. Tahap akhir dilakukan dengan menggabungkan seluruh nilai dimensi untuk memperoleh nilai Indeks Pembangunan Olahraga secara keseluruhan.

CAPAIAN KINERJA INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA



Pelaksanaan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) merupakan tahapan strategis yang berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan kebijakan dan pemanfaatan hasil pengukuran dalam proses pengambilan keputusan pembangunan olahraga. IPO Tahun 2025 dirancang dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, akuntabel dan selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dimana ketiga pilar yaitu Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat dan Olahraga Prestasi sebagai landasan kerangka konseptual dalam merumuskan parameter pengukuran pambangunan olahraga. IPO memberikan rujukan yang jelas bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan olahraga agar lebih terarah, efisien dan efektif.

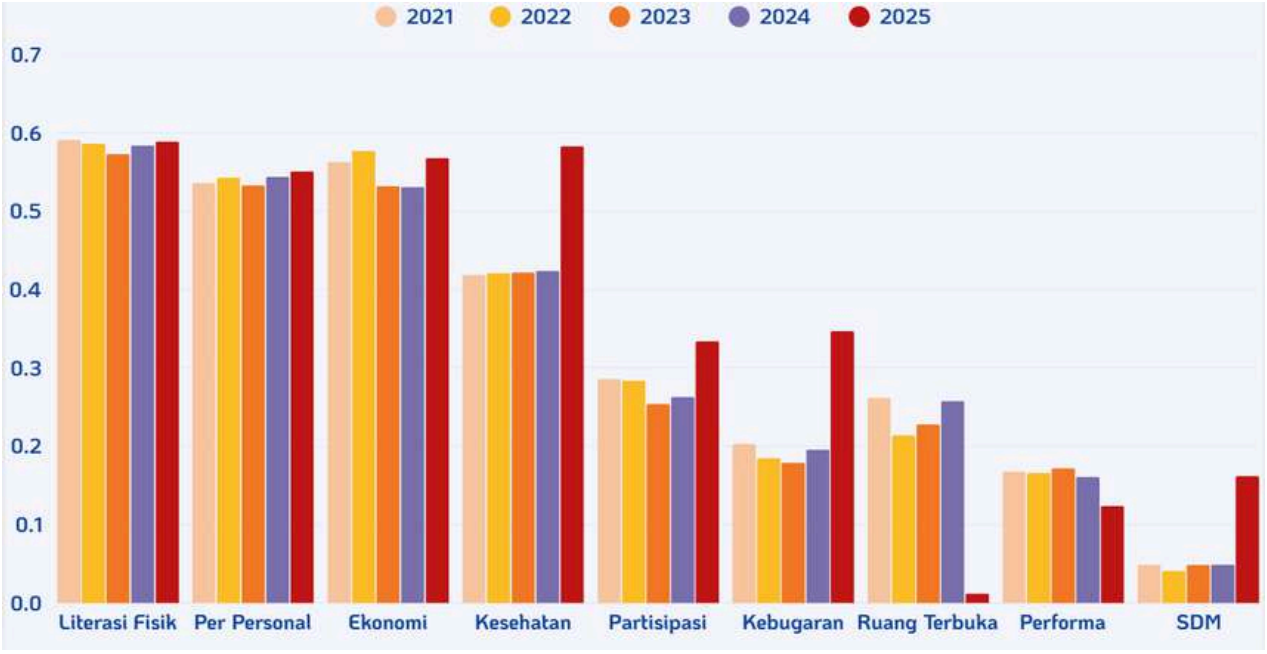
Perkembangan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) pada periode 2021 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang mencerminkan proses adaptasi kebijakan, penguatan sistem pengukuran, serta perubahan pendekatan dalam pembangunan olahraga nasional. Capaian IPO pada periode tahun 2021 - 2025, memperlihatkan pola penurunan pada fase awal, diikuti oleh pemulihan dan peningkatan pada periode tahun 2024 dan 2025.



Grafik 3.7 Capaian Indeks Pembangunan Olahraga 2021 - 2025

Tahun 2021 menjadi titik awal pemantauan tren pembangunan olahraga pasca penerapan instrumen IPO secara lebih sistematis untuk meningkatkan kualitas pengukuran IPO. Capaian IPO di tahun 2025 mengalami kenaikan yaitu dari capaian 0.334 di tahun 2024 naik menjadi 0.363 di tahun 2025.

Peningkatan nilai IPO di tahun 2025 menunjukan adanya akselerasi pembangunan olahraga nasional. Angka tersebut telah melebihi target dari Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2025 yaitu 33,8%. Pola ini mengindikasikan bahwa pembangunan olahraga merupakan proses jangka panjang yang memerlukan konsistensi kebijakan, penguatan sistem pengukuran serta dukungan lintas sektor agar menghasilkan dampak yang berkelanjutan.



	Literasi Fisik	Perkemb Personal	Ekonomi	Kesehatan	Parttisipasi	Kebugaran	R. Terbuka	Performa	SDM
2021	0,591	0,536	0,563	0,419	0,286	0,203	0,262	0,168	0,049
2022	0,586	0,543	0,577	0,421	0,284	0,185	0,214	0,166	0,041
2023	0,573	0,533	0,532	0,422	0,254	0,179	0,228	0,172	0,049
2024	0,584	0,544	0,531	0,424	0,263	0,196	0,256	0,161	0,049
2025	0,589	0,551	0,568	0,583	0,334	0,347	0,012	0,124	0,162

Grafik 3.8 Capaian Indeks Pembangunan Olahraga per Dimensi 2021 - 2025

Perkembangan masing-masing dimensi Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) selama periode 2021–2025 menunjukkan variasi capaian yang menggambarkan perbedaan tingkat kemajuan pembangunan olahraga nasional pada berbagai area prioritas.

Secara umum, dimensi yang berkaitan dengan aspek perilaku masyarakat, seperti Literasi Fisik dan Dimensi Personal, cenderung menunjukkan capaian yang lebih konsisten, sementara dimensi yang bersifat operasional, termasuk sumber daya manusia dan performa olahraga, masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan.

Dimensi Partisipasi dan Kebugaran mengalami penurunan tajam pada periode awal sebelum kembali membaik. Partisipasi turun dari 0,286 pada 2021 menjadi 0,254 pada 2023, sebelum pulih ke 0,334 tahun 2025. Kebugaran mengalami pola serupa, turun dari 0,203 menjadi 0,179 pada 2023 dan kemudian meningkat drastis ke 0,347 pada 2025. Terjadi peningkatan partisipasi olahraga masyarakat yang berdampak pada perbaikan tingkat kebugaran. Kondisi ini menunjukkan tantangan signifikan dalam mendorong keterlibatan langsung masyarakat berolahraga pada fase awal pengukuran IPO, tetapi juga keberhasilan kebijakan pemulihan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2025, hasil penghitungan dan capaian IPO telah melebihi target yang ditentukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu sebesar 0.363 dari target sebesar 0.338.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kemenpora telah mengakselerasi Indeks Pembangunan Olahraga melalui modernisasi Kejuaraan Tarkam, sertifikasi masif instruktur olahraga, dan digitalisasi kampanye kebugaran guna memperluas akses olahraga hingga ke tingkat akar rumput. Upaya strategis ini difokuskan pada penyediaan fasilitas olahraga *last-mile* serta penguatan literasi fisik masyarakat untuk membentuk budaya aktif yang berkelanjutan sesuai mandat DBON. Namun, efektivitas program masih terhambat oleh defisit ruang terbuka akibat alih fungsi lahan perkotaan serta rendahnya komitmen anggaran daerah dalam pemeliharaan sarana publik. Selain itu, tren gaya hidup sedentari berbasis digital menjadi tantangan utama dalam mentransformasi partisipasi massa menjadi kualitas kebugaran jasmani yang terukur secara nasional. Diperlukan integrasi kebijakan lintas sektor yang lebih kuat guna memastikan ketersediaan ruang aktif dan optimalisasi insentif bagi masyarakat bugar di masa depan.

Dalam peningkatan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kemenpora telah menjalankan empat pilar intervensi utama guna mendongkrak skor IPO nasional:

1. **Profesionalisasi Tenaga Penggerak bertujuan untuk peningkatan Dimensi SDM.**

Kemenpora menyadari sepenuhnya bahwa ketersediaan fasilitas olahraga masyarakat akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan keberadaan tenaga penggerak yang kompeten. Upaya masif Kemenpora dalam Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat berhasil menjangkau 12.960 orang (melampaui target awal 10.500 orang).

Para peserta ini diposisikan sebagai "ujung tombak" atau instruktur di level akar rumput. Mereka dilatih agar kompetensinya terstandardisasi melalui sertifikasi instruktur untuk memastikan bahwa olahraga yang dipandu di masyarakat bukan sekadar aktivitas fisik biasa, melainkan gerakan yang benar, terukur, dan teratur sesuai dengan kaidah fisiologi olahraga.

Penyelenggaraan pelatihan tenaga pembudayaan olahraga di lakukan di 6 kabupaten/kota besar, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Kuningan, Kota Malang, Kota Batam, Kota Semarang, dan Kota Palembang. Pembinaan dilakukan pada klaster Pelatih, Instruktur, hingga Tenaga Pendukung (seperti *masseur* dan nutrisionis) yang bernaung di bawah 105 Induk Organisasi Olahraga (INORGA) di bawah koordinasi KORMI. Hal ini memastikan setiap penggerak memiliki lisensi yang diakui, Sebagian proses pembinaan para instruktur juga dibekali kemampuan untuk memandu olahraga bagi penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), hingga warga binaan di Lapas. Menggunakan instrumen seperti *Senior Fitness Test* dan Tes Kebugaran Pelajar Nusantara (TKPN) oleh para instruktur memastikan bahwa program kebugaran yang dijalankan benar-benar berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di semua lini.

2. **Masifikasi *event* berbasis komunitas bertujuan untuk peningkatan Dimensi Partisipasi.**

Instrumen kebijakan strategis Kemenpora untuk mendongkrak nilai IPO melalui pendekatan grassroots (akar rumput) adalah melalui program Tarkam. Program ini secara terstruktur berkontribusi pada dimensi partisipasi melalui empat pilar utama:

a. Akselerasi Jangkauan dan Pemerataan (Skala Nasional).

Program TARKAM dirancang untuk memecahkan hambatan geografis dalam akses olahraga yang diselenggarakan di 47 lokasi yang mencakup 38 provinsi. Dampak terhadap IPO adalah dengan cakupan yang merata di seluruh provinsi, TARKAM memastikan bahwa kenaikan angka partisipasi tidak hanya terpusat di kota-kota besar, sehingga meningkatkan nilai indeks partisipasi secara nasional dan merata.

b. Diversifikasi Aktivitas Fisik (Inklusivitas Peserta).

Pemilihan cabang olahraga (cabor) dilakukan secara taktis untuk memastikan semua kelompok usia dan gender dapat berpartisipasi dengan Prinsip 5M (Murah, Meriah, Massal, Manfaat, Mudah). Cabor Wajib untuk peningkatan kebugaran yang dilakukan adalah senam (kolaborasi dengan Kemenkes), Fun Run 5K, serta Gerak Jalan (Pria 6K & Wanita 5K). Cabor ini dipilih karena memiliki hambatan masuk (barrier to entry) yang rendah, sehingga efektif menarik massa dalam jumlah besar. Untuk cabor pilihan, dilakukan dengan optimalisasi potensi olahraga daerah (lokal) seperti bola voli, bulu tangkis, tenis meja, dan olahraga tradisional. Pendekatan ini memastikan olahraga berbasis komunitas tetap relevan dengan karakteristik daerah masing-masing.



Gambar 3.3 Pelaksanaan Kejuaraan Tarkam Tahun 2025

c. Pencapaian Target Kuantitatif (Volume Partisipasi).
Indikator utama dalam dimensi partisipasi IPO adalah jumlah penduduk yang aktif bergerak secara rutin. Total peserta tarkam mencapai 107.554 orang. Angka ini memberikan kontribusi langsung pada signifikansi statistik yaitu peningkatan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga. Jumlah partisipan yang masif ini menjadi bukti bahwa TARKAM efektif sebagai instrumen "penggerak" masyarakat dari kondisi pasif menjadi aktif.
d. Penguatan Modal Sosial dan Budaya Hidup Aktif
TARKAM tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga dimensi sosial yang memperkuat ekosistem olahraga dan kearifan lokal. Integrasi hiburan berbasis budaya lokal pada acara pembukaan berfungsi sebagai daya tarik (*trigger*) bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terbiasa berolahraga. Meskipun terdapat keterbatasan prasarana di beberapa wilayah, tingginya antusiasme membuktikan bahwa partisipasi aktif dapat tercipta melalui kolaborasi lintas sektor dan pengorganisasian berbasis komunitas.

3. **Digitalisasi Kebugaran bertujuan untuk peningkatan Dimensi Kebugaran**.

Kemenpora telah menggeser pendekatan pembudayaan olahraga dari metode konvensional menuju pendekatan yang lebih modern, terukur, dan berbasis data untuk memperkuat Dimensi Kebugaran dalam IPO. Salah satu pilar utama dalam digitalisasi adalah implementasi Tes Kebugaran Pelajar Nusantara (TKPN).

Kemenpora menggunakan instrumen TKPN sebagai standar digital untuk mengukur tingkat kebugaran anak usia sekolah dan anak jalanan. Data yang dihasilkan dari tes ini diintegrasikan untuk memantau perkembangan fisik secara *real-time*. Selain TKPN, digunakan pula *Rockport Test* (berbasis jalan) dan *Senior Fitness Test* untuk lansia. Upaya digitalisasi ini memungkinkan Kemenpora memiliki database kebugaran nasional yang akurat, yang menjadi komponen vital dalam penghitungan nilai IPO.

Kemenpora juga melakukan digitalisasi sistem pemantauan dan literasi digital pada sisi manajemen kinerja melalui aplikasi:

- E-Monev & Aplikasi Survei: Peningkatan partisipasi dalam pengisian Aplikasi E-Monev BAPPENAS dan E-Monev Kemenpora dan survey data IPO memastikan setiap data kebugaran dari daerah terlaporkan secara sistematis.
- Laporan Kinerja Asdep Olahraga Layanan Khusus secara jujur mencatat hambatan literasi digital pada kelompok lansia dan disabilitas dalam menggunakan gawai untuk survei kebugaran. Hal ini direspons dengan pendampingan langsung oleh tenaga penggerak agar data kebugaran mereka tetap terekam dalam sistem nasional.

Dengan adanya data digital yang valid dari berbagai tes kebugaran (TKPN, *Rockport*, dll) merupakan strategi substansial Kemenpora untuk memastikan Dimensi Kebugaran dalam IPO tidak hanya diukur secara administratif, tetapi benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas fisik masyarakat Indonesia sehingga dapat memetakan intervensi kebijakan yang lebih tajam untuk memperbaiki tingkat kebugaran jasmani masyarakat, yang merupakan salah satu dari 9 dimensi pembentuk IPO.

4. **Penguatan Literasi Fisik sejak Usia Dini.**

Upaya Literasi Fisik ditempatkan sebagai fondasi kognitif dan motivasi agar masyarakat tidak hanya sekadar bergerak, tetapi memahami manfaat dan cara berolahraga yang benar. Kemenpora dalam meningkatkan dimensi literasi fisik adalah melalui aktivasi program yang masif namun edukatif, seperti kegiatan Jumat Krida dan *ASEAN Sports Day*, Kemenpora tidak hanya mengajak masyarakat bergerak, tetapi menyebarkan tema "*Healthy Lifestyle*". Edukasi ini berhasil mendorong partisipasi hingga 12.960 orang (123,43% dari target). Peningkatan partisipasi ini merupakan indikator bahwa literasi fisik masyarakat mulai bergeser dari sekadar "tahu" menjadi "melakukan".

Literasi fisik juga mustahil meningkat tanpa edukator yang kompeten di lapangan menekankan pada profesionalisasi instruktur, maka Kemenpora melatih tenaga olahraga (pelatih dan instruktur) agar mampu memberikan panduan olahraga yang terukur dan sesuai kaidah fisiologi olahraga. Dengan tersertifikasinya tenaga penggerak, masyarakat mendapatkan edukasi yang benar mengenai teknik olahraga, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan diri individu untuk terus aktif (salah satu komponen utama literasi fisik).

Upaya literasi fisik yang dijalankan secara komprehensif ini berdampak langsung pada peningkatan nilai IPO 2025 yang mencapai angka 0,363. Literasi fisik bertindak sebagai *driver* yang mengubah fasilitas olahraga (infrastruktur) dan tenaga olahraga (SDM) menjadi hasil nyata berupa peningkatan kebugaran masyarakat secara nasional.

Upaya Kemenpora dalam dimensi kesehatan dan perkembangan personal dilakukan melalui transformasi gaya hidup masyarakat menjadi lebih aktif (sehat secara fisik) serta internalisasi nilai-nilai sportivitas (sehat secara mental/karakter). Melalui pengukuran yang presisi dan pembinaan yang inklusif, Kemenpora memastikan bahwa setiap kenaikan angka pada nilai IPO mencerminkan perbaikan nyata pada kualitas hidup rakyat Indonesia. Dalam upaya mencapai target Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dan partisipasi aktif penduduk, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan transformasi kebijakan dari pendekatan seremonial menuju pendekatan ekosistem yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan IPO sekalipun capaian kinerja tercapai tetap ditemukan berbagai kendala kompleks yang bersifat multidimensional:

1. Hambatan Struktural. Pembangunan ruang terbuka olahraga seringkali terbentur pada regulasi tata ruang di daerah. Urusan lahan berada di bawah kendali Pemerintah Daerah dan Kementerian ATR/BPN, sementara standar fasilitas berada di Kemenpora. Kurangnya integrasi perencanaan menyebabkan banyak lahan olahraga "tergusur" oleh proyek komersial atau pemukiman.
2. Kesenjangan Kualitas Antarwilayah (*Geographical Disparity*). Terdapat perbedaan mencolok antara skor IPO di Pulau Jawa dengan wilayah Indonesia Timur atau 3T. Kendala logistik dan keterbatasan infrastruktur dasar (seperti akses jalan dan listrik) di wilayah terpencil membuat program masifikasi olahraga sulit menjangkau populasi tersebut secara konsisten.
3. Budaya Sedentari (*Sedentary Behavior*). Tingginya penetrasi teknologi digital tanpa dibarengi literasi kesehatan mengakibatkan peningkatan durasi screen-time. Masyarakat urban menghadapi kendala "*Time-Poverty*" (kemiskinan waktu), di mana tuntutan pekerjaan dan kemacetan mengurangi kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin.
4. Keterbatasan Anggaran Daerah (APBD). Banyak Pemerintah Daerah belum menempatkan olahraga sebagai "Urusan Wajib" dalam postur anggaran mereka. Akibatnya, banyak fasilitas yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui DAK menjadi tidak terawat atau tidak memiliki program kegiatan yang rutin karena ketiadaan dana operasional di tingkat daerah.
5. Rendahnya Kualitas Intensitas Olahraga. Meskipun angka partisipasi meningkat, mayoritas masyarakat masih melakukan olahraga dengan intensitas sangat rendah (hanya jalan santai atau rekreasi ringan). Hal ini menyebabkan dimensi Kebugaran dalam IPO tetap rendah karena aktivitas fisik tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan jantung-paru (kardiorespirasi).

Analisis Keberhasilan Peningkatan Nilai IPO

Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) 2025 sebesar 0,363 (36,3%) telah berhasil melampaui target nasional sebesar 33,8%. Keberhasilan ini bukan sekadar angka, melainkan hasil dari transformasi strategi Kemenpora yang lebih terintegrasi dan inklusif. Keberhasilan utama terletak pada kemampuan mengonversi kebijakan menjadi partisipasi riil di lapangan. Program TARKAM dengan 107.554 peserta dan Jumat Krida (13.901 peserta) membuktikan bahwa pendekatan olahraga berbasis komunitas (*grassroots*) sangat efektif mendongkrak dimensi partisipasi. Kemenpora berhasil memutus rantai "fasilitas terbengkalai" dengan memperkuat sisi penggerak. Pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga olahraga (instruktur, pelatih, dan tenaga pendukung) dengan memastikan setiap aktivitas fisik di masyarakat berjalan secara benar dan terukur. Peningkatan profesionalisme ini memperkuat Dimensi SDM dan Literasi Fisik, yang menjadi fondasi keberlanjutan budaya olahraga. Perluasan mandat dari "Olahraga Disabilitas" menjadi "Olahraga Layanan Khusus" adalah langkah strategis yang inklusif, nilai IPO menjadi lebih representatif terhadap seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok usia produktif.

OUTCOME

Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) secara langsung memperkokoh ketahanan kesehatan nasional melalui efisiensi fiskal anggaran BPJS Kesehatan hingga triliunan rupiah per tahun. Capaian ini menstimulasi produktivitas tenaga kerja serta memacu pertumbuhan ekonomi kreatif pada sektor *sportomics* yang berkontribusi nyata pada pendapatan daerah. Secara strategis, perluasan basis massa olahraga memperkuat sistem identifikasi bakat atlet sejak dini sekaligus menjadi instrumen utama pembangunan karakter dan modal sosial bangsa. Transformasi budaya gerak ini menjamin bonus demografi Indonesia diisi oleh generasi yang tangguh secara fisik, mental, dan memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Keberhasilan ini memposisikan Indonesia sebagai negara maju dengan standar kualitas hidup tinggi, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan target pembangunan berkelanjutan global.

Pencapaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) sebesar 0,363 pada tahun 2025 merupakan fondasi strategis dalam mewujudkan kualitas manusia. Indonesia yang bugar dan berdaya saing, di mana peningkatan skor ini secara sistemik berkontribusi pada penguatan ketahanan kesehatan nasional dan efisiensi fiskal melalui reduksi beban pembiayaan penyakit tidak menular pada anggaran BPJS Kesehatan. Berdasarkan model analisis biaya-manfaat, setiap kenaikan 0,1 poin pada skor IPO diproyeksikan mampu menghasilkan penghematan biaya kesehatan nasional hingga Rp 1,5 – 2,2 triliun per tahun akibat penurunan angka prevalensi penyakit katastropik dan peningkatan imunitas komunal. Pembangunan olahraga yang terintegrasi melalui empat dimensi IPO, yaitu: ruang terbuka, SDM, partisipasi, dan kebugaran, secara langsung mampu menstimulasi produktivitas ekonomi nasional melalui penurunan tingkat absen kerja serta tumbuhnya sektor ekonomi kreatif berbasis olahraga (*sportomics*) di berbagai daerah.

Data dari *World Health Organization* (WHO) menunjukkan bahwa kurangnya aktivitas fisik berkontribusi terhadap kematian dini global dan peningkatan beban ekonomi nasional. Oleh karena itu, kenaikan IPO Indonesia tahun ini menjadi bukti empiris efektivitas investasi pada ruang terbuka publik dan penggerak olahraga. Analisis data dari Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) 2024-2025 mengindikasikan bahwa daerah dengan skor dimensi Ruang Terbuka di atas 0,500 menunjukkan korelasi positif terhadap penurunan prevalensi obesitas dan hipertensi hingga 14%. Hal ini membuktikan bahwa penyediaan infrastruktur olahraga "*last-mile*" bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan instrumen intervensi medis berbasis masyarakat yang mampu meningkatkan angka harapan hidup sehat penduduk secara signifikan.

Secara strategis, penguatan IPO ini juga berfungsi sebagai perluasan basis talenta atlet nasional di tingkat akar rumput, yang menurut prinsip *Sport Development Excellence*, merupakan syarat mutlak bagi terciptanya ekosistem prestasi internasional yang berkelanjutan sekaligus menjadi instrumen efektif dalam membangun modal sosial dan karakter bangsa. Berdasarkan riset *The McKinsey Global Institute*, investasi pada olahraga massal yang tercermin dalam kenaikan IPO berbanding lurus dengan peningkatan Indeks Kebahagiaan dan produktivitas tenaga kerja hingga 10-15%. Peningkatan dimensi SDM olahraga dalam IPO 2025 juga telah menciptakan ekosistem baru di mana instruktur bersertifikasi menjadi ujung tombak dalam meminimalkan cedera olahraga dan memaksimalkan manfaat fisiologis dari aktivitas fisik rutin masyarakat.

ANALISIS HASIL EFISIENSI



Pada akhirnya, transformasi dari masyarakat yang statis menjadi aktif melalui peningkatan indeks ini tidak hanya meningkatkan kohesi sosial dan kesejahteraan psikologis masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa bonus demografi Indonesia diisi oleh generasi yang tangguh secara fisik dan mental. Integrasi data IPO ke dalam kebijakan pembangunan daerah diharapkan mampu mendorong target ambisius Indonesia untuk masuk dalam jajaran negara dengan indeks kebugaran menengah-atas pada tahun 2029.

Hal ini selaras dengan pencapaian target pembangunan berkelanjutan global (SDGs) poin ketiga serta penguatan postur sumber daya manusia yang siap mengakselerasi pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045.



Gambar 3.4 Fun Run pada Kejuaraan Tarkam Tahun 2025

Tabel 3.9 Alokasi Rincian Output intervensi pada indikator IPO

Kegiatan	KRO	RO	% Realisasi Anggaran	Target Output	Satuan	RVO	% RVO
3820 OLK	AEA K	001 Koordinasi Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Pengembangan	100,00%	1	Kegiatan	1	100,00%
3820 OLK	AFA N	001 NSPK Pengembangan Olahraga Layanan Khusus	99,60%	1	NSPK	1	100,00%
3820 OLK	BDB F	001 Bantuan Pemerintah untuk Sarana Olahraga Layanan Khusus	100,00%	16	Lembaga	16	100,00%
3820 OLK	QDC F	001 Fasilitasi dan Pembinaan Peserta Kampanye Olahraga	99,62%	8700	Orang	9011	103,57%
3821 ORDIK	QDB F	001 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga dalam Pengembangan	99,96%	104	Lembaga	56	53,85%
3821 ORDIK	QDC F	001 Fasilitasi dan Pembinaan Peserta kampanye olahraga	99,96%	113334	Orang	86695	76,50%
3821 ORDIK	QDC F	002 Pendampingan Peserta didik nonformal dan informal dalam	100,00%	56667	Orang	47171	83,24%
3821 ORDIK	QEI B	001 Bantuan untuk Prasarana Olahraga Pendidikan	20,95%	2	Lembaga	0	0,00%
3821 ORDIK	QEI B	002 Bantuan untuk Sarana Olahraga Pendidikan	99,94%	200	Lembaga	46	23,00%
3822 ORMA	PBH K	001 Kebijakan Indeks Pembangunan Keolahragaan	99,98%	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100,00%
3822 ORMA	QDB F	001 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga dalam Pengembangan Olahraga Masyarakat	99,91%	20	Lembaga	21	105,00%
3822 ORMA	QDC F	001 Pembinaan Peserta Kampanye Olahraga Masyarakat dalam Partisipasi Berolahraga dan	99,35%	10500	Orang	12960	123,43%
7846 TOP	ABH K	001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga	99,57%	4	Rekomendasi Kebijakan	7	175,00%
7846 TOP	AEA K	001 Koordinasi dan Sinkronisasi Lingkup Peningkatan Tenaga dan Organisasi Pembudayaan	99,61%	2	Kegiatan	2	100,00%
7846 TOP	BDB F	001 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga dalam Peningkatan Pembudayaan Olahraga	99,97%	10	Lembaga	10	100,00%
7846 TOP	BDC F	001 Fasilitasi dan Pembinaan Tenaga Lingkup Olahraga Layanan Khusus, Pendidikan dan	99,78%	150	Orang	206	137,33%
1720 DUKMAN	EBA L	957 Layanan Hukum (Layanan)	99,67%	1	Layanan	1	100,00%
1720 DUKMAN	EBA L	958 Layanan Hubungan Masyakat	99,71%	1	Layanan	1	100,00%
1720 DUKMAN	EBA L	959 Layanan Protokoler (Layanan)	99,90%	1	Layanan	1	100,00%
1720 DUKMAN	EBA L	962 Layanan Umum (Layanan)	99,96%	1	Layanan	1	100,00%
1720 DUKMAN	EBA L	994 Layanan Perkantoran	99,20%	1	Layanan	1	100,00%
1720 DUKMAN	EBC L	957 Layanan Manajemen SDM	98,75%	1	Layanan	1	100,00%
1720 DUKMAN	EBD L	955 Layanan Manajemen	99,58%	1	Layanan	1	100,00%
1720 DUKMAN	EBD L	961 Layanan Reformasi Kinerja	99,26%	1	Layanan	1	100,00%

Indikator Indeks Pembangunan Olahraga menunjukkan performa yang sangat impresif dengan realisasi kinerja mencapai 107,39%. Capaian yang melampaui target ini mengindikasikan bahwa program-program strategis, seperti peningkatan partisipasi olahraga masyarakat dan pembinaan atlet usia dini, telah berjalan melampaui ekspektasi awal yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian kinerja yang tinggi tersebut didukung oleh penyerapan anggaran yang sangat optimal sebesar 99,18%. Hal ini mencerminkan tingkat disiplin anggaran yang tinggi, di mana alokasi dana terserap hampir sepenuhnya untuk mendukung kegiatan prioritas pembangunan olahraga.

Berdasarkan rasio antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan, program ini menghasilkan Nilai Efisiensi sebesar 0,92. Dengan predikat "Efisien", dapat disimpulkan bahwa Kemenpora telah berhasil melakukan optimalisasi sumber daya yang dipengaruhi oleh koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan program olahraga di tingkat daerah serta pemanfaatan sarana olahraga yang lebih intensif oleh masyarakat. Tingginya angka realisasi menunjukkan bahwa strategi intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap indikator pembangunan olahraga.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pembangunan olahraga nasional terkategori *infrastructure-constrained* dengan skor IPO menunjukan kesenjangan ruang terbuka yang masih di bawah standar global. Meskipun bersaing ketat di ASEAN, Indonesia masih tertinggal dalam integrasi fasilitas olahraga ke pusat transportasi publik dan pemanfaatan kebijakan fiskal komunitas. Fenomena *High Passion, Low Fitness* menunjukkan antusiasme masyarakat belum selaras dengan standar kebugaran WHO sehingga skor kebugaran nasional berada di kuartil terbawah. Reformasi kebijakan berbasis *Active Design City* menjadi urgensi utama untuk mencegah stagnasi partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas kebugaran nasional di peta global.

Hingga saat ini, belum terdapat satu ukuran tunggal yang secara universal dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan olahraga secara menyeluruh. Beberapa negara menggunakan pendekatan tertentu sesuai dengan konteks dan tujuan kebijakannya. Indonesia untuk mengukur efektivitas pembangunan olahraga nasional, adalah menggunakan Laporan Indeks Pembangunan Olahraga, capaian skor IPO Indonesia sebesar 0,363 (Tahun 2025) menyoroti sebuah anomali unik, berbeda dengan negara maju yang membangun olahraga berbasis "Sistem Terukur" (sekolah dan klub), Indonesia masih bertumpu pada "aktivitas organik" (gerakan sosial tak terukur), akibatnya, meskipun partisipasi sosial cukup kompetitif, output kebugaran fisik masyarakat tertinggal jauh dari standar global.

1. ***Benchmarking* Tingkat Internasional: The European Standar**

Di tingkat Global perbandingan indeks pembangunan olahraga Indonesia apabila dikomparasikan dengan negara Slovenia berdasarkan Laporan *Global Matrix 4.0* dan Eurobarameter menunjukan kesenjangan kualitas. Berdasarkan Laporan *Global Matrix 4.0,* Slovenia mencatatkan nilai A (Sangat Baik) pada indikator *Physical Fitness* berkat sistem pemantauan wajib *SLOfit* yang menjamin intensitas tinggi (*High Intensity*). Sebaliknya, Indonesia berdasarkan Laporan IPO Tahun 2025 untuk tingkat partisipasi ada di angka 26% - 32% (rendah) dan juga angka kebugaran di angka 0.196, hal ini karena olahraga dominan dilakukan sebagai rekreasi berintensitas rendah (*Low Intensity*).

Untuk perbandingan Ruang Terbuka, kota dengan fasilitas olahraga terbaik adalah Copenhagen atau Melbourne yang memiliki indeks >0.800 dengan standar ruang terbuka 2-3 m^2 per kapita. Indonesia rata-rata nasionalnya masih <1 m^2 per kapita. Kita belum menerapkan *Active Design City* maupun integrasi transportasi dalam perencanaan fasilitas olahraga.

2. ***Benchmarking* Tingkat Regional: The Asian Context**

Di kawasan Asia, kesenjangan terlihat pada ketersediaan ruang dan budaya gerak yang sistematis. Jepang memiliki skor partisipasi aktif (*sport participation rate*) mencapai 59.9% berdasarkan Laporan *Japan Sports Agency,* 2023. Tingginya angka ini didukung oleh budaya "Radio Taiso" dan aktivitas klub sekolah (Bukatsudo) yang terstruktur. Singapura, melalui *Sport Singapore,* mencatat indeks partisipasi 66% berkat integrasi infrastruktur publik yang masif. Indonesia tertinggal secara signifikan dalam dimensi Ruang Terbuka (IPO: 0.280). Tanpa ruang publik yang aksesibel, partisipasi masyarakat Indonesia tidak bisa naik kelas menjadi latihan rutin yang membugarkan. Kita memiliki semangat komunitas (seperti *Car Free Day*), namun kalah dalam rutinitas harian yang dimiliki Jepang atau Singapura.

Tabel 3.10 Data Perbandingan Pembangunan Olahraga Tingkat Regional dan Internasional

Indikator Kinerja	**Indonesia (Data IPO)**	**Slovenia (*Benchmark* Global)**	**Jepang (*Benchmark* Asia)**
Sumber Data Utama	Laporan IPO Kemenpora (2024)	Global Matrix 4.0 (AHKGA) & *Eurobarometer*	*Japan Sports Agency (MEXT) Survey*
Tingkat Partisipasi	26% - 32% (Kategori: Rendah/Cukup)	53% - 58% (Kategori: Tinggi)	59.9% (Kategori: Tinggi)
Kualitas Kebugaran	0.196 (Kuartil Bawah / *Very Poor)*	*Grade A (Excellent)*	*Grade B+ (Good)*

Indikator Kinerja	Indonesia (Data IPO)	Slovenia (*Benchmark* Global)	Jepang (*Benchmark* Asia)
Sistem Sekolah	Kurang Terukur (PJOK Teoretis)	Terukur & Wajib (*SLOfit System*)	Terstruktur (Bukatsudo/*Club*)
Basis Aktivitas	Sosial / Rekreasi Sporadis	Kompetitif / Pelatihan	Budaya / Kedisiplinan

Berdasarkan *benchmarking* di atas, Indonesia tidak mengalami krisis "minat" (karena partisipasi ada), melainkan krisis "metodologi". Negara lain sukses karena mereka memiliki sistem yang menjamin intensitas gerak, sementara Indonesia masih berhenti pada tahap sosialisasi gerak.

PERBAIKAN KINERJA

Kemenpora berkomitmen melakukan akselerasi kinerja melalui integrasi Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) ke dalam parameter evaluasi kinerja Pemerintah Daerah guna menjamin keberlanjutan dukungan anggaran dan fasilitas di tingkat akar rumput. Fokus perbaikan diarahkan pada penyediaan infrastruktur olahraga yang inklusif serta penguatan program masifikasi aktivitas fisik untuk mentransformasi gaya hidup sedentari menjadi budaya aktif yang terukur. Upaya transformatif ini bertujuan memastikan setiap warga negara memiliki akses dan motivasi mandiri dalam menjaga kebugaran sebagai fondasi utama produktivitas nasional. Dengan pendekatan berbasis data dan kebijakan yang sistemik, perbaikan kinerja ke depan diproyeksikan mampu mengakselerasi pencapaian target pembangunan olahraga menuju visi Indonesia Emas 2045.

Guna mengakselerasi skor IPO serta memastikan pencapaian target Renstra di periode mendatang, Kemenpora perlu melakukan lompatan kebijakan yang tidak lagi hanya berfokus pada kegiatan seremonial, melainkan pada penguatan struktur ekosistem olahraga nasional melalui lima pilar transformasi berikut:

1. Transformasi Regulasi. Pengarusutamaan Olahraga dalam Pembangunan Daerah karena kendala utama selama ini adalah belum ditempatkannya olahraga sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Kemenpora harus mendorong penetapan Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Mendagri yang mewajibkan integrasi skor IPO ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Dengan menjadikan IPO sebagai parameter keberhasilan kepemimpinan daerah, Pemerintah Daerah akan lebih terstimulasi untuk mengalokasikan APBD guna pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga serta penyediaan ruang terbuka hijau fungsional.

2. Akselerasi Infrastruktur "*Active City Design*" & Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menjawab rendahnya skor dimensi Ruang Terbuka, Kemenpora harus bergeser dari pembangunan stadion megah menuju penyediaan fasilitas *last-mile*, berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN untuk menetapkan standar "Ruang Aktif Multifungsi" pada setiap proyek pembangunan pemukiman dan normalisasi area publik. Setiap desa/kelurahan wajib memiliki minimal satu lapangan multifungsi (*One Village One Playground*) yang dilengkapi dengan area *outdoor gym*. Pemanfaatan aset lahan tidur milik pemerintah maupun BUMN untuk dikonversi menjadi taman olahraga komunitas menjadi strategi krusial dalam mengatasi keterbatasan lahan di perkotaan.

3. Integrasi Teknologi Digital: "*Smart Sporting & Monitoring*". Dimensi Kebugaran Jasmani seringkali sulit diukur secara akurat karena keterbatasan data fisik masyarakat secara *real-time*. Kemenpora harus menginisiasi pengembangan ekosistem digital "Indonesia Bugar *Dashboard*" yang terintegrasi dengan aplikasi kesehatan nasional (seperti SATUSEHAT). Penggunaan teknologi *wearable* dan *AI* dapat digunakan untuk memantau intensitas olahraga warga secara objektif. Melalui data ini, Kemenpora bersinergi dengan KL membuat konsep sistem reward berupa insentif ekonomi (diskon pajak, *voucher* belanja, atau pengurangan premi BPJS) bagi individu dan komunitas yang terbukti mencapai standar kebugaran tertentu, guna memitigasi budaya sedentari.

4. Reformasi SDM dan Kurikulum Literasi Fisik Sejak Dini. Kesenjangan kualitas instruktur dan rendahnya kebugaran pada usia sekolah memerlukan intervensi hulu, sehingga perlu dilakukan standardisasi dan sertifikasi massal bagi tenaga penggerak olahraga di tingkat desa melalui program "*Sport Facilitator Squad*". Selain itu, bersama Kemendikbudristek, perlu dilakukan reformasi kurikulum PJOK yang berorientasi pada *Physical Literacy*-fokus pada pembangunan kesenangan bergerak daripada sekadar nilai ketangkasan atletik. Hal ini bertujuan agar penduduk usia 10 tahun ke atas memiliki kemandirian dalam menjaga kebugaran seumur hidup (*long-term athlete development*).

5. Penguatan Ekosistem Ekonomi "*Sportomics*". Olahraga harus dipandang sebagai sektor ekonomi yang mampu membiayai dirinya sendiri melalui partisipasi masyarakat. Dengan mendorong insentif bagi sektor swasta (melalui skema *tax deduction*) yang membangun fasilitas olahraga bagi karyawan atau mensponsori kegiatan olahraga komunitas. Pengembangan *Sport Tourism* berbasis kearifan lokal di berbagai provinsi akan menciptakan pendapatan mandiri bagi daerah yang kemudian dapat diputar kembali untuk pemeliharaan fasilitas IPO, sehingga pembangunan olahraga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN.

Tabel 3.11 Inovasi Peningkatan IPO Terukur

Pilar	Target Inovasi	*Output* Terukur
Infrastruktur	Standardisasi Lapangan Desa Multifungsi	Peningkatan skor Ruang Terbuka sebesar 0,05.
Kebijakan	IPO masuk dalam evaluasi kinerja Pemda	100% Provinsi melaporkan data IPO secara mandiri.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2.2

PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG AKTIF BEROLAHRAGA

Pindai QR untuk bahan dan data pendukung lainnya.

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga menunjukkan capaian partisipasi olahraga masyarakat yang berdampak pada kesehatan, kualitas hidup, dan pembangunan sumber daya manusia.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada pertumbuhan ekonomi sosial

KATA KUNCI TOPIK

- Capaian Kinerja
- Analisis Program/Kegiatan
- *Outcome*
- Nilai Efisiensi
- Perbandingan Capaian Kinerja
- Perbaikan Kinerja

Indikator "Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Aktif Berolahraga" pada tahun 2025 bukan sekadar metrik sektoral, melainkan refleksi dari ketahanan fundamental bangsa. Di tengah pergeseran paradigma global yang menempatkan kesehatan fisik sebagai penggerak utama ekonomi (*Human Capital Index*), peran Kemenpora menjadi sangat strategis dalam melakukan intervensi di hulu pembangunan manusia Indonesia. Berdasarkan data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) yang diekstrapolasi hingga 2024, prevalensi kurang gerak (*physical inactivity*) di Indonesia masih menunjukkan angka yang signifikan. Lebih jauh lagi, laporan Stanford University yang dipublikasikan dalam jurnal *Nature* sempat menempatkan penduduk Indonesia sebagai "penduduk paling malas melangkah di dunia" dengan rata-rata hanya 3.513 langkah per hari jauh di bawah rata-rata global sebesar 4.961 langkah. Kondisi ini menjadi alarm bagi Kemenpora untuk mengonversi kebiasaan pasif menjadi budaya olahraga aktif melalui kebijakan yang terukur. Data dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan tahun 2024 menunjukkan bahwa penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung yang erat kaitannya dengan kurangnya aktivitas fisik menyerap anggaran lebih dari Rp 20 triliun per tahun. Analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% partisipasi olahraga masyarakat berpotensi mereduksi beban pembiayaan kesehatan nasional hingga ratusan miliar rupiah. Oleh karena itu, target partisipasi aktif 3 kali seminggu merupakan langkah preventif untuk menjaga keberlanjutan fiskal negara melalui penciptaan warga negara yang bugar dan produktif.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang DBON, arah kebijakan tahun 2025 difokuskan pada penguatan "Hulu Olahraga". Bukti ilmiah dari World Health Organization (WHO) melalui Global Action Plan on Physical Activity 2018–2030 menegaskan bahwa aktivitas fisik yang teratur adalah kunci untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan nomor 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan). Dengan memperkuat partisipasi di usia mulai 10 tahun, Kemenpora sedang membangun basis massa (*sporting foundation*) yang akan menjadi sumber bakat bagi olahraga prestasi di masa depan, sekaligus memastikan bonus demografi Indonesia 2045 tidak menjadi beban demografi akibat masalah kesehatan kronis. Data dari Laporan IPO Indonesia menunjukkan bahwa "Indeks Kebugaran" masyarakat kita masih dalam kategori "Rendah" hingga "Sangat Rendah". Hal ini diperburuk oleh penetrasi teknologi digital yang meningkatkan *screen-time* rata-rata penduduk Indonesia hingga 7-8 jam per hari. Fenomena ini mengharuskan Kemenpora untuk menyusun narasi kinerja yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformatif dalam mengubah perilaku sosial (*social behavior change*) melalui gerakan "Indonesia Bugar 2045". Indikator 'Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga' merupakan indikator kunci dalam mengukur keberhasilan kebijakan pembudayaan olahraga. Mengacu pada metadata Badan Pusat Statistik (BPS), pengukuran dilakukan terhadap penduduk yang melakukan aktivitas olahraga minimal 3 kali/minggu atau akumulasi durasi 150 menit/minggu.

Secara strategis, indikator ini berfungsi sebagai parameter hulu dalam ekosistem keolahragaan nasional. Tingginya angka partisipasi masyarakat berbanding lurus dengan ketersediaan basis talenta (*talent pool*). Dengan masyarakat yang bugar dan aktif, proses identifikasi bibit atlet potensial dapat dilakukan secara lebih masif dan sistematis, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan capaian prestasi Indonesia di level regional maupun global.

Indikator ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat partisipasi olahraga masyarakat Indonesia. Fokus utamanya adalah melihat persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga dalam satu minggu terakhir. Parameter Pengukuran Seseorang dikategorikan sebagai "aktif berolahraga" apabila memenuhi salah satu atau kedua kriteria berikut dalam kurun waktu seminggu terakhir:

- Melakukan aktivitas olahraga minimal 3 kali dalam seminggu.
- Total durasi olahraga mencapai minimal 150 menit dalam seminggu.

Metode Penghitungan
Secara teknis, angka ini diperoleh dengan membandingkan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang memenuhi kriteria aktif berolahraga terhadap total seluruh penduduk dalam kelompok usia tersebut, kemudian dikalikan 100%.

$$P = \frac{\text{(Penduduk Aktif Olahraga (10+th)}}{\text{(Total Penduduk (10+th) X100\%}} \text{ x } 100\%$$

CAPAIAN KINERJA PERSENTASE PENDUDUK USIA 10TH KE ATAS AKTIF BEROLAHRAGA



Berdasarkan survei Susenas MSBP tahun 2024 dan olah data oleh BAPPENAS, capaian persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga pada tahun 2025 secara nasional berada di angka 9,06%, apabila dibandingkan target 2025 capaian ini masih di angka 87,45% dan masih memerlukan upaya perbaikan agar dapat memenuhi capaian di akhir periode Renstra 2025 - 2029 sebesar 12,13%.

Data ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari gaya hidup sehat masyarakat. Tingginya angka partisipasi ini diharapkan dapat: Menjadi fondasi untuk menemukan bibit-bibit atlet potensial sejak dini. Memberikan ruang bagi lahirnya olahragawan unggul yang mampu bersaing di kancah regional maupun internasional. Secara tidak langsung menggambarkan tingkat kebugaran fisik penduduk yang berimplikasi pada produktivitas nasional. Angka ini juga menjadi tolok ukur untuk melihat provinsi mana saja yang memiliki tingkat partisipasi olahraga di atas atau di bawah rata-rata nasional.

Tabel 3.12 Persentase Penduduk 10th Ke Atas Yang Aktif Berolahraga pada 38 Provinsi di Indonesia

No	Provinsi	A	B	C	% Penduduk Aktif OR
1	Aceh	3.799,10	4.128	4.212,00	980%
2	Sumatera Utara	10.668,60	8.777	11.546,30	760%
3	Sumatera Barat	3.982,60	3.686	4.351,20	847%
4	Riau	5.052,20	5.261	5.578,20	943%
5	Jambi	2.649,60	2.262	2.875,80	787%
6	Sumatera Selatan	6.348,80	4.276	6.776,40	631%
7	Bengkulu	1.476,90	1.152	1.592,20	724%
8	Lampung	6.249,50	5.246	6.774,10	774%
9	Kep. Bangka Belitung	1.045,10	1.339	1.179,00	1.136%
10	Kepulauan Riau	1.695,30	2.462	1.941,40	1.268%
11	DKI Jakarta	7.321,40	1.038,60	8.360,00	1.242%
12	Jawa Barat	36.442,80	3.297,60	39.740,30	830%
13	Jawa Tengah	25.303,10	2.517,90	27.821,00	905%
14	DI Yogyakarta	2.840,10	4.056	3.245,70	1.250%
15	Jawa Timur	28.741,30	3.279,50	32.020,80	1.024%
16	Banten	9.207,60	1.217,60	10.425,20	1.168%
17	Bali	3.266,50	3.651	3.631,60	1.005%
18	Nusa Tenggara Barat	3.607,70	5.215	4.129,20	1.263%
19	Nusa Tenggara Timur	3.993,40	2.643	4.257,80	621%

No	Provinsi	A	B	C	% Penduduk Aktif OR
20	Kalimantan Barat	3.755,50	3.027	4.058,20	746%
21	Kalimantan Tengah	1.983,10	1.758	2.158,80	814%
22	Kalimantan Selatan	3.165,90	2.388	3.404,60	701%
23	Kalimantan Timur	2.641,60	2.991	2.940,70	1.017%
24	Kalimantan Utara	5.025	742	5.767	1.287%
25	Sulawesi Utara	1.885,40	1.207	2.006,10	602%
26	Sulawesi Tengah	2.251,60	1.795	2.431,10	738%
27	Sulawesi Selatan	6.508,10	5.106	7.018,70	727%
28	Sulawesi Tenggara	1.935,30	1.825	2.117,80	862%
29	Gorontalo	8.809	562	9.371	600%
30	Sulawesi Barat	9.942	901	1.084,40	831%
31	Maluku	1.259,00	1.285	1.387,40	926%
32	Maluku Utara	9.134	722	9.856	733%
33	Papua Barat	3.401	312	3.714	840%
34	Papua Barat Daya	3.747	454	4.201	1.081%
35	Papua	5.838	903	674	1.340%
36	Papua Selatan	3.622	189	3.811	496%
37	Papua Tengah	7.445	714	8.158	875%
38	Papua Pegunungan	8.553	247	880	281%
	Nasional	195.628,60	19.479,40	215.108,00	906%

A = jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang tidak melakukan olahraga >150 menit atau >3x seminggu

B = jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga >150 menit atau >3x seminggu

C = total penduduk > 10 tahun ke atas

Data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antar wilayah:

1. **Partisipasi Tertinggi**
Provinsi Papua mencatatkan angka tertinggi dengan 13,40%, disusul oleh Kalimantan Utara (12,87%), dan Kepulauan Riau (12,68%). Wilayah urban seperti DI Yogyakarta (12,50%) dan DKI Jakarta (12,42%) juga menunjukkan tingkat kesadaran olahraga yang jauh melampaui rata-rata nasional.

2. **Partisipasi Terendah**
Sebaliknya, tingkat partisipasi terendah ditemukan di Papua Pegunungan yang hanya mencapai 2,81%, diikuti oleh Papua Selatan (4,96%).

Tabel 3.13 Tingkat Pengelompokan Partisipasi Penduduk 10th Ke Atas Yang Aktif Berolahraga berdasarkan Pulau

Wilayah	Uraian
Jawa	Hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa (kecuali Jawa Barat) memiliki persentase di atas rata-rata nasional, dengan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta sebagai pemimpin.
Sumatera	Provinsi di Sumatera sangat bervariasi untuk tingkat partisipasinya namun Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung sangat tinggi, sementara Sumatera Selatan termasuk yang rendah (6,31%).
Kalimantan	Kalimantan Utara menonjol sebagai yang tertinggi di pulau ini, sementara provinsi lainnya cenderung mendekati rata-rata nasional.
Sulawesi	Secara umum berada di bawah rata-rata nasional, dengan angka terendah di Gorontalo (6,00%) dan Sulawesi Utara (6,02%).
Papua	Terjadi disparitas yang cukup tinggi, Prov. Papua sangat tinggi tingkat partisipasinya, namun wilayah pemekaran baru seperti Papua Pegunungan sangat rendah.

Data ini mengindikasikan bahwa kebiasaan berolahraga belum merata di seluruh Indonesia. Wilayah dengan akses fasilitas yang lebih baik atau pusat perkotaan cenderung memiliki persentase yang lebih tinggi. Namun, tingginya angka di Provinsi Papua menunjukkan bahwa faktor budaya atau gaya hidup lokal juga berperan besar selain faktor infrastruktur.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kemenpora telah menginisiasi berbagai langkah strategis seperti penguatan kejuaraan antar-kampung (Tarkam) dan digitalisasi kampanye "Ayo Olahraga" untuk menstimulasi partisipasi fisik masyarakat. Namun, upaya ini menghadapi tantangan besar berupa tingginya durasi penggunaan gawai (*screen time*) pada remaja yang memperkuat budaya hidup sedenter. Selain itu, keterbatasan infrastruktur olahraga yang merata di wilayah pedesaan dan minimnya instruktur terlatih menjadi hambatan utama dalam mencapai target partisipasi aktif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor guna menyediakan fasilitas publik yang inklusif serta program edukasi kebugaran yang lebih masif.

Upaya Kemenpora dalam mengejar target indikator pembangunan olahraga nasional dilaksanakan melalui pendekatan berbasis komunitas yang inklusif dan masif. Program ini secara khusus dirancang untuk menyentuh akar rumput guna memastikan masyarakat di tingkat lokal memiliki akses yang merata terhadap layanan olahraga.

Penguatan Olahraga Masyarakat Berbasis Massal

Upaya pertama difokuskan pada kegiatan yang melibatkan partisipasi publik dalam jumlah besar untuk membangun budaya aktif melalui kampanye olahraga masi. Program "Kampanye Olahraga Masyarakat" berhasil menjadi motor penggerak utama dengan realisasi partisipasi mencapai 12.960 orang, melampaui target awal sebesar 10.500 orang (Capaian 123,43%). Kampanye ini dilakukan dengan diversifikasi kegiatan dimana aktivitas fisik digiatkan melalui berbagai variasi program, antara lain:

- Festival Olahraga Tradisional untuk melestarikan budaya gerak lokal.
- *Asean Sports Day* yang dilaksanakan pada 24 Agustus 2025 sebagai diplomasi olahraga.
- Jum'at Krida dan Senam Kebugaran Otak untuk pembiasaan rutin.
- Kejuaraan TARKAM

Kejuaraan TARKAM

Untuk memastikan keterjangkauan layanan olahraga bagi penduduk di seluruh Indonesia, Kejuaraan TARKAM diselenggarakan dengan jangkauan luas tersebar di 47 lokasi yang mencakup 38 provinsi di Indonesia, dan tujuan strategis: yang ingin di capai adalah memperluas akses dan pemerataan layanan olahraga masyarakat sesuai dengan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemilihan cabang olahraga dilakukan secara terukur untuk memaksimalkan angka partisipasi dan kebugaran jasmani masyarakat.

Setiap wilayah menyelenggarakan 4 cabang olahraga (cabor) wajib, yaitu: Senam, *Fun Run* 5K, Gerak Jalan Pria 6K, dan Gerak Jalan Wanita 5K. Selain itu, daerah dapat menambahkan cabor pilihan seperti Bola Voli, Bulu Tangkis, Tenis Meja, atau Olahraga Tradisional sesuai karakteristik wilayahnya.

Tabel 3.14 Kategori Cabang Olahraga pada Kejuaraan TARKAM

Kategori Cabang	Jenis Aktivitas	Tujuan Indikator
Cabang Wajib	Senam (Kolaborasi Kemenkes), Fun Run 5K, Gerak Jalan Pria 6K, dan Gerak Jalan Wanita 5K.	Mendorong pembiasaan aktivitas fisik harian dan peningkatan dimensi kebugaran dalam Indeks Pembangunan Olahraga.
Cabang Pilihan	Bola voli, bulu tangkis, tenis meja, dan olahraga tradisional.	Menyesuaikan dengan potensi karakteristik wilayah serta mengoptimalkan keterlibatan komunitas lokal.

Kejuaraan TARKAM 2025 berhasil mencatatkan antusiasme yang signifikan sebagai bukti efektivitas program dengan total partisipasi mencapai 107.554 orang peserta secara keseluruhan, dengan rata-rata partisipasi setiap kabupaten/kota mencapai 2.000 sampai dengan 5.000 orang.

Perluasan Akses Inklusif (Olahraga Layanan Khusus)

Sebagai wujud keadilan dalam pembangunan olahraga, strategi kedua menyasar kelompok yang memerlukan layanan khusus guna memastikan "*No One Left Behind*". Program dirancang untuk menjamin akses dan partisipasi bagi penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), warga binaan, dan anak jalanan sesuai amanat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Upaya ini berkontribusi langsung pada indikator strategis, yaitu persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga dalam seminggu terakhir serta peningkatan Indeks Kebugaran Jasmani Masyarakat. Dukungan anggaran sebesar Rp 13 Miliar dialokasikan khusus untuk Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus guna memfasilitasi pembinaan dan sinergi program inklusif ini.

Tabel 3.15 Program perluasan akses inklusif

Program Strategis	Lokasi Pelaksanaan	Jangkauan Partisipasi & Penerima Manfaat
1. Kampanye Olahraga Masyarakat	Dilaksanakan melalui aktivasi ruang publik, *Car Free Day*, dan instansi pemerintah (pusat dan daerah). • Asean Sports Day (24 Agustus 2025). • Jum'at Krida (Rutin Mingguan). • Tarkam	120.514 Orang Partisipasi ini mencakup masyarakat umum yang mengikuti senam massal, festival, dan aktivasi olahraga rutin.
2. Olahraga Layanan Khusus (Inklusif)	Titik Fokus Wilayah: • DKI Jakarta: Pusat kegiatan NPC dan Festival Olahraga Disabilitas (FOD). • Kota Bandung (Jawa Barat): Rutan Bandung, LPP Bandung, LPKA Bandung. • Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat): Rutan Mamuju. • Nasional: Melalui mitra lembaga di berbagai provinsi.	Fasilitasi ke 37 Lembaga Mitra • 21 Lembaga difasilitasi untuk penyelenggaraan event (Festival Lansia, Disabilitas, Warga Binaan). • 16 Lembaga menerima bantuan sarana olahraga untuk komunitas. • Sampling Partisipasi Aktif: - 400 Peserta Disabilitas (FOD/SOIna/NPC). - 176 Warga Binaan (Lapas/Rutan).
3. Festival Olahraga Tradisional	Berbasis *Event*: Dilaksanakan sebagai event tunggal nasional untuk melestarikan budaya gerak lokal.	Peserta Komunitas Adat/Lokal Melibatkan penggiat olahraga tradisional dan masyarakat lokal sebagai upaya pelestarian budaya melalui aktivitas fisik.

Tingginya angka partisipasi ini menegaskan peran kegiatan ini sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan angka penduduk aktif berolahraga. Melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan komunitas, program ini diharapkan mampu membentuk budaya hidup aktif yang berkelanjutan demi meningkatkan tingkat kebugaran nasional.

Kendala strategis maupun teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan program peningkatan partisipasi olahraga (baik melalui Tarkam, Olahraga Masyarakat, maupun Olahraga Layanan Khusus). Berikut adalah klasifikasi kendala tersebut:

1. Kendala Infrastruktur dan Faktor Eksternal. Tantangan yang dihadapi langsung di lapangan terkait kondisi masyarakat dan fasilita. Pada pelaksanaan Kejuaraan TARKAM, masih ditemui adanya keterbatasan prasarana olahraga di beberapa wilayah pelaksanaan, meskipun hal ini tidak menyurutkan antusiasme peserta. Tantangan dalam meningkatkan angka partisipasi meliputi keterbatasan akses dan jangkauan kampanye, fasilitas pendukung yang minim, serta rendahnya literasi fisik masyarakat dan masih kuatnya dominasi gaya hidup pasif (*sedentary*) di masyarakat yang dipengaruhi oleh penggunaan teknologi dan hiburan.

2. Kendala Manajemen dan Administrasi (Internal). Hambatan yang berkaitan dengan tata kelola birokrasi dan pelaksanaan kegiatan adalah komunikasi yang kurang efektif dan kurangnya keselarasan informasi antar pihak terkait menjadi masalah utama, menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya berjalan sesuai lini masa. Faktor administratif, seperti keterlambatan dalam pengalokasian anggaran dan ketersediaan sumber daya, menghambat proses perencanaan dan eksekusi kegiatan secara keseluruhan. Beberapa kegiatan dilaporkan mengalami keterlambatan pelaksanaan dari rencana awal yang telah ditetapkan.

3. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM). Keterbatasan kapasitas personel dalam mendukung kinerja strategi kurangnya SDM senior berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja yang bersifat strategis, seperti analisis kompleks, evaluasi mendalam, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang komprehensif.

Analisis Faktor Kegagalan

Kegagalan optimalisasi indikator penduduk aktif berolahraga disebabkan oleh dominasi intervensi bersifat "*micro-event*" yang berbenturan dengan kendala "*macro-structural*" berupa keterbatasan infrastruktur wilayah, rendahnya literasi fisik, serta pergeseran gaya hidup sedentari. Skala intervensi episodik ini belum mampu mengimbangi tantangan perubahan perilaku pada populasi nasional secara masif karena partisipasi masyarakat cenderung bersifat temporer dan seremonial tanpa dukungan fasilitas permanen yang menjamin keberlanjutan aktivitas fisik pasca-kegiatan.

Kondisi tersebut diperparah oleh hambatan administratif internal seperti keterlambatan alokasi anggaran, lemahnya koordinasi antarpihak, serta keterbatasan SDM ahli di level strategis. Dominasi SDM pada level pelaksana menyebabkan fokus organisasi terjebak pada pemenuhan *output* teknis dan serapan anggaran daripada pengembangan kebijakan berbasis dampak. Hal ini membatasi kemampuan kementerian untuk merumuskan solusi inovatif dalam mengatasi kendala mendasar seperti aksesibilitas layanan inklusif dan efektivitas kampanye olahraga secara nasional.

OUTCOME

Realisasi partisipasi penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga sebesar 9,06% pada tahun 2025 merupakan capaian strategis yang menunjukkan tren positif kebugaran nasional, di mana hasil ini secara holistik berkontribusi pada penghematan anggaran kesehatan negara melalui pencegahan penyakit tidak menular serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi sektor *sportomics*. Meskipun target Renstra belum sepenuhnya tercapai akibat hambatan infrastruktur urban dan gaya hidup sedentari, keberhasilan ini telah memperkokoh dasar piramida talenta atlet dan modal sosial bangsa yang esensial bagi peningkatan produktivitas menuju visi Indonesia Emas 2045.

Capaian indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga pada tahun 2025 tercatat sebesar 9,06% dari target 10,36%. Meskipun secara kuantitatif belum mencapai target ideal, angka 9,06% ini merepresentasikan "garis pertahanan" vital dalam struktur kesehatan preventif nasional. Di tengah lonjakan beban biaya kesehatan kuratif, keberadaan populasi aktif ini berfungsi sebagai penahan laju kasus penyakit katastropik. Urgensi dari capaian ini tercermin dari data BPJS Kesehatan tahun 2024, di mana beban pembiayaan untuk penyakit katastropik (seperti jantung, gagal ginjal, dan stroke) telah menembus angka Rp 37,28 triliun dengan tren kasus yang terus meningkat. Tanpa adanya 9,06% populasi yang konsisten menjaga kebugaran ini, beban fiskal negara diproyeksikan akan jauh lebih berat akibat hilangnya daya tangkal alami masyarakat terhadap risiko penyakit degeneratif.

Secara ekonomi, realisasi 9,06% ini tetap memberikan kontribusi riil terhadap produktivitas nasional. Segmen masyarakat yang aktif ini menjadi motor penggerak ekonomi yang efisien karena memiliki tingkat absensi sakit (*sick leave*) dan presenteeism (bekerja namun tidak produktif karena kondisi fisik) yang lebih rendah. Dalam ekosistem *Sportomics*, kelompok aktif ini juga menjadi pasar inti (*core market*) yang menopang perputaran ekonomi industri olahraga domestik-mulai dari event olahraga masyarakat hingga UMKM peralatan olahraga yang nilai ekonominya terus tumbuh signifikan. Oleh karena itu, mempertahankan dan melayani 9,06% basis massa ini sama pentingnya dengan upaya memperluas jangkauan partisipasi baru.

Namun, selisih capaian terhadap target (*gap*) sebesar 1,3% menjadi alarm strategis bagi pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045. Ketidatercapaian ini mengindikasikan bahwa tantangan gaya hidup sedentari dan keterbatasan akses infrastruktur olahraga masih menjadi hambatan struktural yang kuat. Hal ini menegaskan bahwa intervensi olahraga tidak bisa lagi hanya bersifat "himbauan", melainkan harus bertransformasi menjadi kebijakan "investasi kesehatan" yang lebih agresif. Peningkatan angka ini di tahun-tahun mendatang adalah syarat mutlak untuk memastikan bonus demografi Indonesia diisi oleh SDM yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara fisik dan mental.

ANALISIS HASIL EFISIENSI



Kementerian Pemuda dan Olahraga mengalokasikan anggaran untuk Indikator Kinerja Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga sebesar Rp80 Miliar melalui 12 Rincian Output (RO). Berdasarkan pagu tersebut, anggaran yang telah direalisasikan sebesar 79,3 M atau 99,17%. Meskipun penyerapan anggaran mencapai 99,17%, capaian kinerja pada indikator partisipasi olahraga masyarakat (usia 10 tahun ke atas) baru menyentuh angka 87,45%. Hal ini menghasilkan indeks efisiensi sebesar 1.13 (Tidak Efisien). Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi anggaran belum secara optimal terkonversi menjadi perubahan perilaku olahraga masyarakat sesuai kriteria metadata BPS, sehingga diperlukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas belanja program.

Tabel 3.16 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan dalam peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga

3820 OLK	AEA K	001 Koordinasi Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Pengembangan	100,00%	1	Kegiatan	1	100,00%
3820 OLK	AFA N	001 NSPK Pengembangan Olahraga Layanan Khusus	99,60%	1	NSPK	1	100,00%
3820 OLK	BDB F	001 Bantuan Pemerintah untuk Sarana Olahraga Layanan Khusus	100,00%	16	Lembaga	16	100,00%
3820 OLK	QDC F	001 Fasilitasi dan Pembinaan Peserta Kampanye Olahraga	99,62%	8700	Orang	9011	103,57%
3821 ORDIK	QDB F	001 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga dalam Pengembangan	99,96%	104	Lembaga	56	53,85%
3821 ORDIK	QDC F	001 Fasilitasi dan Pembinaan Peserta kampanye olahraga	99,96%	113334	Orang	86695	76,50%
3821 ORDIK	QDC F	002 Pendampingan Peserta didik nonformal dan informal dalam	100,00%	56667	Orang	47171	83,24%
3821 ORDIK	QEI B	001 Bantuan untuk Prasarana Olahraga Pendidikan	20,95%	2	Lembaga	0	0,00%
3821 ORDIK	QEI B	002 Bantuan untuk Sarana Olahraga Pendidikan	99,94%	200	Lembaga	46	23,00%
3822 ORMA	PBH K	001 Kebijakan Indeks Pembangunan Keolahragaan	99,98%	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100,00%
3822 ORMA	QDB F	001 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga dalam Pengembangan Olahraga Masyarakat	99,91%	20	Lembaga	21	105,00%
3822 ORMA	QDC F	001 Pembinaan Peserta Kampanye Olahraga Masyarakat dalam Partisipasi Berolahraga dan	99,35%	10500	Orang	12960	123,43%

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Meskipun partisipasi olahraga aktif Indonesia mengalami tren positif sebesar 27,15%, angka ini masih berada di bawah rata-rata negara maju seperti Australia dan Jepang yang telah melampaui 50%. Di tingkat regional, Indonesia juga tertinggal dari Singapura yang sukses mencapai tingkat partisipasi 58% berkat integrasi fasilitas olahraga dengan sistem transportasi publik dan pemukiman. Kesenjangan ini mencerminkan perlunya penguatan infrastruktur ruang terbuka hijau dan kemudahan akses sarana olahraga di tingkat akar rumput. *Benchmarking* ini menunjukkan bahwa komitmen kebijakan yang lebih progresif sangat diperlukan agar tingkat aktivitas fisik masyarakat setara dengan standar global WHO.

Berdasarkan laporan ASEAN Physical Activity Card, Indonesia berada di posisi yang kompetitif namun masih tertinggal dari Singapura yang memiliki indeks kebugaran nasional lebih merata berkat integrasi teknologi kesehatan digital (*National Steps Challenge*). Thailand sedikit lebih unggul dalam dimensi Ruang Terbuka karena kebijakan pemerintah daerahnya yang mewajibkan pembangunan taman aktif di setiap kecamatan.

Indonesia bersaing ketat dengan Thailand (Indeks ~0,420). Thailand lebih unggul karena keberhasilan program "pajak dosa" (*sin tax*) dari rokok dan alkohol yang secara khusus dialokasikan untuk mendanai infrastruktur olahraga komunitas, sebuah model yang belum sepenuhnya diadopsi oleh Indonesia.

Standar Kebugaran Global (VO2 *Max* & *Sedentary Level*)
Data internasional dari Non-Communicable Disease Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat aktivitas fisik harian (jalan kaki) terendah di dunia. Posisi Indonesia dengan skor IPO 0,363 mencerminkan realitas ini. Meskipun penduduk aktif berolahraga secara rekreasi (frekuensi tinggi), namun intensitasnya tidak mencapai ambang batas metabolisme yang setara dengan standar WHO *Global Recommendations for Physical Activity*. WHO dalam Global Action Plan on Physical Activity (GAPPA) 2018-2030 menetapkan target penurunan relatif sebesar 15% pada angka kurang gerak global. Indonesia dengan capaian 9,06% masih berada di bawah ambang ideal. Sebagian besar penduduk Indonesia (sekitar 65,5%) masih masuk dalam kategori *insufficiently active* menurut standar 150 menit aktivitas moderat per minggu.

PERBAIKAN KINERJA

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, Kemenpora akan memperkuat kolaborasi lintas kementerian guna mengintegrasikan aktivitas fisik ke dalam kurikulum pendidikan dan lingkungan kerja. Transformasi digital akan dioptimalkan melalui pengembangan aplikasi pemantauan kebugaran bagi masyarakat yang aktif berolahraga. Selain itu, kebijakan *Car Free Day* menjadi prioritas untuk memasifkan partisipasi berolahraga guna meningkatkan tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

Upaya fundamental dalam memperbaiki kinerja indikator ini dimulai dengan standardisasi aktivitas olahraga di level akar rumput untuk memastikan penduduk usia 10 tahun ke atas benar-benar memenuhi ambang batas aktif yang ditetapkan. Pemerintah perlu beralih dari sekadar sosialisasi umum menuju penyediaan panduan aktivitas yang terukur, sehingga masyarakat memahami bahwa olahraga bukan sekadar gerak fisik sesekali, melainkan aktivitas rutin minimal 150 menit seminggu. Dengan memberikan target yang jelas kepada komunitas-komunitas olahraga, kualitas partisipasi masyarakat akan meningkat secara signifikan dan tercatat lebih akurat dalam data nasional.

Selanjutnya, perbaikan kinerja dilakukan melalui optimalisasi ekosistem olahraga di lingkungan pendidikan dan pemukiman. Mengingat target dimulai dari usia sekolah, intervensi harus masuk ke dalam jadwal harian siswa melalui penguatan kegiatan setelah jam sekolah yang menarik dan konsisten tentunya sinergi dengan Kemendikdasmen sangat diperlukan. Di sisi lain, aktivasi fasilitas olahraga di tingkat desa atau kelurahan harus diperbanyak agar masyarakat memiliki akses yang mudah dan murah setiap harinya. Kemudahan akses ini adalah faktor kunci yang akan mendorong masyarakat untuk rutin berolahraga tiga kali seminggu, yang secara otomatis akan mengangkat angka realisasi kinerja indikator ini.

Peningkatan kinerja juga perlu dilakukan dengan pemetaan wilayah dengan tingkat partisipasi rendah untuk diberikan intervensi khusus berupa bantuan peralatan atau instruktur olahraga maupun program peningkatan partisipasi olahraga melalui Program Kampanye Olahraga melalui Kebijakan *Car Free Day*. Dengan melakukan jemput bola ke wilayah-wilayah yang capaiannya rendah, disparitas partisipasi antar wilayah dapat dikurangi. Fokus pada pemecahan masalah di tingkat lokal ini akan memastikan bahwa target nasional tercapai secara merata dan target kinerja indikator tersebut dapat terpenuhi atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2.3

PERINGKAT INDONESIA PADA ASIA YOUTH GAMES

Pindai QR untuk bahan dan data pendukung lainnya.

Peringkat Indonesia pada Asian Youth Games mencerminkan daya saing atlet muda Indonesia di tingkat Asia serta memperkuat fondasi pembinaan prestasi menuju peningkatan kedigdayaan olahraga nasional di kancah internasional.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada pertumbuhan ekonomi sosial

KATA KUNCI TOPIK

- Capaian Kinerja
- Analisis Program/Kegiatan
- *Outcome*
- Nilai Efisiensi
- Perbandingan Capaian Kinerja
- Perbaikan Kinerja

Partisipasi Indonesia dalam 3rd Asian Youth Games di Manama, Bahrain pada tanggal 22-31 Oktober 2025 merupakan tonggak penting dalam pembinaan atlet elit junior nasional. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Kemenpora Tahun 2025, keikutsertaan kontingen Indonesia dalam *multi-event* ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pembinaan atlet muda dalam kerangka Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Tahap Kedua.

Berdasarkan hasil kompetisi, Indonesia berhasil menunjukkan performa kompetitif di tingkat Asia melalui sinergi antara Kemenpora, NOC Indonesia, dan Pengurus Besar Cabang Olahraga. Indonesia berpartisipasi dengan total 119 Atlet, 51 Ofisial, dan 20 *Head Quarter*.

Keberhasilan ini dibuktikan dengan efektivitas pengiriman kontingen pada cabang olahraga unggulan yang selaras dengan prioritas DBON, seperti Renang, Bulutangkis dan Angkat Besi, termasuk dari 22 cabang olahraga yang diikuti diantaranya termasuk: Atletik (*Track & Field*), Basketball 3x3, *Camel Race*, Balap Sepeda, Berkuda, *e-Sports*, Golf, Judo, Jujitsu, *Mix Martial Art*, *Muay Thai*, Tenis Meja, Tae Kwon Do), Teq Ball, *Triathlon*, Bola Voli Indoor, Bola Voli Pantai. Pencak Silat,dan Kurash. Pengalaman medali emas pada Olimpiade Paris 2024 menjadi standar performa yang diturunkan pada level junior, memastikan Indonesia tetap berada dalam jalur (*on track*) menuju target prestasi dunia.

Target utama yang ditetapkan untuk AYG 2025 yang berlangsung di Manama, Bahrain mencakup dua dimensi:

- Target *Output*: Pengiriman kontingen yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial pada cabang olahraga unggulan.
- Target *Outcome*: Peningkatan peringkat Indonesia dibandingkan edisi sebelumnya serta pemenuhan target medali emas yang telah diproyeksikan melalui analisis performa atlet elit junior.

CAPAIAN KINERJA PERINGKAT INDONESIA PADA *ASIAN YOUTH GAMES*



Gambar 3.5 Peringkat Indonesia pada Asian Youth Games 2025

Peringkat Indonesia pada Asian Youth Games (AYG) menunjukkan peningkatan, dengan pencapaian tertinggi di posisi ke-15 pada tahun 2013 dan 2025. Pada tahun 2009, Indonesia berada di peringkat ke-21. Pada AYG 2025 di Bahrain, Indonesia finis di peringkat ke-15 dengan perolehan 4 emas, 6 perak, dan 18 perunggu.

Berikut ringkasan peringkat Indonesia pada Asian Youth Games:

- 2009 (Singapura): Peringkat 21 (0 emas, 0 perak, 0 perunggu).
- 2013 (Nanjing): Peringkat 15 (1 emas, 0 perak, 0 perunggu).
- 2021/2022: Tidak diselenggarakan (ditunda lalu dibatalkan).
- 2025 (Bahrain): Peringkat 15 (4 emas, 6 perak, 18 perunggu).

Indonesia berhasil mempertahankan peringkat dari pelaksanaan Asian Youth Games di tahun 2021, namun sebenarnya secara kuantitas total medali menunjukkan grafik yang kompetitif yaitu dengan perolehan medali sebanyak 28 dengan komposisi 4 Emas, 6 Perak, 18 Perunggu, namun dari sisi konversi medali emas, capaian ini berada di bawah target awal yang memproyeksikan posisi 13 sampai dengan 15 besar. Hal ini memberikan gambaran bahwa secara kolektif atlet muda Indonesia mampu bersaing hingga babak final, namun masih membutuhkan penguatan pada tahap penyelesaian (puncak performa).

Tabel 3.17 Capaian medali dan analisis performa

CABANG OLAHRAGA	TARGET MEDALI	REALISASI	ANALISIS PERFORMA
Angkat Besi	2 Emas	2 Emas, 1 Perak	Sangat Berhasil. Konsistensi atlet junior di kelas ringan sangat terjaga. Raihan 2 emas menunjukan program regenerasi berjalan optimal.
Bulutangkis	2 Emas	1 Emas, 2 Perunggu	Dominasi atlet junior Tiongkok dan Korea Selatan meningkat drastis sehingga perlu evaluasi strategi di nomor ganda. Fokus pada ketahanan fisik perlu ditingkatkan.
Pencak Silat	2 Emas	1 Emas, 3 Perak	Banyaknya perubahan aturan (rules) baru yang lebih menguntungkan atlet bertipe menyerang (agresif) belum teradaptasi sempurna.
Panahan	1 Emas	1 Perak, 2 Perunggu	Kekalahan tipis di babak final karena faktor cuaca (angin kencang) dan mentalitas di poin kritis.
Atletik	1 Medali	2 Perunggu	Peningkatan catatan waktu pribadi (PB) atlet pada nomor lari jarak pendek (100m) melampaui ekspektasi. Tidak ada emas, tapi banyak atlet memecahkan rekor pribadi (PB).
Renang	1 Medali	0 Medali	Kesenjangan fisik dan teknik dengan atlet Asia Timur masih sangat lebar. Perlu perombakan sistem kepelatihan junior.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kemenpora telah mengoptimalkan penerapan sport science melalui sistem monitoring digital dan penguatan kurikulum sentra latihan DBON untuk meningkatkan kualitas atlet junior. Namun, proses ini menghadapi tantangan besar berupa regulasi pengadaan peralatan standar internasional yang memakan waktu lama sehingga menghambat waktu adaptasi atlet. Upaya sinkronisasi jadwal latihan dengan kalender akademik juga dilakukan demi menjaga keseimbangan mental dan fisik atlet muda di tengah padatnya kompetisi. Kendala administratif dalam pencairan dana hibah di awal tahun anggaran masih menjadi hambatan operasional bagi beberapa federasi cabang olahraga. Oleh karena itu, reformasi manajemen logistik dan fleksibilitas anggaran menjadi prioritas utama guna menjamin keberlanjutan prestasi di masa depan.

Upaya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam mencapai target kinerja pada Asian Youth Games (AYG) 2025 dilakukan melalui sistem pembinaan yang terintegrasi, mulai dari level daerah hingga pusat, serta dukungan manajemen organisasi yang profesional.

Konstruksi tahapan pembinaan dan dukungan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pembinaan Berjenjang (*Pipeline* Talenta)
   Kemenpora membangun ekosistem pembinaan atlet muda secara sistematis untuk memastikan ketersediaan atlet elit junior yang siap bersaing di tingkat regional seperti AYG. Keberhasilan di AYG 2025 merupakan validasi atas skema Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional (SPOBNAS) dan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional seperti bagan berikut:



Grafik 3.9 Jenjang Pembinaan Olahraga Prestasi

Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional (SPOPNAS)
Sentra Performa Tinggi (CYATC & SKODI): Atlet muda potensial dibina lebih lanjut di Cibubur *Youth Athlete Training Center* (CYATC) dan Sentra Khusus Olahragawan Disabilitas Indonesia (SKODI) untuk cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade.

Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Junior:
Atlet yang lolos seleksi masuk ke skema Pelatnas Junior. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 516 atlet elit junior terbina dalam Pelatnas, jauh melampaui target awal 175 orang. Persiapan Pelatnas AYG 2025 mengedepankan pemanfaatan *sport science* dan manajemen sistem informasi yang lebih akuntabel.



Grafik 3.10 Gambaran Pelaksanaan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional

Evaluasi menunjukkan bahwa Pelatnas jangka panjang yang terintegrasi dengan kompetisi rutin (seperti PRA POPNAS dan Kejuaraan Nasional Junior) efektif dalam membangun mental bertanding. Sebagaimana tercatat dalam rekapitulasi evaluasi DBON, kendala minimnya sinergi antar-lembaga pada periode sebelumnya mulai teratasi dengan adanya regulasi baru (seperti Permendagri No. 14 Tahun 2025) yang memberikan kepastian anggaran daerah untuk mendukung suplai atlet ke Pelatnas nasional. Fasilitasi pemusatan latihan yang intensif dan sistematis, memastikan bahwa atlet muda yang dikirim memiliki standar performa yang kompetitif di level Asia. Pengiriman kontingen pada AYG Bahrain 2025 dilakukan dengan prinsip selektivitas tinggi yang berbasis pada data performa. Indonesia menunjukkan dominasi yang kuat pada cabang olahraga bela diri dan akurasi. Meskipun terdapat tantangan dalam adaptasi peralatan dan iklim di Bahrain, secara keseluruhan, capaian peringkat Indonesia pada AYG 2025 telah memenuhi jalur (*on track*) menuju target besar RPJMN 2025-2029, yaitu meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia.

- Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional (SPOBNAS)
  Berdasarkan Permenpora No. 11 Tahun 2024, Kemenpora berhasil menyelaraskan program latihan baik di SPOPNAS di tingkat provinsi dan PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar) di tingkat kabupaten/kota dengan standar elit nasional, sehingga Kemenpora berhasil menjaring bibit potensial usia 15-18 tahun di 34 provinsi. Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional (SPOBNAS) adalah pusat pembinaan Olahraga Prestasi di provinsi yang diselenggarakan untuk menjaring dan membina bakat Olahragawan Muda usia 15 s.d 18 Tahun. SPOBNAS juga dapat menjaring dan membina bakat Olahragawan Muda usia di bawah 15 (lima belas) tahun dengan mempertimbangkan cabang Olahraga dengan spesialisasi awal (early specialization) dan Olahragawan Muda dengan potensi istimewa Program ini menjadi fondasi awal untuk memajukan olahraga prestasi di tingkat daerah. Partisipasi di AYG diposisikan sebagai puncak dari rantai kompetisi yang dimulai dari tingkat lokal, Pra-POPNAS, hingga kejuaraan nasional junior. Pola ini memperkuat mental bertanding atlet karena mereka telah terbiasa dengan tekanan kompetisi sebelum mencapai level Asia. Hal ini memastikan atlet muda yang berlaga di Bahrain memiliki basis teknik yang setara dengan lawan-lawan tangguh di Asia.



Grafik 3.11 Capaian Pembinaan Olahragawan Muda di Tahun 2025

SPOBNAS merupakan program Kemenpora yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi dan dikelola oleh organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani bidang Keolahragaan. *Evidence* menunjukkan bahwa atlet yang berlaga di AYG merupakan hasil dari sistem kompetisi berjenjang, mulai dari Pra-POPNAS hingga kejuaraan internasional, yang memperkuat mental bertanding dan kualitas teknik.

2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Keolahragaan

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pembinaan atlet secara berkelanjutan. Berdasarkan data sertifikasi yang ada, profil kompetensi pelatih menunjukkan angka yang sangat positif. Kemenpora total telah memfasilitasi sebanyak 1575 pelatih dengan komposisi:

- Sertifikasi Internasional: Sebanyak 180 pelatih telah memiliki lisensi internasional.
- Sertifikasi Nasional: Sebanyak 1395 pelatih telah mengantongi lisensi nasional.

Selain fasilitasi sertfikasi pelatih olahraga, Kemenpora juga memfasilitasi sertifikasi Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade/paralimpiade bersertifikasi Internasional, realisasi capaian kinerjanya didapat melalui Kegiatan Pelatihan Wasit Internasional Cabang Olahraga Anggar, Bulutangkis dan Dayung. Adapun wasit yang mengikuti kedua kegiatan pelatihan tersebut berjumlah 90 Orang. Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas pelatih (sekitar 85%) telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk pembinaan olahraga prestasi. Capaian ini diraih melalui Upaya Kementerian Pemuda dan Olahraga di tahun 2025 dengan melaksanakan :

- Pelatihan Pelatih & Wasit: Meliputi berbagai cabor seperti Angkat Besi, Atletik, Voley Pantai, Judo, Futsal dan Rowing.
- Tenaga Pendukung Olahraga: Meliputi pelatihan Massage, Psikologi, Gizi (*Nutrition*), Biomekanik, Sport Medicine, hingga penanganan kegawatdaruratan.
- Sertifikasi Khusus: Pelatihan fisik nasional dan internasional, serta pelatihan klasifikasi untuk NPC.

Pelaksanaan fasilitasi ini tersebar di seluruh Indonesia untuk memastikan pemerataan kualitas SDM, mencakup lokasi seperti: Jakarta, Yogyakarta, Banten, Jawa Barat (Bogor, Bekasi, Jatiluhur), Jawa Tengah (Solo, Semarang), Jawa Timur (Surabaya, Sidoarjo), Bali, Medan, Palembang, Batam, Mataram, dan Manado. Program pelatihan dan sertifikasi ini secara nyata mendukung peningkatan daya saing pelatih Indonesia di tingkat global. Sinergi antara tingginya jumlah pelatih tersertifikasi dan luasnya cakupan pelatihan di berbagai wilayah menjadi indikator keberhasilan dalam memperkuat fondasi prestasi olahraga nasional.

3. Dukungan Manajemen dan Fasilitasi Strategis

Untuk memastikan indikator sasaran strategis tercapai, Kemenpora memberikan berbagai dukungan lain:

- Fasilitasi *Multi-event*: Kemenpora memfasilitasi lembaga (NOC Indonesia) untuk pengiriman kontingen ke AYG 2025.
- Sinkronisasi DBON: Penguatan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan Manajemen Talenta Nasional memastikan program pembinaan tidak berjalan sektoral dan berbasis pada data kinerja atlet.

- Sinergi Pusat-Daerah (DOD): Keberhasilan penyusunan Desain Olahraga Daerah (DOD) di berbagai provinsi, yang didukung oleh Permendagri No. 14 Tahun 2025 terkait alokasi anggaran APBD 2026, telah memperkuat rantai pasokan atlet berbakat dari daerah untuk memperkuat Pelatnas.
- Penerbitan regulasi mengenai penghargaan bagi atlet dan pelatih berprestasi (NSPK) untuk menjaga motivasi dan profesionalisme di tingkat elit.

Konstruksi pembinaan yang berkelanjutan ini memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari identifikasi bakat di daerah hingga kompetisi internasional, berjalan dalam satu kesatuan sistem yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Kontingen Indonesia pada AYG juga tentunya didukung oleh efektivitas manajerial di lapangan yang cukup siap. Analisis performa mencatat perlunya penguatan pada aspek recovery dan dukungan medis di lapangan. Merujuk pada laporan teknis AYG, penggunaan fasilitas Medical Room untuk fisioterapi dan penanganan cedera secara cepat menjadi faktor kunci dalam menjaga kebugaran atlet di tengah jadwal pertandingan yang padat, fasilitasi fisioterapi dan tindakan medis cepat di *Medical Room* (seperti pada cabor Voli Indoor Putri) terbukti krusial dalam mempercepat proses *recovery* atlet pasca-pertandingan. Sinergi antara Kemenpora, NOC Indonesia, dan Federasi Nasional dalam proses akreditasi serta manajemen *Head Quarter* (HQ) di Bahrain memastikan atlet dapat fokus sepenuhnya pada performa tanpa terkendala isu non-teknis baik l*ogistic* maupun *administrative*, seperti akreditasi dan jadwal transportasi ke *venue* (seperti *Seef*, *Sanabis*, dan *Muharraq*), terkelola secara profesional sehingga atlet dapat berkonsentrasi penuh pada pertandingan.

Analisis Faktor Keberhasilan

Narasi keberhasilan Indonesia di Bahrain tidak terlepas dari kolaborasi yang solid. Dukungan teknis dan administratif diberikan melalui sinergi antara:

- Kemenpora: Sebagai penyedia regulasi dan fasilitasi anggaran pembinaan.
- NOC Indonesia: Dalam hal manajemen kontingen dan koordinasi internasional.
- Induk Organisasi Cabang Olahraga: Sebagai pelaksana teknis pembinaan atlet di lapangan. Keterlibatan seluruh pihak ini memastikan bahwa setiap kebutuhan atlet, mulai dari persiapan teknis hingga aspek logistik di lokasi pertandingan, terpenuhi secara optimal.

Data menunjukkan bahwa pengiriman atlet pada cabang olahraga unggulan seperti Angkat Besi dan Panjat Tebing yang sebelumnya sukses di Olimpiade Paris 2024, tetap menjadi pilar utama perolehan medali.

Efektivitas pembinaan terlihat dari konsistensi performa atlet muda di level Asia, yang menunjukkan bahwa sistem regenerasi melalui Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional (SPOBNAS) mulai memberikan dampak nyata pada output prestasi internasional. Capaian ini mencerminkan efektivitas pembinaan junior sebagai investasi jangka panjang menuju Asian Games 2026 dan Olimpiade 2028. Keberhasilan meraih emas pada cabang olahraga terukur (seperti angkat besi dan pencak silat) didukung oleh Penerapan *Sport Science* dalam Pelatnas Junior yaitu pemanfaatan data performa dan nutrisi yang lebih disiplin yang memperlihatkan. efektivitas program DBON sehingga menghasilkan atlet-atlet muda dengan ketahanan fisik yang setara dengan standar Asia. Sebagian besar peraih medali adalah lulusan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) yang dikelola langsung di bawah pengawasan Kemenpora, membuktikan bahwa jalur pembinaan berjenjang mulai membuahkan hasil. Peningkatan jumlah medali perunggu dan perak menunjukkan daya juang yang lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebagai hasil dari pendampingan psikolog olahraga selama pemusatan latihan.

Indikator kinerja Asian Youth Games 2025 telah tercapai secara administratif dan partisipatif, namun memerlukan perbaikan substansial pada aspek teknologi dan mentalitas juara untuk mencapai target 10 besar Asia di masa depan.

Kendala Utama yang dihadapi adalah

- Rendahnya efisiensi konversi medali perunggu/perak menjadi emas. Hal ini diidentifikasi sebagai akibat dari kurangnya simulasi pertandingan tekanan tinggi dan keterlambatan adaptasi peralatan bertanding standar terbaru.
- Adanya perubahan jadwal *event* internasional yang berdekatan dengan persiapan SEA Games 2025 menyebabkan pembagian fokus atlet dan tenaga ahli tidak maksimal.
- Pada cabang olahraga teknis (seperti balap sepeda atau menembak), atlet Indonesia masih menggunakan peralatan yang selangkah di belakang kompetitor utama seperti Tiongkok dan Uzbekistan.
- Kurangnya *try-out* internasional di luar kawasan ASEAN membuat atlet mengalami "demam panggung" saat menghadapi lawan tangguh dari Asia Timur dan Asia Tengah di babak krusial.
- Mekanisme hibah kepada induk organisasi (Pengurus Besar Cabor) yang masih bersifat tahunan (*annual*) menyulitkan perencanaan jangka panjang (*multi-year*).
- Kesulitan dalam pengiriman senjata (Menembak) dan kuda (*Equestrian*) ke Bahrain yang terkendala izin transit.

OUTCOME

Capaian Indonesia pada Asian Youth Games 2025 memberikan Outcome strategis berupa tervalidasinya sistem pembinaan atlet lapis kedua yang lebih terstruktur dan berkelanjutan di bawah kerangka Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Keberhasilan meraih total 28 medali secara inklusif di delapan cabang olahraga membuktikan adanya perluasan basis talenta potensial yang siap dipromosikan menjadi atlet elit senior di masa depan. Peningkatan performa pada cabang olahraga terukur, yang ditandai dengan pemecahan rekor pribadi (*personal best*) oleh atlet muda, menunjukkan bahwa intervensi *sport science* mulai memberikan dampak nyata terhadap standarisasi prestasi internasional. Selain itu, partisipasi ini berhasil memperkuat posisi kompetitif Indonesia di kawasan Asia serta memberikan pengalaman tanding kompetitif yang krusial bagi pengembangan ketahanan mental atlet di level dunia. Sebagai dampak lanjutan, keberhasilan ini diharapkan mampu memicu gairah olahraga di tingkat remaja sekaligus meningkatkan indeks pembangunan olahraga nasional melalui penciptaan figur teladan atlet muda yang berprestasi.

Penyediaan Jalur Regenerasi Atlet Elit yang Terukur *Outcome* utama dari keikutsertaan pada Asian Youth Games (AYG) 2025 adalah terciptanya kesinambungan regenerasi atlet nasional yang tervalidasi melalui kompetisi tingkat tinggi. Keberhasilan para atlet muda dalam mengamankan medali di berbagai cabang olahraga membuktikan bahwa pola pembinaan pada Sentra Latihan Olahraga Muda Potensial Nasional (SLOMPN) telah berhasil menciptakan "pipa talenta" yang stabil. Hal ini memastikan bahwa risiko stagnasi prestasi pasca-pensiunnya atlet senior dapat dimitigasi melalui ketersediaan basis data atlet junior yang memiliki profil performa setara dengan standar elit Asia.

Peningkatan Standar Performa dan Kompetensi Teknis Secara substansial, capaian ini menghasilkan *outcome* berupa elevasi standar teknis atlet muda Indonesia yang diukur melalui perbaikan catatan waktu, beban angkatan, dan akurasi poin dibandingkan rekor domestik sebelumnya. Fasilitasi keikutsertaan ini memberikan dampak pada penguasaan teknologi bertanding dan adaptasi terhadap regulasi internasional terbaru yang tidak bisa didapatkan melalui latihan lokal. Dengan demikian, investasi anggaran yang dialokasikan tidak hanya menjadi biaya operasional, melainkan bertransformasi menjadi aset keterampilan teknis dan kematangan bertanding yang akan menjadi modal utama menuju Olimpiade masa depan.

Penguatan Resiliensi Psikologis dan Mentalitas Juara Dampak jangka panjang yang dihasilkan adalah penguatan ketahanan mental (*mental toughness*) atlet muda dalam menghadapi tekanan atmosfer multi-event internasional. Pengalaman bertanding melawan dominasi negara-negara raksasa olahraga Asia memberikan pelajaran krusial mengenai manajemen stres dan taktik di lapangan yang menjadi pembeda antara atlet potensial dan atlet juara.

Outcome ini merupakan investasi non-fisik yang sangat berharga, di mana para atlet kini memiliki kepercayaan diri kolektif bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi, yang pada gilirannya akan meningkatkan budaya juara di lingkungan pelatnas junior secara keseluruhan.

Peningkatan Reputasi dan Posisi Tawar Olahraga Nasional Di tingkat global, *outcome* ini mempertegas posisi Indonesia dalam peta kekuatan olahraga Asia, sekaligus meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*) Indonesia di mata federasi internasional. Konsistensi perolehan medali di ajang AYG menjadi indikator bagi komunitas olahraga dunia bahwa program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) merupakan kebijakan yang kredibel dan berdampak nyata. Dampak turunannya adalah terbukanya peluang kerja sama strategis, seperti pertukaran pelatihan dan akses terhadap teknologi olahraga mutakhir dari negara-negara maju, yang akan mempercepat akselerasi prestasi olahraga nasional ke depan.

ANALISIS HASIL EFISIENSI



Indonesia tidak hanya sukses secara administratif dalam membelanjakan anggaran, tetapi juga sukses secara substansial dalam meraih peringkat yang ditargetkan dengan pengalokasian dana difokuskan pada cabang olahraga atau nomor pertandingan yang memiliki potensi medali paling tinggi. Adanya penghematan dalam pengadaan sarana, biaya perjalanan, atau akomodasi tanpa mengurangi kualitas dukungan terhadap atlet, hal ini disebabkan pengiriman kontingen berdasarkan seleksi yang ketat dan analisis performa sehingga kontingan yang diberangkatkan dapat memberikan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan. Sinergi kelembagaan dan oordinasi yang baik antara kementerian, federasi, dan tim ofisial mencegah terjadinya tumpang tindih anggaran (*overlapping*). Untuk meningkatkan nilai efisiensi di tahun mendatang perlu dilakukan re-orientasi pada tahun 2026 agar alokasi lebih besar dititikberatkan pada program training camp luar negeri bagi cabor akurasi dan permainan.

Tabel 3.18 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan dalam perolehan medali emas

Kegiatan	Kode KRO	RO	% Realisasi Anggaran	Target Output	Satuan	RVO	% RVO
3823 Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	BDC	003 Fasillitasi dan Pembinaan atas Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kompetisi Olahraga Junior/Pelajar (Orang)	99,92%	5.000	Orang	5.790	115,80%
3823 Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	PEA	001 Koordinasi Provinsi dengan Sentra Khusus Olahraga (kegiatan)	99,92%	3	kegiatan	5	166,67%
3823 Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	PEA	002 Koordinasi Kabupaten/Kota dengan PPLP (kegiatan)	100,00%	1	kegiatan	2	200,00%
3823 Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	PEA	003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga (kegiatan)	98,31%	1	kegiatan	1	100,00%
3823 Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	PFA	001 Pedoman Pengembangan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga (NSPK)	81,98%	1	NSPK	1	100,00%
3823 Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	QDC	001 Fasilitasi dan Pembinaan Talenta di Sentra Olahragawan Muda Nasional (Orang)	97,33%	245	Orang	200	81,63%
3823 Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	QDC	002 Fasilitasi dan Pembinaan Talenta Olahragawan Berbakat Nasional (Orang)	99,74%	6.000	Orang	6053	100,88%
3823 Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	QDC	005 Fasilitasi dan Pembinaan Talenta Potensial Olahraga pada Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade (Orang)	95,04%	99	Orang	77	77,78%
3823 Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	QEI	001 Bantuan Lembaga dalam Penyelenggaraan dan/ Keikutsertaan Pada Kompetisi Olahraga Junior/ Pelajar (Lembaga)	100,00%	57	Lembaga	40	70,18%
3824 Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi	AEA	001 Koordinasi Lintas Sektor Prasarana dan Sarana Olahraga prestasi yang terstandarisasi (kegiatan)	93,80%	1	kegiatan	1	100,00%
3824 Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi	AFA	001 NSPK Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi (NSPK)	98,68%	2	NSPK	2	100,00%
3824 Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi	PBH	001 Rancangan Kebijakan Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi (Rekomendasi Kebijakan)	99,80%	1	Rekomendasi Kebijaka	1	100,00%
3824 Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi	QEI	001 Lembaga yang Terfasilitasi Prasarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade	97,94%	4	Lembaga	5	125,00%
3824 Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi	QEI	002 Lembaga yang Terfasilitasi Sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade (Lembaga)	62,39%	145	Lembaga	201	138,62%
3824 Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi	QEI	003 Fasilitasi Sarana Olahraga Pendukung Pembinaan Atlet Junior (Lembaga)	100,00%	1	Lembaga	2	200,00%
3829 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	PBH	001 Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun (Rekomendasi Kebijakan)	99,63%	4	Rekomendasi Kebijaka		0,00%
3829 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	PDI	001 Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional (Orang)	98,96%	2.600	Orang		0,00%
3829 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	PDI	002 Pelatih Cabang Olahraga DBON yang bersertifikat Nasional dan Internasional (Orang)	98,91%	400	Orang		0,00%
3829 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	PEA	001 Koordinasi Cabor Pusat dan Daerah yang Terstandarisasi	96,61%	3	kegiatan		0,00%

Kegiatan	Kode KRO	RO	% Realisasi Anggaran	Target Output	Satuan	RVO	% RVO
3829 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	PEA	002 Pembinaan dan Pengelolaan ASN Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih	99,87%	4	kegiatan		0,00%
3829 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	PFA	001 Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang tersusun (NSPK)	92,76%	2	NSPK		0,00%
3829 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	QDB	001 Lembaga Keolahragaan yang terfasilitasi dalam Standardisasi Organisasi Olahraga (Lembaga)	99,71%	12	Lembaga		0,00%
3829 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	QDB	002 Induk Organisasi Cabang Olahraga Unggulan yang terbina dan berkembang(Lembaga)	89,91%	6	Lembaga		0,00%
3829 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	QEA	001 Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas (Orang)	78,58%	10	Orang		0,00%
3833 Pembinaan Olahragawan Elit	PEA	001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional dan Manajemen Talenta Nasional (kegiatan)	98,64%	3	kegiatan	1	33,33%
3833 Pembinaan Olahragawan Elit	PFA	001 NSPK Olahraga Prestasi yang Tersusun (NSPK)	99,36%	1	NSPK	2	200,00%
3833 Pembinaan Olahragawan Elit	QDC	001 Olahragawan Talenta Unggul yang Terbina dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Orang)	100,00%	845	Orang	797	94,32%
3833 Pembinaan Olahragawan Elit	QDC	002 Olahragawan Talenta Unggul yang Terfasilitasi dalam Pemusatan Pelatihan Elite Junior Nasional (Orang)	98,40%	300	Orang	68	22,67%
3833 Pembinaan Olahragawan Elit	QDC	003 Pemberian Penghargaan Olahragawan Berprestasi (Orang)	88,89%	756	Orang	1	0,13%
3833 Pembinaan Olahragawan Elit	QEI	002 Kejuaraan Multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi (Lembaga)	99,97%	22	Lembaga	2	9,09%
3833 Pembinaan Olahragawan Elit	QEI	003 Lembaga yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kejuaraan Single-event Olahraga Prestasi	99,92%	44	Lembaga	9	20,45%
3833 Pembinaan Olahragawan Elit	QEI	004 Lembaga yang Terfasilitasi dalam Penyelanggaraan Kejuaraan Single-event Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Berbasis	97,45%	29	Lembaga	14	48,28%
1721 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	EBA	957 Layanan Hukum (Layanan)	96,30%	1	Layanan	1	100,00%
1721 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	EBA	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	99,99%	1	Layanan	1	100,00%
1721 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	EBA	959 Layanan Protokoler (Layanan)	96,66%	1	Layanan	1	100,00%
1721 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	EBA	962 Layanan Umum (Layanan)	97,52%	1	Layanan	1	100,00%
1721 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	EBA	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	99,86%	1	Layanan	1	100,00%
1721 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	EBC	957 Layanan Manajemen SDM (Layanan)	99,47%	200	Layanan	365	182,50%
1721 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	EBD	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	99,62%	1	Dokumen	1	100,00%
1721 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	EBD	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	12,17%	1	Dokumen	1	100,00%
1721 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	FAB	001 Layanan Sistem Informasi	94,77%	1	Sistem Informasi	1	100,00%

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pada Asian Youth Games 2025, Indonesia menunjukkan pertumbuhan kedalaman skuad dengan distribusi medali yang lebih merata di delapan cabang olahraga, namun masih menghadapi tantangan dalam efisiensi konversi medali emas jika dibandingkan dengan negara papan atas Asia. Hasil *benchmarking* menunjukkan bahwa meskipun atlet muda kita memiliki keunggulan fisik dan teknis yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih mengalami gap teknologi peralatan dan jam terbang internasional dibandingkan Thailand dan negara-negara Asia Timur. Tingginya perolehan medali perunggu membuktikan bahwa atlet Indonesia telah mampu menembus dominasi level Asia dan berada di ambang batas juara, namun memerlukan penguatan mentalitas final serta modernisasi sarana tanding untuk naik ke peringkat 10 besar. Secara keseluruhan, capaian ini memvalidasi kemajuan sistem pembinaan DBON namun sekaligus memberikan sinyal urgensi transformasi pada aspek pendukung performa agar mampu bersaing lebih tajam di level tertinggi.

Dalam melakukan evaluasi, Kemenpora melakukan *benchmarking* terhadap negara-negara pesaing di kawasan Asia Tenggara dan Asia secara luas:

Tabel 3.19 *Benchmarking* perolehan medali dengan negara lain di Asia

Negara	Emas	Perak	Perunggu	Peringkat (Asia)	Keterangan
Tiongkok	63	14	35	1	Dominasi total di semua lini
Uzbekistan	37	16	28	2	Fokus pada olahraga beladiri & berat
Thailand	15	15	18	8	Unggul di kawasan ASEAN
Filipina	7	7	10	11	Efektivitas konversi emas tinggi
Indonesia	4	6	18	15	Dominasi pada medali perunggu

Dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia menunjukkan karakteristik "*Tall Talent, Short Experience*". Thailand yang berada pada peringkat 8 unggul dalam cabor atletik dan renang karena sistem kompetisi junior mereka berlangsung sepanjang tahun. Filipina di peringkat 11 ternyata memiliki efisiensi tinggi yaitu 7 Emas dari 24 Medali karena hanya mengirim atlet dengan peluang emas di atas 80%. Indonesia dibanding Filipina lebih unggul dalam jumlah medali total sebanyak 28 medali, namun lemah dalam pengamanan medali emas di nomor-nomor krusial.

PERBAIKAN KINERJA

Perbaikan kinerja di masa mendatang akan difokuskan pada akselerasi konversi medali melalui modernisasi peralatan tanding standar internasional dan penguatan strategi peaking performa berbasis *data analytics*. Kemenpora berkomitmen mereformasi manajemen birokrasi pengadaan sarana serta fleksibilitas anggaran guna memastikan atlet junior memiliki waktu adaptasi alat yang cukup sebelum kompetisi dimulai. Program "Global Talent Exchange" dan peningkatan frekuensi simulasi pertandingan tekanan tinggi akan diwajibkan untuk mengikis *gap* jam terbang internasional serta memperkuat resiliensi mental atlet di babak final. Selain itu, integrasi database performa atlet dari seluruh sentra latihan akan dioptimalkan demi menjamin keberlanjutan pembinaan yang lebih presisi dan kompetitif. Sinergi antara teknologi olahraga dan penguatan psikologi juara ini diharapkan menjadi kunci utama dalam mendorong posisi Indonesia menembus jajaran 10 besar Asia pada edisi berikutnya.

Perbaikan kinerja di masa mendatang akan difokuskan pada akselerasi konversi medali melalui :

1. Mengembangkan platform monitoring atlet junior dari seluruh PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar) agar perkembangan fisik dan medik mereka dapat dipantau langsung oleh tim ahli Kemenpora.
2. Memastikan seluruh atlet lapis kedua tidak lagi berlatih secara terpisah, melainkan terpusat di Cibubur *Youth Training Center* (CYTC) untuk standarisasi nutrisi dan fasilitas.
3. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas pola pencairan dana ke cabor menjadi sistem *Multi-Year* untuk kegiatan yang bersifat berkelanjutan (seperti kontrak pelatih asing) maupun pembinaan atlet, guna menghindari kekosongan program di awal tahun anggaran.
4. Mengadakan simulasi pertandingan dengan atmosfer yang menyerupai event Internasional (mengundang lawan tanding dari luar negeri) untuk memperkuat mental bertanding atlet muda.
5. Menyiapkan kebijakan terkait potensi atlet junior untuk disekolahkan ke luar negeri sekaligus berlatih di negara-negara dengan keunggulan cabor tertentu seperti Amerika Serikat untuk cabor renang

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2.4

PERINGKAT INDONESIA PADA ASIAN YOUTH PARA GAMES

Pindai QR untuk bahan dan data pendukung lainnya.

Peringkat 6 Indonesia pada Asian Youth Para Games merefleksikan efektivitas pembinaan talenta muda para olahraga, yang berdampak pada keberlanjutan prestasi, peningkatan daya saing internasional, serta penguatan kedigdayaan olahraga nasional.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada pertumbuhan ekonomi sosial

KATA KUNCI TOPIK

- Capaian Kinerja
- Analisis Program/Kegiatan
- Nilai Efisiensi
- Perbandingan Capaian Kinerja
- Perbaikan Kinerja

AYPG 2025 merupakan ajang multi-cabang olahraga disabilitas terbesar di Asia untuk kategori atlet muda (junior). Asian Youth Para Games (AYPG) ke-5 tahun 2025 berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, mulai tanggal 7 hingga 14 Desember 2025. Ajang ini diikuti oleh lebih dari 1.300 atlet muda dari 35 negara yang berkompetisi dalam 11 cabang olahraga, yaitu : Para Atletik, Para Renang, Para Bulu Tangkis, Para Angkat Berat (*Powerlifting*), Boccia, Goalball, Para Panahan, Para Taekwondo, Para Tenis Meja, Bola Basket Kursi Roda, dan Para Panco (*Armwrestling*).

Event ini menjadi panggung utama bagi 131 atlet junior elit Indonesia untuk menunjukkan hasil pembinaan di level internasional.

CAPAIAN KINERJA PERINGKAT INDONESIA PADA ASIAN YOUTH PARAGAMES



Gambar 3.6 Peringkat Indonesia pada
Asian Youth Para Games 2025

Capaian kinerja Indonesia pada Asian Youth Para Games (AYPG) 2025 yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab meskipun dibandingkan tahun 2021 Indonesia mengalami penurunan peringkat dari 5 ke 6 namun secara kuantitas medali dapat menggambarkan lonjakan prestasi yang sangat signifikan dan melampaui target awal yang ditetapkan oleh pemerintah. Pencapaian ini dianggap sebagai kejutan besar karena *National Paralympic Committee* (NPC) Indonesia awalnya hanya menargetkan 4 medali emas dan total 22 medali, namun hasil akhir Indonesia berhasil memboyong total 89 medali dengan komposisi 31 emas, 34 perak, dan 24 perunggu yang menunjukkan keberhasilan regenerasi atlet paralimpiade muda Indonesia. Hasil dari evaluasi kinerja menunjukan bahwa Para Renang menjadi "lumbung" medali utama dengan total 26 medali (11 emas, 11 perak, dan 4 perunggu), dan dari cabor para Atletik dan para Angkat Berat memberikan kontribusi emas yang signifikan bagi posisi Indonesia di klasemen 10 besar.

Beberapa atlet muda tampil sangat menonjol dan menjadi bintang di ajang ini:

- Abdil Majid Rahman (Para Renang): Meraih 4 medali emas dan 2 medali perak dari enam nomor yang diikuti.
- Siti Aisyah (Para Renang): Menyumbangkan 4 medali emas untuk Indonesia.
- Furgon Habbil Winata: Peraih emas pertama di ajang ini.

Capaian kinerja ini sekaligus menegaskan keberhasilan Kemenpora dalam membina atlet disabilitas usia muda sebagai basis prestasi menuju Asian Para Games 2026 dan Paralimpiade masa depan. Perolehan total medali Indonesia pada Asian Youth Para Games mencerminkan adanya akselerasi performa yang melampaui kurva pertumbuhan normal. Secara teknis, keberhasilan melampaui target emas hingga 375% menunjukkan bahwa sistem rekrutmen atlet muda melalui jalur daerah hingga nasional telah berjalan secara integratif. Prestasi ini membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar berpartisipasi, namun telah memiliki "cetak biru" juara yang efektif pada level usia muda, yang mampu mengonversi potensi bakat menjadi medali di panggung internasional.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kemenpora telah mengoptimalkan penerapan *sport science* melalui sistem monitoring digital dan penguatan kurikulum sentra latihan DBON untuk meningkatkan kualitas atlet junior. Namun, proses ini menghadapi tantangan besar berupa regulasi pengadaan peralatan standar internasional yang memakan waktu lama sehingga menghambat waktu adaptasi atlet. Upaya sinkronisasi jadwal latihan dengan kalender akademik juga dilakukan demi menjaga keseimbangan mental dan fisik atlet muda di tengah padatnya kompetisi. Kendala administratif dalam pencairan dana hibah di awal tahun anggaran masih menjadi hambatan operasional bagi beberapa federasi cabang olahraga. Oleh karena itu, reformasi manajemen logistik dan fleksibilitas anggaran menjadi prioritas utama guna menjamin keberlanjutan prestasi di masa depan.

Upaya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam mencapai kinerja pada Asian Youth Para Games (AYPG) 2025 dikonstruksikan melalui penguatan ekosistem olahraga disabilitas yang inklusif, mulai dari penjaringan bakat di tingkat dasar hingga peningkatan kapasitas tenaga pendukung dan fasilitasi kompetisi internasional.

1. **Tahapan Pembinaan dan Regenerasi (*Talent Pipeline*).** Kemenpora memastikan keberlanjutan prestasi atlet disabilitas melalui sistem pembinaan berjenjang yang terintegrasi dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON melalui:
    a. **Sentra Khusus Olahragawan Disabilitas Indonesia (SKODI).** Pembinaan dimulai dari level pelajar (usia 12-20 tahun) di SKODI sebagai pusat pembinaan performa tinggi (*high performance*) khusus untuk atlet disabilitas potensial pada cabang olahraga Paralimpiade. Jumlah olahragawan elit Paralimpiade level dunia yang terbina pada 2025 mencapai 185 orang, atau 185% dari target awal 100 orang.
    b. **Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Junior.** Kemenpora memfasilitasi pembinaan atlet elit junior Paralimpiade dalam skema Pelatnas untuk memastikan transisi yang mulus ke level senior. Pada tahun 2025, Kemenpora berhasil membina 131 atlet junior elit Paralimpiade (melampaui target 120 orang), yang menjadi stok talenta utama untuk ajang internasional seperti AYPG.
2. **Peningkatan Kapasitas Tenaga Keolahragaan.** Pencapaian medali didukung oleh melalui pelatihan bagi pelatih cabang olahraga Paralimpiade (seperti pelatih fisik, gizi, hingga klasifikasi khusus NPC) untuk memperkuat pemahaman *sport science* dalam menangani atlet disabilitas.
3. **Dukungan Manajemen dan Fasilitasi Strategis.** Dukungan manajemen organisasi menjadi kunci dalam memastikan kesiapan kontingen Indonesia:
    a. **Fasilitasi Lembaga (NPC Indonesia):** Kemenpora memberikan bantuan dan fasilitasi penuh kepada *National Paralympic Committee* (NPC) Indonesia sebagai lembaga pengampu olahraga disabilitas untuk persiapan dan pengiriman kontingen ke AYPG 2025.
    b. **Eksposur Kompetisi:** Kemenpora memfasilitasi keikutsertaan atlet dalam berbagai event kualifikasi dan kejuaraan dunia Paralimpiade sepanjang tahun 2025 sebagai ajang uji coba sebelum AYPG.
    c. **Kepastian Regulasi:** Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) penyaluran bantuan pemerintah memastikan dukungan pendanaan bagi tenaga dan organisasi keolahragaan disabilitas berjalan transparan dan akuntabel.

Melalui integrasi antara pembinaan usia dini di SKODI, penguatan kompetensi pelatih, dan fasilitasi anggaran yang efektif melalui NPC Indonesia, Kemenpora berhasil menjadikan AYPG 2025 sebagai landasan kokoh bagi reputasi olahraga disabilitas Indonesia di kancah dunia.

Meskipun Indonesia meraih prestasi pada AYPG 2025, terdapat beberapa hambatan strategis dan teknis yang perlu diidentifikasi. Analisis Kendala berfungsi sebagai mitigasi risiko dan ruang perbaikan untuk siklus berikutnya.

1. Kendala Klasifikasi Atlet (*Classification Risks*)
Salah satu tantangan terbesar dalam olahraga disabilitas adalah dinamika klasifikasi medis dan fungsional. Adanya atlet yang mengalami perubahan klasifikasi (*re-classification*) sesaat sebelum pertandingan dimulai oleh tim medis internasional. Hal ini sering kali memaksa atlet bertanding di kelas yang lebih berat atau justru kehilangan nomor perlombaan spesialisasi mereka. Hal ini tentu saja berdampak bagi ketidakpastian dalam proyeksi medali pada nomor-nomor tertentu dan tekanan psikologis bagi atlet muda.

2. Kesenjangan Fasilitas dan Teknologi Olahraga (*Sport Science*)
Meskipun performa fisik atlet sangat tinggi, dukungan infrastruktur masih menemui hambatan seperti keterbatasan akses terhadap peralatan tanding berstandar mutakhir (seperti kursi roda balap karbon, prostetik lari terbaru, atau sensor analisis gerak) yang harganya sangat mahal dan distribusinya terbatas di Indonesia. Indonesia masih sedikit tertinggal dalam aspek mekanis dibandingkan negara seperti Jepang atau Tiongkok, sehingga atlet harus mengandalkan kekuatan fisik murni untuk menutupi celah teknologi tersebut.

3. Keterbatasan Database Talenta di Tingkat Akar Rumput
Proses *talent scouting* masih bersifat sporadis di beberapa wilayah. Belum meratanya identifikasi talenta muda disabilitas di daerah terpencil. Banyak calon atlet potensial yang belum terdata karena kendala akses informasi dan fasilitas olahraga disabilitas di tingkat kabupaten/kota yang belum memadai. Ketergantungan pada sentra-sentra pembinaan tertentu (seperti Solo) yang memicu risiko kejenuhan stok atlet di masa depan jika tidak segera dilakukan ekspansi pencarian bakat.

4. Kendala Psikologis dan Jam Terbang Internasional
Faktor non-teknis pada atlet usia muda sering kali menjadi penentu hasil akhir. Kurangnya frekuensi uji coba (*try-out*) internasional bagi atlet muda sebelum ajang besar seperti AYPG. Banyak atlet yang mengalami "demam panggung" atau kendala adaptasi cuaca/lingkungan karena ini adalah kali pertama mereka bertanding di luar negeri.

5. Sinkronisasi Administrasi dan Pendanaan
Hambatan birokrasi yang lazim terjadi dalam manajemen olahraga besar, terutama ketepatan waktu dalam pencairan anggaran untuk pengadaan peralatan spesifik cabor yang harus diimpor, yang sering kali terkendala prosedur pengadaan barang dan jasa, sehingga atlet sering kali baru menerima peralatan baru mendekati hari keberangkatan, sehingga waktu adaptasi dengan alat tanding menjadi sangat minim.

Analisis Faktor Keberhasilan dan Kegagalan

Berikut adalah faktor keberhasilan yang mendorong prestasi Indonesia dalam mencapai raihan 89 medali dan faktor penghambat (kendala) yang menghalangi pencapaian peringkat yang lebih tinggi pada Asian Youth Para Games (AYPG) 2025

Tabel 3.20 Analisis faktor keberhasilan dan penghambat AYPG 2025

Aspek	Faktor Keberhasilan (*Key Success Factors*)	Faktor Penghambat (Analisis Kendala)
Teknis & Strategi	Analisis kompetisi yang akurat untuk mengidentifikasi nomor dengan peluang medali tinggi (*Strategic Mapping*).	Perubahan klasifikasi medis oleh tim internasional sesaat sebelum laga dapat membatalkan nomor spesialisasi atlet.
Sistem Pembinaan	Sentralisasi Latihan. Model Pelatnas terpusat di Solo yang memungkinkan pengawasan performa atlet secara harian (24/7).	Database Akar Rumput: Identifikasi talenta di daerah terpencil masih sporadis dan belum merata, sehingga stok atlet belum optimal.
Teknologi & Sains	Pemanfaatan *Sport Science* seperti monitoring digital, nutrisi spesifik, dan teknik pemulihan modern untuk menjaga kebugaran atlet.	Keterbatasan akses terhadap beberapa peralatan tanding mutakhir (seperti kursi roda karbon) karena harga mahal dan distribusi terbatas.
Kesiapan Mental	Kejelasan kebijakan bonus dan apresiasi dari Kemenpora memberikan ketenangan psikologis bagi atlet.	Kurangnya frekuensi uji coba internasional (t*ry-out*) yang menyebabkan munculnya kendala adaptasi atau "demam panggung".
Manajemen & Regulasi	Sinergi dan kolaborasi antara Kemenpora, NPC Indonesia, dan sponsor memastikan rencana latihan terlaksana 100%.	Kendala administratif dalam pencairan dana hibah dan prosedur pengadaan barang impor yang memakan waktu lama.

ANALISIS HASIL EFISIENSI



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja indikator Asian Youth Para Games (AYPG) 2025, penggunaan anggaran dalam program ini dikategorikan dalam status "Tidak Efisien" dengan perolehan nilai indeks sebesar 1,24. Beberapa faktor yang menyebabkan nilai efisiensi ini belum optimal antara lain: adanya kendala dalam pencairan dana hibah di awal tahun anggaran yang mengganggu ritme operasional federasi, besarnya anggaran yang terserap untuk pengadaan peralatan standar internasional yang harus diimpor, namun waktu adaptasi atlet terhadap alat tersebut sangat minim karena prosedur pengadaan yang lama serta penggunaan anggaran yang maksimal belum bisa mengantisipasi risiko tak terduga seperti perubahan klasifikasi medis (*re-classification*) atlet yang membatalkan nomor-nomor potensial medali di lapangan.

Tabel 3.21 Alokasi Rincian Output intervensi pada indikator Peringkat Indonesia AYPG

Kegiatan	Kode KRO	RO	% Realisasi Anggaran	Target Output	Satuan	RVO	% RVO
3823 Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	BDC	003 Fasilitasi dan Pembinaan atas Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kompetisi Olahraga Junior/Pelajar (Orang)	99,92%	5.000	Orang	5.790	115,80%
3823 Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	PEA	001 Koordinasi Provinsi dengan Sentra Khusus Olahraga (kegiatan)	99,92%	3	kegiatan	5	166,67%
3823 Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	PEA	002 Koordinasi Kabupaten/Kota dengan PPLP (kegiatan)	100,00%	1	kegiatan	2	200,00%
3823 Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	PEA	003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga (kegiatan)	98,31%	1	kegiatan	1	100,00%
3823 Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	PFA	001 Pedoman Pengembangan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga (NSPK)	81,98%	1	NSPK	1	100,00%
3823 Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	QDC	001 Fasilitasi dan Pembinaan Talenta di Sentra Olahragawan Muda Nasional (Orang)	97,33%	245	Orang	200	81,63%
3823 Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	QDC	002 Fasilitasi dan Pembinaan Talenta Olahragawan Berbakat Nasional (Orang)	99,74%	6.000	Orang	6053	100,88%
3823 Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	QDC	005 Fasilitasi dan Pembinaan Talenta Potensial Olahraga pada Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade (Orang)	95,04%	99	Orang	77	77,78%
3823 Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahragawan Muda	QEI	001 Bantuan Lembaga dalam Penyelenggaraan dan/ Keikutsertaan Pada Kompetisi Olahraga Junior/ Pelajar (Lembaga)	100,00%	57	Lembaga	40	70,18%
3824 Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi	AEA	001 Koordinasi Lintas Sektor Prasarana dan Sarana Olahraga prestasi yang terstandarisasi (kegiatan)	93,80%	1	kegiatan	1	100,00%
3824 Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi	AFA	001 NSPK Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi (NSPK)	98,68%	2	NSPK	2	100,00%
3824 Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi	PBH	001 Rancangan Kebijakan Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi (Rekomendasi Kebijakan)	99,80%	1	Rekomendasi Kebijaka	1	100,00%
3824 Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi	QEI	001 Lembaga yang Terfasilitasi Prasarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade	97,94%	4	Lembaga	5	125,00%
3824 Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi	QEI	002 Lembaga yang Terfasilitasi Sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade (Lembaga)	62,39%	145	Lembaga	201	138,62%
3824 Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi	QEI	003 Fasilitasi Sarana Olahraga Pendukung Pembinaan Atlet Junior (Lembaga)	100,00%	1	Lembaga	2	200,00%
3829 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	PBH	001 Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun (Rekomendasi Kebijakan)	99,63%	4	Rekomendasi Kebijaka		0,00%
3829 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	PDI	001 Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional (Orang)	98,96%	2.600	Orang		0,00%
3829 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	PDI	002 Pelatih Cabang Olahraga DBON yang bersertifikat Nasional dan Internasional (Orang)	98,91%	400	Orang		0,00%
3829 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	PEA	001 Koordinasi Cabor Pusat dan Daerah yang Terstandarisasi	96,61%	3	kegiatan		0,00%

Kegiatan	Kode KRO	RO	% Realisasi Anggaran	Target Output	Satuan	RVO	% RVO
3829 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	PEA	002 Pembinaan dan Pengelolaan ASN Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih	99,87%	4	kegiatan		0,00%
3829 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	PFA	001 Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang tersusun (NSPK)	92,76%	2	NSPK		0,00%
3829 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	QDB	001 Lembaga Keolahragaan yang terfasilitasi dalam Standardisasi Organisasi Olahraga (Lembaga)	99,71%	12	Lembaga		0,00%
3829 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	QDB	002 Induk Organisasi Cabang Olahraga Unggulan yang terbina dan berkembang(Lembaga)	89,91%	6	Lembaga		0,00%
3829 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	QEA	001 Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas (Orang)	78,58%	10	Orang		0,00%
3833 Pembinaan Olahragawan Elit	PEA	001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional dan Manajemen Talenta Nasional (kegiatan)	98,64%	3	kegiatan	1	33,33%
3833 Pembinaan Olahragawan Elit	PFA	001 NSPK Olahraga Prestasi yang Tersusun (NSPK)	99,36%	1	NSPK	2	200,00%
3833 Pembinaan Olahragawan Elit	QDC	001 Olahragawan Talenta Unggul yang Terbina dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Orang)	100,00%	845	Orang	797	94,32%
3833 Pembinaan Olahragawan Elit	QDC	002 Olahragawan Talenta Unggul yang Terfasilitasi dalam Pemusatan Pelatihan Elite Junior Nasional (Orang)	98,40%	300	Orang	68	22,67%
3833 Pembinaan Olahragawan Elit	QDC	003 Pemberian Penghargaan Olahragawan Berprestasi (Orang)	88,89%	756	Orang	1	0,13%
3833 Pembinaan Olahragawan Elit	QEI	002 Kejuaraan Multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi (Lembaga)	99,97%	22	Lembaga	2	9,09%
3833 Pembinaan Olahragawan Elit	QEI	003 Lembaga yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kejuaraan Single-event Olahraga Prestasi	99,92%	44	Lembaga	9	20,45%
3833 Pembinaan Olahragawan Elit	QEI	004 Lembaga yang Terfasilitasi dalam Penyelanggaraan Kejuaraan Single-event Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Berbasis	97,45%	29	Lembaga	14	48,28%
1721 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	EBA	957 Layanan Hukum (Layanan)	96,30%	1	Layanan	1	100,00%
1721 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	EBA	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	99,99%	1	Layanan	1	100,00%
1721 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	EBA	959 Layanan Protokoler (Layanan)	96,66%	1	Layanan	1	100,00%
1721 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	EBA	962 Layanan Umum (Layanan)	97,52%	1	Layanan	1	100,00%
1721 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	EBA	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	99,86%	1	Layanan	1	100,00%
1721 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	EBC	957 Layanan Manajemen SDM (Layanan)	99,47%	200	Layanan	365	182,50%
1721 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	EBD	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	99,62%	1	Dokumen	1	100,00%
1721 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	EBD	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	12,17%	1	Dokumen	1	100,00%
1721 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	FAB	001 Layanan Sistem Informasi	94,77%	1	Sistem Informasi	1	100,00%

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Melalui analisis *benchmarking*, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah bertransformasi dari **pesaing regional menjadi kekuatan kontinental.** Dengan melampaui standar prestasi negara-negara maju di Asia. Indonesia kini memiliki posisi tawar yang kuat dalam penentuan kebijakan olahraga disabilitas di tingkat internasional. Capaian ini memberikan validasi bahwa model pembinaan atlet muda Indonesia saat ini merupakan salah satu yang terbaik di Asia.

Tabel 3.22 Perbandingan capaian medali AYPG 2025 dengan negara lain

Rank	Flag	Country	Gold	Silver	Bronze	Total
1		Uzbekistan	125	77	52	254
2		Islamic Republic of Iran	73	91	97	261
3		Japan	48	26	16	90
4		India	38	32	40	110
5		Thailand	37	37	33	107
6		Indonesia	31	34	24	89

Indonesia berhasil menempati peringkat ke-6 di bawah negara-negara raksasa olahraga seperti Uzbekistan, Iran, Jepang, India, dan Thailand. Melalui perbandingan hasil akhir klasemen, Indonesia telah berhasil mentransformasi posisinya dari sekadar kompetitor regional menjadi kekuatan signifikan di level Asia. Keberhasilan ini sangat strategis karena Indonesia mampu mengungguli negara-negara dengan tradisi olahraga disabilitas yang kuat seperti Kazakhstan. Meskipun masih terdapat jarak medali yang cukup lebar dengan Uzbekistan di posisi puncak, Indonesia telah berhasil memperkecil *gap* performa pada cabang olahraga terukur (Para Renang dan Para Atletik). Indonesia kini menjadi *benchmark* bagi negara-negara Asia lainnya dalam hal kecepatan transformasi prestasi atlet muda disabilitas.

Di tingkat Asia Tenggara, Indonesia menegaskan statusnya sebagai pemimpin pasar (*Market Leader*) dalam pembinaan atlet paralimpiade muda. Thailand sebelumnya menjadi tolok ukur utama di ASEAN. Namun, dalam ajang ini, Indonesia mampu bersaing ketat dengan Thailand yang berada di posisi ke-5, menunjukkan bahwa Indonesia kini menjadi "*Center of Excellence*" baru di kawasan ini. Sistem pencarian bakat Indonesia terbukti lebih unggul dalam menemukan atlet potensial di kelas disabilitas tertentu yang menghasilkan *Return on Investment* (RoI) prestasi yang lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.

PERBAIKAN KINERJA

Perbaikan kinerja berkelanjutan pasca-AYPG 2025 akan difokuskan pada institusionalisasi sistem pembinaan dan digitalisasi manajemen talenta. Dengan menjadikan hasil tahun ini sebagai standar kinerja baru, Kemenpora bersama NPC Indonesia berkomitmen untuk memastikan transisi mulus atlet muda menuju panggung Paralimpiade, guna menjaga stabilitas posisi Indonesia dalam 6 besar Asia.

Untuk memastikan lonjakan prestasi pada Asian Youth Para Games (AYPG) 2025 tidak menjadi fenomena sesaat (*one-hit wonder*), diperlukan strategi **Perbaikan Kinerja Berkelanjutan (*Continuous Performance Improvement*)**. Strategi ini dirancang untuk mengonversi kesuksesan atlet muda menjadi supremasi jangka panjang di level senior (Paralimpiade).

1. Penguatan *Long-Term Athlete Development* (LTAD)
Keberhasilan di level *youth* harus dijembatani agar tidak terputus saat memasuki level senior dengan menyusun *career path* yang jelas bagi peraih medali AYPG 2025 untuk langsung masuk ke dalam program Pelatnas Senior dengan pemantauan khusus. Menjadikan capaian AYPG 2025 sebagai *baseline* (standar minimum) baru untuk seleksi kontingen di masa depan, sehingga standar kualitas atlet yang dikirim terus meningkat. Menerapkan sistem *Sport Science* berbasis data untuk memantau perkembangan fisik dan teknik atlet secara longitudinal (berkelanjutan) guna mencegah burnout di usia dini.

2. Diversifikasi dan Ekspansi Cabang Olahraga Unggulan
Indonesia sangat kuat di Para Renang, namun perlu memperluas basis medali pada cabor lain. Mengadopsi pola kepelatihan dan manajemen cabor Para Renang untuk diterapkan pada cabor yang masih memiliki gap medali lebar (seperti Para Tenis Meja atau Para Bulu Tangkis) dan mulai berinvestasi pada peralatan dan pelatih spesialis untuk cabor yang mengandalkan teknologi (seperti *wheelchair racing* atau *archery*) guna memperkecil ketertinggalan dari negara papan atas Asia (Tiongkok).

3. Institusionalisasi Talent Scouting Berbasis Digital
Melakukan digitalisasi dalam pencarian bakat di seluruh daerah di Indonesia dengan mulai membangun database atlet disabilitas nasional dengan sistem informasi terpadu yang memuat data performa atlet muda dari tingkat PEPARNAS (Pekan Paralimpiade Nasional) hingga level internasional.

4. Optimalisasi Anggaran Berbasis *Output* (*Performance-Based Budgeting*)
Memastikan setiap rupiah yang dialokasikan berdampak langsung pada kenaikan peringkat dengan mengalokasikan anggaran lebih besar pada aspek-aspek yang terbukti mendongkrak performa secara signifikan, seperti uji coba internasional (*try-out*) ke negara-negara dengan peringkat di atas Indonesia.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2.5

PDB INDUSTRI OLAHRAGA

Pindai QR untuk bahan dan data pendukung lainnya.

Industri olahraga Indonesia tengah memasuki fase transisi menuju sektor ekonomi strategis yang mampu menyumbang nilai tambah signifikan terhadap pertumbuhan nasional.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada pertumbuhan ekonomi sosial

KATA KUNCI TOPIK

- Capaian Kinerja
- Analisis Program/Kegiatan
- *Outcome*
- Nilai Efisiensi
- Perbandingan Capaian Kinerja
- Perbaikan Kinerja

Industri olahraga di Indonesia telah melampaui batas aktivitas fisik dan kini diposisikan sebagai portofolio ekonomi baru yang strategis. Sesuai dengan mandat Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), optimalisasi industri olahraga diarahkan untuk berkontribusi langsung terhadap PDB melalui ekosistem manufaktur, jasa, dan pariwisata berbasis olahraga. Paradigma lama bahwa anggaran olahraga sering dianggap sebagai *cost center* (pusat biaya) melalui hibah dan bantuan sosial, namun, di tahun 2025-2026, terjadi pergeseran paradigma di mana olahraga dipandang sebagai Produk Industri (*commodity*). Meskipun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tergolong kecil dibandingkan negara maju, trennya menunjukkan grafik yang terus menanjak secara signifikan. Ekonomi olahraga tidak hanya soal tiket pertandingan, melainkan ekosistem manufaktur dan jasa. Berdasarkan Laporan Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2023 pada dimensi ekonomi 5 (lima) kontributor terbesar dalam industri olahraga Indonesia adalah sebagai berikut

Tabel 3.23 Kontribusi PDB industri olahraga pada tiap sektor

Sektor Kontributor	**Persentase Kontribusi**
Produk Sepatu Olahraga	4.175%
Pakaian Olahraga (Apparel)	2.861%
Tiket Pertandingan	2.596%
Biaya Perjalanan (Sport Tourism)	2.059%
Sewa Tempat Latihan	1.869%

PDB Industri Olahraga pada laporan kinerja Kemenpora ini merujuk pada Indeks Ekonomi yang ada pada Laporan IPO yang menggambarkan tingkat pengeluaran individu yang dialokasikan untuk aktivitas olahraga dalam kurun waktu satu tahun. Metode penghitungan kontribusi industri olahraga terhadap PDB adalah dari pengeluaran yang mendukung keterlibatan aktiifnya dalam kegiatan olahraga, baik melalui pembelian barang (peralatan atau perlengkapan olahraga) maupun pemanfaatan jasa terkait olahraga seperti tiket event olahraga, keanggotaan *gym*, peralatan olahraga, tiket wisata olahraga, investasi olahraga, *media right* olahraga,

- PDB Manufaktur: Indonesia merupakan salah satu eksportir sepatu olahraga (Nike, Adidas, dll.) terbesar di dunia. Meskipun kontribusi ini masuk dalam kategori "Industri Pengolahan" di BPS, namun secara esensi, ini adalah Ekonomi Olahraga.
- PDB Jasa: Lonjakan terjadi pada sektor kebugaran (*gym/fitness*) dan *wellness*. Masyarakat kelas menengah kini mengalokasikan rata-rata 5-8% dari pendapatan bulanan mereka untuk gaya hidup sehat (keanggotaan *gym*, pelatih pribadi, hingga suplemen).

Metode pengukuran yang digunakan =

$$\Sigma P(i) \times J(i)$$

Pi = pengeluaran per/tahun pada kelompok ke-i
i = 8 kelompok pengeluaran / tahun
Ji = Jumlah konsumen pada kelompok pengeluaran ke-i

No	Pengeluaran Per/Tahun
1	<200 Ribu
2	200-499 Ribu
3	0,5-1 Juta
4	1,1-2 Juta
5	2,1-3 Juta
6	3,1-4 Juta
7	4,1-5 Juta
8	>5 Juta

Tabel 3.24 Delapan komponen pengeluaran

Kemenpora mendorong sektor ini karena memiliki beberapa keunggulan strategis:

1. M*ultiplier Effect*. Setiap penyelenggaraan event olahraga besar menggerakkan sektor transportasi, akomodasi, dan konsumsi secara simultan.
2. Penciptaan Lapangan Kerja. Sektor ini bersifat padat karya, terutama pada industri konveksi sepatu/pakaian dan jasa instruktur kebugaran.
3. Kemandirian Ekonomi. Dengan meningkatnya kualitas produk olahraga lokal (seperti bola yang digunakan di standar internasional), Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor alat olahraga.
4. Tantangan Pencatatan Data. Salah satu isu utama dalam menghitung PDB Industri Olahraga adalah belum adanya Akun Satelit Olahraga (ASO) yang sepenuhnya mandiri di BPS. Saat ini, data industri olahraga masih sering tersebar di bawah sektor "Industri Pengolahan" atau "Jasa Lainnya". Oleh karena itu, realisasi sebesar Rp58,6 triliun pada 2025 merupakan langkah maju yang besar dalam memetakan kekuatan ekonomi riil sektor ini.

CAPAIAN KINERJA PDB INDUSTRI OLAHRAGA

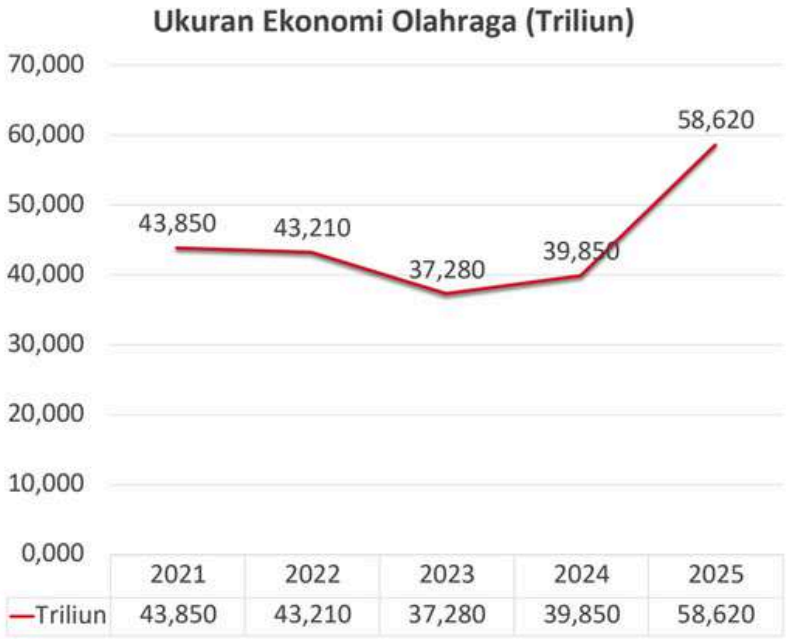


Kinerja sektor industri olahraga pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang sangat agresif dan melampaui target yang ditetapkan. Capaian tahun 2025 menyentuh angka Rp58.620 Miliar atau setara Rp. 58,6T, melonjak signifikan dari capaian tahun 2024 yang sebesar Rp39.500 Miliar atau setara Rp. 39,5T, dengan target 2025 sebesar Rp38.805 Miliar, maka persentase capaian kinerja mencapai 151,06%. Ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan industri olahraga berjalan jauh lebih efektif dari proyeksi awal.

Tabel 3.25 Rekapitulasi Estimasi Uang Beredar Untuk Belanja Olahraga Tahun 2025 berdasarkan Laporan IPO Tahun 2025

Jumlah Penduduk Usia 10 - 60 Tahun		208.494.046	Indeks	0,568
Pengeluaran Per/Tahun	Persentase	Median Belanja	Jumlah Konsumen	Total Belanja
< 200 Ribu	43,180%	100.000	51.100.745	5.110.074.484.053
200 - 499 Ribu	33,087%	250.000	39.155.715	9.788.928.783.756
0,5 - 1 Juta	12,938%	750.000	15.311.776	11.483.831.647.374
1,1 - 2 Juta	5,261%	1.500.000	6.226.174	9.339.260.677.082
2,1 - 3 Juta	2,611%	2.500.000	3.090.027	7.725.067.473.635
3,1 - 4 Juta	0,974%	3.500.000	1.152.995	4.035.483.008.615
4,1 - 5 Juta	0,663%	4.500.000	784.037	3.528.165.144.675
> 5 Juta	1,286%	5.000.000	1.521.954	7.609.767.959.103
Total	**100%**	18.100.000	118.343.422	58.620.579.178.294

Dari seluruh responden sasaran IPO 2025, sebanyak 56,761% atau sekitar 118,3 juta orang membelanjakan uangnya untuk kebutuhan olahraga yang dikeluarkan per tahun berkisar dari Rp. 200.000,- hingga Rp. 5.000.000,-, yang apabila angka tersebut direkapitulasi secara nasional, estimasi uang beredar untuk belanja olahraga mencapai sekitar Rp. 58,6 triliun per tahun



Grafik 3.12 PDB Industri Olahraga Merujuk pada Indeks Ekonomi IPO

Data pembanding dengan proyeksi jangka panjang (Renstra 2029) menunjukkan optimisme tinggi namun juga tantangan dalam penetapan target masa depan. Kemenpora menetapkan target Renstra 2029 antara Rp41.925 Miliar hingga Rp44.075 Miliar, sedangkan realisasi tahun 2025 (Rp58.620 Miliar) sudah jauh melampaui target akhir Renstra 2029. Hal ini mengindikasikan perlunya reviu atau revisi target Renstra agar lebih menantang dan relevan dengan dinamika pasar yang berkembang pesat saat ini. Lonjakan capaian hingga 151,06% ini membuktikan bahwa industri olahraga telah bertransformasi menjadi salah satu pilar ekonomi yang potensial. Dominasi produk sepatu dan pakaian olahraga menunjukkan kuatnya basis produksi dalam negeri, sementara pertumbuhan di sektor perjalanan (*sport tourism*) membuka peluang integrasi lintas kementerian yang lebih luas.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kemenpora telah mengoptimalkan penerapan *sport science* melalui sistem monitoring digital Pencapaian PDB Industri Olahraga 2025 yang melampaui target didorong oleh transformasi strategis Kemenpora melalui penguatan regulasi KBLI, penyelenggaraan event besar seperti ISS 2025, dan optimalisasi *sport tourism* berbasis kolaborasi lintas sektor. Langkah terintegrasi ini berhasil menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan, memosisikan industri olahraga sebagai pilar baru pertumbuhan nasional yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan *Event* Indonesia Sports Summit

Penyelenggaraan Indonesia *Sports Summit* (ISS) 2025 merupakan langkah strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI dalam membangun ekosistem olahraga yang mandiri secara ekonomi. Dengan mengacu pada Perpres No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), kegiatan ini berfungsi sebagai cetak biru untuk memperkuat industri olahraga sebagai salah satu pilar baru pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. ISS 2025 berhasil mentransformasi wajah olahraga dari sekadar prestasi menjadi sebuah sektor industri yang menjanjikan melalui tema "*Beyond The Game*". Peran ISS sebagai katalisator ekonomi dapat mempertemukan enam pilar utama: pemerintah (regulator), pelaku industri, investor, atlet, *sport enthusiast*, dan penyedia teknologi.

Penyelenggaraan ISS menjadi daya ungkit industri olahraga melalui diversifikasi dan inovasi diantaranya : Partisipasi Industri Olahraga Melibatkan lebih dari 45 *brand global* dan nasional (seperti FIFA, Technogym, Eiger dan Yonex) serta 23 *tenant* kuliner yang menggerakkan ekonomi lokal.

- Aktivasi *Sportainment* dan *Wellness.* Kemenpora juga memperluas spektrum kontribusi ekonomi melalui berbagai zona interaktif yang mencakup *sportainment* dan *wellness*: dengan penyelenggaraan *Exhibition, Experience Zone* (seperti Padel), dan *Sport Medicine Zone*, dengan pengintegrasian sektor *Sport Medicine*, teknologi olahraga, hingga pariwisata melalui keterlibatan berbagai kementerian terkait (Kemenkes, Kemenpar dan Kemen UMKM). Melalui integrasi ini, Kemenpora tidak hanya meningkatkan *awareness* publik terhadap isu kesehatan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dalam rantai nilai industri olahraga.
- Dialog Strategis. Melalui forum-forum diskusi, dilakukan pembahasan mengenai regulasi investasi olahraga, digitalisasi program DIGDAYA dan penguatan rantai nilai industri olahraga (*Sports Industry Value Chain*) yang melibatkan lintas kementerian, mulai dari Pariwisata hingga UMKM.
- Penyediaan Lapangan Kerja. Upaya Kemenpora dalam meningkatkan PDB dilakukan melalui penguatan infrastruktur SDM dan kolaborasi lintas sektor: Dalam pemberdayaan ekonomi, ajang ini menghadirkan *Job Fair* yang mempertemukan talenta muda dengan lebih dari 25 perusahaan di bidang olahraga dan pendukungnya.

Keberhasilan ISS 2025 dalam menarik minat pasar domestik dengan volume pengunjung mencapai total 16.778 pengunjung dalam dua hari pelaksanaan di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno.

Eksposur Digital ISS melalui viralitas media sosial mencapai lebih dari 200 juta penayangan, memperluas *brand awareness* industri olahraga secara massif, menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan investasi dan menunjukkan potensi pasar domestik yang sangat besar untuk menggerakkan roda ekonomi sektor olahraga.

Salah satu keberhasilan terbesar ISS 2025 adalah tercapainya kesepakatan antara Menpora, Menkeu, Mendagri, dan Mendikdasmen untuk:

- **Optimalisasi Aset Daerah**: Mendorong Pemda agar aset olahraga yang terbengkalai tidak lagi menjadi beban biaya, melainkan sumber pendapatan asli daerah (PAD);
- **Ekosistem *Student-Athlete***: Memberikan payung hukum dan beasiswa (seperti 100 beasiswa LPDP untuk atlet) guna memastikan keberlanjutan karier atlet sebagai bagian dari SDM industri olahraga profesional.

ISS 2025 bukan sekadar kegiatan seremoni, melainkan sebuah titik tolak untuk menempatkan olahraga sebagai industri bernilai tinggi. Melalui diversifikasi dan inovasi kegiatan, dari forum strategis hingga *sportainment*, Kemenpora telah berhasil membuka ratusan peluang kerja baru dan meningkatkan kesadaran publik terhadap nilai ekonomi olahraga.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Sektor Olahraga pada tahun 2025

Kemenpora telah mengambil langkah fundamental dalam memperkuat indikator Produk Domestik Bruto (PDB) sektor olahraga melalui penguatan peran sebagai pengampu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Sektor Olahraga pada tahun 2025. Upaya strategis dalam mendukung validitas dan peningkatan PDB industri olahraga:

1. Transformasi Klasifikasi Usaha yang Presisi

Kemenpora secara aktif berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memutakhirkan KBLI 2020 menjadi KBLI 2025 melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. Langkah ini krusial bagi penghitungan PDB karena aktivitas yang sebelumnya bersifat umum kini diklasifikasikan secara spesifik seperti pengelolaan olahraga profesional, promosi kegiatan olahraga, hingga usaha olahraga berbasis digital. Rincian yang lebih tajam ini memungkinkan pencatatan kontribusi ekonomi dari sektor olahraga ke dalam statistik nasional menjadi jauh lebih akurat. KBLI 2025 menyesuaikan model bisnis olahraga dengan standar internasional, yang memperkuat dasar pengukuran kontribusi ekonomi secara global.

2. Integrasi Ekosistem Industri "Hulu ke Hilir"

Dengan menjadi pengampu substansi KBLI, Kemenpora memastikan bahwa pengembangan industri olahraga tidak lagi bersifat parsial. Hal ini mendukung indikator PDB melalui :

a. Tata Kelola Data berkelanjutan. Klasifikasi yang jelas memudahkan pemetaan skala usaha dan penghitungan potensi kontribusi riil terhadap PDB.
b. *Single Point of Contact.*Kemenpora menjadi titik koordinasi tunggal bagi investor dan pelaku usaha, yang mempercepat proses perizinan dan sinkronisasi kebijakan insentif fiskal serta investasi.
c. Intervensi Kebijakan. Data yang dihasilkan dari KBLI baru menjadi landasan dalam merumuskan intervensi fiskal dan program kemitraan yang tepat sasaran untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

3. Sinergi Lintas Sektor untuk Nilai Tambah Ekonomi

Kejelasan klasifikasi dalam KBLI 2025 menciptakan konektivitas yang lebih erat antara olahraga dengan sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong sinergi dengan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, kesehatan, dan teknologi digital. Sinergi ini diarahkan untuk memperluas dampak pembangunan olahraga, bertransformasi dari sekadar partisipasi masyarakat menjadi penciptaan nilai tambah ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Upaya pengampuan KBLI ini memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di industri olahraga dapat teridentifikasi, terukur, dan dioptimalkan sebagai pilar baru dalam struktur PDB nasional.

Sport Tourism

Pemerintah menyepakati penguatan ekosistem sport tourism sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama melalui optimalisasi event daerah. Kemenpora melakukan upaya dengan memfasilitasi dan mendorong penyelenggaraan *event* olahraga berdampak ekonomi tinggi karena mampu menarik kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kemenpora juga berupaya melakukan penguatan infrastruktur dengan memastikan fasilitas dan sarana prasarana olahraga di daerah-daerah potensi wisata memenuhi standar kualitas yang baik. Mendorong kemitraan dengan sektor swasta untuk mengembangkan destinasi *sport tourism* unggulan, sehingga mengurangi ketergantungan pada anggaran negara (APBN).

Upaya promosi destinasi wisata olahraga Indonesia ke kancah internasional bertujuan untuk membangun citra Indonesia sebagai destinasi utama kegiatan olahraga global, yang pada gilirannya akan meningkatkan devisa negara dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, fasilitasi yang dilakukan Kemenpora:

- Fasilitasi *Event* Daerah: Dukungan terhadap kegiatan lokal yang menjadi ikon wisata, seperti Tanggamus Color *Run* 2025 di Lampung, Patriot Run di Bekasi, dan *World Walking Day* 2025 di Pringsewu yang dihadiri 18.000 peserta.

- Dukungan Event Internasional: Sinergi dalam penyelenggaraan ajang dunia seperti MotoGP Mandalika, *Aquabike* Danau Toba, dan *Paragliding Accuracy World Cup* 2025 untuk menarik wisatawan mancanegara.

Untuk memastikan keberlanjutan destinasi, Kemenpora melaksanakan program edukasi bagi pelaku industri:

1. Pelatihan Manajemen Destinasi Wisata Olahraga. Menciptakan SDM unggul yang mampu menyelenggarakan event secara profesional dan kreatif.
2. Bimtek Fasilitasi Pengembangan Wisata Olahraga. Pelatihan bagi komunitas dan pemangku kepentingan mengenai tata kelola bantuan keuangan, penyusunan laporan, dan implementasi program yang akuntabel.
3. E*xpert Forum.* Diskusi strategis mengenai skema bantuan penyelenggaraan *event* olahraga profesional agar tepat sasaran dan transparan.

Strategi Kemenpora pada tahun 2025-2026 beralih dari sekadar penyelenggaraan lomba menjadi pembangunan ekosistem. Fokusnya adalah kolaborasi pemerintah-swasta untuk menciptakan destinasi yang berkelanjutan, didukung oleh regulasi yang memudahkan investasi di sektor wisata olahraga

Dalam rangka meningkatkan kualitas capaian di masa mendatang, berikut adalah analisis hambatan dan kendala yang ditemui selama proses pengukuran serta pengembangan kontribusi PDB Industri Olahraga sepanjang tahun 2025. Analisis ini menjadi krusial untuk dipahami, mengingat status PDB Industri Olahraga merupakan parameter baru dalam arsitektur kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang memerlukan penyesuaian metodologi serta penguatan koordinasi data sektoral secara berkelanjutan.

1. Kendala Metodologi dan Rumusan Perhitungan. Salah satu hambatan utama belum ada rumusan baku, Kemenpora masih dalam tahap mencari dan menyempurnakan rumusan perhitungan PDB yang akurat untuk sektor olahraga.
2. Ketersediaan dan Integrasi Data Ekonomi. Penghitungan PDB memerlukan data perputaran ekonomi yang detail dari berbagai daerah, namun terdapat beberapa kendala teknis sehingga diperlukan koordinasi intensif dengan berbagai kota (seperti Kota Bandung, Kota Solo, Kota Malang, dll.) untuk memotret potensi ekonomi dan kendala industri di daerah sebagai bahan pembahasan PDB. Data Sektoral yang ada masih terfragmentasi, sebelum adanya penguatan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) khusus olahraga, data pelaku usaha olahraga masih tersebar dan sulit dipetakan kontribusi ekonominya secara spesifik terhadap PDB**.**

3. Kendala Struktur Industri dan Kebijakan. Kebijakan olahraga nasional masih sangat berfokus pada aspek prestasi (*sports excellence*), sehingga aspek industri dan kontribusi ekonominya belum mendapatkan dukungan regulasi dan insentif yang setara. Kontribusi PDB dari subsektor manufaktur alat olahraga masih terhambat karena standar peralatan untuk ajang internasional mayoritas masih didatangkan dari luar negeri. Hal ini mengurangi nilai tambah ekonomi yang bisa dihasilkan di dalam negeri. Pengelolaan infrastruktur pasca-event besar (seperti PON) belum optimal dalam menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang dapat tercatat dalam PDB jasa olahraga.

Analisis Faktor Keberhasilan

Capaian nilai PDB Industri Olahraga tahun 2025 yang melampaui target merupakan hasil nyata dari transformasi paradigma Kemenpora, yang kini menempatkan olahraga tidak hanya sebagai instrumen prestasi tetapi juga sebagai mesin penggerak ekonomi nasional. Keberhasilan ini didorong oleh penguatan fondasi regulasi melalui peran aktif Kemenpora sebagai pengampu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sektor olahraga. Dengan adanya standardisasi dan kepastian hukum dalam klasifikasi usaha, ekosistem industri olahraga menjadi lebih terukur, transparan, dan menarik bagi investasi swasta, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan nilai tambah ekonomi dan perluasan lapangan kerja di berbagai subsektor.

Peningkatan kontribusi ekonomi ini juga diperkuat melalui strategi kolaborasi lintas sektor yang inklusif, seperti penyelenggaraan *event* berskala besar dengan konsep "*Beyond The Game*" yang berhasil menyatukan aspek olahraga, hiburan, dan pariwisata (*sport tourism*). Integrasi ini menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan, mulai dari optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga hingga peningkatan konsumsi produk manufaktur olahraga domestik. Melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan teknologi digital, Kemenpora telah berhasil membangun ekosistem industri olahraga yang berkelanjutan, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga memperkuat posisi sektor olahraga dalam struktur Produk Domestik Bruto nasional.

OUTCOME

Kemenpora telah mengoptimalkan penerapan *sport science* melalui sistem monitoring digital Pencapaian PDB Industri Olahraga 2025 yang melampaui target didorong oleh transformasi strategis Kemenpora melalui penguatan regulasi KBLI, penyelenggaraan event besar seperti ISS 2025, dan optimalisasi *sport tourism* berbasis kolaborasi lintas sektor. Langkah terintegrasi ini berhasil menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan, memosisikan industri olahraga sebagai pilar baru pertumbuhan nasional yang berkelanjutan.

Pencapaian PDB Industri Olahraga tahun 2025 yang melampaui target merupakan manifestasi nyata dari keberhasilan transformasi paradigma Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam memosisikan sektor olahraga sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang baru. Keberhasilan ini berakar pada penguatan landasan regulasi melalui pengampuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang memungkinkan pencatatan kontribusi ekonomi olahraga dilakukan secara presisi, terukur, dan selaras dengan standar internasional. Dengan adanya kepastian hukum dan klasifikasi usaha yang tajam, ekosistem industri olahraga kini memiliki daya tarik investasi yang lebih kuat, sekaligus mempermudah pemerintah dalam merumuskan intervensi kebijakan fiskal dan program kemitraan yang lebih tepat sasaran.

Dampak positif dari penguatan regulasi tersebut semakin diperluas melalui strategi kolaborasi lintas sektor yang inklusif, sebagaimana tercermin dalam penyelenggaraan ajang strategis seperti Indonesia Sports Summit (ISS) 2025 dengan konsep "*Beyond The Game*". Melalui integrasi antara sektor prestasi, hiburan, dan wisata olahraga (*sport tourism*), Kemenpora berhasil menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan, mulai dari peningkatan volume kunjungan wisatawan hingga terciptanya ratusan peluang kerja baru bagi generasi muda. Sinergi berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, dan teknologi digital ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam struktur PDB nasional, tetapi juga memastikan keberlanjutan industri olahraga sebagai sektor yang mandiri dan berdaya saing global.

ANALISIS HASIL EFISIENSI



Nilai efisiensi dalam pencapaian indikator PDB Industri Olahraga tahun 2025 merefleksikan keberhasilan Kemenpora dalam menerapkan prinsip *Value for Money*, di mana realisasi kinerja sebesar 151,06% berhasil dicapai dengan optimalisasi anggaran yang sangat presisi. Efisiensi ini tidak hanya terlihat dari rasio output ekonomi yang melampaui target di tengah penyerapan anggaran unit kerja yang tetap terjaga pada kisaran 96% hingga 99%, tetapi juga melalui strategi *cost-sharing* yang efektif dengan pihak swasta. Melalui kolaborasi strategis dalam berbagai ajang nasional dan internasional, Kemenpora mampu meminimalkan beban APBN sekaligus memaksimalkan dampak ekonomi dan viralitas publik, membuktikan bahwa penggunaan sumber daya negara telah dikonversi secara maksimal menjadi daya ungkit ekonomi yang nyata bagi struktur PDB nasional.

Selain dari sisi anggaran, nilai efisiensi juga terwujud dalam penguatan tata kelola birokrasi dan digitalisasi perizinan melalui integrasi sistem KBLI 2025 ke dalam platform *Online Single Submission* (OSS). Langkah fundamental ini secara signifikan memangkas biaya transaksi serta waktu bagi pelaku usaha, sehingga proses pendataan dan pemetaan potensi ekonomi industri olahraga menjadi lebih cepat dan murah tanpa mengesampingkan akurasi data. Kemenpora telah berhasil memastikan bahwa setiap program kerja bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah investasi strategis yang efisien dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan kemandirian sektor industri olahraga di masa depan.

Tabel 3.26 Alokasi rincian output intervensi indikator PDB Industri Olahraga

Kegiatan	Kode KRO	RO	% Realisasi Anggaran	Target Output	Satuan	RVO	% RVO
7847 Pengembangan Wisata Olahraga	AEA	001 Koordinasi strategis dalam pengembangan wisata olahraga (kegiatan)	98,08%	3	kegiatan	20	666,67%
7847 Pengembangan Wisata Olahraga	AFA	001 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengembangan Wisata Olahraga (NSPK)	99,79%	1	NSPK	1	100,00%
7847 Pengembangan Wisata Olahraga	BDC	001 Pendampingan pengelola wisata olahraga dalam pelatihan keterampilan (Orang)	97,87%	120	orang	121	100,83%
7847 Pengembangan Wisata Olahraga	BEI	001 Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Olahraga (Lembaga)	99,67%	5	lembaga	18	360,00%
7848 Pembinaan Olahraga Profesional	AEA	001 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga profesional (kegiatan)	99,69%	3	kegiatan	4	133,33%
7848 Pembinaan Olahraga Profesional	AFA	001 NSPK standarisasi dan tata kelola bidang olahraga profesional (NSPK)	99,64%	1	NSPK	1	100,00%
7848 Pembinaan Olahraga Profesional	BDB	001 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga atau badan hukum lingkup olahraga profesional	93,47%	2	lembaga	3	150,00%
7848 Pembinaan Olahraga Profesional	BDC	001 Fasilitasi dan Pembinaan Olahragawan Profesional (Orang)	99,82%	100	orang	100	100,00%
7848 Pembinaan Olahraga Profesional	BMA	001 Sistem Informasi Pendataan Olahraga Profesional (dokumen)	99,89%	1	dokumen	1	100,00%
7849 Peningkatan Pengelolaan Jasa, Sarana dan Prasarana Olahraga	AEA	001 Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan konferensi dan pameran produk olahraga (kegiatan)	96,38%	1	kegiatan	1	100,00%
7849 Peningkatan Pengelolaan Jasa, Sarana dan Prasarana Olahraga	AFA	001 NSPK bidang pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga (NSPK)	99,22%	2	NSPK	3	150,00%
7849 Peningkatan Pengelolaan Jasa, Sarana dan Prasarana Olahraga	BDB	001 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga atau pelaku usaha indsutri olahraga dalam	98,18%	5	lembaga	12	240,00%
7849 Peningkatan Pengelolaan Jasa, Sarana dan Prasarana Olahraga	BMA	001 Pendataan sarana dan prasarana Industri Olahraga (dokumen)	97,49%	1	dokumen	1	100,00%
7849 Peningkatan Pengelolaan Jasa, Sarana dan Prasarana Olahraga	QDC	001 Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Industri Olahraga dalam Pelatihan Pengelolaan Jasa Sarana	98,28%	500	orang	900	180,00%
7850 Peningkatan Promosi dan Kemitraan Global Olahraga	AEA	001 Koordinasi Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Propinsi/Swasta dalam	98,55%	6	kegiatan	8	133,33%
7850 Peningkatan Promosi dan Kemitraan Global Olahraga	AEC	001 Kerja Sama Dalam Peningkatan Kualitas dan Kompetisi Olahraga (Kesepakatan)	99,36%	2	kesepakatan	3	150,00%
7850 Peningkatan Promosi dan Kemitraan Global Olahraga	AFA	001 NSPK Kebijakan Bidang Promosi dan Kemitraan Global Olahraga (NSPK)	99,81%	1	NSPK	1	100,00%
7850 Peningkatan Promosi dan Kemitraan Global Olahraga	BDC	001 Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Industri Olahraga dalam Peningkatan Promosi dan	99,30%	100	orang	16.000	16.000%
7909 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	EBA	957 Layanan Hukum (Layanan)	98,34%	1	layanan	1	100,00%
7909 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	EBA	958 Layanan Hubungan Masyakat dan Informasi (Layanan)	90,84%	1	layanan	1	100,00%
7909 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	EBA	959 Layanan Protokoler (Layanan)	97,90%	1	layanan	1	100,00%
7909 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	EBA	962 Layanan Umum (Layanan)	99,87%	1	layanan	1	100,00%
7909 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	EBA	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	94,51%	1	layanan	1	100,00%
7909 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	EBC	957 Layanan Manajemen SDM (Layanan)	97,34%	1	layanan	1	100,00%
7909 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	EBD	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	86,97%	1	dokumen	1	100,00%

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Melalui analisis *benchmarking*, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah bertransformasi dari pesaing regional menjadi kekuatan kontinental. Dengan melampaui standar prestasi negara-negara maju di Asia, Indonesia kini memiliki posisi tawar yang kuat dalam penentuan kebijakan olahraga disabilitas di tingkat internasional. Capaian ini memberikan validasi bahwa model pembinaan atlet muda Indonesia saat ini merupakan salah satu yang terbaik di Asia.

Menurut laporan *PwC's Global Sports Survey 2024*, industri olahraga global diproyeksikan tumbuh sebesar 7,3% selama 3-5 tahun ke depan. Sebagai perbandingan, menurut laporan Kearney (2025), nilai pasar olahraga dunia kini menyentuh angka USD 600 miliar, didorong oleh transisi dari sekadar manufaktur barang ke arah *media rights* dan *digital engagement.*

Komparasi PDB Per Negara

Berdasarkan data *National Bureau of Statistics* (NBS) Tiongkok dan laporan E*uromonitor International,* berikut adalah perbandingan kontribusi terhadap PDB:

- Tiongkok: Menurut Rencana Pembangunan Industri Olahraga Tiongkok ke-14, kontribusi olahraga terhadap PDB telah mencapai 1,19%. Tiongkok menargetkan angka ini naik menjadi 4% pada 2035.
- Inggris (UK): Laporan *Sport England & Sheffield Hallam University* mencatat kontribusi ekonomi olahraga mencapai 0,8% dari total PDB Inggris, dengan nilai tambah bruto (GVA) sebesar £18 miliar lebih.
- Uni Eropa: Mengutip *Eurostat* (*Vilnius Definition*), sektor olahraga secara luas menyumbang rata-rata 2,12% terhadap PDB Uni Eropa, dengan Austria dan Jerman sebagai pemimpin di angka di atas 3,5%.
- Indonesia: Merujuk pada data Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) 2024, kontribusi Indonesia masih berada di angka 0,19%.

Laporan *McKinsey & Company* dalam The Sporting Goods Industry Report 2025 menyoroti perbedaan struktur ekonomi di bidang olahraga pada negara maju yang didominasi oleh *Sports Services* (70-80%), yang mencakup penyiaran, manajemen klub, dan kebugaran. Berdasarkan Laporan tersebut dengan membandingkan dimensi ekonomi pada Laporan Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2023 disimpulkan bahwa Indonesia masih didominasi oleh *Sports Goods Manufacturing*. Berdasarkan agregat data industri, sektor alas kaki dan pakaian olahraga menyumbang lebih dari 70% dari total ekonomi olahraga nasional.

Kontribusi Indonesia sebesar 0,19% menunjukkan potensi *gap* yang sangat besar jika dibandingkan dengan Tiongkok (1,19%) atau Inggris (0,8%). Peningkatan partisipasi masyarakat (saat ini ~26%) menjadi kunci utama untuk mendorong permintaan (*demand*) yang nantinya akan meningkatkan angka PDB dari sektor jasa dan *event* olahraga.

Tabel 3.27 Perbedaaan Kontribusi Industri Olahraga pada PDB antara Indonesia dan Negara Maju

Indikator	Negara Maju (AS, Tiongkok, Inggris, Korsel)	Indonesia (2024/2025)
Kontribusi terhadap PDB	1,0% – 2,5%	0,19%
Pertumbuhan (CAGR)	6% - 9%	Stabil di level rendah
Sektor Dominan	Jasa Olahraga, *Media Rights, Betting*	Manufaktur (Sepatu & Pakaian)
Fokus Strategis	*Game Changer* ekonomi baru	Pengembangan partisipasi olahraga

PERBAIKAN KINERJA

Kemenpora berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan dengan menyusun rumusan perhitungan PDB Industri Olahraga yang baku dan terstandardisasi bersama Badan Pusat Statistik. Fokus utama diarahkan pada penguatan integrasi data sektoral lintas daerah serta implementasi NSPK yang terhubung dengan sistem perizinan digital OSS untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor. Upaya ini bertujuan mentransformasi tata kelola aset olahraga menjadi sumber pendapatan produktif guna membangun ekosistem industri yang mandiri dan berdaya saing global.

Dalam upaya memastikan keberlanjutan tren positif capaian ekonomi sektor olahraga dan guna memperkuat kontribusi strategisnya terhadap pembangunan nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah merumuskan langkah-langkah perbaikan kinerja jangka panjang. Berdasarkan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program tahun 2025, berikut adalah rencana aksi dan strategi perbaikan kinerja berkelanjutan yang akan diimplementasikan:

- Penyempurnaan Metodologi dan Standardisasi Perhitungan PDB Mengingat PDB Industri Olahraga merupakan parameter baru, fokus utama ke depan adalah menyusun rumusan perhitungan yang baku dan terstandardisasi. Kemenpora akan memperkuat kerja sama teknis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menciptakan instrumen survei yang lebih tajam sehingga kontribusi ekonomi dari berbagai subsektor olahraga dapat terukur secara valid dan diakui dalam statistik ekonomi nasional.

- Integrasi Data Sektoral Lintas Daerah Untuk mengatasi hambatan fragmentasi data, Kemenpora akan melakukan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait di berbagai kota besar. Upaya ini bertujuan untuk memetakan perputaran ekonomi lokal secara komprehensif, mulai dari jasa sarana prasarana hingga dampak ekonomi *event* daerah, guna memastikan data yang masuk ke dalam perhitungan PDB mencerminkan realitas ekonomi olahraga di seluruh Indonesia.
- Penguatan Implementasi KBLI 2025 dan NSPK Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran KBLI, Kemenpora akan segera menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang spesifik untuk sektor olahraga. NSPK ini akan diintegrasikan dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan investasi swasta di sektor industri olahraga.
- Transformasi Pengelolaan Aset dan Kemandirian Ekonomi Perbaikan kinerja juga diarahkan pada optimalisasi aset-aset olahraga yang terbengkalai agar berubah dari beban biaya menjadi sumber pendapatan produktif (PAD). Dengan mendorong tata kelola aset yang lebih komersial dan profesional, Kemenpora berupaya membangun kemandirian ekonomi sektor olahraga sehingga kontribusinya terhadap PDB tidak lagi hanya bergantung pada anggaran pemerintah (APBN).
- Pengembangan SDM Industri Olahraga Profesional Kemenpora akan memperluas program edukasi dan sertifikasi bagi tenaga kerja di bidang industri olahraga, termasuk manajemen destinasi wisata olahraga dan kewirausahaan (*sportpreneur*). Langkah ini bertujuan untuk mengisi rantai nilai industri olahraga dengan SDM lokal yang kompetitif, sehingga nilai tambah ekonomi dari penyelenggaraan ajang internasional dapat dinikmati sepenuhnya oleh penyedia jasa dalam negeri.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3.1

INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Pindai QR untuk bahan dan data pendukung lainnya.

Reformasi Birokrasi menjadi cerminan penguatan tata kelola organisasi guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang berlandaskan *good governance*.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik

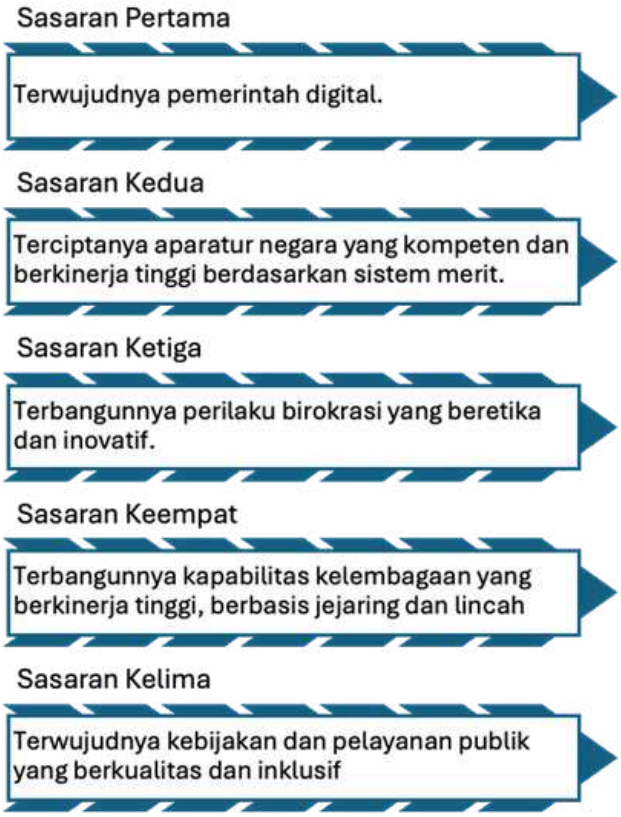
KATA KUNCI TOPIK

- Capaian Kinerja
- Analisis Program/Kegiatan
- *Outcome*
- Nilai Efisiensi
- Perbandingan Capaian Kinerja
- Perbaikan Kinerja

Reformasi Birokrasi (RB) menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Asta Cita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Penetapan ini menegaskan bahwa pelaksanaan RB tidak sekadar merupakan agenda internal pemerintah, tetapi merupakan bagian strategis dari arah pembenahan birokrasi secara nasional guna mewujudkan birokrasi yang kompetitif dan berkelas dunia sebagai prasyarat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025-2029 sedang proses penyusunan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu sebagai pedoman pelaksanaan RB terdapat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

Sejak Tahun 2023, pelaksanaan RB berfokus pada kegiatan percepatan yang diterjemahkan pada 28 sub komponen pada indikator RB General dan 6 sub komponen pada indikator RB Tematik. Sasaran dan agenda RB General mencakup transformasi tata kelola birokrasi secara umum, yang saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan RB dan pembangunan.

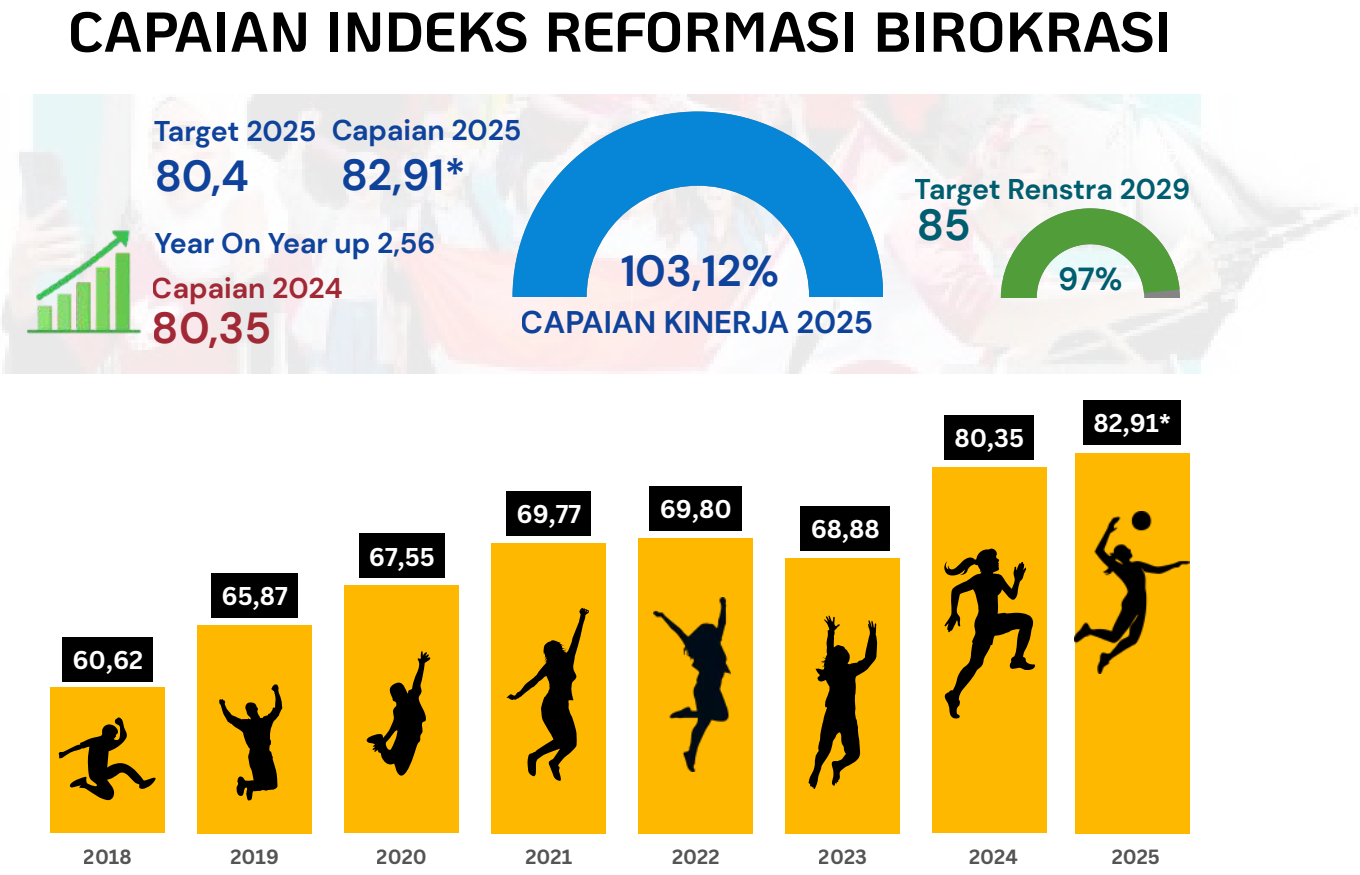


Grafik 3.13 Sasaran RB Tematik berdasarkan RPJMN 2025–2029

Sasaran dan agenda RB Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola di sektor-sektor prioritas sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.



Grafik 3.14 Agenda RB Tematik Tahun 2025



Grafik 3.15 Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2025

*Prognosa Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora Tahun 2025

INDEKS REFORMASI BIROKRASI KEMENPORA TAHUN 2024-2025

Tabel 3.28 Indeks RB Kemenpora Tahun 2024-2025

NO	RB KEMENPORA	BOBOT	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
			SKOR	SKOR INDEX	SKOR	SKOR INDEX
RB GENERAL		**100**		**72,64**		**74,85**
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,3	2,3	2,55	2,55
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	5,37	100	5,95
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2	100	2
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5	2	5	2
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,301	2,64	3,58	2,86
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0	0	0	0
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	68,08	2,72	68,83	2,75
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	87,15	1,74	91,27	1,83
9	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	3	1,2	3	1,2

NO	RB KEMENPORA	BOBOT	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
			SKOR	SKOR INDEX	SKOR	SKOR INDEX
RB GENERAL		**100**		**72,64**		**74,85**
10	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	91,88	1,84	86,79	1,74
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	90,16	1,8	90,16	1,8
12	Indeks Pengelolaan Aset	2	3,74	1,87	3,49	1,75
13	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,5	4	1,2	4	1,2
14	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	66,33	0,99	74,44	1,12
15	Indeks Reformasi Hukum	1,5	86,8	1,3	99,4	1,49
16	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	2,69	0,81	2,69	0,81
17	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	50,22	1	55,62	1,11
18	Indeks Sistem Merit	4	293,5	2,86	239,5	2,86
19	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,31	1,29	4,67	1,4
20	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	70,76	1,06	70,76	1,06
21	Indeks SPBE	9	3,75	6,75	3,75	6,75
22	Capaian Prioritas Nasional	2	79,59	1,62	75,3	1,55

NO	RB KEMENPORA	BOBOT	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
			SKOR	SKOR INDEX	SKOR	SKOR INDEX
RB GENERAL		**100**		**72,64**		**74,85**
23	Capaian IKU	8	72,73	3,46	67	3,22
24	Opini BPK	5	3	5	3	5
25	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	58,88	2,36	81,13	3,25
26	Indeks BerAkhlak	4	62,92	2,52	62,92	2,52
27	Survei Penilaian Integritas	10	77,4	7,74	78	7,8
28	Survei Kepuasan Masyarakat	8	90,05	7,2	91,03	7,28
RB TEMATIK		**10**		**6,99**		**7,32**
1	Pengentasan Kemiskinan	0,8	1,23	1,23	1,43	1,43
2	Realisasi Investasi	0,8	1,58	1,58	1,71	1,71
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4	Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,8	1,84	1,84	1,84	1,84
5	Laju Inflasi	0,8	1,54	1,54	1,54	1,54
Total		**100**	**80,35**		***82,91**	

NILAI KINERJA REFORMASI BIROKRASI 2025

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 sebesar 82,91 dengan kategori "A". Namun data tersebut berdasarkan hasil prognosa yang dihimpun melalui capaian RB General dan RB Tematik yang dikeluarkan oleh K/L atau evaluator meso. Sehingga nilai tersebut belum final. Berdasarkan nilai tahun 2025 ketercapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora sebesar 103,12% dari target 80,4 mengalami **peningkatan 2,56 poin dari capaian di tahun 2024** dengan Indeks RB sebesar 80,35. Nilai ini merupakan gabungan dari hasil evaluasi RB General dengan nilai 74,85 dan RB Tematik dengan nilai sebesar 7,32. Terdapat peningkatan nilai hampir di semua indikator RB General sehingga skor indeks meningkat 2,21 dari tahun 2024.

Pada tahun 2025, penilaian RB Tematik tetap mengacu pada tema RB Tematik Tahun 2024. Bentuk intervensi Kemenpora pada RB Tematik yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan
   Kemenpora berkontribusi dalam upaya peningkatan taraf hidup pemuda kategori P3KE. Kontribusi ini diwujudkan melalui pemberdayaan dan pengembangan potensi kewirausahaan serta kemandirian pemuda, dengan fokus pada pemberian keterampilan dan dukungan untuk memulai usaha. Kemenpora melaksanakan Pelatihan *Youth Edulife Skill* bagi pemuda miskin yang merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi strategis dengan Dinas Sosial terkait di masing-masing kabupaten/kota.

2. Realisasi Investasi
   Kemenpora berupaya meningkatkan investasi di sektor olahraga melalui berbagai inisiatif strategis, salah satunya adalah memberikan bantuan untuk penyelenggaraan event olahraga tingkat nasional dan regional. Langkah ini diambil dengan tujuan ganda: memperkuat ekosistem olahraga nasional dan menarik investor untuk mendukung pengembangan industri olahraga yang berkelanjutan.
   Dukungan finansial dan fasilitasi ini diharapkan dapat menciptakan kompetisi yang berkualitas, meningkatkan daya tarik olahraga bagi masyarakat dan pihak swasta, serta membuka peluang bisnis yang lebih luas. Selain itu, bantuan ini juga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan prestasi atlet dan pengembangan infrastruktur olahraga, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan *Stunting*
   Kemenpora secara aktif mendukung program penanganan *stunting* dengan mempromosikan budaya olahraga kepada masyarakat luas. Inisiatif ini didasarkan pada pemahaman bahwa olahraga memiliki peran krusial dalam menunjang kesehatan fisik, termasuk meningkatkan kualitas gizi dan pertumbuhan anak, yang merupakan bagian esensial dari upaya pencegahan *stunting*.

Melalui kampanye ini, Kemenpora mendorong masyarakat untuk mengintegrasikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti senam massal, lomba olahraga tradisional, dan sosialisasi tentang pentingnya olahraga bagi kesehatan keluarga, bertujuan untuk mencapai tujuan ini. Dengan menerapkan pendekatan yang inklusif, Kemenpora berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga sebagai investasi kesehatan jangka panjang, dan dengan demikian, berkontribusi pada pencapaian target pengurangan angka *stunting* di Indonesia.

4. Penggunaan Produk Dalam Negeri
   Kemenpora telah menunjukkan komitmen kuat dalam memajukan produk dalam negeri sebagai bagian dari strategi nasional untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan melalui berbagai implementasi nyata. Kemenpora memprioritaskan penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk fasilitas sarana olahraga. Selain itu, Kemenpora aktif menggalakkan kampanye produk dalam negeri melalui kemitraan dengan industri lokal, yang mencakup penyediaan perlengkapan olahraga, *merchandise*, dan infrastruktur pendukung.
   Langkah strategis ini memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha domestik dan sekaligus menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap produk Indonesia. Dengan fokus pada inovasi dan kerja sama strategis, Kemenpora berhasil membentuk ekosistem yang mendukung keberlanjutan industri setempat. Kemenpora juga menjadi contoh nyata bagi institusi lain dalam memanfaatkan potensi produk dalam negeri sebagai motor utama pembangunan.

5. Pengendalian Inflasi
   Kemenpora berkomitmen menangani inflasi dengan program kepeloporan pemuda dalam inovasi pangan dan kewirausahaan. Upaya ini melibatkan generasi muda dalam peningkatan produktivitas sektor pangan melalui teknologi dan kreativitas. Kemenpora membekali pemuda dengan keterampilan dan pengetahuan untuk solusi pengelolaan pangan melalui pelatihan, pendampingan, dan akses sumber daya.
   Fasilitasi kewirausahaan menghasilkan pelaku usaha baru yang membuka lapangan kerja dan menjaga stabilitas harga dengan menyediakan produk berkualitas. Program ini berdampak signifikan pada peningkatan ketahanan pangan setempat, penciptaan ekosistem usaha dinamis, dan kontribusi nyata dalam pengendalian harga pasar. Kemenpora berperan penting memperkuat ekonomi nasional dan mengoptimalkan potensi pemuda sebagai motor perubahan.

Namun demikian, seiring dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025, arah kebijakan RB Tematik mengalami penyesuaian. Melalui fokus pada subkomponen tersebut, pelaksanaan RB Tematik Tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat sinergi lintas program, meningkatkan efektivitas intervensi kebijakan, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan inovasi kelembagaan. Pendekatan ini menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi tidak hanya berorientasi pada perbaikan proses internal, tetapi juga pada kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kemenpora tahun 2025 memperkuat RB melalui penyederhanaan kelembagaan, deregulasi, digitalisasi SPBE, manajemen talenta, serta monitoring dan evaluasi kinerja berbasis e-kinerja. Pada RB Tematik, tantangan terletak pada lemahnya basis data dan pengukuran *outcome*, sinergi lintas unit yang belum solid, serta belum sistematisnya pengembangan model bisnis aset olahraga untuk mendukung hilirisasi dan penurunan kemiskinan ekstrem.

Upaya Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2025 yaitu mengidentifikasi dukungan program, indikator kegiatan dan rencana aksi yang diproyeksikan menjawab permasalahan tema-tema nasional dalam RB seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi dalam upaya penurunan stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan penurunan inflasi. Untuk itu telah disusun Rencana Aksi pencapaian RB oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga baik secara general maupun tematik yang relevansinya terbukti kuat berdampak bagi masyarakat, didukung oleh beberapa upaya yang dilakukan diantaranya:

1. Kemenpora melakukan proses deregulasi dan debirokratisasi yang memiliki tujuan utama untuk membangun sistem pelayanan yang sederhana, cepat, dan transparan. Penyederhanaan regulasi dalam mendukung pelaksanaan UU Kepemudaan dan dan UU Sistem Keolahragaan Nasional juga telah dilakukan melalui peraturan–peraturan turunannya, baik berkaitan dengan pembangunan kepemudaan maupun pembangunan keolahragaan
2. Penyediaan dukungan teknologi dan informasi serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran. Pembenahan telah dilakukan pada beberapa sektor, khususnya kepegawaian dan layanan digitalisasi terkait data dan informasi pelayanan.
3. Pelaksanaan jumlah kerja sama baik luar negeri maupun dalam negeri yang dilakukan harus benar-benar memberikan manfaat baik bagi program maupun masyarakat yang terdampak.
4. Penyesuaian sistem kerja dalam rangka penyederhanaan birokrasi dan implementasi sistem kerja menggunakan mekanisme tim kerja berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2024;
5. Penyusunan kebijakan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemenpora berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 97 Tahun 2024;
6. *Pilot Project* kebijakan manajemen talenta Kemenpora;
7. Monitoring dan evaluasi kinerja individu dan monitoring capaian dan renaksi kinerja organisasi dilakukan setiap bulan melalui aplikasi e-kinerja Kemenpora
8. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) secara mandiri sesuai Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022.

Kinerja RB di Kemenpora masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya terkait belum optimalnya integrasi antara SPBE, SAKIP, dan perencanaan kinerja, sehingga arah program belum sepenuhnya didukung data dan *evidence* yang memadai. Pada aspek RB General, pengelolaan SDM belum sepenuhnya menerapkan prinsip merit karena pemetaan kompetensi, manajemen talenta, serta digitalisasi proses bisnis belum berjalan merata di seluruh unit. Selain itu, penyusunan SOP dan layanan internal masih bersifat parsial dan belum terotomasi, sementara pengawasan internal melalui SPIP belum sepenuhnya berbasis risiko dan tindak lanjut rekomendasi audit masih terlambat. Inovasi pelayanan publik juga belum memiliki standar yang seragam dan belum terintegrasi dalam arsitektur layanan digital Kemenpora, sehingga peningkatan kualitas layanan belum signifikan.

Pada pelaksanaan RB Tematik, khususnya terkait hilirisasi olahraga dan kontribusi program terhadap penurunan kemiskinan ekstrem, masih terdapat sejumlah kendala yang signifikan. Basis data kinerja meliputi data atlet, *sport science*, industri olahraga, hingga dampak ekonomi kegiatan olahraga belum sepenuhnya kuat sehingga pengukuran *outcome* belum dapat dilakukan secara optimal. Sinergi lintas unit dan lintas pemangku kepentingan juga belum terbangun secara solid, menyebabkan program tematik belum menghasilkan rantai pasok yang memberikan nilai tambah ekonomi dan manfaat sosial yang terukur. Selain itu, model bisnis pemanfaatan aset olahraga belum dikembangkan secara sistematis, sehingga potensi *value creation* melalui BLU, kemitraan, maupun penguatan ekosistem olahraga belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator RB Tematik. Variasi kapasitas unit teknis dalam pengolahan data tematik turut berdampak pada proses monitoring dan evaluasi, yang hingga kini belum secara konsisten menunjukkan kontribusi nyata terhadap hilirisasi olahraga maupun penurunan kemiskinan ekstrem.

OUTCOME

Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Kemenpora meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola melalui penyederhanaan proses bisnis, penguatan koordinasi lintas-unit, serta digitalisasi manajemen kinerja, sekaligus memperbaiki kualitas layanan publik yang lebih cepat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Implementasi RB di Kemenpora menghasilkan sejumlah *outcome* yang berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja organisasi. Tata kelola birokrasi semakin efektif dan efisien melalui penyederhanaan proses bisnis, penguatan koordinasi lintas-unit, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung manajemen kinerja dan proses pengambilan keputusan. Kualitas layanan publik di bidang kepemudaan dan keolahragaan juga menunjukkan perbaikan melalui peningkatan standardisasi layanan, mekanisme pengaduan yang lebih responsif, serta peningkatan profesionalisme SDM yang mendorong layanan lebih cepat, tepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kemenpora juga mencatat keberhasilan RB melalui dua terobosan utama, yaitu RB Tematik Hilirisasi Olahraga dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada aspek hilirisasi, Kemenpora berhasil mendorong pertumbuhan rantai nilai industri olahraga melalui peningkatan sertifikasi TKDN, penguatan kapasitas pelaku usaha, serta penyediaan database produk olahraga dalam negeri sebagai acuan dalam kebijakan pengadaan nasional.

Sementara itu, pada agenda pelayanan publik, Kemenpora meningkatkan transparansi dan responsivitas layanan melalui penguatan standar pelayanan, optimalisasi kanal pengaduan digital, serta peningkatan kepatuhan terhadap penilaian Ombudsman Republik Indonesia. Kedua agenda ini menunjukkan bahwa penerapan RB tidak hanya memperbaiki tata kelola internal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pemangku kepentingan di sektor kepemudaan dan keolahragaan.

ANALISIS HASIL EFISIENSI



Pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi, tingkat efisiensi dinilai berdasarkan kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan capaian kinerja yang dihasilkan. Kemenpora mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.000.000.000 untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.984.890.250 atau 99,24%. Dengan capaian kinerja sebesar 103,12%, tingkat efisiensi yang diperoleh tercatat sebesar 0,96. Hasil ini menunjukkan bahwa anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.000.000.000 yang dialokasikan untuk mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,91 sudah digunakan secara efisien.

Tabel 3.29 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan dalam Indeks Reformasi Birokrasi

Uraian Sasaran Program/Komponen		Belanja		
		Anggaran	Realisasi	%
6972.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	2.000.000.000	1.984.890.250	99,24%

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Capaian Indeks RB Kemenpora mencerminkan komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Capaian ini menempatkan Kemenpora pada posisi kompetitif serta menjadi modal strategis untuk penguatan kinerja berbasis hasil, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2025, Kemenpora memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,91 yang menunjukkan capaian kinerja reformasi birokrasi pada kategori sangat baik. Capaian ini mencerminkan komitmen Kemenpora dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Jika dibandingkan dengan beberapa kementerian lain di tahun 2024 sebagai *benchmark*, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora berada pada posisi yang kompetitif. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat indeks sebesar 81,60, dan Kementerian PPN/BAPPENAS sebesar 81,90.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenpora telah berada di atas rata-rata beberapa kementerian, serta mendekati capaian kementerian dengan karakter perencanaan dan kebijakan strategis. Ke depan, capaian ini menjadi modal penting untuk terus memperkuat kualitas implementasi reformasi birokrasi, khususnya dalam peningkatan kinerja berbasis hasil, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

PERBAIKAN KINERJA

Perbaikan kinerja Reformasi Birokrasi difokuskan pada penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan melalui integrasi SPBE, SAKIP, dan perencanaan berbasis digital, penguatan sistem merit SDM, serta pengawasan internal berbasis risiko untuk mendorong *outcome* pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang terukur dan berkelanjutan.

Upaya perbaikan kinerja Reformasi Birokrasi difokuskan pada penguatan tata kelola internal dan kapasitas kelembagaan melalui integrasi SPBE, SAKIP, dan perencanaan kinerja berbasis proses bisnis digital serta pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan; penguatan sistem merit SDM melalui peta kompetensi, manajemen talenta, dan digitalisasi layanan kepegawaian; serta pengawasan internal dengan SPIP berbasis risiko yang terintegrasi, sekaligus diarahkan secara tematik untuk memastikan birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga menghasilkan dampak nyata melalui penajaman sasaran, indikator, dan program prioritas berbasis isu strategis, inovasi kebijakan dan layanan publik, serta kolaborasi lintas sektor guna mendorong *outcome* pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3.2

OPINI BPK

Pindai QR untuk bahan dan data pendukung lainnya.

Perolehan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, akuntabel, dan berintegritas.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik

KATA KUNCI TOPIK

- Capaian Kinerja
- Analisis Program/Kegiatan
- *Outcome*
- Nilai Efisiensi
- Perbandingan Capaian Kinerja
- Perbaikan Kinerja

CAPAIAN OPINI BPK



Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan untuk membantu Presiden dalam pemerintahan negara menurut Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Pengguna Anggaran/Barang diamanatkan untuk menyusun laporan keuangan.

Dalam hal ini, Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang disusun oleh Sekretariat Kementerian melalui Biro Perencanaan dan Keuangan wajib melakukan tata kelola administrasi keuangan dan aset sesuai dengan kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan. Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki satu sasaran strategis yaitu Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, profesional dan melayani. Sasaran ini dicapai salah satunya melalui Indikator Kinerja Program "Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga".

Berdasarkan target pada dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025, Indikator Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga "Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga" memiliki target Wajar Tanpa Pengecualian. Pada tahun 2025, Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian seperti termuat pada "Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024", dengan capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Kementerian Pemuda dan Olahraga mampu mempertahankan level tertinggi Opini BPK. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2024 menggunakan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan tahun 2023. Perincian laporan keuangan disajikan dalam 5 bahasan utama yaitu laporan laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Tabel 3.30 Capaian Opini BPK Kemenpora Tahun 2021-2024

Tahun Anggaran	Opini BPK	Keterangan
2021	WTP	Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 58A/LHP/XVI/05/2022 tanggal 25 Mei 2022, Opini atas LK Kemenpora TA 2021 Wajar dalam semua hal yang material
2022	WTP	Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 100.a/LHP/XVI/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, Opini atas LK Kemenpora TA 2022 Wajar dalam semua hal yang material
2023	WTP	Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 47.a/LHP/XVI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, Opini atas LK Kemenpora TA 2023 Wajar dalam semua hal yang material
2024	WTP	Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 36.a/LHP/XVI/05/2025 tanggal 19 Mei 2025, Opini atas LK Kemenpora TA 2024 Wajar dalam semua hal yang material

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kemenpora berkomitmen untuk memberikan pengendalian intern dan pelayanan terbaik yang tepat guna, bebas korupsi, dan transparan demi meningkatkan mutu atas pengawasan dan pelaporan keuangan.

Sejatinya transaksi dan pencatatan kas keuangan berada pada level satuan kerja, dimana komitmen dan peran pimpinan sangat diharapkan. Terdapat empat kriteria untuk melihat kewajaran informasi keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan, yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Pelaporan keuangan merupakan hasil kerja sama multipihak dalam memenuhi kriteria pelaporan yang baik dan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas keuangan sepihak. Pimpinan selaku pucuk komando dalam pengelolaan keuangan suatu entitas perlu memperlihatkan komitmen untuk memberikan pengendalian intern dan pelayanan terbaik yang tepat guna, bebas korupsi, dan transparan.

Dalam rangka meningkatkan mutu atas pengawasan program dan kegiatan pada tahun 2025 Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan pengawasan atas program dan kegiatan melalui pengawasan yang bersifat rutin yaitu:

1. Reviu Laporan Keuangan Kemenpora;
2. Reviu Laporan Kinerja Kemenpora;
3. Reviu RKA K/L;
4. Reviu PNBP;
5. Reviu RKBMN;
6. Reviu Penyerapan Anggaran PBJ;
7. Reviu Buka Blokir atas DIPA Kemenpora TA 2025;
8. Reviu Perencanaan Program dan Kegiatan TA 2025;
9. Reviu atas Revisi Anggaran Satker yang memerlukan telaah Inspektorat;
10. Evaluasi SAKIP Eselon I.

Selain melakukan pengawasan yang bersifat rutin, Kemenpora juga melakukan pengawasan atas program dan kegiatan yang menjadi prioritas pimpinan melalui pendampingan, reviu dan monitoring kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan Hari Sumpah Pemuda TA 2025;
2. Pengawasan bantuan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional Tahun 2024;
3. Pengawasan pemberian Bonus *Multievent*;
4. Pendampingan pelaksanaan bantuan pemerintah kepada organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
5. Pengawasan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024 dan PEPARNAS XVII Tahun 2024.
6. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, yaitu:
    - Reviu atas pertanggungjawaban kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN)
    - Reviu atas pertanggungjawaban yang belum disampaikan oleh penerima bantuan pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
    - Reviu atas pertanggungjawaban yang belum disampaikan oleh penerima bantuan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
    - Reviu atas pertanggungjawaban bantuan untuk kegiatan Pesantrenpreneur pada Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda
    - Reviu atas penyaluran bantuan pemerintah pada Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN) pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
    - Reviu atas Realisasi Belanja Barang Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Olahragawan Nasional pada Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) Tahun 2024
    - Reviu atas pertanggungjawaban kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan JAMTANAS

Dalam rangka meningkatkan mutu atas pengawasan dan pelaporan keuangan terdapat hambatan sebagai berikut:

1. Penatausahaan aset dan persediaan yang belum optimal
2. Pengelolaan Bantuan Pemerintah yang belum optimal
3. Dokumen hasil tindak lanjut yang disampaikan belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK

OUTCOME

Penyajian laporan keuangan yang disajikan secara wajar yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat meningkatkan citra dan reputasi Kementerian Pemuda dan Olahraga serta sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kemenpora mengupayakan ketercapaian indikator Opini BPK yang berdampak positif. Indikator ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. BPK dapat menilai kinerja pengelolaan keuangan negara dan memberikan opini yang objektif dan independen. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan mengurangi risiko korupsi dan penyelewengan keuangan.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara dengan adanya opini yang objektif dan independen dari BPK. Selain itu, indikator ini juga dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan melakukan perbaikan yang lebih tepat dan efektif. Dengan demikian, pelaksanaan indikator opini BPK dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

ANALISIS HASIL EFISIENSI



Pada indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan, efisiensi dapat dilihat dari aspek penggunaan anggaran yang diberikan serta upaya yang dilakukan. Kementerian Pemuda dan Olahraga mengalokasikan anggaran untuk indikator Opini BPK sebesar Rp3.077.000.000, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp2.979.440.232 atau 96,83%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja yang dihasilkan, yaitu sebesar 100% maka efisiensi yang diperoleh sebesar 0,97. Nilai efisiensi 0,97 menunjukkan bahwa anggaran tahun 2025 yang dialokasikan untuk mencapai target Opini BPK WTP telah digunakan secara efisien.

Tabel 3.31 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan dalam Opini BPK

KRO	RO	Pagu	Realisasi	%
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	965 Layanan Audit Internal (Dokumen)	3.077.000.000	2.979.440.232	96,83%

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Jika dibandingkan dengan K/L lain yang masih serumpun atau berada pada lingkup kementerian kordinator yang sama, Kementerian Pemuda dan Olahraga mencetak prestasi yang setara (WTP).

Pada tahun 2025, untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kemenpora. BPK juga memberikan opini WTP untuk 83 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas dua LKKL.

Jika dibandingkan dengan K/L lain yang masih serumpun atau berada pada lingkup kementerian kordinator yang sama, Kementerian Pemuda dan Olahraga mencetak prestasi yang setara. Selain Kementerian Pemuda dan Olahraga, kementerian lain yang mendapatkan penghargaan atas pencapaian Opini BPK diantaranya adalah:

- Kementerian Pariwisata;
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Kementerian Koperasi;
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Prestasi Kementerian/Lembaga yang semakin baik dalam perolehan opini menunjukkan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama dengan Kementerian/Lembaga lain berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui pelaporan kinerja yang transparan dan bertanggungjawab.

PERBAIKAN KINERJA

Kemenpora perlu mempertahankan capaian yang telah baik dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian intern

Strategi perbaikan yang dilakukan untuk mempertahankan Opini WTP pada Laporan Keuangan Kemenpora Tahun 2025 diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan anggaran sejak saat perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam rangka memastikan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Meningkatkan kualitas pengendalian intern, diantaranya:
    a. Menerapkan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2023;
    b. Adanya koordinasi yang intensif antara Biro Hubungan Masyarakat dan Umum c.q. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Kerja terkait dalam upaya pengelolaan Barang Milik Negara.
3. Melakukan pendampingan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan kepada satuan kerja di Kemenpora;
4. Menindaklanjuti rekomendasi yang belum sesuai dan melakukan pemantauan atas penyelesaian atas rekomendasi BPK RI.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3.3

INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Pindai QR untuk bahan dan data pendukung lainnya.

Indeks Pelayanan Publik merefleksikan keberhasilan organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik

KATA KUNCI TOPIK

- Capaian Kinerja
- Analisis Program/Kegiatan
- *Outcome*
- Nilai Efisiensi
- Perbandingan Capaian Kinerja
- Perbaikan Kinerja

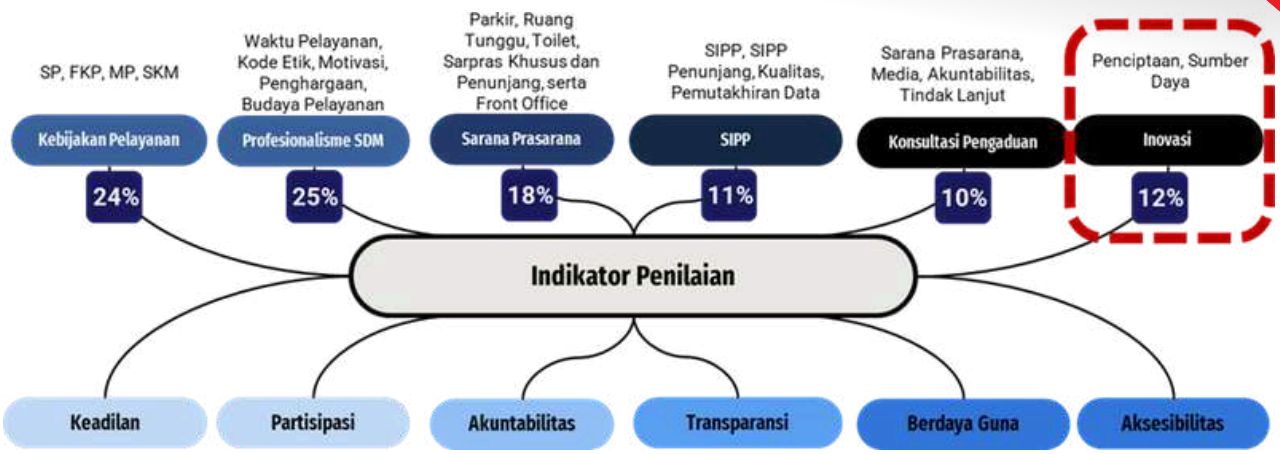
CAPAIAN INDEKS PELAYANAN PUBLIK



Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayan publik dalam hal ini institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pemantauan terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemantauan, penyelenggara kemudian diwajibkan untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana.

Untuk peningkatan kapasitas seluruh unit pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kemenpora maka dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dengan indikator yang jelas dan terukur serta memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan hasil dari PEKPPP di lingkungan Kemenpora yang mengacu pada PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pedoman teknis di lapangan, evaluator, dan unit lokus mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP (sebagai panduan terbaru untuk kegiatan Pemantauan, PEKPPP Mandiri, dan PEKPPP Khusus).

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek Kebijakan Pelayanan, aspek Profesionalisme SDM, aspek Sarana Prasarana, aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, aspek Konsultasi dan Pengaduan, dan aspek Inovasi.



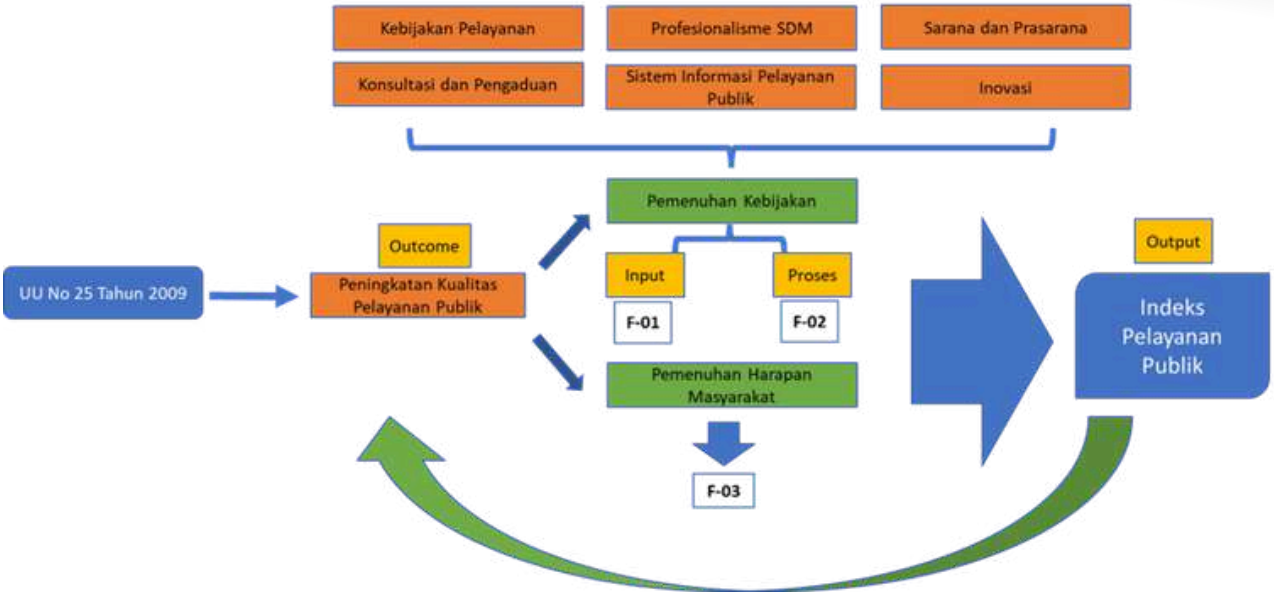
Grafik 3.16 Aspek dan Prinsip Evaluasi PEKPPP

Penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan melalui pengisian formulir, evaluasi lapangan, dan pembuatan berita acara. Terdapat 3 formulir dalam PEKPPP yaitu:
1. Formulir F-01 diisi oleh unit penyelenggara (*self-assessment*);
2. Formulir F-02 diisi oleh evaluator (verifikasi objektif); dan
3. Formulir F-03 diisi oleh masyarakat/pengguna layanan (survei persepsi).

Penghitungan nilai indeks diperoleh dari nilai komposit 3 formulir, yaitu formulir F01 terdiri dari 6 aspek; formulir F02 terdiri dari 6 Aspek; dan formulir F03 terdiri dari 5 aspek. Setelah nilai indeks diperoleh, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan pengumpulan data yang diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.32 Nilai dan Kategori Indeks Pelayanan Publik

Interval Nilai	Kategori	Predikat
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
3,51-4,00	B	Baik
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
2,51-3,00	C	Cukup
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
1,51-2,00	D	Prioritas Pembinaan
1,01-1,50	E	Prioritas Pembinaan
0-1,00	F	Prioritas Pembinaan

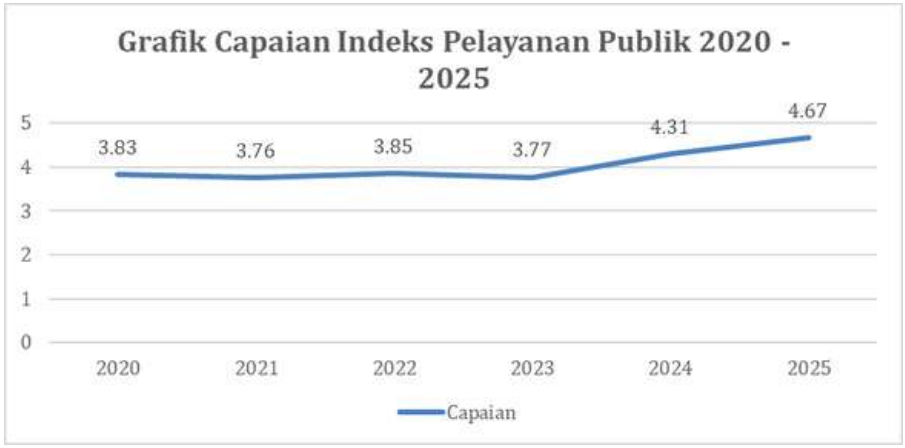


Grafik 3.17 Alur Proses Perolehan Indeks Pelayanan Publik

Adapun target dan capaian Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 yang dibandingkan dengan *baseline* 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.33 Indeks Pelayanan Publik Kemenpora Tahun 2020-2025

Tahun	Capaian
2020	3,83
2021	3,76
2022	3,85
2023	3,77
2024	4,31
2025	4,67



Grafik 3.18 Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020-2025

Indeks Pelayanan Publik Kemenpora mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data capaian (*baseline*) Indeks Pelayanan Publik Kemenpora selama 3 tahun terakhir dapat dianalisis bahwa terdapat interval perubahan nilai Indeks Pelayanan Publik dimana periode tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,08 namun setelah itu selalu mengalami peningkatan. Periode tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,54 dan periode tahun 2024 ke tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,36. Capaian tersebut memenuhi target yang diharapkan sebesar 4,32 dengan kategori A (Pelayanan Prima) yang merupakan kategori tertinggi dalam predikat penyelenggaraan pelayanan publik. Ini merupakan capaian tertinggi yang pernah diperoleh Kemenpora.

Tabel 3.34 Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022-2025

Indeks Pelayanan Publik				
Tahun Pelaksanaan	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Target	401	426	401	432
Capaian	385	377	431	467
Kategori	B (Baik)	B (Baik)	A- (Sangat Baik)	A (Pelayanan Prima)

PEKPPP Mandiri

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: B/101/PP.00.02/2025 hal Pemberitahuan Informasi Tambahan PEKPPP Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2025, maka diamanatkan bahwa instansi pemerintah wajib melaksanakan PEKPPP Mandiri terhadap paling sedikit 25% dari total Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OPP). OPP dimaksud adalah Unit Organisasi setingkat Eselon II. Untuk menindaklanjuti amanat tersebut, maka telah dilakukan PEKPPP secara Mandiri kepada 11 (sebelas) unit organisasi tingkat Eselon II yang telah diusulkan atau sebesar 40% dari total jumlah unit organisasi setingkat Eselon II yang terdapat di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hasil pelaksanaan PEKPPP Mandiri 2025 yang dilaksanakan oleh Kemenpora adalah sebagai berikut :

Tabel 3.35 Hasil pelaksanaan PEKPPP Mandiri Kemenpora Tahun 2025

No	Unit Organisasi	Indeks	Predikat	Kategori
1	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data	2,93	C	Cukup
2	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	3,19	B-	Baik dengan Catatan
3	Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda	2,52	C	Cukup
4	Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global	2,68	C	Cukup
5	Asisten Deputi Olahraga Pendidikan	-	Tidak mengisi F01	
6	Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	3,27	B-	Baik
7	Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga	3,44	B-	Baik dengan Catatan
8	Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	3,91	B	Baik
9	Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi	3,11	B-	Baik dengan Catatan
10	Asisten Deputi Pengelolaan Jasa, Sarana, dan Prasarana Olahraga	3,88	B	Baik
11	Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global	2,68	C	Cukup

Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan, maka penyelenggara pelayanan publik harus memberikan pelayanan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (pemangku kepentingan).

Pelayanan publik sendiri merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan bersih, efisien, akuntabel, serta berdampak kepada masyarakat maka dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik instansi pemerintah. Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik instansi pemerintah adalah Ombusdman Republik Indonesia.

Bahwa Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, ditetapkan Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai pengganti atas Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016.

Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga tentunya memiliki tanggung jawab yang besar untuk melakukan pelayanan publik yang prima bagi seluruh pemangku kepentingan pemuda dan olahraga.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Kementerian Pemuda dan Olahraga selama 3 tahun terakhir, maka dapat dilihat nilai penyelenggaraan pelayanan publik Kemenpora sebagai berikut:



Grafik 3.19 Capaian Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kemenpora

Sedangkan untuk penilaian penyelenggaraan pelayanan publik Kemenpora Tahun 2025 telah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 27 s.d. 29 Oktober Tahun 2025 dengan metode wawancara, studi dokumen dan evaluasi lapangan. Untuk hasil penilaian masih dalam proses penetapan Surat Keputusan oleh Ketua Ombusdman Republik Indonesia.

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 berhasil mencapai target, didukung oleh komitmen pimpinan, pendampingan pemenuhan bukti dukung, serta penguatan kompetensi petugas layanan. Kendala yang masih dihadapi meliputi kebutuhan peningkatan sarana prasarana, termasuk akses disabilitas, serta belum tersedianya fitur khusus Pelayanan Publik pada website Kemenpora.

Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja yaitu:

1. Komitmen pimpinan berupa dukungan pelaksanaan dan pemenuhan bukti dukung, pendampingan dari awal hingga akhir proses pemenuhan bukti dukung, dukungan penyelenggaraan kegiatan pendukung seperti FKP dan peningkatan kompetensi petugas layanan.
2. Koordinasi secara intensif dengan unit terkait penyediaan Prasarana dan Sarana antara lain melalui nota dinas permohonan kepada Kepala Biro Humas dan Umum, koordinasi secara langsung dengan Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan, koordinasi secara teknis dengan Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Biro Humas dan Umum.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi, di antaranya:

1. Peningkatan penyediaan Prasarana dan Sarana termasuk Sarpras untuk Disabilitas.
2. Belum adanya fitur khusus Pelayanan Publik di laman Kemenpora yang memuat standar pelayanan dan maklumat pelayanan yang sebelumnya ada pada laman kedeputian.

OUTCOME

Sejalan dengan meningkatnya Indeks Pelayanan Publik Kemenpora, Indeks Kepuasan Masyarakat Kemenpora juga mengalami peningkatan signifikan.

Pelayanan Publik adalah hak mutlak bagi Masyarakat. Pelayanan publik yang prima diharapkan Masyarakat dapat memperoleh layanan yang sesuai standar yang telah ditetapkan. Melalui pemenuhan indikator–indikator kinerja penyelenggaraan pelayanan publik maka unit/instansi penyelenggara pelayanan publik telah mencapai *output* yang diharapkan dari setiap indikator, namun keberhasilan Pelayanan Publik tidak hanya diukur dari terpenuhinya indikator capaian tersebut.

Salah satu *outcome* yang terukur dan objektif adalah tingkat kepuasan pengguna layanan (Masyarakat). Hal tersebut dikarenakan, pengguna layanan merupakan objek nyata yang menerima layanan dari penyelenggara layanan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sejalan dengan meningkatnya Indeks Pelayanan Publik Kemenpora, Indeks Kepuasan Masyarakat Kemenpora juga mengalami peningkatan secara signifikan dari *baseline* Tahun 2023 sebesar 80,77 dengan kategori Baik menjadi 90,05 dengan kategori Sangat Baik di Tahun 2024 dan di tahun 2025 menjadi 91,38 dengan kategori Sangat Baik. Selanjutnya diharapkan Kemenpora dapat terus meningkatkan Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun–tahun selanjutnya dengan target *impact* (dampak) dari penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima adalah Kepercayaan (*trust*) Masyarakat terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi semakin meningkat.

ANALISIS HASIL EFISIENSI



Pada indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik, efisiensi dapat dilihat dari aspek penggunaan anggaran yang diberikan serta upaya yang dilakukan. Kementerian Pemuda dan Olahraga mengalokasikan anggaran untuk Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik sebesar Rp.117.560.000 anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp.117.260.000 (99,74%). Jika dibandingkan dengan capaian kinerja yang dihasilkan, yaitu sebesar 108,10% maka efisiensi yang diperoleh sebesar 0,92. Nilai efisiensi 0,92 menunjukkan bahwa anggaran tahun 2025 yang dialokasikan untuk mencapai target Indeks Pelayanan Publik telah digunakan secara efisien.

Tabel 3.36 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan dalam Indeks Pelayanan Publik

Uraian Sasaran Program/Komponen		Belanja		
		Anggaran	Realisasi	%
6974.EBA.052.OF	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) KemenPAN RB	117.560.000	117.260.000	99,74%

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Benchmarking dilakukan dengan merujuk pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026, di mana Kementerian Pemuda dan Olahraga meraih peringkat ke-18 dari 93 K/L pada Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 sebagai dasar pembelajaran untuk peningkatan kualitas layanan publik yang prima dan berkelanjutan.

Merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Daerah Tahun 2025, Kementerian Pemuda dan Olahraga berada pada urutan ke-18 dari 93 Kementerian/Lembaga yang dilakukan pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025. Oleh karena itu, hasilnya dapat diperbandingkan untuk melihat dan mempelajari keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik di kementerian atau lembaga lain. *Benchmarking* terhadap Kementerian/Lembaga yang turut ikut serta dalam penilaian Indeks Pelayanan Publik perlu dilakukan agar Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat memastikan layanan publik yang prima dan berkualitas bagi masyarakat seiring dengan semakin meningkatnya harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Kementerian PANRB pada tahun 2025 berhasil mencapai nilai indeks sebesar 4,51 poin. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhasil mencapai nilai indeks sebesar 3,93. Sementara Kementerian PPN/BAPPENAS berhasil mencapai nilai indeks 3,18. Capaian dari ketiga Kementerian yang sama-sama berada pada klaster 3 bersama Kemenpora tersebut menunjukan bahwa capaian Kemenpora sebesar 4,67 sudah sangat baik dan menandakan kualitas pelayanan publik di Kemenpora sudah sangat baik.

PERBAIKAN KINERJA

Kemenpora perlu mempertahankan capaian yang telah baik dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian intern

Peningkatan kualitas kebijakan pelayanan didukung melalui pemeliharaan sarana dan prasarana, serta optimalisasi website Kemenpora dan pengelolaan SP4N-LAPOR!. Meskipun indikator ini telah tercapai melampaui target, upaya perbaikan tetap diperlukan guna meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, antara lain:

1. Terkait Aspek Kebijakan Pelayanan perlu pendampingan penyusunan Standar Pelayanan agar seluruh unit kerja di Kemenpora memiliki Standar Pelayanan yang menjadi dasar pelaksanaan layanannya;
2. Terkait Profesionalisme SDM, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga mengenai kriteria pemberian penghargaan yang memuat unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal serta mengimplementasikannya dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan dokumentasi pemberian penghargaan;
3. Terkait Sarana Prasarana, perlu meningkatkan dan memelihara sarana prasarana bagi kelompok rentan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas sarana prasarana mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan;
4. Untuk aspek sistem informasi pelayanan publik, agar memanfaatkan laman kemenpora.go.id untuk dikelola, dimanfaatkan dan dilakukan pemutakhiran secara rutin;
5. Terkait konsultasi dan pengaduan, memaksimalkan fungsi SP4N LAPOR! Sebagai sarana konsultasi dan pengaduan dengan memberikan sosialisasi kepada Masyarakat untuk kanal pengaduan SP4N LAPOR!;
6. Untuk aspek inovasi, mendorong unit kerja untuk terus belajar untuk menciptakan inovasi baik.

Sebagai hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik Kemenpora, maka direkomendasikan hal–hal sebagai berikut:

1. Perlu menyusun dan menetapkan dokumen Standar Pelayanan untuk seluruh unit organisasi dan seluruh jenis layanan yang ada di Kemenpora;
2. Perlu menyiapkan dan memelihara sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk sarana prasarana bagi masyarakat kelompok rentan;
3. Perlu menyediakan kanal pengaduan bagi masyarakat serta menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan target *output* dan target waktu yang jelas;
4. Perlu mempublikasikan jenis–jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Kemenpora untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi Masyarakat memanfaatkan pelayanan tersebut.

Untuk itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu melakukan rencana aksi dan tindakan perbaikan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pemuda dan olahraga.

REKAPITULASI NILAI EFISIENSI

Efisiensi sumber daya mengacu pada kemampuan untuk menggunakan sumber daya secara optimal sehingga menghasilkan *output* yang maksimal dengan *input* yang diberikan. Efisiensi sumber daya menjadi penting dalam konteks keberlanjutan dan dapat membantu mengurangi dampak negatif serta memastikan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. Selain itu, efisiensi sumber daya juga dapat berkontribusi pada efisiensi ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya produksi. Nilai efisiensi dihitung dari besaran persentase realisasi anggaran dibagi oleh persentase capaian kinerja. Efisiensi dengan nilai lebih dari 1 (satu) termasuk dalam kategori kurang efisien karena belum dapat mencapai kinerja yang diharapkan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Efisiensi dengan nilai kurang dari 1 (satu) termasuk dalam kategori efisien karena mampu mencapai kinerja lebih besar dari alokasi anggaran yang direalisasikan.

Tabel 3.37 Rekapitulasi Efisiensi Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1,1	Indeks Pembangunan Pemuda	101,29
2,1	Indeks Pembangunan Olahraga	107,40
2,2	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	87,45
2,3	Peringkat pada Asian Youth Games	100,00
2,4	Peringkat pada Asian Youth Para Games	80,00
2,5	PDB Industri Olahraga	151,06
3,1	Indeks RB	103,12
3,2	Opini BPK	100,00
3,3	Indeks Pelayanan Publik	108,10
Rata-rata capaian kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga		**104,27**
% Realisasi anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga		**91,36**
EFISIENSI		**0,88**

Secara agregat dalam mencapai 9 target Indikator Kinerja Utama (IKU), penggunaan efisiensi sumber daya Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2025 termasuk dalam kategori efisien dengan nilai 0,88.

C. REALISASI ANGGARAN

C.1 REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025

Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran (TA) 2025 diawali dengan penetapan pagu awal sebesar Rp2.478.345.816.000 pada Januari 2025. Dalam perjalanan tahun anggaran, dilakukan penyesuaian melalui mekanisme revisi sebagai bentuk penajaman prioritas program, efisiensi belanja, serta optimalisasi alokasi sumber daya agar lebih berorientasi pada hasil. Berdasarkan Revisi DIPA Nomor SP DIPA-092.01.1.499962/2025 tanggal 26 November 2025, pagu anggaran disesuaikan menjadi Rp2.408.834.380.000, atau mengalami penurunan sebesar Rp69.511.436.000 (2,80%) dari pagu awal.

Seluruh anggaran TA 2025 bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan realisasi mencapai Rp2.200.703.342.238 atau 91,36%, yang menunjukkan tingkat serapan anggaran cukup tinggi dan mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif serta terkendali. Ditinjau dari jenis belanja, realisasi anggaran didominasi oleh Belanja Barang sebagai instrumen utama pelaksanaan program, dengan serapan 91,79%, diikuti Belanja Modal sebesar 95,17% yang menunjukkan optimalnya pengadaan sarana dan prasarana pendukung layanan. Sementara itu, Belanja Pegawai terealisasi 85,08% sebagai hasil penyesuaian kebutuhan riil dan efisiensi belanja aparatur.

Dari sisi program, serapan tertinggi terdapat pada Program Keolahragaan sebesar 93,82%, yang mencerminkan kuatnya dukungan terhadap pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga nasional. Program Dukungan Manajemen juga menunjukkan capaian tinggi sebesar 90,77% dalam menopang tata kelola dan layanan organisasi. Program Keolahragaan melalui skema Badan Layanan Umum (BLU) terealisasi 80,18%, menandakan penguatan layanan berbasis fleksibilitas pengelolaan keuangan. Adapun Program Kepemudaan terealisasi 53,96%, dipengaruhi oleh refocusing kegiatan dan penyesuaian strategi pelaksanaan yang lebih kolaboratif.

Berdasarkan satuan kerja, unit dengan tingkat serapan tertinggi adalah Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga sebesar 99,18%, diikuti Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebesar 95,53% dan Sekretariat sebesar 91,57%, yang menunjukkan optimalnya dukungan terhadap program prioritas kementerian. Sementara itu, realisasi pada beberapa unit lainnya menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi, restrukturisasi kegiatan, dan penajaman output program. Mekanisme Dekonsentrasi terealisasi 86,02%, sedangkan LPDUK sebagai BLU mencapai 80,18% dalam mendukung layanan dan pengelolaan kegiatan keolahragaan.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran TA 2025 menunjukkan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara efektif, efisien, dan akuntabel, melalui penyesuaian kebijakan anggaran yang adaptif tanpa mengurangi fokus pada pencapaian sasaran strategis pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Struktur belanja yang lebih terarah pada kegiatan substantif menjadi cerminan komitmen kementerian dalam memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi peningkatan layanan, partisipasi pemuda, serta prestasi olahraga nasional.

C.2 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER SUMBER DANA DAN PER JENIS BELANJA

Tabel 3.38 Realisasi Pagu dan realisasi anggaran per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja

per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Pagu	%
Rupiah Murni (RM)	2.408.834.380.000	2.200.703.342.238	91,36%
Belanja Pegawai	183.401.643.000	156.036.011.934	85,08%
Belanja Barang	2.168.931.394.000	1.990.895.319.356	91,79%
Belanja Modal	56.501.343.000	53.772.010.948	95,17%

Berdasarkan struktur sumber dana, seluruh pelaksanaan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 berasal dari Rupiah Murni (RM) dengan pagu sebesar Rp2.408.834.380.000 dan realisasi mencapai Rp2.200.703.342.238 atau 91,36%. Tingkat serapan ini menunjukkan pelaksanaan anggaran yang efektif dan terkendali, dengan sebagian kecil sisa anggaran merupakan hasil efisiensi pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi belanja.

Ditinjau berdasarkan jenis belanja, capaian realisasi menunjukkan:

1. Belanja Pegawai
   Dialokasikan sebesar Rp183.401.643.000 dengan realisasi Rp156.036.011.934 atau 85,08%. Persentase ini mencerminkan adanya efisiensi dari komponen belanja pegawai, antara lain dipengaruhi oleh penyesuaian kebutuhan riil, dinamika pengisian formasi, serta optimalisasi pembayaran hak kepegawaian sesuai ketentuan.
2. Belanja Barang
   Merupakan komponen terbesar dengan pagu Rp2.168.931.394.000 dan realisasi Rp1.990.895.319.356 atau 91,79%. Tingginya serapan belanja barang menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan operasional, layanan publik, pembinaan kepemudaan, serta penyelenggaraan kegiatan keolahragaan telah terlaksana sesuai rencana kerja tahun berjalan.

3. Belanja Modal
   Dialokasikan sebesar Rp56.501.343.000 dengan realisasi Rp53.772.010.948 atau 95,17%, menjadi jenis belanja dengan tingkat serapan tertinggi. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pengadaan aset dan sarana prasarana yang mendukung layanan keolahragaan dan operasional organisasi secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

Secara keseluruhan, komposisi realisasi anggaran TA 2025 memperlihatkan bahwa belanja kementerian didominasi oleh belanja barang sebagai instrumen utama pelaksanaan program, dengan dukungan belanja modal yang terealisasi sangat optimal serta belanja pegawai yang terkendali. Struktur ini mencerminkan orientasi belanja yang lebih berfokus pada pelaksanaan kegiatan substantif dan pencapaian *output* pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

C.3. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

Tabel 3.39 Realisasi Pagu dan Realisasi Anggaran per Program

Per Program	Pagu	Realisasi Pagu	%
Dukman	473.770.252.000	430.032.611.177	90,77%
Keolahragaan	1.751.313.688.000	1.643.081.698.264	93,82%
Kepemudaan	75.300.000.000	40.630.423.663	53,96%
Keolahragaan (Badan Layanan Umum)	108.450.440.000	86.958.609.134	80,18%

Pada Tahun Anggaran 2025, terdapat 3 (tiga) program di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu Program Dukungan Manajemen, Program Keolahragaan, dan Program Kepemudaan. Secara keseluruhan, total realisasi anggaran Kemenpora Tahun Anggaran 2025 mencapai 91,36 persen dari total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2.408.834.380.000.

Berdasarkan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025, capaian realisasi per program menunjukkan variasi tingkat serapan sebagai berikut:

Program Dukungan Manajemen (Dukman)
Dari pagu sebesar Rp473.770.252.000, terealisasi Rp430.032.611.177 atau 90,77%. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan dukungan tata kelola, layanan administrasi, perencanaan, serta penguatan sistem akuntabilitas telah terlaksana dengan baik. Sisa anggaran merupakan hasil efisiensi operasional dan penyesuaian kebutuhan riil kegiatan.

Program Keolahragaan

Program ini memiliki pagu terbesar, yaitu Rp1.751.313.688.000, dengan realisasi Rp1.643.081.698.264 atau 93,82%, menjadi salah satu dengan serapan tertinggi. Tingginya realisasi mencerminkan optimalnya pelaksanaan pembinaan olahraga, dukungan peningkatan prestasi, serta penyelenggaraan kegiatan olahraga nasional yang menjadi prioritas kementerian.

Program Kepemudaan

Dari pagu Rp75.300.000.000, terealisasi Rp40.630.423.663 atau 53,96%, merupakan tingkat serapan terendah. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penyesuaian dan *refocusing* kegiatan kepemudaan, perubahan pola pelaksanaan program, serta optimalisasi kolaborasi dengan pemangku kepentingan sehingga tidak seluruh alokasi anggaran terserap.

Program Keolahragaan melalui Badan Layanan Umum (BLU)

Dialokasikan sebesar Rp108.450.440.000 dengan realisasi Rp86.958.609.134 atau 80,18%. Capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme BLU telah berjalan cukup efektif dalam memberikan layanan keolahragaan secara lebih fleksibel dan berbasis kinerja, meskipun masih terdapat ruang optimalisasi pemanfaatan anggaran layanan.

Secara umum, realisasi anggaran per program TA 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar program strategis-terutama bidang keolahragaan dan dukungan manajemen-telah mencapai tingkat serapan yang tinggi. Variasi capaian mencerminkan kebijakan penajaman prioritas, efisiensi belanja, serta penyesuaian mekanisme pelaksanaan program agar lebih berorientasi pada hasil dan dampak pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

C.4. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER ESELON 1 KEMENPORA, LPDUK DAN DEKONSENTRASI

Tabel 3.40 Pagu dan Realisasi Anggaran per Eselon 1, LPDUK dan Dekonsentrasi

Per Satker	Pagu	Realisasi Pagu	%
Sekretariat	447.070.252.000	409.391.176.033	91,57%
Deputi 1	81.300.000.000	44.296.429.900	54,49%
Deputi 2	80.000.000.000	79.346.320.552	99,18%
Deputi 3	1.576.002.188.000	1.505.577.542.309	95,53%
Deputi 4	67.311.000.000	33.241.859.576	49,39%
LPDUK	108.450.440.000	86.958.609.134	80,18%
Dekonsentrasi	48.700.500.000	41.891.404.734	86,02%
Total	2.408.834.380.000	2.200.703.342.238	91,36%

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki berbagai satuan kerja (satker) yang tersebar pada Eselon I, masing-masing bertanggung jawab atas berbagai program dan kegiatan terkait dengan pemuda dan olahraga di Indonesia. Secara keseluruhan, Kemenpora memiliki pengelolaan anggaran yang cukup efisien, dengan rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 91.36%. Secara keseluruhan, Kemenpora berhasil mempertahankan tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang tinggi, yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan dan visi pembangunan sektor pemuda dan olahraga di Indonesia. Terdapat 5 (Lima) unit Kerja pada Eselon 1 (Sekretariat, Deputi 1, Deputi 2, Deputi 3, dan Deputi 4) lalu ada LPDUK dan Dekonsentrasi.

Pada Tahun Anggaran 2025, Realisasi anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 berdasarkan satuan kerja menunjukkan capaian yang bervariasi, dengan total realisasi sebesar Rp2.200.703.342.238 dari pagu Rp2.408.834.380.000 atau 91.36%. Tingkat serapan ini mencerminkan pelaksanaan anggaran yang secara umum berjalan efektif dalam mendukung program prioritas kementerian.

Uraian capaian per satuan kerja adalah sebagai berikut:

Sekretariat
Dari pagu Rp447.070.252.000, terealisasi Rp409.391.176.033 atau 91,57%. Capaian ini menunjukkan dukungan manajemen, layanan administrasi, dan tata kelola organisasi telah berjalan optimal dalam menopang pelaksanaan program teknis kementerian.

Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan (Deputi 1)
Realisasi sebesar Rp44.296.429.900 dari pagu Rp81.300.000.000 atau 54,49%. Tingkat serapan yang masih moderat dipengaruhi oleh penyesuaian kegiatan dan *refocusing* program kepemudaan, serta penguatan pola kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga (Deputi 2)
Mencapai realisasi Rp79.346.320.552 dari pagu Rp80.000.000.000 atau 99,18%, merupakan capaian tertinggi. Hal ini menunjukkan pelaksanaan program pembudayaan olahraga masyarakat berjalan sangat optimal dan sesuai dengan rencana kegiatan.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (Deputi 3)
Merealisasikan Rp1.505.577.542.309 dari pagu Rp1.576.002.188.000 atau 95,53%. Tingginya serapan mencerminkan optimalnya dukungan terhadap pembinaan atlet, peningkatan prestasi olahraga, serta penyelenggaraan kegiatan kompetisi dan pelatihan.

Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga (Deputi 4)
Realisasi sebesar Rp33.241.859.576 dari pagu Rp67.311.000.000 atau 49,39%. Capaian ini dipengaruhi oleh penyesuaian pelaksanaan program pengembangan industri olahraga dan adanya efisiensi pada beberapa kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal.

LPDUK (Badan Layanan Umum)
Dari pagu Rp108.450.440.000, terealisasi Rp86.958.609.134 atau 80,18%. Capaian ini menunjukkan mekanisme BLU telah berjalan cukup baik dalam memberikan layanan dan pengelolaan kegiatan keolahragaan secara fleksibel dan berbasis kinerja.

Dekonsentrasi
Realisasi mencapai Rp41.891.404.734 dari pagu Rp48.700.500.000 atau 86,02%. Pelaksanaan kegiatan di daerah berjalan cukup efektif, meskipun terdapat penyesuaian volume kegiatan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi dan penajaman program.

Secara keseluruhan, capaian realisasi per satuan kerja menunjukkan bahwa sebagian besar unit kerja telah melaksanakan anggaran secara optimal, terutama pada unit yang mendukung langsung peningkatan prestasi olahraga dan pembudayaan olahraga. Variasi capaian pada beberapa satuan kerja merupakan konsekuensi dari kebijakan *refocusing*, efisiensi belanja, serta penyesuaian strategi pelaksanaan program agar lebih berorientasi pada hasil dan dampak pembangunan.

PAGU ANGGARAN DALAM STATUS BLOKIR

Tabel 3.41 Pagu Anggaran status blokir

Per Satker	Pagu	Blokir
Sekretariat	447.070.252.000	4.500.706.000
Deputi 1	81.300.000.000	36.638.103.000
Deputi 2	80.000.000.000	0
Deputi 3	1.576.002.188.000	55.616.879.000
Deputi 4	67.311.000.000	33.311.000.000
LPDUK	108.450.440.000	15.000.000.000
Dekonsentrasi	48.700.500.000	0
Total	2.408.834.380.000	145.066.688.000

Pada Tahun Anggaran 2025, dari total pagu anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar R**p2.408.834.380.000**, terdapat pagu anggaran yang masih berada dalam status blokir sebesar **Rp145.066.688.000.** Pagu blokir tersebut tersebar pada beberapa satuan kerja dengan proporsi yang berbeda-beda, sementara sebagian satker lainnya tidak memiliki anggaran dalam status blokir.

Secara rinci, pagu blokir terbesar terdapat pada **Deputi 3** sebesar **Rp55.616.879.000, diikuti oleh Deputi 1 sebesar Rp36.638.103.000 dan Deputi 4 sebesar Rp33.311.000.000.** Sementara itu, **Sekretariat memiliki pagu blokir relatif kecil yaitu Rp4.500.706.000, dan LPDUK sebesar Rp15.000.000.000.** Adapun Deputi 2 dan anggaran Dekonsentrasi tidak memiliki pagu dalam status blokir.

Keberadaan pagu dalam status blokir secara umum kondisi ini **tidak menghambat pencapaian sasaran strategis utama,** karena sebagian besar kegiatan prioritas tetap dapat dilaksanakan melalui pagu yang tidak diblokir.

C.5. NILAI KINERJA ANGGARAN KEMENPORA TAHUN 2025

Nilai Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dihitung berdasarkan pengukuran nilai SMART dilakukan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) di Kementerian Pemuda dan Olahraga dilakukan secara berjenjang pada tingkat satker, unit kerja Eselon I, dan kementerian. Nilai Kinerja Kemenpora per 28 Januari 2026 sebagaimana dipantau melalui aplikasi SMART adalah 87.67 dengan predikat kinerja “BAIK”.

Penurunan nilai kinerja yang terjadi pada tahun 2025 karena adanya perubahan dalam komponen pengukuran capaian nilai kinerja dari tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi cara evaluasi dan perhitungan capaian kinerja.

Pengukuran Nilai Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025 merupakan gabungan dari dua komponen penilaian yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan bobot sama besar masing-masing 50%. Nilai komponen tersebut adalah sebagai berikut:



Grafik 3.20 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kemenpora tahun 2025

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran menunjukkan capaian yang bervariasi pada setiap indikator, yang mencerminkan dinamika pelaksanaan anggaran sepanjang tahun berjalan. Capaian tertinggi terdapat pada indikator **Penyelesaian Tagihan** dengan nilai **25**, yang menunjukkan bahwa proses pembayaran dan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga telah dilaksanakan secara optimal dan tepat waktu. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan serta dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Indikator **Penyerapan Anggaran** mencatat nilai **19,06,** menunjukkan tingkat realisasi anggaran relatif baik dan menggambarkan upaya unit kerja dalam mengakselerasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana. Sementara itu, indikator **Deviasi Halaman III DIPA** dan **Realisasi UP dan TUP** masing-masing memperoleh nilai **11,77** dan **10**, mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran masih memerlukan penguatan dalam aspek perencanaan dan pengendalian agar deviasi dapat ditekan secara lebih optimal.

Pada indikator **Capaian *Output*** dengan perolehan **8,66**, serta indikator **Penyelesaian Kontraktual** sebesar **8,97,** yang menunjukkan bahwa sebagian besar output dan kontrak kegiatan telah terlaksana, namun masih terdapat ruang perbaikan dalam meningkatkan keselarasan antara realisasi anggaran dan pencapaian target kinerja. Adapun indikator **Belanja Kontraktual** memperoleh nilai terendah yaitu **0,75**, yang menunjukkan masih terbatasnya pemanfaatan skema kontraktual dalam pelaksanaan belanja, baik karena karakteristik kegiatan maupun faktor perencanaan dan waktu pelaksanaan.

Secara keseluruhan, kinerja pelaksanaan anggaran menunjukkan kecenderungan positif, khususnya pada aspek penyelesaian tagihan dan penyerapan anggaran. Ke depan, diperlukan penguatan pada tahap perencanaan, penjadwalan kegiatan, serta pengelolaan kontrak agar seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran dapat meningkat secara lebih merata dan berkelanjutan.



Grafik 3.21 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Kemenpora tahun 2024

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran menunjukkan capaian yang relatif baik pada sebagian besar indikator, yang mencerminkan kualitas perencanaan anggaran yang semakin terarah dan selaras dengan sasaran program dan kegiatan. Indikator Capaian Rincian Output (CRO) memperoleh nilai tertinggi sebesar 99,06, yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada tingkat satuan kerja telah disusun secara efektif dan mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi.

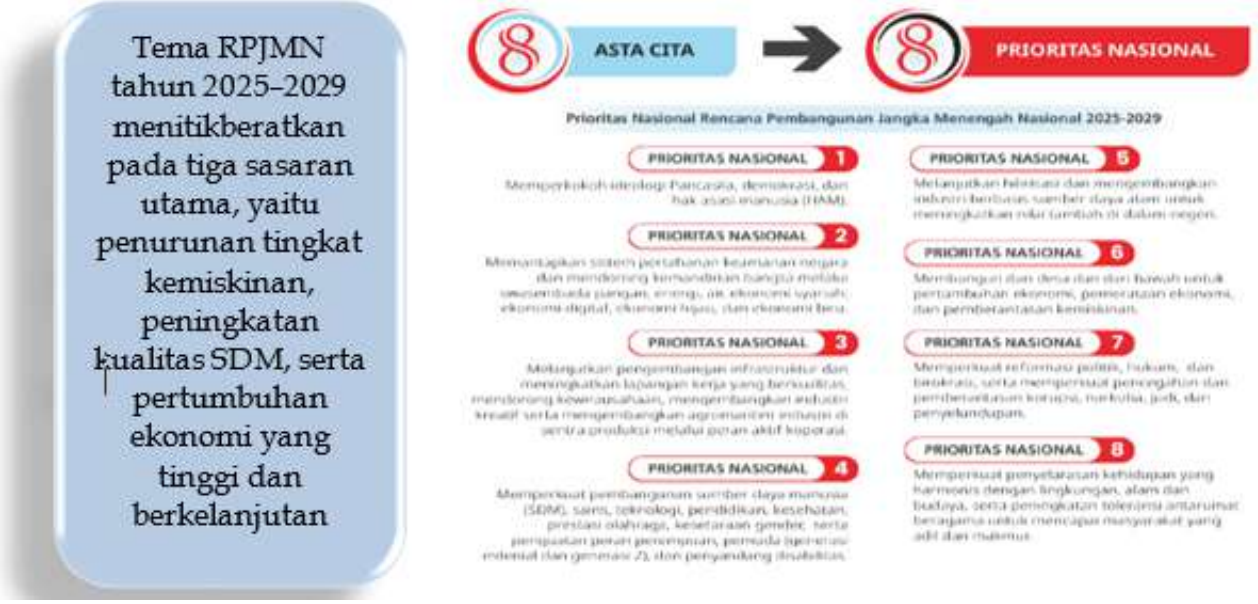
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (**IKSS)** mencatat nilai **97,82**, yang mengindikasikan tingkat kesesuaian yang sangat baik antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan dan sasaran strategis. Sementara itu, Indikator Kinerja Program (**IKP/Efektivitas UE1)** memperoleh nilai **84,85**, yang menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan pada level unit Eselon I telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam hal konsistensi dan kualitas penganggaran berbasis kinerja.

Di sisi lain, indikator Penggunaan Standar Biaya Keluaran (**SBK) dan Efisiensi SBK** masing-masing memperoleh nilai **44,44 dan 38,9**. Capaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan SBK dalam proses perencanaan anggaran masih belum optimal, baik dari aspek penerapan maupun efisiensinya. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh keterbatasan jenis SBK yang relevan dengan karakteristik kegiatan serta kebutuhan penyesuaian dalam perencanaan anggaran.

Secara keseluruhan, kinerja perencanaan anggaran telah menunjukkan hasil yang baik, khususnya pada aspek efektivitas perencanaan dan keselarasan dengan sasaran kinerja. Ke depan, diperlukan penguatan dalam optimalisasi penggunaan dan efisiensi SBK agar perencanaan anggaran tidak hanya efektif, tetapi juga semakin efisien dan akuntabel.

D. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Pembangunan Indonesia Tahun 2025–2029 ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul sebagai penggerak utama transformasi menuju Indonesia Emas 2045, yaitu sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, adaptif, berdaya saing global, dan berkarakter. Kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada peningkatan kualitas modal manusia secara komprehensif melalui penguatan layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, peningkatan kualitas anak, pemuda, dan perempuan, penguatan keterampilan dan produktivitas angkatan kerja, percepatan penghapusan kemiskinan dan penurunan ketimpangan, serta penguatan perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi dan lintas sektor dengan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut dan penyandang disabilitas, serta pengembangan talenta nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa.



Grafik 3.22 Indikator Prioritas Nasional 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah. PN ini merupakan bentuk implementasi langsung dari Asta Cita, yaitu delapan misi Presiden yang telah dijabarkan dalam Bab II. Setiap PN mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Dari kedelapan PN tersebut, terdapat dua PN yang menjadi fokus utama Kementerian Pemuda dan Olahraga, yakni PN ke-4 Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas dan PN ke-5 Melanjutkan Hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

Prioritas Nasional 4 didukung oleh total pagu anggaran sekitar **Rp1,6 triliun** yang tersebar pada berbagai unit kerja, mencakup kegiatan penyusunan regulasi, pembinaan dan penguatan kelembagaan, serta fasilitasi peserta dan lembaga. Berdasarkan realisasi sampai dengan Triwulan IV setelah pengembalian, realisasi anggaran **PN 4 secara umum menunjukkan kinerja yang tinggi**, dengan mayoritas kegiatan mencatatkan realisasi di atas **90%**, bahkan sejumlah kegiatan mencapai realisasi mendekati atau sebesar **100%.** Dari sisi kinerja *output*, **PN 4 menunjukkan capaian fisik yang secara agregat melampaui target,** ditandai dengan banyaknya indikator *output* yang mencapai 100% hingga lebih dari **200%,** khususnya pada *output* berbasis jumlah orang, lembaga, dan kegiatan. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya efektif dalam penyerapan anggaran, tetapi juga mampu menghasilkan output yang melebihi target perencanaan.

Tabel 3.42 Kontribusi Kemenpora dalam Capaian Prioritas Nasional Bidang Kepemudaan

Kode Level	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi TW 4	%
PN 04	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	64,95	65,79	101,29%
PP 04.18	Persentase usia muda (16-30 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	persen	24,13	22,9	105,10%
PP 04.18	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	persen	75,79	79,51	104,91%
KP 04.18.01	Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	persen	25,49	15,72	61,67%
KP 04.18.01	Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK	persen	96,96	97,73	100,79%
KP 04.18.01	Persentase pemuda yang merokok	persen	23,88	25,86	108%
KP 04.18.01	Persentase pemuda berolahraga	persen	38,92	59,05	151,72%
KP 04.18.02	Persentase pemuda bekerja tidak penuh	persen	31	32,51	105%
KP 04.18.02	Rasio Kewirausahaan Pemuda	persen	1,33	1,17	87,97%
KP 04.18.02	Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	persen	17,82	25,78	144,67%
KP 04.18.02	Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	persen	66,3	68,93	103,97%
KP 04.18.03	Persentase pemuda (16-30 Tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	persen	5,65	6,75	119,47%
KP 04.18.03	Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	persen	1,48	1,34	90,54%

Kode Level	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi TW 4	%
PN 04	Peringkat pada SEA Games	peringkat	3	2	133,33%
PN 04	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	persen	10,36 - 11,45	9,04	87,26%
PP 04.09	Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional	persen	76-80	73,38	96,55%
PP 04.09	Peringkat pada Asian Youth Games	peringkat	13-15	15	100,00%
PP 04.09	Peringkat pada Asian Youth Para Games	peringkat	5	6	80,00%
PP 04.21	Jumlah perolehan medali pada Sea Games	medali	87 emas / 80 perak/ 109 perunggu	91 emas/ 111 perak/ 131 perunggu	105%
PP 04.22	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	persen	36,71	25,92	70,61%
KP 04.09.03	Provinsi dengan sekolah khusus olahraga yang terstandarisasi	provinsi	18	7	38,89%
KP 04.09.03	Kab/Kota dengan PPLP yang terbentuk	kab/kota	29	14	48,28%
KP 04.09.03	Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah	persen	15	12	80,00%
KP 04.09.03	Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat	persen	15	88	586,67%
KP 04.09.03	Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Games	medali	'1-2	28	1400,00
KP 04.09.03	Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Para Games	medali	12-15	89	593,33%
KP 04.18.01	Persentase pemuda berolahraga	persen	38,92	59,05	151,72%

Kode Level	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi TW 4	%
KP 04.09.03	Provinsi dengan sekolah khusus olahraga yang terstandarisasi	provinsi	18	7	39%
KP 04.09.03	Kab/Kota dengan PPLP yang terbentuk	kab/kota	29	14	48%
KP 04.09.03	Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah	persen	15	12	80%
KP 04.09.03	Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat	persen	15	88	587%
KP 04.09.03	Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Games	medali	'1 - 2	28	1400%
KP 04.09.03	Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Para Games	medali	12-15	89	593%
KP 04.18.01	Persentase pemuda berolahraga	persen	38,92	59,05	152%
KP 04.21.04	Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara	kegiatan	20	24	120%
KP 04.21.04	Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara	kegiatan	20	40	200%
KP 04.22.01	Persentase penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang melakukan olahraga seminggu terakhir	persen	69,06	48,76	71%
KP 04.22.01	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu terakhir	persen	11,67	8,24	71%
KP 04.22.02	Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga	persen	100	100	100%
KP 04.22.02	Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam	persen	3,59	3,29	91,64%

Secara umum, capaian Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pemetaan Prioritas Nasional tercapai dengan baik. Hal ini menggambarkan Kementerian Pemuda dan Olahraga terus berupaya mencapai Rencana Kerja Pemerintah nasional secara optimal.

E. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI SAKIP TAHUN 2024

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/660/AA.05/2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024, Kemenpora telah melakukan upaya perbaikan terhadap hasil evaluasi yang menjadi catatan pada saat evaluasi dilaksanakan, antara lain:

1. Seluruh dokumen rencana kinerja jangka menengah pada unit kerja Eselon I dan Unit Kerja Mandiri telah tersusun dan dilengkapi serta dipublikasikan melalui *website* https://kemenpora.go.id yang terdiri dari: Renstra Kementerian, Renstra Eselon I, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan Manual Indikator Kinerja Utama Kemenpora yang dapat diakses oleh publik;
2. Perbaikan pada proses dan mekanisme penilaian kinerja organisasi yang dilaporkan melalui aplikasi e-kinerja Kemenpora dengan menampilkan dashboard yang memuat progress pencapaian kinerja setiap unit kerja Eselon I maupun Eselon II. Selain itu telah dilaksanakan bimbingan teknis dan updating pada aplikasi kinerja sampai dengan triwulan IV Tahun 2025;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program terkait pencapaian kinerja kegiatan dan anggaran kepemudaan dan keolahragaan melalui aplikasi e-MONEV BAPPENAS dan e-SMART KEMENKEU yang dilaporkan secara berkala;
4. Inspektorat telah dilakukan reviu terhadap Laporan Kinerja dan melaksanakan penilaian dan evaluasi SAKIP berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi pada unit kerja Eselon I dan II di lingkungan Kemenpora secara berkala;
5. Menyusun dan menyampaikan seluruh dokumen Sasaran Kerja Pegawai yang dapat diakses oleh publik secara terbatas serta melaporkan perubahan dokumen SAKIP yang dilakukan revisi;
6. Menyampaikan bentuk pemanfaatan atas pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpora untuk perbaikan perencanaan di masa yang akan datang dan memperbaiki target-target kinerja agar lebih challenging dengan melaksanakan beberapa rapim menggunakan data evaluasi capaian kinerja dan melakukan diskusi dengan BAPPENAS terkait pilihan indikator kinerja yang diselaraskan dengan dokumen RPJMN terkait dengan penentuan indikator olahraga dan pemuda yang dapat diukur dan dibandingkan pertahun;
7. Berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam menyusun pedoman *reward and punishment* atas kinerja dan pencapaian seorang pegawai;
8. Menyampaikan rencana aksi tindak lanjut dan progress terkait dengan rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024.

BAB IV
PENUTUP

04



PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Tahun 2025 ini menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja, realisasi keuangan, serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan nasional selama satu tahun anggaran. Tahun 2025 memiliki arti strategis sebagai tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kemenpora 2025-2029 dan awal dari transisi menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kinerja Kemenpora pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang **"Sangat Baik"** dengan rata-rata capaian sasaran strategis sebesar **104,27%**. Angka ini mencerminkan keberhasilan Kemenpora dalam melampaui target-target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Tahun 2025 ditandai dengan kebangkitan prestasi olahraga Indonesia di pentas dunia. Beberapa capaian monumentalnya antara lain:

- **Meraih 4 medali emas** pada **Asian Youth Games (AYG) 2025** di Bahrain.
- Menembus posisi **6 besar Asia** pada **Asian Youth Para Games (AYPG) 2025** di Dubai dengan total 59 medali.
- Menempati peringkat kedua klasemen akhir pada **SEA Games 2025** di Thailand dengan perolehan **91 medali emas**, sebuah pencapaian tandang terbaik dalam tiga dekade terakhir.

Berdasarkan hasil monitoring, pengukuran, dan evaluasi kinerja yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. **Capaian Kinerja Organisasi.** Secara umum, kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2025 dikategorikan **"Sangat Baik"** dengan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar **104,27%**. Angka ini menunjukkan bahwa Kemenpora berhasil melampaui target-target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi dalam membangun pemuda yang patriotik serta menempatkan olahraga sebagai duta bangsa yang mencerminkan kedigdayaan Indonesia.

2. **Capaian Prestasi Strategis.** Tahun 2025 menjadi momentum kebangkitan prestasi olahraga nasional di kancah internasional. Hal ini dibuktikan dengan raihan prestasi gemilang pada **Asian Youth Games (AYG) 2025** di Bahrain, **Asian Youth Para Games (AYPG) 2025** di Dubai yang menembus 5 besar Asia, serta keberhasilan menempati peringkat kedua pada **SEA Games 2025** di Thailand dengan 91 medali emas. Capaian ini mengindikasikan bahwa pembinaan atlet elit muda dan transformasi tata kelola 21 Cabang Olahraga Unggulan telah berjalan pada jalur yang tepat (*on the track*).

3. **Akuntabilitas Keuangan.** Realisasi anggaran Kemenpora Tahun 2025 mencapai **91,36%** atau sebesar **Rp2.200.703.342.238** dari total pagu akhir Rp2.408.834.380.000. Meskipun terdapat sisa anggaran, tingkat penyerapan ini menunjukkan optimalisasi pelaksanaan program prioritas, terutama pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang memiliki kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja utama.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Meskipun capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, evaluasi internal mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas kinerja di masa mendatang.

Guna mempertahankan predikat kinerja dan meningkatkan efisiensi pada tahun anggaran berikutnya, beberapa langkah strategis yang perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Belanja (*Value for Money*).** Perlu dilakukan penajaman prioritas belanja dengan membatasi kegiatan operasional yang urgensinya rendah, seperti perjalanan dinas dan konsinyering. Tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi:
   - Melakukan reviu anggaran secara ketat untuk memastikan alokasi dana berfokus pada kegiatan yang berdampak langsung pada pencapaian *output* dan *outcome;*
   - Meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan mengutamakan substansi pencapaian target kinerja dibandingkan sekadar realisasi serapan anggaran.
2. **Penguatan Monitoring dan Pengendalian Internal.** Untuk memitigasi kendala teknis yang berulang di akhir tahun anggaran, sistem pengendalian internal perlu diperkuat. Langkah tindak lanjut meliputi:
   - Mewajibkan seluruh pimpinan unit kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik (bulanan/triwulanan) guna mendeteksi potensi hambatan sejak dini.
   - Melibatkan Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai mitra strategis (strategic partner) sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, guna mengawal kepatuhan terhadap regulasi.
3. **Optimalisasi Teknologi Informasi.** Mendorong transformasi digital dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi akan dioptimalkan untuk mengurangi beban administratif manual, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data.
4. **Percepatan Penyelesaian Kegiatan.** Mengupayakan agar kegiatan-kegiatan strategis dapat diselesaikan paling lambat pada Triwulan III tahun berjalan. Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan tagihan dan kegiatan di akhir tahun anggaran yang berpotensi menurunkan kualitas output dan akuntabilitas administrasi.

Demikian Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran negara. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

